

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI BALI



MEI
2019

**PESONA KABUPATEN
BADUNG**



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI BALI MEI 2019

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi

Kelompok Koordinator Asesmen Ekonomi Keuangan Regional dan Advisory Daerah

Fungsi Asesmen Ekonomi dan *Surveilans*

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Jl. Letda Tantular No. 4

Denpasar – Bali, 80234

Tel. (0361) 248982

Fax. (0361) 222988

Pos-el :

leo_a@bi.go.id

umran_u@bi.go.id

wilda_tf@bi.go.id

riyan_h@bi.go.id



VISI BANK INDONESIA

"Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara *emerging markets*"

MISI BANK INDONESIA

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.

NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA

"Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas (*trust and integrity*); (ii) profesionalisme (*professionalism*); (iii) keunggulan (*excellence*); (iv) mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan (v) koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi)"

VISI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

"Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan berkontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional"

MISI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

"Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan"

...Memberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan ekonomi daerah, yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil kajian yang akurat...

(Salah satu dari lima tugas pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia)

Mei 2019

 **BANK INDONESIA**
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI BALI



Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Bali

Laporan Perekonomian Provinsi Bali

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Perekonomian Provinsi Bali Mei 2019. Laporan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan stakeholders internal maupun eksternal Bank Indonesia mengenai informasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, keuangan, dan sistem pembayaran di Provinsi Bali.

Bank Indonesia berpandangan bahwa perekonomian daerah khususnya Provinsi Bali mempunyai posisi dan peran yang strategis terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dalam upaya menjaga kestabilan nilai Rupiah. Hal ini didasari oleh fakta pembangunan nasional merupakan agregasi dari pembangunan daerah dan semakin meningkatnya proporsi inflasi daerah dalam menyumbang inflasi nasional. Oleh sebab itu Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, menaruh perhatian yang besar terhadap upaya-upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah guna semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional termasuk dalam upaya pengendalian inflasi daerah guna mencapai target inflasi nasional.

Salah satu wujud dari kepedulian Bank Indonesia terhadap dinamika perekonomian daerah adalah melakukan berbagai kajian dan diseminasi hasil-hasil kajian kepada stakeholders

Salah satunya melalui Laporan Perekonomian Provinsi Bali yang berisikan kajian dan informasi mengenai perekonomian daerah dan dipahami secara luas oleh seluruh pihak terkait. Selanjutnya, stakeholders dapat memanfaatkan informasi dari Laporan Perekonomian Provinsi Bali ini sesuai dengan kepentingan masing-masing dalam upaya perbaikan kinerja ekonomi Provinsi Bali di masa depan. Kami juga berharap akan muncul ide-ide konstruktif yang dapat memberikan nilai tambah serta menjadi stimulus upaya-upaya pengembangan ekonomi daerah melalui kebijakan maupun kajian – kajian lanjutan.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang kami perlukan antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya. Kami menyadari bahwa cakupan dan analisis dalam Laporan Perekonomian Provinsi Bali masih belum sepenuhnya sempurna, sehingga saran, kritik dan dukungan informasi/data dari Bapak/Ibu sekalian sangat diharapkan guna peningkatan kualitas dari kajian tersebut.

Akhir kata, kami berharap semoga Laporan Perekonomian Provinsi Bali ini bermanfaat bagi para pembaca.

Denpasar, 27 Mei 2019

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI BALI

TTD

Causa Iman Karana
Kepala Perwakilan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR TABEL	xiv
RINGKASAN EKSEKUTIF	xviii
TABEL INDIKATOR TERPILIH	xxiv



1.2.1. Konsumsi	4
1.2.2. Investasi	7
1.2.3. Ekspor dan Impor	8
1.3. PERTUMBUHAN EKONOMI BALI	
TRIWULAN I 2019 SISI PENAWARAN	11
1.3.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan & Minum	12
1.3.2. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14
1.3.3. Lapangan Usaha Industri Pengolahan	15
1.3.4. Lapangan Usaha Konstruksi	16
1.3.5. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	17

01

02

BAB I

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

1.1. KONDISI UMUM KINERJA EKONOMI

Provinsi Bali TRIWULAN I 2019

1.1.1 Kinerja Perekonomian Provinsi Bali Triwulan I
2019

1.1.2. *Tracking* Kinerja Ekonomi Bali

Triwulan II 2019

1.2. PERTUMBUHAN EKONOMI BALI

TRIWULAN I 2019 SISI PERMINTAAN

1

2

2

3

4

BAB II

KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM

2.2. APBD PROVINSI BALI

2.2.1. Pagu Anggaran Pendapatan Provinsi Bali

2.2.2. Realisasi Pendapatan Provinsi Bali

Tahun 2019

2.2.3. Pagu Anggaran Belanja Provinsi Bali

2.2.4. Realisasi Belanja Provinsi Bali

27

28

31

31

32

35

35



BAB IV

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 65

2.3. APBD KABUPATEN/KOTA	38
2.3.1. Pagu Pendapatan APBD Kabupaten/Kota	38
2.3.2. Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota	38
2.3.3. Pagu Belanja APBD Kabupaten/Kota	40
2.3.4. Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota	41
2.4. REALISASI APBN PROVINSI BALI	43
2.4.1. Pagu Belanja APBN Provinsi Bali	43
2.4.2. Realisasi Belanja APBN Provinsi Bali	43

4.1. ASESMEN INTERMEDIASI PERBANKAN	66
4.1.1. Jaringan Kantor dan Aset	66
4.1.2. Kinerja Bank Umum	66
4.1.2.1. Dana Pihak Ketiga	66
4.1.2.2. Penyaluran Kredit	67
4.1.2.3. LDR dan NPL	68
4.1.3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	68
4.1.4. Kinerja Bank Syariah	68

03

BAB III

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH 47

3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI	48
3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI	49
3.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa	49
3.3. DISAGREGASI INFLASI	56
3.4. INFLASI PANGAN	57
3.5. KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI	58



4.2. ASESMEN SEKTOR KORPORASI	69
4.2.1. Sumber Kerentanan Sektor Korporasi	69
4.2.2. Kinerja Korporasi	70
4.2.3. Eksposur Perbankan Pada Korporasi	72
4.3. ASESMEN SEKTOR RUMAH TANGGA	73
4.3.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga	73



4.3.2. Kinerja Keuangan Rumah Tangga	74
4.3.3. Dana Pihak Ketiga Perseorangan (Di Perbankan)	76
4.3.4. Kredit Perbankan Pada Sektor Rumah Tangga	77
4.3.4.1. Kredit Kepemilikan Rumah dan Apartemen	79
4.3.4.2. Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor	80
4.3.4.3. Kredit Multiguna	81
4.4. AKSES KEUANGAN DAN UMKM	82
4.4.1. Akses Keuangan Kepada UMKM	82
4.4.2. Akses Keuangan Kepada Penduduk	84

BAB V

PENYELENGGARAAN

SISTEM PEMBAYARAN DAN

PENGELOLAAN UANG RUPIAH **87**

5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN	88
DI BALI	
5.1.1. Transaksi Sistem Pembayaran Tunai	88
5.1.1.1. Aliran Uang Masuk/Keluar (Inflow/Outflow)	88

5.1.1.2. Uang Tidak Layak Edar (UTLE)	89
5.1.2. Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai	89
5.1.2.1. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	89
5.1.2.2. Perkembangan Tolakan Transaksi Cek/BG	90

5.2. UPAYA MENJAGA KELANCARAN SISTEM

PEMBAYARAN **90**

5.2.1. Penyediaan Uang Layak Edar dan Penanganan Uang Tidak Asli	90
5.2.2. Perkembangan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di Provinsi Bali	92
5.2.3. Perkembangan Inklusi Keuangan Provinsi Bali	93
5.2.4. Pengembangan Layanan Keuangan Nontunai dan Elektronifikasi	96

06

05

BAB VI

KETENAGAKERJAAN

& KESEJAHTERAAN **105**

6.1. KETENAGAKERJAAN	106
6.1.1. Kondisi Ketenagakerjaan Di Bali	106
6.1.2. Prospek Ketenagakerjaan Triwulan II 2019 dan Triwulan III 2019	111
6.2. KESEJAHTERAAN	112
6.2.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Bali	112
6.2.2. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	113

6.2.3. Ketimpangan Pengeluaran Penduduk	113
6.2.4. Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan	114
6.3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	114

07

BAB VII	
PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	117
7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI BALI	118
7.2. PROSPEK INFLASI BALI	118
DAFTAR ISTILAH	126



BOKS

Boks 1	
TANTANGAN EKSPOR IKAN TUNA BALI	20
Boks 2	
HAMBATAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOMODITAS KAKAO DI BALI	22
Boks 3	
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI PEMERINTAH DAERAH BALI	100

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali dan Nasional Triwulanan	2	Kecil (IMK)	16
Grafik 1.2. Pangsa Ekonomi Provinsi Bali Terhadap Nasional	2	Grafik 1.32. Kredit Kategori Industri	16
Grafik 1.3. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen, Indeks Kondisi Ekonomi dan Indeks Ekspektasi Konsumen	5	Grafik 1.33. Perkembangan Pengadaan Semen	16
Grafik 1.4. Pertumbuhan Penjualan Eceran	5	Grafik 1.34. Perkembangan SBT Konstruksi SKDU	17
Grafik 1.5. Perkembangan Penjualan Kendaraan Baru	5	Grafik 1.35. Perkembangan Kredit KPR	17
Grafik 1.6. Perkembangan Indeks Tendensi Konsumen	6	Grafik 1.36. Perkembangan Kredit Konstruksi	17
Grafik 1.7. Perkembangan Kredit KPR, KKB, Multiguna	6	Grafik 1.37. Perkembangan Penjualan Kelompok Komoditas	18
Grafik 1.8. Perkembangan Belanja APBD Provinsi Bali	7	Grafik 1.38. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen, Indeks Kondisi Ekonomi dan Indeks Ekspektasi Konsumen	18
Grafik 1.9. Perkembangan Belanja APBN di Bali	7	Grafik 1.39. Perkembangan Kredit Konsumsi	18
Grafik 1.10. Perkembangan SBT Investasi SKDU	7	Grafik 1.40. Perkembangan Suku Bunga Kredit Konsumsi	18
Grafik 1.11. Perkembangan Nilai Impor <i>Capital Goods</i>	7	Grafik 2.1. Struktur Pagu Anggaran Belanja Pemerintah di Provinsi Bali 2018	29
Grafik 1.12. Realisasi Pengadaan Semen di Bali	8	Grafik 2.2. Struktur Pagu Anggaran Belanja Pemerintah di Provinsi Bali 2019	29
Grafik 1.13. Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Bali	8	Grafik 2.3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja APBD Provinsi Bali Per Triwulan (2015-2019)	36
Grafik 1.14. Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama	9	Grafik 2.4. Perkembangan Total Belanja, Belanja Operasi dan Modal APBD Provinsi Bali (2016-2019)	36
Grafik 1.15. Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama	9	Grafik 2.5. Struktur Belanja Operasi APBD Provinsi Bali Triwulan I 2018	37
Grafik 1.16. Impor Barang Berdasarkan Jenis	9	Grafik 2.6. Struktur Belanja Operasi APBD Provinsi Bali Triwulan I 2019	37
Grafik 1.17. Impor Barang Modal Berdasarkan Jenis	10	Grafik 2.7. Persentase Realisasi Pendapatan 9 kabupaten/kota Triwulan I (2018-2019)	40
Grafik 1.18. Pangsa Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Utama	10	Grafik 2.8. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) 9 kabupaten/kota Triwulan I (2018-2019)	40
Grafik 1.19. Pertumbuhan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Utama	10	Grafik 2.9. Persentase Realisasi Belanja 9 kabupaten/kota Triwulan I (2018-2019)	42
Grafik 1.20. Kunjungan Wisman ke Bali	11	Grafik 3.1. Inflasi Kota di Provinsi Bali (%yoy)	48
Grafik 1.21. Jumlah Kedatangan Penumpang ke Provinsi Bali pada Gate Internasional Bandara Ngurah Rai	11	Grafik 3.2. Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (% yoy)	48
Grafik 1.22. <i>Share</i> Wisman Berdasarkan Negara Asal	11	Grafik 3.3. Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Provinsi Bali (%qtq)	50
Grafik 1.23. Rata-Rata Lama Menginap Hotel Bintang dan Non Bintang	13	Grafik 3.4. Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan di Provinsi Bali (%yoy)	50
Grafik 1.24. Kunjungan Wisman ke Provinsi Bali Triwulanan	13	Grafik 3.5. Perkembangan Cabai Rawit Merah dan Cabai Merah Besar (Rp/Kg)	50
Grafik 1.25. Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan Negara	13	Grafik 3.6. Perkembangan Harga Beras di Provinsi Bali (Rp/Kg)	50
Grafik 1.26. Perkembangan Kedatangan Penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai	13		
Grafik 1.27. Perkembangan Arus Penumpang di Pelabuhan	13		
Grafik 1.28. Perkembangan Produksi Padi di Bali	14		
Grafik 1.29. Perkembangan NTP Sub Sektor Tanaman Pangan	14		
Grafik 1.30. Perkembangan Komoditas Utama Ekspor Bali	15		
Grafik 1.31. Pertumbuhan Produksi Industri Manuf. Besar & Sedang (IBS) dan Industri Manuf. Mikro &			

Grafik 3.7. Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Provinsi Bali (% ,qtq)	51	Grafik 4.1. Komposisi Impor Bali	70
Grafik 3.8. Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Provinsi Bali (% ,yoy)	51	Grafik 4.2. Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan	70
Grafik 3.9. Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Provinsi Bali (% ,qtq)	51	Grafik 4.3. Perkembangan Nilai Ekspor Barang LN	70
Grafik 3.10. Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar di Provinsi Bali (% ,yoy)	51	Grafik 4.4. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	71
Grafik 3.11. Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Provinsi Bali (% ,qtq)	52	Grafik 4.5. Perkembangan Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi di Bali	71
Grafik 3.12. Inflasi Tahunan Kelompok Sandang di Provinsi Bali (% ,yoy)	52	Grafik 4.6. Perkembangan <i>Likert Scale</i>	71
Grafik 3.13. Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Provinsi Bali (% ,qtq)	52	Grafik 4.7. Komposisi Penggunaan Kredit Korporasi	72
Grafik 3.14. Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Provinsi Bali (% ,yoy)	52	Grafik 4.8. Pertumbuhan Kredit Korporasi	72
Grafik 3.15. Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga di Provinsi Bali (% ,qtq)	53	Grafik 4.9. NPL Kredit Korporasi	72
Grafik 3.16. Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga di Provinsi Bali (% ,yoy)	53	Grafik 4.10. Kredit Korporasi Lapangan Usaha Akmamin	72
Grafik 3.17. Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (% ,qtq)	53	Grafik 4.11. Kredit Korporasi Lapangan Usaha Pertanian	73
Grafik 3.18. Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (% ,yoy)	53	Grafik 4.12. Kredit Korporasi Lapangan Usaha Perdagangan	73
Grafik 3.19. Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar	54	Grafik 4.13. Kredit Korporasi Lapangan Usaha Industri Pengolahan	73
Grafik 3.20. Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja	54	Grafik 4.14. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Bali	74
Grafik 3.21. Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% yoy)	56	Grafik 4.15. Persepsi Rumah Tangga Provinsi Bali Terhadap Ekonomi Saat Ini	74
Grafik 3.22. Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% mtm)	56	Grafik 4.16. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Bali	75
Grafik 3.23. Perkembangan Harga Jual Listrik Untuk Rumah Tangga 900 VA Di Provinsi Bali	57	Grafik 4.17. Komposisi DPK Perbankan Provinsi Bali (% total DPK Bali)	76
Grafik 3.24. Interaksi Permintaan dan Penawaran	57	Grafik 4.18. Komposisi Perbankan DPK Provinsi Bali berdasarkan Jenis Simpanan (% total DPK Bali)	76
Grafik 3.25. Ekspektasi Konsumen	57	Grafik 4.19. Pertumbuhan DPK Perbankan Provinsi Bali (%)	77
Grafik 3.26. Perkembangan Inflasi (yoy) Kelompok Pangan	58	Grafik 4.20. Pertumbuhan DPK Perseorangan (%)	77
Grafik 3.27. Andil Inflasi (yoy) Kelompok Pangan Triwulan IV 2018	58	Grafik 4.21. Komposisi Penyaluran Kredit Perbankan	78
Grafik 3.28. Andil Inflasi (yoy) Kelompok Pangan Triwulan I 2019	58	Grafik 4.22. Komposisi Kredit Perseorangan	78
		Grafik 4.23. Komposisi Kredit Konsumsi Perseorangan	78
		Grafik 4.24. Pertumbuhan Kredit Konsumsi Perseorangan	78
		Grafik 4.25. NPL dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga & Kredit Konsumsi di Bali	78
		Grafik 4.26. Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga (%)	78
		Grafik 4.27. Pertumbuhan Kredit UMKM	82
		Grafik 4.28. Pangsa Kredit UMKM terhadap Total Kredit	82
		Grafik 4.29. Pangsa Nominal Kredit UMKM	83
		Grafik 4.30. Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Kabupaten/Kota	83
		Grafik 4.31. NPL Kredit UMKM Berdasar Kab/Kota	83
		Grafik 4.32. Realisasi Kredit UMKM Berdasar Sektor Ekonomi	83
		Grafik 4.33. Rasio Rekening DPK per Penduduk Bekerja	84
		Grafik 4.34. Rasio Rekening Kredit per Penduduk Bekerja	84

Grafik 5.1. Pergerakan Inflow, Outflow, Netflow, Inflasi dan PDRB	88	Grafik 6.4. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Utama	109
Grafik 5.2. Rasio UTLE terhadap Inflow di Provinsi Bali	89	Grafik 6.5. Komposisi Tenaga Kerja Sektor Utama	109
Grafik 5.3. Perkembangan Nominal dan Volume Kliring di Bali	90	Grafik 6.6. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Formal & Informal	110
Grafik 5.4. Perkembangan Nominal RTGS	90	Grafik 6.7. Komposisi Tenaga Kerja Formal dan Informal	110
Grafik 5.5. Perkembangan Volume RTGS	90	Grafik 6.8. Hasil SKDU Triwulan I 2019	111
Grafik 5.6. Perkembangan Cek dan Bilyet Giro di Bali	90	Grafik 6.9. Indikator Ekspektasi Konsumen	111
Grafik 5.7. Perkembangan Kegiatan Kas Keliling di Bali	91	Grafik 6.10. Indikator Ekspektasi SKDU	112
Grafik 5.8. Perkembangan Transaksi Jual – Beli Valas di Provinsi Bali	92	Grafik 6.11. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Bali dan Nasional	113
Grafik 5.9. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman di Provinsi Bali	92	Grafik 6.12. Distribusi Pendapatan Perkapita Penduduk	114
Grafik 5.10. Jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali	93	Grafik 6.13. NTP Bali, Indeks yang Diterima (IT), dan Indeks yang Dibayar (IB)	114
Grafik 5.11. Perkembangan Jumlah Uang Elektronik	96	Grafik 6.14. Perbandingan NTP Provinsi Bali dan Nasional	114
Grafik 5.12. Perkembangan Jenis Transaksi Uang Elektronik	97	Grafik 6.15. Perkembangan IPM Provinsi Bali	115
Grafik 5.13. Pangsa Jenis Transaksi Uang Elektronik	97	Grafik 6.16. Perbandingan IPM Provinsi Bali dan Nasional	115
Grafik 5.14. Perkembangan Jumlah Agen LKD di Provinsi Bali	98	Grafik 7.1. Perkembangan Indeks Ekspektasi Konsumen	120
Grafik 6.1. Perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali	107	Grafik 7. 2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2019	122
Grafik 6.2. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	108	Grafik 7.3. Proyeksi Inflasi Provinsi Bali 2019	123
Grafik 6.3. Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	108		

DAFTAR TABEL

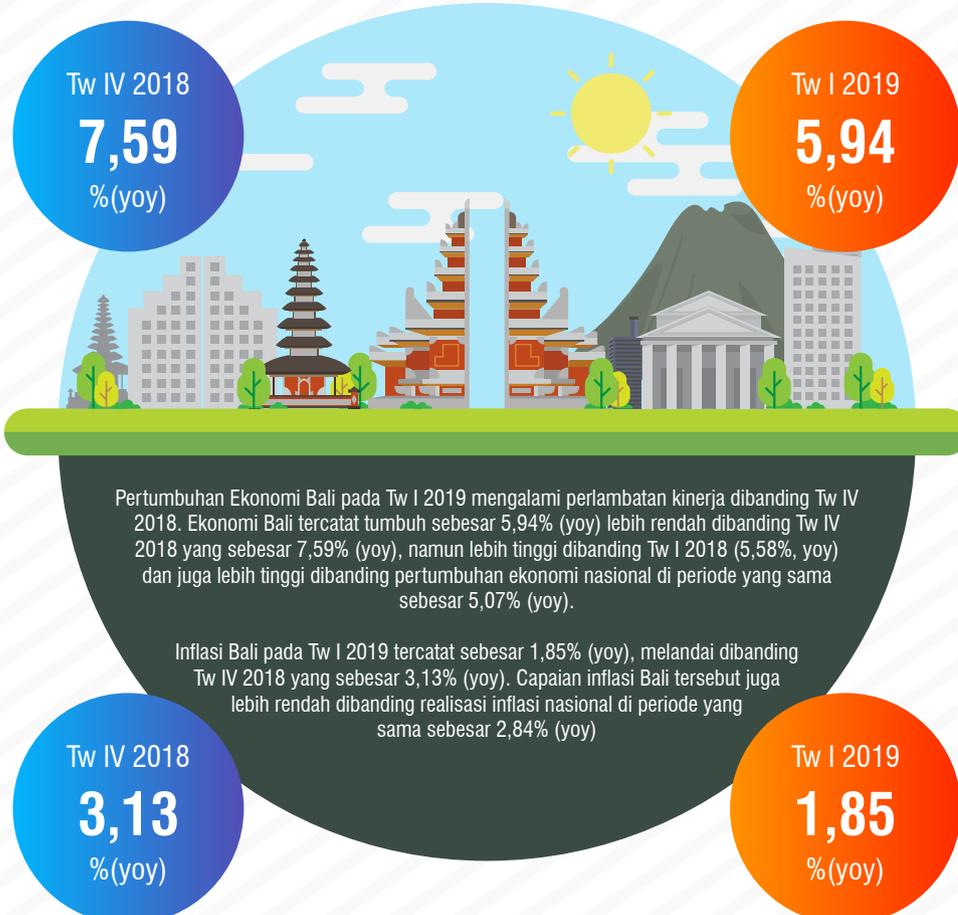
Tabel 1.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Sisi Permintaan (% , yoy)	4	Tabel 3. 3 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran	55
Tabel 1.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Sisi Penawaran (% , yoy)	12	Tabel 3. 4 Ranking Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/Deflasi di Kota Singaraja Triwulan I 2019	56
Tabel 2.1. Pagu Anggaran Belanja Pemerintah di Provinsi Bali (2018-2019)	28	Tabel 3.5. Kegiatan TPID Triwulan I 2019	59
Tabel 2.2. Realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi Bali Triwulan I (2018 & 2019)	28	Tabel 4.1. Perkembangan Jumlah Bank dan Jaringan Kantor Bank di Bali	66
Tabel 2.3. Persentase Realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi Bali Triwulan I (2018-2019)	29	Tabel 4.2. Perkembangan Indikator Bank Umum di Bali	67
Tabel 2.4. Pagu Anggaran Pendapatan Pemerintah di Provinsi Bali Triwulan I (2018-2019)	30	Tabel 4.3. Perkembangan Indikator BPR di Bali	68
Tabel 2.5. Realisasi Pendapatan Pemerintah di Provinsi Bali Triwulan I (2018-2019)	30	Tabel 4.4. Perkembangan Indikator Bank Syariah di Bali	69
Tabel 2.6. Persentase Realisasi Pendapatan Pemerintah di Provinsi Bali Triwulan I (2018-2019)	31	Tabel 4.5. Dana Rumah Tangga Untuk Membayar Cicilan dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan	75
Tabel 2.7. Pagu Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Bali (2018-2019)	32	Tabel 4.6. Dana Rumah Tangga Untuk Menabung dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan	75
Tabel 2.8. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Triwulan I (2018-2019)	33	Tabel 4.7. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Berdasarkan Kategori Pengeluarannya Per Bulan	76
Tabel 2.9. Pagu Anggaran Belanja Daerah Provinsi Bali (2018-2019)	35	Tabel 4.8. Komposisi Jumlah Rekening Perseorangan Per Nilai Penempatan di Bali	77
Tabel 2.10. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali Triwulan I (2018-2019)	36	Tabel 4.9. Penyaluran Kredit Perseorangan Secara Spasial Posisi Triwulan I 2019	79
Tabel 2.11. Pagu Anggaran Pendapatan Daerah 9 Kabupaten/Kota Tahun 2018-2019	38	Tabel 4.10. Pertumbuhan dan NPL KPR di Bali	80
Tabel 2.12. Realisasi Pendapatan Daerah 9 Kabupaten/Kota Triwulan 1 (2018-2019)	39	Tabel 4.11. Pertumbuhan dan NPL KKB dan Multiguna di Bali	80
Tabel 2.13. Pagu Anggaran Belanja Daerah 9 Kabupaten/Kota (2018-2019)	41	Tabel 4.12. Komposisi Kredit Multiguna Posisi Triwulan I 2019	81
Tabel 2.14. Realisasi Belanja Daerah 9 Kabupaten/Kota Triwulan I (2018-2019)	41	Tabel 4.13. NPL Kredit Multiguna	81
Tabel 2.15. Pagu Anggaran Belanja APBN di Provinsi Bali (2018-2019)	43	Tabel 4.14. NPL Kredit UMKM berdasarkan Sektor Ekonomi	84
Tabel 2.16. Realisasi Belanja APBN di Provinsi Bali Triwulan I (2018-2019)	44	Tabel 5.1. Perkembangan Inflow – Outflow Provinsi Bali	88
Tabel 3.1. Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran	54	Tabel 5.2. Perkembangan Indikator SKNBI di Bali	89
Tabel 3. 2 Ranking Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/Deflasi (yoy) di Kota Denpasar Tw I 2019	55	Tabel 5.3. Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 100.000 Penduduk	94
		Tabel 5.4. Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 1000 km ²	95
		Tabel 5.5. Indikator Banking Penetration	95
		Tabel 5.6. Jumlah Gardu Tol Provinsi Bali Mandara	96
		Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama	106
		Tabel 6.2. TPT menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Utama	106
		Tabel 6.3. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	107
		Tabel 6.4. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja	108

Tabel 6.5. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (Ribu Orang)	109
Tabel 6.6. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (Orang)	110
Tabel 6.7. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin	113
Tabel 7.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali 2019	118
Tabel 7.2. Outlook Ekonomi Dunia dan Negara Mitra Dagang Utama Provinsi Bali 2019-2024	119

halaman ini sengaja dikosongkan



PERTUMBUHAN EKONOMI



Pertumbuhan Ekonomi Bali pada Tw I 2019 mengalami perlambatan kinerja dibanding Tw IV 2018. Ekonomi Bali tercatat tumbuh sebesar 5,94% (yoy) lebih rendah dibanding Tw IV 2018 yang sebesar 7,59% (yoy), namun lebih tinggi dibanding Tw I 2018 (5,58%, yoy) dan juga lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional di periode yang sama sebesar 5,07% (yoy).

Inflasi Bali pada Tw I 2019 tercatat sebesar 1,85% (yoy), melandai dibanding Tw IV 2018 yang sebesar 3,13% (yoy). Capaian inflasi Bali tersebut juga lebih rendah dibanding realisasi inflasi nasional di periode yang sama sebesar 2,84% (yoy)

PERKEMBANGAN INFLASI

PROSPEK PEREKONOMIAN BALI



KEUANGAN

PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN

APBD Provinsi Bali
22,03% **24,02%**

APBD 9 Kab/Kota
17,71% **18,17%**



PERKEMBANGAN

TUNAI

Inflow		Inflow
4,16	(Rp Triliun)	6,76
Outflow		Outflow
5,70	(Rp Triliun)	3,51
Net Outflow		Net Inflow
-1,54	(Rp Miliar)	3,25



KONOMIAN BALI TRIWULAN I TAHUN 2019

REKONOMIAN BALI TRIWULAN II TAHUN 2019 DAN TAHUN 2019

PEMERINTAH

■ Twl 2018
■ Tw I 2019

PERSENTASE REALISASI BELANJA

APBN Wilayah Bali
14,20% **16,65%**

APBD Provinsi Bali
11,45% **6,76%**

APBD 9 Kab/Kota
10,04% **12,27%**



SISTEM PEMBAYARAN

NON TUNAI

Nominal Kliring
14,60 **12,60**
Rp Triliun Rp Triliun

Volume Kliring
510 **437**
Ribu Lembar Ribu Lembar



■ Twl 2018
■ Tw I 2019

STABILITAS KEUANGAN DAERAH

■ Twl 2018
■ Tw I 2019



PERTUMBUHAN DPK 7,92 (% yoy) 8,01 (% yoy)	PERTUMBUHAN DEPOSITO 4,52 (% yoy) 5,88 (% yoy)	PERTUMBUHAN GIRO 3,13 (% yoy) 4,56 (% yoy)	PERTUMBUHAN TABUNGAN 11,99 (% yoy) 10,77 (% yoy)
PERTUMBUHAN KREDIT 5,96 (% yoy) 5,44 (% yoy)	PERTUMBUHAN KREDIT MODAL KERJA 6,50 (% yoy) 2,88 (% yoy)	PERTUMBUHAN KREDIT INVESTASI 1,45 (% yoy) 9,66 (% yoy)	PERTUMBUHAN KREDIT KONSUMSI 5,50 (% yoy) 5,53 (% yoy)

KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN

ANGKATAN KERJA (*Juta Orang)

2,61 **2,53** **2,54**
Februari 2018 Agustus 2018 Februari 2019



PENGANGGURAN TERBUKA

0,86% **1,37%** **1,19%**
Februari 2018 Agustus 2018 Februari 2019



KEMISKINAN

4,14% **4,01%** **3,91%**
September 2017 Maret 2018 September 2018



RINGKASAN EKSEKUTIF

EKONOMI MAKRO REGIONAL

Kinerja ekonomi Provinsi Bali pada triwulan I 2019 masih tetap tumbuh kuat, meskipun melambat dibanding triwulan sebelumnya. Ekonomi Provinsi Bali tercatat tumbuh sebesar 5,94% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 7,59% (yoy) dan juga lebih tinggi dibanding triwulan I 2018 yang sebesar 5,58% (yoy). Dari sisi permintaan, perlambatan kinerja ekonomi Provinsi Bali tersebut disebabkan oleh melambatnya kinerja komponen konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor luar negeri. Sementara itu, dari sisi penawaran, kinerja ekonomi Provinsi Bali yang melambat disebabkan oleh perlambatan kinerja hampir semua lapangan usaha utama Bali, yaitu lapangan usaha akomodasi makan minum (akmamin), pertanian, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Beberapa faktor yang menjadi penahan kinerja ekonomi Provinsi Bali meliputi: i). periode *low season* pariwisata, ii). mundurnya periode puncak panen untuk komoditas tabama, iii) progres proyek konstruksi yang masih dalam tahap pengadaan, iv) sikap *wait and see* pelaku usaha menanti kebijakan presiden terpilih, v) melambatnya jumlah kunjungan wisman, vi) harga tiket pesawat udara yang tinggi dan pemberlakuan bagasi berbayar dan vii) melambatnya kinerja ekonomi negara mitra dagang utama Bali.

Kinerja ekonomi Provinsi Bali pada triwulan I 2019 tumbuh sebesar 5,94% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan IV 2018 sebesar 7,59% (yoy)

Prospek Ekonomi Triwulan II 2019

Dari berbagai *prompt* indikator yang ada dan hasil survei serta liaison yang telah dilakukan, kinerja ekonomi Provinsi Bali pada triwulan II 2019 diprakirakan akan tetap tumbuh kuat, dengan kecenderungan meningkat. Ekonomi Provinsi Bali diprakirakan akan tumbuh dalam kisaran 6,00%-6,40% (yoy). Beberapa faktor yang menjadi pendorong akselerasi tersebut meliputi: i) meningkatnya frekuensi perayaan HBKN, ii) pelaksanaan pemilihan umum presiden dan legislatif, iii) pembayaran THR dan gaji ke 14 ASN, iv) penambahan penerima BPNT dan peningkatan nilai nominal, v) akselerasi realisasi belanja pemerintah, vi) masuknya periode puncak panen komoditas padi dan masuknya periode panen komoditas perkebunan, vii) persentase realisasi fisik dan keuangan pengerjaan proyek konstruksi dan infrastruktur yang meningkat, mendorong peningkatan kinerja komponen permintaan dan lapangan usaha utama ekonomi Bali.

Kinerja Ekonomi Provinsi Bali pada triwulan II 2019 diprakirakan akan mengalami akselerasi, dengan tumbuh dalam kisaran 6,00%-6,40% (yoy)

Dari sisi permintaan, prakiraan meningkatnya kinerja ekonomi Provinsi Bali terutama didorong oleh peningkatan kinerja komponen konsumsi rumah tangga, ekspor luar negeri, konsumsi pemerintah dan investasi. Sementara itu, dari sisi penawaran meningkatnya kinerja ekonomi Provinsi Bali didorong oleh akselerasi kinerja lapangan usaha akomodasi makan dan minum, pertanian, transportasi, konstruksi, industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran.

PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

Realisasi belanja pemerintah (APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD gabungan 9 kabupaten/kota) pada triwulan I 2019 tercatat sebesar Rp5,23 triliun atau meningkat 11,95% (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan realisasi belanja pemerintah triwulan I 2018 yang sebesar 35,50% (yoy) atau tercatat Rp4,67 triliun. Melambatnya peningkatan realisasi belanja pemerintah pada triwulan I 2019, terutama disebabkan oleh rendahnya peningkatan realisasi belanja untuk kategori APBN dan menurunnya realisasi belanja untuk kategori APBD Provinsi. Sementara itu, realisasi belanja untuk APBD kabupaten/kota tetap tumbuh lebih tinggi di triwulan I 2019 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sehingga dapat menahan perlambatan realisasi belanja pemerintah. Capaian persentase realisasi belanja pemerintah (APBD & APBN) di triwulan I 2019 tercatat sebesar 12,58%, meningkat dibandingkan capaian persentase realisasi triwulan I 2018 yang sebesar 11,45%. Kondisi ini terutama didorong oleh meningkatnya persentase realisasi belanja untuk kategori APBN dan APBD kabupaten/kota sebagai dua kategori dengan pangsa terbesar.

Pada sisi yang lain, realisasi pendapatan pemerintah (APBD Provinsi Bali dan APBD gabungan 9 kabupaten/kota) pada triwulan I 2019 tercatat sebesar Rp5,47 triliun atau tumbuh 8,34% (yoy), meningkat dibanding triwulan I 2018 yang sebesar 4,06% (yoy) atau Rp5,05 triliun. Kondisi ini didukung oleh peningkatan pertumbuhan realisasi pendapatan baik pada tingkat provinsi maupun gabungan 9 kabupaten/kota. Dengan kondisi tersebut, persentase realisasi pendapatan pemerintah di triwulan I 2019 mencapai sebesar 19,49%, lebih tinggi dibanding triwulan I 2018 yang sebesar 18,71%.

PERKEMBANGAN INFLASI

Realisasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan I 2019 tercatat sebesar 1,85% (yoy), melandai dibanding triwulan IV 2018 yang sebesar 3,13% (yoy). Capaian realisasi inflasi Provinsi Bali tersebut juga lebih rendah dibanding realisasi inflasi Nasional di periode yang sama sebesar 2,48% (yoy). Melandainya realisasi inflasi tersebut terjadi disebabkan oleh melandainya tekanan inflasi pada semua komponen disagregasi. Tekanan inflasi yang melandai juga terjadi pada semua kelompok pengeluaran, kecuali kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Terjaganya inflasi di Provinsi Bali tersebut, didukung oleh semakin solidnya upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Prospek Inflasi Triwulan II 2019

Inflasi Provinsi Bali pada triwulan II 2019 diperkirakan akan lebih tinggi dibanding triwulan I 2019, yaitu dalam kisaran 2,20% - 2,60% (yoy). Terdapat beberapa tantangan tekanan inflasi pada triwulan II 2019 seiring adanya: (i) hari besar keagamaan nasional (HBKN), yaitu ramadhan pada bulan Mei 2019 dan Hari Raya Idul Fitri pada bulan Juni 2019 yang berpotensi mendorong permintaan, (ii)

Realisasi belanja pemerintah pada triwulan I 2019 tercatat sebesar Rp5,23 triliun, dengan persentase realisasi mencapai 12,58%, lebih tinggi dibanding triwulan I 2018 yang sebesar 11,45% atau dengan nominal Rp4,67 triliun.

Realisasi pendapatan pemerintah pada triwulan I 2019 tercatat sebesar Rp5,47 triliun atau dengan persentase realisasi sebesar 19,49%, meningkat dibanding triwulan I 2018 yang sebesar 18,71% atau dengan nilai nominal sebesar Rp5,05 triliun

Inflasi Provinsi Bali triwulan I 2019 tercatat sebesar 1,85% (yoy), melandai dibanding inflasi triwulan IV 2018 yang sebesar 3,13% (yoy).

Tekanan inflasi Provinsi Bali pada triwulan II 2019 diperkirakan akan meningkat dibanding triwulan I 2019, yaitu diperkirakan dalam kisaran 2,20%-2,60% (yoy).

kebijakan maskapai dalam mempertahankan tarif angkutan udara pada level yang relatif tinggi, serta (iii) peningkatan pendapatan seiring dengan pencairan THR pada bulan Mei 2019 juga berpotensi meningkatkan konsumsi yang dapat berdampak pada peningkatan harga komoditas kelompok inti. Menyikapi adanya risiko dan tantangan tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali akan terus berupaya melakukan pengendalian harga baik melalui forum koordinasi dan langkah tindak lanjut dengan OPD terkait. Kondisi tersebut diharapkan dapat menjaga inflasi Provinsi Bali tahun 2019 untuk berada pada dalam sasaran inflasi Nasional sesuai PMK No.93/PMK.011/2014, yaitu sebesar $3,5\% \pm 1\%$ (yoy).

Kredit kelompok rumah tangga pada triwulan I 2019 mengalami akselerasi, sementara itu kualitas kredit mengalami penurunan.

PERKEMBANGAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Meskipun kinerja konsumsi rumah tangga (PDRB) pada triwulan I 2019 tercatat tumbuh melambat, namun penyaluran kredit untuk kelompok rumah tangga (perseorangan) di periode yang sama tetap dapat tumbuh lebih tinggi (terakselerasi) yaitu sebesar 6,29% (yoy), sedikit meningkat dibanding triwulan IV 2018 sebesar 6,26% (yoy). Sejalan dengan kondisi tersebut, kualitas kredit mengalami penurunan tercermin oleh nilai NPL pada triwulan I 2019 sebesar 2,33%, lebih tinggi dibanding triwulan IV 2018 sebesar 2,23%.

Sejalan dengan perlambatan kinerja ekonomi Provinsi Bali pada triwulan I 2019, kinerja kredit korporasi juga menunjukkan perlambatan. Pada triwulan I 2019, kredit korporasi tercatat tumbuh sebesar 5,38% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,24% (yoy). Perlambatan ini disebabkan oleh melambatnya kinerja kredit modal kerja, sementara kredit investasi tetap tumbuh lebih tinggi. Perlambatan kredit korporasi menyebabkan terjadinya penurunan kualitas kredit korporasi menjadi 7,95% pada triwulan I 2019, lebih tinggi dibanding triwulan IV 2018 yang sebesar 7,11%.

Kinerja kredit Korporasi dan UMKM mengalami perlambatan di triwulan I 2019. Kualitas kredit UMKM mengalami perbaikan, sementara kualitas kredit korporasi mengalami penurunan.

Perkembangan kredit UMKM menunjukkan perlambatan di triwulan I 2019. Kredit UMKM tercatat tumbuh sebesar 5,79% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan IV 2018 mencapai 6,81% (yoy). Meskipun tumbuh melambat, namun kualitas kredit UMKM mengalami perbaikan, tercermin dari nilai NPL pada triwulan I 2019 yang sebesar 3,13% dibanding 3,28% di triwulan IV 2018.

Nilai nominal transaksi tunai pada triwulan I 2019 menunjukkan terjadinya net inflow sebesar Rp3,25 triliun.

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

Perkembangan kinerja transaksi tunai pada triwulan I 2019 di Provinsi Bali menunjukkan terjadinya *net inflow* (uang yang masuk ke Bank Indonesia melalui perbankan lebih besar dibanding uang yang keluar) sebesar Rp3,25 triliun. Terjadinya *net inflow* dalam jumlah yang signifikan tersebut, didorong oleh minimnya frekuensi HBKN dibanding triwulan sebelumnya, melambatnya pertumbuhan jumlah kunjungan wisman dan masuknya periode *low season* pariwisata.

Transaksi melalui SKNBI menurun dibanding triwulan sebelumnya, baik secara nominal maupun volume. Pada triwulan I 2019, volume transaksi melalui SKNBI tercatat sebanyak 437 ribu lembar atau terkontraksi 18,80% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan IV 2018 yang terkontraksi 10,30% (yoy). Sementara itu, nominal transaksi melalui SKNBI tercatat sebesar Rp12,60 triliun atau turun sebesar 7,60% (yoy) pada triwulan I 2019, lebih rendah dibanding triwulan IV 2018 yang menurun sebesar 3,20% (yoy).

Perkembangan nominal transaksi penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali di triwulan I 2019 menunjukkan penurunan sebesar 37,20% (yoy) atau dengan nilai nominal sebesar Rp6,01 triliun (beli Rp2,98 triliun, jual Rp3,02 triliun), lebih rendah dibanding triwulan IV 2018 yang meningkat sebesar 0,16% (yoy). Penurunan nilai transaksi KUPVA di triwulan I 2019 tersebut, sejalan dengan melambatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali, seiring dengan masuknya periode *low season* pariwisata di Bali.

PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN

Secara umum kondisi ketenagakerjaan Provinsi Bali pada Februari 2019 menunjukkan kinerja yang menurun dibandingkan Februari 2018. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Bali pada Februari 2019 mengalami penurunan menjadi 2,54 juta orang atau menurun 2,60% (yoy), lebih rendah dibanding Februari 2018 yang tumbuh 5,60%. Kondisi ini juga diikuti oleh menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi sebesar 76,68% di Februari 2019, lebih rendah dibanding Februari 2018 sebesar 79,83%. Penurunan angkatan kerja dan TPAK di periode Februari 2019 tersebut, berdampak pada meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu dari 0,89% (Februari 2018) menjadi 1,19% (Februari 2019). Prospek ketenagakerjaan Provinsi Bali pada triwulan II dan III 2019 diperkirakan akan menunjukkan peningkatan kinerja, terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan hasil Survei Konsumen (SK) periode triwulan I & II 2019.

Tingkat kemiskinan Provinsi Bali pada September 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 3,91%, menurun dibanding September 2017 yang sebesar 4,14%. Sejalan dengan kondisi tersebut, gini ratio Provinsi Bali juga mengalami penurunan dari 0,379 pada September 2017 menjadi 0,364 pada September 2018. Sejalan dengan kondisi tersebut, indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali yang menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani, menunjukkan peningkatan pada triwulan IV 2018 yaitu sebesar 103,87, lebih tinggi dibanding triwulan III 2018 yang sebesar 103,28. Kondisi ini mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

PROSPEK EKONOMI BALI

Dengan mencermati perkembangan ekonomi, *prompt* indikator dan hasil survei serta liaison terakhir, perekonomian Provinsi Bali di tahun 2019 diperkirakan akan

Transaksi melalui SKNBI menunjukkan penurunan, baik secara nominal dan volume pada triwulan I 2019, dibanding triwulan sebelumnya

Transaksi penukaran valuta asing melalui KUPVA BB menunjukkan penurunan pada triwulan I 2019 dibanding triwulan sebelumnya.

Pada periode Februari 2019, angkatan kerja dan TPAK di Provinsi Bali menurun dibanding Februari 2018. Kondisi tersebut mendorong terjadinya peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat kemiskinan di Provinsi Bali pada periode September 2018 menunjukkan penurunan, diikuti oleh penurunan rasio gini dan peningkatan NTP

Kinerja ekonomi Provinsi Bali tahun 2019 diperkirakan akan tumbuh melambat, dengan kisaran 5,90%-6,30% (yoy)

melambat yaitu tumbuh dalam kisaran 5,90%-6,30% (yoy). Dari sisi permintaan, melambatnya kinerja ekonomi Provinsi Bali terutama disebabkan oleh melambatnya kinerja komponen investasi dan ekspor luar negeri. Sementara dari sisi penawaran, melambatnya kinerja ekonomi Provinsi Bali disebabkan oleh perlambatan 5 lapangan usaha utama ekonomi Bali, yaitu lapangan usaha akomodasi makan minum, pertanian, perdagangan, konstruksi dan transportasi. Sementara itu lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi, didukung antara lain oleh pelaksanaan pemilihan umum presiden dan legislatif.

Tekanan inflasi Provinsi Bali pada tahun 2019 diperkirakan akan melandai dan berada dalam kisaran 2,70%-3,10% (yoy).

PROSPEK INFLASI BALI

Inflasi Provinsi Bali pada tahun 2019 diperkirakan akan melandai dan berada dalam kisaran 2,70%-3,10% (yoy), lebih rendah dibanding realisasi inflasi tahun 2018 yang sebesar 3,13% (yoy). Prakiraan inflasi tersebut masuk dalam rentang sasaran inflasi Nasional yang sebesar $3,5\% \pm 1\%$ (yoy), sebagaimana tercantum dalam PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi. Berdasarkan disagregasinya, melandainya tekanan inflasi pada tahun 2019 terutama bersumber dari hampir semua kelompok pengeluaran, terutama kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Kecukupan pasokan komoditas strategis dan koordinasi serta langkah-langkah strategis yang dilakukan TPID berkontribusi terhadap melandainya tingkat inflasi 2019. Sejalan dengan itu, penurunan tarif batas atas angkutan udara sebesar 15% yang berlaku sejak Mei 2019 juga memberikan kontribusi terhadap terkendalinya inflasi 2019.

halaman ini sengaja dikosongkan

TABEL INDIKATOR TERPILIH

PDRB DAN INFLASI

INDIKATOR	2017				2017	2018				2018	2019
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		
EKONOMI MAKRO REGIONAL											
Produk Domestik Regional Bruto (%)											
1. Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha:	6,25	5,92	6,18	4,01	5,57	5,58	6,05	6,15	7,59	6,35	5,94
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,24	4,65	3,80	-1,42	2,73	5,15	4,17	4,48	6,92	5,19	1,68
Pertambangan dan Penggalian	2,54	0,39	1,91	-10,49	-1,44	-6,26	-3,12	-4,00	3,44	-2,65	-4,10
Industri Pengolahan	3,58	-0,06	0,46	-0,69	0,80	1,36	5,46	6,73	9,16	5,67	9,74
Pengadaan Listrik dan Gas	0,40	-0,16	8,40	13,50	5,48	4,90	6,52	0,50	-3,51	1,94	1,50
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,82	4,86	3,05	1,16	2,72	-1,88	2,92	2,14	4,87	2,03	6,04
Konstruksi	6,27	7,15	8,54	9,72	7,95	9,96	10,40	12,01	9,40	10,44	8,97
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,48	8,23	9,60	5,11	7,84	4,84	5,44	7,21	12,34	7,48	7,56
Transportasi dan Pergudangan	4,89	5,44	6,37	3,28	5,00	6,78	6,07	3,15	8,79	6,15	6,40
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,47	9,73	10,59	6,35	9,03	6,35	6,16	4,24	8,26	6,22	4,99
Informasi dan Komunikasi	8,14	8,31	7,85	8,09	8,10	8,87	8,47	7,63	6,12	7,74	5,99
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,06	6,34	0,70	-2,01	2,43	1,00	-0,23	3,15	3,84	1,93	6,89
Real Estate	3,67	4,28	4,50	4,92	4,34	1,43	3,20	5,38	6,44	4,14	7,65
Jasa Perusahaan	8,56	7,66	5,90	5,65	6,91	6,94	8,40	9,00	6,83	7,79	4,10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,11	-5,07	-1,34	0,30	-1,60	0,81	5,56	7,78	3,23	4,45	9,74
Jasa Pendidikan	7,30	8,11	5,24	7,44	7,00	9,02	8,44	7,98	4,31	7,38	3,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,00	7,92	7,76	9,06	8,44	9,29	9,44	9,16	6,61	8,59	6,24
Jasa lainnya	9,57	8,26	7,52	6,18	7,85	7,03	8,77	9,08	8,97	8,47	7,07
2. Berdasarkan Pengeluaran:	6,25	5,92	6,18	4,01	5,57	5,58	6,05	6,15	7,59	6,35	5,94
1. Pengeluaran Konsumsi	7,02	1,94	4,22	3,97	4,22	4,50	4,53	6,17	3,77	4,74	8,35
1.a. Konsumsi Rumah Tangga	4,77	3,71	4,44	3,19	4,02	3,19	4,52	5,36	6,90	5,00	6,26
1.b. Konsumsi LNPR	5,85	0,12	0,14	9,64	3,94	8,27	9,62	9,47	0,54	6,76	23,09
1.c. Konsumsi Pemerintah	29,07	-7,01	3,59	6,47	5,28	14,23	3,94	10,03	-7,57	3,08	20,84
2. Investasi	3,08	3,89	3,81	3,42	3,55	7,43	6,23	10,22	11,97	9,01	8,78
2.a. PMTB	3,04	3,82	3,84	3,43	3,54	7,46	6,23	10,25	12,03	9,04	8,79
2.b. Perubahan Inventori	9,50	19,74	-1,84	1,71	6,56	2,59	6,34	3,69	-0,43	3,02	6,71
3. Neraca Perdagangan Bersih	16,99	255,01	64,58	-69,37	68,28	6,66	26,36	-18,36	-1320,68	10,73	-33,08
3. a. Ekspor Luar Negeri	11,25	11,29	11,45	-5,03	7,09	-3,83	3,35	11,67	15,15	6,45	2,19
3.b. Impor Luar Negeri	14,36	32,96	21,98	2,91	17,14	12,98	7,58	27,32	49,09	24,41	9,78
3.c. Net Ekspor Antar Daerah	8,89	-5,13	1,20	-8,17	-1,44	-12,40	-2,02	12,37	-1,25	-0,67	9,16
3. Ekspor											
Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)	128,49	121,79	124,75	133,74	508,76	144,11	128,20	135,76	163,38	571,46	150,78
Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)	21,46	20,76	21,11	22,04	85,37	21,90	20,79	22,06	27,01	91,77	21,38
4. Impor											
Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)	18,31	33,80	41,90	43,21	137,22	34,17	47,32	64,35	120,31	266,15	59,82
Volume Impor Nonmigas (ribu ton)	1,58	2,15	1,42	2,15	7,30	6,17	1,45	2,03	2,05	11,70	2,32
5. Laju Inflasi Provinsi Bali (% yoy)	4,40	4,02	2,69	3,32	3,32	3,10	3,47	3,60	3,13	3,13	1,85

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jembrana (%; yoy)	6,11	5,69	6,05	6,19	5,96	5,31
Tabanan (%; yoy)	6,12	6,45	6,53	6,19	6,14	5,38
Badung (%; yoy)	7,64	6,82	6,98	6,24	6,81	6,11
Gianyar (%; yoy)	7,08	6,82	6,80	6,30	6,31	5,50
Klungkung (%; yoy)	6,25	6,05	5,98	6,11	6,28	5,34
Bangli (%; yoy)	6,20	5,94	5,83	6,16	6,24	5,35
Karangasem (%; yoy)	5,93	6,16	6,01	6,00	5,92	5,08
Buleleng (%; yoy)	6,78	7,15	6,96	6,07	6,02	5,40
Denpasar (%; yoy)	7,51	6,96	7,00	6,14	6,51	6,08

KREDIT RUMAH TANGGA (BANK UMUM -LOKASI PROYEK)

INDIKATOR	2017				2018				2019
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Kredit RT. Total (Rp triliun)	57,52	59,07	59,83	60,58	61,31	62,27	63,43	64,37	65,16
KPR (Rp triliun)	10,92	9,07	9,30	9,59	9,68	9,76	10,10	10,58	10,70
RT. KPR sd 21	2,26	0,59	0,61	0,65	0,71	0,70	0,72	0,69	0,69
RT. KPR sd 70	3,99	4,04	4,24	4,41	4,43	4,45	4,69	5,10	5,25
RT. KPR 70+	4,67	4,45	4,46	4,54	4,55	4,60	4,70	4,79	4,76
KPA (Rp triliun)	0,18	0,18	0,18	0,17	0,16	0,14	0,15	0,14	0,13
RT. KPA sd 21	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
RT. KPA sd 70	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,07
RT. KPA 70+	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04
RT. Ruko	0,58	0,61	0,61	0,58	0,57	0,58	0,56	0,56	0,56
KKB (Rp triliun)	2,28	2,28	2,32	2,31	2,38	2,48	2,57	2,63	2,70
RT. KKB Roda 4	2,12	2,14	2,19	2,15	2,21	2,30	2,39	2,39	2,43
RT. KKB Roda 2	0,12	0,10	0,09	0,13	0,13	0,14	0,14	0,18	0,21
RT. KKB Roda 6	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
RT. KKB Lainnya	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03	0,03	0,05	0,05
RT. Multiguna (triliun)	13,37	15,78	15,93	16,15	16,49	16,52	16,74	16,94	16,98
NPL Kredit RT (Gross %)	2,56	2,96	3,12	2,27	3,08	2,78	2,70	2,23	2,33

KREDIT KORPORASI (BANK UMUM - LOKASI PROYEK)

INDIKATOR	2017				2018				2019
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Kredit Korporasi (Rp triliun)	28,21	28,16	28,06	28,09	27,88	27,34	28,93	29,84	29,38
Modal Kerja (Rp triliun)	10,65	10,53	10,33	10,52	10,17	9,64	10,91	11,24	10,65
Investasi (Rp triliun)	17,47	17,55	17,67	17,55	17,66	17,68	17,99	18,57	18,70
NPL (Gross, %)	6,26	5,27	4,88	5,45	6,33	5,22	5,60	7,11	7,95

INDIKATOR PERBANKAN - BANK UMUM (LOKASI BANK)

INDIKATOR	2017				2018				2019
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total Asset (Rp Triliun)	95,92	98,06	103,43	103,50	105,32	106,45	109,99	112,41	109,29
DPK (Rp Triliun) - Bank Pelapor	81,57	83,21	87,61	86,73	87,32	89,69	94,76	93,61	94,32
Giro (Rp Triliun)	14,41	15,18	16,38	13,80	14,28	15,12	16,53	14,23	14,93
Tabungan (Rp Triliun)	36,83	38,11	40,58	42,09	41,84	43,89	46,48	47,14	46,35
Deposito (Rp Triliun)	30,33	29,92	30,65	30,84	31,20	30,68	31,75	32,24	33,04
Kredit (Rp Triliun) - Lokasi Bank	69,60	71,27	71,88	73,04	73,25	73,93	75,50	76,67	77,24
Modal Kerja	26,85	27,73	27,52	28,07	28,23	28,39	28,71	29,89	29,05
Investasi	16,32	16,25	16,52	16,60	16,55	16,67	17,34	16,84	18,15
Konsumsi	26,43	27,29	27,83	28,37	28,47	28,88	29,44	29,93	30,05
Loan to Deposit Ratio (%)	85,32	85,65	82,05	84,21	83,89	82,43	79,67	81,90	81,89
NPL Gross (%)	2,73	2,96	3,16	2,98	3,40	3,08	2,98	2,56	3,03

DANA PERBANKAN BERDASARKAN KCKCP (BANK UMUM)

INDIKATOR	2017				2018				2019
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total (Rp triliun)	81,53	89,97	93,24	86,68	87,27	89,63	94,70	93,49	94,20
Giro (Rp triliun)	14,41	15,18	16,38	13,80	14,28	15,12	16,53	14,23	14,92
Tabungan (Rp triliun)	36,80	42,89	44,02	42,06	41,81	43,85	46,44	47,07	46,28
Deposito (Rp triliun)	30,32	31,90	32,84	30,82	31,18	30,65	31,73	32,19	33,00

INDIKATOR PERBANKAN KABUPATEN/KOTA - BANK UMUM (LOKASI BANK)

Kabupaten/Kota	Indikator	2017				2018				2019
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Jembrana	Kredit (Rp Triliun)	2,26	2,35	2,10	2,16	2,27	2,31	2,37	2,40	2,46
	DPK (Rp Triliun)	1,24	1,31	1,37	1,37	1,46	1,47	1,54	1,42	1,48
Tabanan	Kredit (Rp Triliun)	3,38	3,95	3,68	3,73	3,81	3,84	3,93	4,02	4,13
	DPK (Rp Triliun)	2,24	2,37	2,52	2,41	2,53	2,60	2,79	2,68	2,87
Badung	Kredit (Rp Triliun)	8,79	9,03	9,20	9,36	9,30	9,42	9,62	9,68	9,71
	DPK (Rp Triliun)	13,12	14,05	15,07	13,93	14,69	15,60	16,54	15,97	15,56
Gianyar	Kredit (Rp Triliun)	3,56	3,64	3,13	3,22	3,35	3,41	3,45	3,49	3,58
	DPK (Rp Triliun)	2,83	3,04	3,18	3,13	3,24	3,38	3,73	3,74	3,97
Klungkung	Kredit (Rp Triliun)	1,63	1,68	1,71	1,73	1,80	1,85	1,89	1,92	1,97
	DPK (Rp Triliun)	1,18	1,26	1,35	1,29	1,37	1,42	1,50	1,40	1,48
Bangli	Kredit (Rp Triliun)	1,65	1,68	1,70	1,73	1,79	1,82	1,85	1,87	1,91
	DPK (Rp Triliun)	859,00	978,86	1,10	1,02	1,12	1,22	1,35	1,12	1,14
Karangasem	Kredit (Rp Triliun)	2,80	2,85	3,10	3,03	3,03	3,05	3,09	3,09	3,12
	DPK (Rp Triliun)	1,62	1,68	1,80	1,95	2,00	2,07	2,17	2,13	2,25
Buleleng	Kredit (Rp Triliun)	5,05	5,23	5,90	5,99	5,98	6,04	6,14	6,10	6,19
	DPK (Rp Triliun)	3,33	3,54	3,90	3,90	3,94	4,02	4,32	4,21	4,24
Denpasar	Kredit (Rp Triliun)	2,26	2,35	2,10	2,16	2,27	2,31	2,37	2,40	2,46
	DPK (Rp Triliun)	1,24	1,31	1,37	1,37	1,46	1,47	1,54	1,42	61,33

KREDIT UMKM (LOKASI PROYEK - BANK UMUM)

Kredit UMKM	2017				2018				2019
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Kredit UMKM (Rp Triliun)	31,84	33,13	33,27	34,15	34,60	35,44	35,92	36,47	36,60
g Kredit UMKM (% yoy)	14,20	11,18	8,43	7,30	8,66	6,96	7,95	6,81	5,79
Mikro (Triliun)	5,56	5,83	6,12	6,47	6,88	7,20	7,39	7,49	7,73
Kecil (Triliun)	12,17	12,64	12,78	13,02	13,19	13,41	13,42	1,33	13,55
Menengah (Triliun)	14,11	14,67	14,37	14,66	14,53	14,82	15,11	15,65	15,33
NPL (%)	2,38	4,01	3,03	2,82	3,56	3,56	3,89	3,28	3,13

SISTEM PEMBAYARAN (TUNAI - NON TUNAI)

INDIKATOR	2017				2018				2019
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
SISTEM PEMBAYARAN									
Transaksi Tunai									
Inflow (Rp Triliun)	4,50	3,90	4,90	3,58	4,50	5,21	4,65	4,16	6,76
Outflow (Rp Triliun)	3,90	5,80	3,60	4,42	3,45	6,56	4,74	5,70	3,51
Kliring									
Nom. Kliring (Rp triliun)	16,27	13,37	15,80	15,08	13,64	13,84	15,85	14,60	12,60
Vol. Kliring (ribu lembar)	622	540	609	569	538	534	582	510	437
Nominal Tolakan Cek/BG (Rp miliar)	423	202	187	197	169	175	163	167,45	146
Volume Tolakan Cek/BG (ribu lembar)	7,90	7,50	6,06	5,63	5,91	5,35	4,72	4,62	4,14



Patung Garuda Wisnu Kencana - Badung

BAB I

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL



- Kinerja ekonomi Provinsi Bali pada triwulan I 2019 masih tetap tumbuh kuat, meskipun melambat dibanding triwulan sebelumnya. Ekonomi Provinsi Bali tercatat tumbuh sebesar 5,94% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 7,59% (yoy) dan juga lebih tinggi dibanding triwulan I 2018 yang sebesar 5,58% (yoy).
- Kinerja ekonomi Provinsi Bali pada triwulan II 2019 diprakirakan akan menunjukkan akselerasi, tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya dalam kisaran 6,00-6,40% (yoy)

1.1. KONDISI UMUM

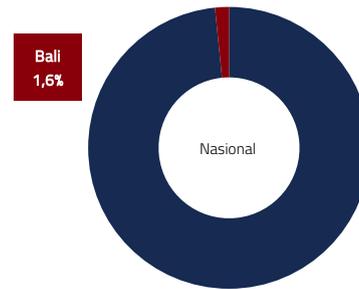
Kinerja ekonomi Provinsi Bali pada triwulan I 2019 masih tetap tumbuh kuat, meskipun melambat dibanding triwulan sebelumnya. Ekonomi Provinsi Bali tercatat tumbuh sebesar 5,94% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 7,59% (yoy) dan juga lebih tinggi dibanding triwulan I 2018 yang sebesar 5,58% (yoy). Dari sisi permintaan, perlambatan kinerja ekonomi Provinsi Bali tersebut disebabkan oleh melambatnya kinerja komponen konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor luar negeri. Sementara itu, dari sisi penawaran, kinerja ekonomi Provinsi Bali yang melambat disebabkan oleh perlambatan kinerja hampir semua lapangan usaha utama Bali, yaitu lapangan usaha akomodasi makan minum (akmamin), pertanian, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Beberapa faktor yang menjadi penahan kinerja ekonomi Provinsi Bali meliputi: i). periode *low season* pariwisata, ii). mundurnya periode puncak panen untuk komoditas tabama, iii) progres proyek konstruksi yang masih dalam tahap pengadaan, iv) sikap *wait and see* pelaku usaha menanti kebijakan presiden terpilih, v) melambatnya jumlah kunjungan wisman, vi) harga tiket pesawat udara yang tinggi dan pemberlakuan bagasi berbayar dan vii) melambatnya kinerja ekonomi negara mitra dagang utama Bali.

1.1.1. KINERJA PEREKONOMIAN Provinsi Bali TRIWULAN I 2019

Perekonomian Provinsi Bali pada triwulan I 2019 menunjukkan perlambatan dibanding triwulan IV



Grafik 1.2. Pangsa Ekonomi Provinsi Bali Terhadap Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

2018. Ekonomi Provinsi Bali dengan output rill sebesar Rp 39,08 triliun tercatat tumbuh 5,94% (yoy) pada triwulan I 2019, lebih rendah dibanding triwulan IV 2018 yang tumbuh 7,59% (yoy) namun lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama sebesar 5,07% (yoy).

Dari sisi permintaan, perlambatan kinerja ekonomi Provinsi Bali pada triwulan laporan disebabkan oleh melambatnya kinerja komponen konsumsi rumah tangga, investasi, serta ekspor luar negeri. Sementara itu, kinerja konsumsi pemerintah mengalami akselerasi dibanding triwulan sebelumnya. Perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga disebabkan oleh: i) Kenaikan UMP Provinsi Bali pada tahun 2019 (8,03%) lebih rendah dibanding kenaikan tahun 2018 (8,71%), dan ii) kinerja pariwisata yang melambat dibanding triwulan IV 2018, sejalan dengan masuknya *low season* pariwisata dan harga tiket pesawat yang tinggi, iii) bergesernya periode puncak panen untuk komoditas tabama. Sementara itu, melambatnya kinerja investasi disebabkan oleh i) sikap *wait and see* pelaku usaha menanti kebijakan presiden terpilih, ii) tertahannya investasi bangunan sejalan dengan pengerjaan proyek konstruksi dan infrastruktur yang tidak sebanyak triwulan sebelumnya. Perlambatan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan laporan juga disebabkan oleh melambatnya kinerja komponen ekspor luar negeri, sebagai dampak dari prakiraan perlambatan kinerja negara mitra dagang utama Provinsi Bali (AS, Australia, Singapura dan Tiongkok) serta masuknya periode *low*

season pariwisata pada triwulan I 2019, sehingga berdampak pada melambatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Di sisi lain, kinerja konsumsi pemerintah yang tumbuh lebih baik didorong oleh peningkatan persentase realisasi belanja pemerintah, baik yang menggunakan anggaran APBN maupun APBD. Sejalan dengan itu, persiapan penyelenggaraan Pemilu (Pilpres dan Pileg), juga turut mendorong kinerja komponen konsumsi pemerintah.

Dari sisi penawaran, perlambatan kinerja ekonomi Provinsi Bali disebabkan oleh melambatnya kinerja 4 lapangan usaha utama Bali, yaitu akmamin (pangsa 23%); pertanian, kehutanan, dan perikanan (pangsa 13%); konstruksi (pangsa 10%); serta perdagangan besar dan eceran (pangsa 9%). Perlambatan kinerja lapangan usaha akomodasi makan dan minum seiring dengan periode *low season* pariwisata, sehingga berdampak terhadap melambatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Selanjutnya, perlambatan kinerja lapangan usaha pertanian disebabkan oleh pergeseran masa panen padi dari bulan Maret menjadi bulan April, sehingga menyebabkan penurunan produksi padi dan menurunnya jumlah luasan panen. Selain itu, faktor tingginya gelombang laut menyebabkan penurunan tangkapan ikan laut, juga menjadi faktor penahan kinerja pertanian. Perlambatan lapangan usaha konstruksi disebabkan oleh pengerjaan proyek konstruksi dan infrastruktur yang tidak semasih triwulan sebelumnya, selain itu beberapa proyek konstruksi berupa pembangunan bendungan dan *shortcut* jalan, persentase realisasi fisik dan anggarannya masih dalam nilai yang rendah (baru dimulai). Sejalan dengan itu, kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran yang melambat, dipengaruhi oleh alokasi anggaran rumah tangga yang telah dipergunakan pada triwulan sebelumnya untuk liburan akhir tahun dan tahun ajaran baru, perlambatan konsumsi rumah tangga, seiring dengan melambatnya kinerja lapangan

usaha penyediaan akomodasi makan-minum serta bergesernya puncak panen komoditas tabama.

1.1.2. *Tracking Kinerja Ekonomi Bali Triwulan II 2019*

Kinerja ekonomi Provinsi Bali pada triwulan II 2019 diperkirakan akan menunjukkan akselerasi dibandingkan triwulan I 2019. Peningkatan tersebut didorong oleh akselerasi seluruh komponen dan seluruh lapangan usaha utama ekonomi Bali. Dari sisi permintaan, akselerasi kinerja ekonomi Provinsi Bali terutama didorong oleh akselerasi semua komponen utama ekonomi Bali, meliputi: konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor luar negeri. Sejalan dengan itu, akselerasi ekonomi Provinsi Bali pada triwulan II 2019 dari sisi penawaran juga didorong oleh akselerasi kinerja lapangan usaha utama ekonomi Bali, yaitu lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, perdagangan besar dan eceran, konstruksi serta pertanian.

Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nonprofit rumah tangga, konsumsi pemerintah, lapangan usaha perdagangan serta industri pengolahan pada triwulan II 2019 didorong oleh beberapa faktor. Adanya perayaan hari keagamaan¹, pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif, pembayaran THR dan gaji ke 14 PNS, penambahan penerima BPNT, akselerasi realisasi belanja pemerintah dan masuknya puncak panen komoditas padi, mendorong akselerasi masing-masing komponen permintaan dan lapangan usaha tersebut.

Sementara itu, kinerja ekspor luar negeri, baik ekspor jasa maupun barang, kinerja lapangan usaha akmamin dan transportasi diperkirakan akan meningkat pada triwulan II 2019. Meningkatnya frekuensi penerbangan sejalan dengan adanya penambahan *direct flight* baru sepanjang triwulan II 2019², membaiknya proyeksi pertumbuhan ekonomi

1. Perayaan hari keagamaan pada triwulan II 2019 meliputi Waisak, Ramadhan & Idul Fitri, Saraswati

2. Malindo Air membuka rute penerbangan langsung Baru Denpasar-Adelaide pada April 2019 dengan frekuensi penerbangan 4 kali per minggu dengan kapasitas 162 seat per flight

Jepang sebagai mitra dagang³, serta masuknya periode pariwisata pada triwulan laporan menjadi faktor pendorong akselerasi komponen permintaan dan masing-masing lapangan usaha tersebut.

Kinerja sektor pertanian pada triwulan II 2019 diprakiraan meningkat didorong oleh faktor cuaca yang mendukung dan masuknya musim panen puncak komoditas padi. Beberapa upaya dalam mendorong peningkatan produksi yaitu pemberian bantuan sarana produksi pertanian dan program Sapi Induk Wajib Bunting (Siwab) juga berpotensi mendorong peningkatan kinerja pertanian pada triwulan II 2019. Selain itu, beroperasinya waduk Titab berpotensi mendorong peningkatan indeks luas tanam padi⁴ sehingga menambah peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian.

Lapangan usaha konstruksi dan komponen investasi diprakiraan akan menunjukkan peningkatan kinerja pada triwulan II 2019. Akselerasi ini didorong oleh berlanjutnya pengerjaan proyek konstruksi swasta yaitu pengembangan kawasan Nusa Dua . Selain itu, pengerjaan beberapa proyek infrastruktur pemerintah diprakiraan juga mendorong kinerja lapangan usaha konstruksi dan komponen investasi. Proyek infrastruktur tersebut yaitu pengembangan pelabuhan Benoa dan Celukan

Bawang, proyek *shortcut* jalan Singaraja-Mengwitani, pembangunan *Rapid Exit Taxiway* Bandara I Gusti Ngurah Rai, serta pembangunan bendungan Sidane.

Dari berbagai *prompt indicator* ekonomi Regional di Provinsi Bali dan hasil survei dan liaison, terindikasi tendensi terjadi peningkatan kinerja ekonomi Provinsi Bali pada triwulan II 2019. Kondisi ini juga didukung oleh beberapa faktor internal dan eksternal yang mendukung terealisasinya peningkatan kinerja ekonomi ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kinerja ekonomi Provinsi Bali diprakiraan akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan berada pada kisaran 6,00% - 6,40% (yoy).

1.2. PERTUMBUHAN EKONOMI BALI TRIWULAN I 2019 SISI PERMINTAAN

Perlambatan kinerja ekonomi Provinsi Bali pada triwulan I 2019 dari sisi permintaan disebabkan oleh melambatnya kinerja konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor luar negeri. Sementara itu, kinerja konsumsi pemerintah mengalami akselerasi dibanding triwulan sebelumnya.

1.2.1. Konsumsi

Komponen konsumsi pada periode laporan tumbuh akselerasi dibanding triwulan sebelumnya. Komponen konsumsi tercatat tumbuh sebesar 8,35%

Tabel 1.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Sisi Permintaan (% , yoy)

Komponen	2017				2017	2018				2018	2019
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Konsumsi	7,02	1,94	4,22	3,97	4,22	4,50	4,53	6,17	3,77	4,74	8,35
Kons.RT	4,77	3,71	4,44	3,19	4,02	3,19	4,52	5,36	6,90	5,00	6,26
Kons.LNPRT	5,85	0,12	0,14	9,64	3,94	8,27	9,62	9,47	0,54	6,76	23,09
Kons. Pemerintah	29,07	-7,01	3,59	6,47	5,28	14,23	3,94	10,03	-7,57	3,08	20,84
Investasi	3,08	3,89	3,81	3,42	3,55	7,43	6,23	10,22	11,97	9,01	8,78
PMTB	3,04	3,82	3,84	3,43	3,54	7,46	6,23	10,25	12,03	9,04	8,79
Perubahan Inventori	9,50	19,74	-1,84	1,71	6,56	2,59	6,34	3,69	-0,43	3,02	6,71
Ekspor LN	11,25	11,29	11,45	-5,03	7,09	-3,83	3,35	11,67	15,15	6,45	2,19
Impor LN	14,36	32,96	21,98	2,91	17,14	12,98	7,58	27,32	49,09	24,41	9,78
Net Ekspor antar daerah	16,99	255,01	64,58	-69,37	68,28	6,66	26,36	-18,36	-1320,68	10,73	9,16
PDRB	6,25	5,92	6,18	4,01	5,57	5,58	6,05	6,15	7,59	6,35	5,94

Sumber : BPS Provinsi Bali

- Berdasarkan World Economic Outlook (WEO) IMF pada periode April 2019 pertumbuhan ekonomi Jepang tahun 2019 diprakiraan tumbuh 1,0% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 0,9% (yoy).
- Dengan beroperasinya waduk Titab, indeks luas tanam padi diprakiraan meningkat dari 169% menjadi 275%.
- Pengembangan kawasan Nusa Dua termasuk pembangunan Hotel Shangrila, awarta Villa, dan Hotel Renaissance serta kompleks perkantoran CREA.

(yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,77% (yoy). Akselerasi ini didorong oleh peningkatan kinerja 2 komponen konsumsi, yaitu konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPR) dan konsumsi pemerintah. Sementara itu, kinerja konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan dibanding triwulan sebelumnya.

Konsumsi Swasta: Rumah Tangga & Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPR)

Kinerja konsumsi rumah tangga melambat pada periode laporan, sedangkan konsumsi LNPR mengalami akselerasi. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 6,26% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 6,90% (yoy). Perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga dipengaruhi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Bali pada tahun 2019 yang lebih rendah



6. Penjualan Perlengkapan RT tumbuh sebesar 49,97% (yoy) melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 109,72% (yoy), sedangkan pertumbuhan penjualan Pakaian Jadi & Tekstil masih kontraksi sebesar -28,13% (yoy), sebagaimana pada triwulan IV 2018 yang juga tercatat tumbuh -28,80% (yoy)



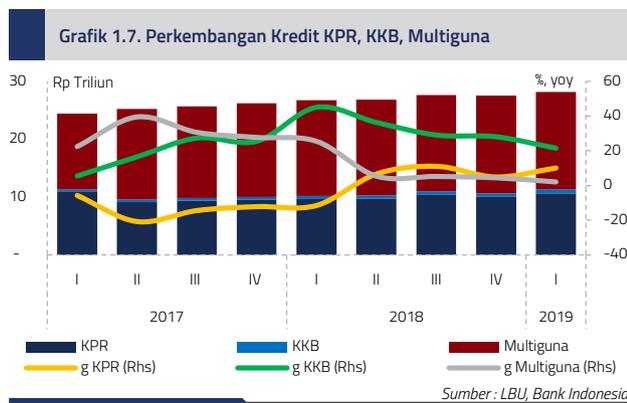
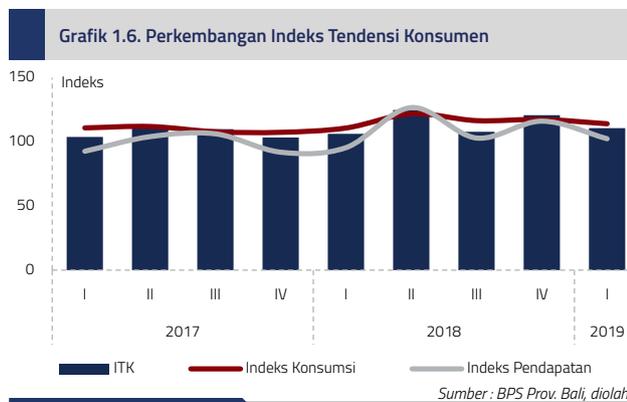
dibanding tahun 2018. Selain itu, waktu panen padi yang bergeser dari bulan Maret ke April juga ikut menekan pendapatan petani pada periode laporan. Sementara itu, kinerja konsumsi LNPR mengalami akselerasi dari 0,54% (yoy) menjadi 23,09% (yoy) pada triwulan laporan. Hal ini didorong oleh meningkatnya konsumsi lembaga non profit dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu (Pilpres dan Pileg).

Meskipun kinerja konsumsi RT melambat, konsumen masih optimis terhadap kondisi perekonomian yang tergambar dari hasil Survei Konsumen (SK). Menurut hasil SK, nilai Indeks Keyakinan Konsumen, Indeks Kondisi Ekonomi, dan Indeks Ekspektasi Konsumen masih di atas 100 yang menunjukkan kondisi optimis. Selain itu, nilai indeks-indeks tersebut meningkat dibanding triwulan sebelumnya.

Kinerja konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan pada triwulan laporan terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan Eceran (SPE), penjualan kendaraan baru, dan Indeks Tendensi Konsumen (ITK). Berdasarkan hasil SPE, pertumbuhan penjualan perlengkapan rumah tangga mengalami perlambatan pada triwulan laporan dibanding triwulan IV 2018, sedangkan pertumbuhan penjualan pakaian jadi & tekstil masih kontraksi sebagaimana triwulan

sebelumnya⁶. Perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga juga terkonfirmasi dari perlambatan pertumbuhan penjualan kendaraan baru (Mobil dan Sepeda Motor) yang pada triwulan laporan tercatat tumbuh kontraksi⁷. Selain itu, ITK pada triwulan I 2019 yang tercatat lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya⁸ juga mengonfirmasi perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga.

Perlambatan pertumbuhan berbagai jenis kredit juga mengonfirmasi perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan. Pertumbuhan kredit kendaraan bermotor (KKB) mengalami perlambatan pada triwulan laporan dibanding triwulan sebelumnya⁹. Selain itu, perlambatan pertumbuhan kredit multiguna pada triwulan I 2019 juga mengonfirmasi perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga¹⁰.



7. Total kendaraan pada triwulan I 2019 tercatat tumbuh -1,80% (yoy), menurun dibanding triwulan IV 2018 yang tumbuh 24,04% (yoy)
8. ITK pada triwulan I 2019 tercatat sebesar 110,5, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 120,96
9. Kredit KKB tumbuh 21,51% (yoy) pada triwulan I 2019, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 28,08% (yoy)
10. Kredit multiguna tercatat tumbuh melambat dari 4,44% (yoy) menjadi 2,05% (yoy) pada triwulan I 2019
11. Perluasan penyaluran BPNT dengan tambahan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) mencapai 53.662 untuk daerah Kab. Badung, Kab. Bangli, dan Kab. Buleleng
12. Pertumbuhan realisasi belanja pemerintah tingkat kementerian/lembaga pada triwulan I 2019 sebesar 16,43% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 7,62% (yoy)
13. Pertumbuhan realisasi belanja pemerintah provinsi pada triwulan I 2019 tercatat sebesar -38,81% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar -10,44% (yoy)

Tracking Kinerja Triwulan II 2019

Kinerja komponen konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2019 diperkirakan meningkat, sedangkan kinerja konsumsi LNPRT diperkirakan melambat. Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga didorong oleh beberapa faktor, meliputi: i) peningkatan frekuensi perayaan HBKN (Ramadhan & Idul Fitri, Waisak, Saraswati); ii) adanya pembayaran THR karyawan dan pembayaran gaji ke 14; iii) perluasan penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)¹¹; Sementara itu, perlambatan kinerja LNPRT pada triwulan II 2019 seiring dengan tingginya kinerja komponen ini pada triwulan sebelumnya yang didorong oleh aktivitas kegiatan politik sejalan dengan pelaksanaan Pemilu (Pilpres dan Pileg).

Konsumsi Pemerintah

Pada triwulan I 2019, kinerja konsumsi pemerintah menunjukkan peningkatan dibanding triwulan sebelumnya. Konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 20,84% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar -7,57% (yoy). Akselerasi ini didorong oleh peningkatan persentase realisasi belanja pemerintah (APBD dan APBN) seiring dengan percepatan tahapan realisasi belanja.

Peningkatan kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan laporan terutama didorong oleh meningkatnya realisasi belanja pemerintah tingkat kementerian/lembaga, sehingga berdampak pada persentase realisasi belanja yang meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya¹². Sementara itu, pertumbuhan realisasi belanja pemerintah tingkat provinsi mengalami perlambatan pada triwulan laporan dibanding triwulan sebelumnya¹³.

Meningkatnya kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan laporan juga disebabkan oleh meningkatnya kinerja realisasi belanja APBD 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali baik secara persentase maupun nominal¹⁴. Hal ini dipengaruhi upaya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah di 9 kabupaten/kota baik untuk belanja operasional, transfer, maupun belanja modal serta telah selesainya penataan OPD kabupaten/kota di tahun 2017.



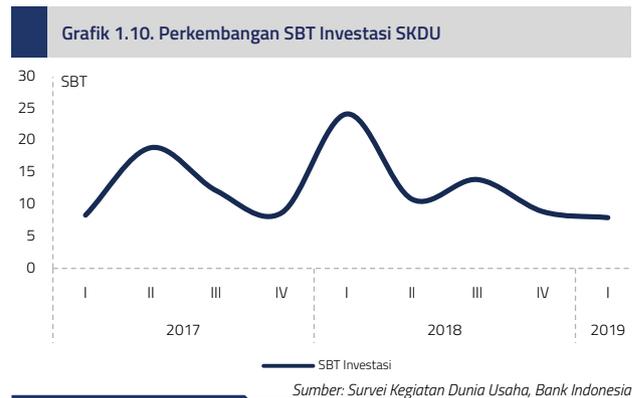
Tracking Kinerja Triwulan II 2019

Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan II 2019 diperkirakan akan meningkat dibanding triwulan I 2019. Akselerasi ini didorong oleh penyelenggaraan Pemilu (Pilpres dan Pileg) pada bulan April 2019. Selain itu, peningkatan persentase realisasi belanja APBN di Provinsi Bali pada April 2019 dibanding periode April 2018 juga berpotensi turut mendorong kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan II 2019¹⁵. Hal ini sejalan dengan upaya percepatan realisasi belanja

antara lain melalui percepatan proses pengadaan. Upaya percepatan realisasi belanja ini juga didorong oleh peningkatan persentase pengerjaan proyek infrastruktur dan upaya akselerasi percepatan realisasi belanja oleh Kementerian dan Lembaga vertikal.

1.2.2. Investasi

Kinerja komponen investasi pada triwulan I 2019 tercatat lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya. Komponen investasi pada triwulan I 2019 tumbuh 8,78% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan IV 2018 yang tumbuh sebesar 11,97% (yoy). Perlambatan kinerja komponen investasi disebabkan tidak ada lagi pengerjaan proyek konstruksi dan infrastruktur yang semasih triwulan sebelumnya yaitu dalam rangka penyelenggaraan *IMF-World Bank Annual Meeting 2018*. Perlambatan ini juga disebabkan oleh masuknya tahun politik dengan adanya pemilihan presiden dan legislatif sehingga mendorong perilaku *wait and see* pelaku usaha.



14. Pertumbuhan realisasi belanja pemerintah tingkat kabupaten/kota pada triwulan I 2019 sebesar 31,31% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 19,27% (yoy)
 15. Persentase realisasi belanja APBN di Provinsi Bali pada April 2019 tercatat sebesar 25,89%, meningkat dibanding periode April 2018 yang sebesar 21,30%.

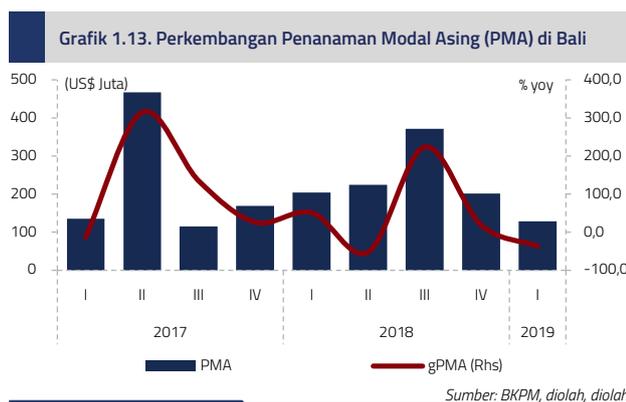
Kinerja investasi yang melambat pada triwulan laporan juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan nilai impor barang modal. Hasil SKDU menunjukkan penurunan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) investasi, terutama disumbangkan oleh perlambatan nilai SBT pada sektor utama di Provinsi Bali yaitu PHR dan Konstruksi¹⁶. Selain itu, nilai impor barang modal pada triwulan I 2019 yang tumbuh lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya¹⁷ juga mengkonfirmasi perlambatan kinerja komponen investasi.

Perlambatan kinerja komponen investasi pada triwulan I 2019 sejalan dengan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan pengadaan semen. Realisasi PMA di Provinsi Bali pada triwulan laporan mengalami kontraksi, menurun signifikan dibanding triwulan sebelumnya yang masih tumbuh positif¹⁸. Sementara itu, pengadaan semen di Provinsi

Bali pada triwulan I 2019 yang tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya¹⁹ juga mengkonfirmasi perlambatan kinerja komponen investasi.

Tracking Kinerja Triwulan II 2019

Kinerja investasi pada triwulan II 2019 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya. Akselerasi ini didorong oleh pengerjaan proyek infrastruktur dan konstruksi antara lain pengembangan kawasan Nusa Dua, Pelabuhan Benua dan Celukan Bawang, *Shortcut* Jalan Singaraja-Mengwitani, *Rapid Exit Taxiway* Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan bendungan Sidane. Selain itu, percepatan realisasi belanja modal untuk APBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga berpotensi mendorong kinerja komponen investasi pada triwulan II 2019, dan berlanjutnya kebijakan suku bunga kebijakan yang akomodatif dan turunnya suku bunga kredit diharapkan juga mampu mendorong kinerja investasi.



1.2.3. Ekspor & Impor

Neraca perdagangan Provinsi Bali (antar daerah dan luar negeri) pada triwulan I 2019 masih mencatatkan surplus, meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Surplus neraca perdagangan gabungan (luar negeri dan antar daerah) mengalami tercatat sebesar Rp 1,5 triliun pada triwulan I 2019, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang surplus Rp 383 miliar. Peningkatan surplus neraca perdagangan gabungan didorong oleh penurunan defisit neraca perdagangan antar daerah serta penurunan impor luar negeri.

Neraca perdagangan luar negeri Provinsi Bali masih mencatatkan surplus, namun melambat dibanding triwulan sebelumnya. Ekspor luar negeri Provinsi Bali pada triwulan I 2019 tumbuh lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya. Sejalan dengan itu, impor luar negeri Provinsi Bali juga tumbuh lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya.

16. Nilai SBT Investasi pada triwulan I 2019 sebesar 7,94, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 8,90
 17. Impor barang modal pada triwulan I 2019 tumbuh 254% (yoy) , lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya (4.822%,yoy)
 18. PMA di Provinsi Bali pada triwulan I 2019 tumbuh -36,91% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 18,99% (yoy)
 19. Pengadaan semen di Provinsi Bali pada triwulan I 2019 tumbuh 17,54% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 32,13% (yoy)

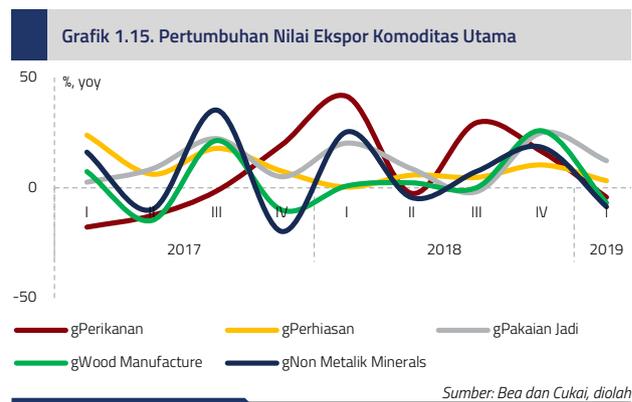
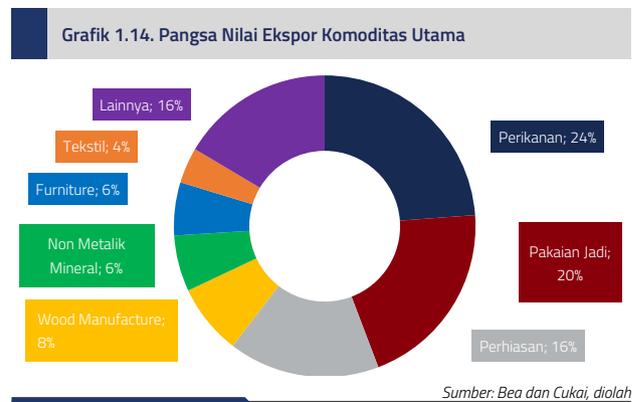
Ekspor-Impor Antar Daerah

Defisit neraca perdagangan antar daerah Provinsi Bali pada triwulan I 2019 menurun dibanding triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, neraca perdagangan antar daerah Provinsi Bali mencatatkan defisit sebesar Rp8,3 triliun, lebih rendah dibanding triwulan I 2018 yang sebesar Rp7,6 triliun. Penurunan nilai defisit ini didorong oleh peningkatan nilai ekspor serta penurunan nilai impor. Ekspor daerah Provinsi Bali antara lain dilakukan dengan daerah di Pulau Jawa seperti Banyuwangi yaitu untuk komoditas bawang merah. Sementara itu, Provinsi Bali melakukan impor beberapa komoditas seperti beras dan cabai merah dari Surabaya dan Banyuwangi.

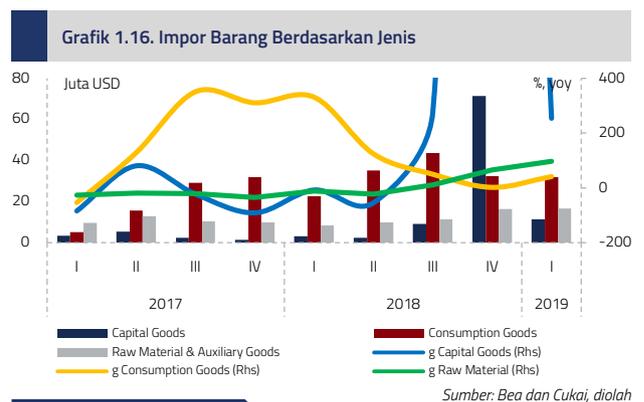
Ekspor-Impor Luar Negeri

Kinerja ekspor luar negeri Provinsi Bali tumbuh melambat pada triwulan laporan, demikian pula impor luar negeri yang juga melambat dibanding triwulan sebelumnya. Ekspor luar negeri Provinsi Bali tercatat tumbuh 2,19% (yoy) pada triwulan I 2019, lebih rendah dibanding triwulan IV 2018 yang tumbuh 15,15% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh perlambatan kinerja ekspor barang²⁰ dan kontraksi ekspor jasa pada triwulan laporan²¹. Demikian pula, impor luar negeri Provinsi Bali tumbuh 9,78% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 49,09% (yoy).

Perlambatan ekspor barang luar negeri Provinsi Bali terjadi pada beberapa jenis komoditas utama yaitu perikanan, perhiasan, pakaian jadi, dan *wood manufacture*. Ekspor perikanan sebagai pangsa terbesar (24%) kontraksi pada triwulan laporan²². Sejalan dengan itu, ekspor pakaian jadi dan perhiasan dengan tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya. Perlambatan kinerja ekspor yang lebih dalam tertahan oleh akselerasi kinerja ekspor furnitur yang tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya.



Penurunan tekanan impor barang luar negeri disebabkan oleh melambatnya impor barang modal pada triwulan I 2019²³. Kinerja impor barang modal yang melambat terjadi pada semua jenis barang modal kecuali alat angkutan. Sementara itu, kinerja impor barang modal pada jenis mobil penumpang dan jenis alat angkutan industri mengalami akselerasi pada triwulan laporan.



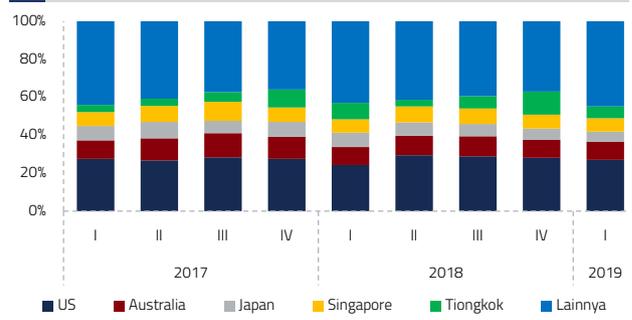
20. Ekspor barang luar negeri Provinsi Bali tercatat tumbuh 4,62% (yoy) pada triwulan I-2019, lebih rendah dibanding triwulan IV-2018 yang tumbuh 22,16% (yoy).
 21. Ekspor jasa luar negeri Provinsi Bali pada triwulan I-2019 tumbuh -21,16% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan IV-2018 yang tumbuh 48,15% (yoy).
 22. Ekspor perikanan tumbuh -4,27% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 16,47% (yoy).
 23. Impor barang modal Provinsi Bali tumbuh 254% (yoy) pada triwulan I 2019, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya (4.844%;yoy)

Grafik 1.17. Impor Barang Modal Berdasarkan Jenis



Sumber: Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.18. Pangsa Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Utama

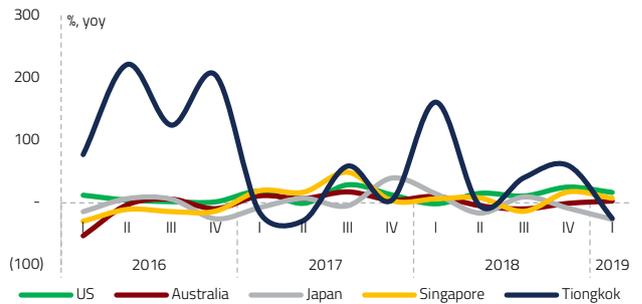


Sumber: Bea dan Cukai, diolah

Melambatnya kinerja ekspor barang luar negeri Provinsi Bali disebabkan oleh menurunnya ekspor barang Provinsi Bali ke beberapa negara pasar utama antara lain US, Jepang, Singapura, dan Tiongkok²⁴. Ekspor barang Provinsi Bali ke AS, Jepang, Singapura, dan Tiongkok menunjukkan pertumbuhan yang melambat dibanding triwulan sebelumnya²⁵. Sementara itu, perlambatan kinerja ekspor luar negeri yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan ekspor barang Provinsi Bali ke Australia. Negara-negara pasar utama tersebut menjadi pasar untuk berbagai komoditas barang Bali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Amerika Serikat:
 - Komoditas perikanan berupa ikan tuna, ikan lainnya dan kepiting/kerang-kerangan
 - Komoditas industri berupa olahan kayu, tekstil, barang dari logam tidak mulia, makanan olahan (coklat, olahan buah dan sayur), meubel, bahan dari plastik atau damar
2. Australia:
 - Komoditas perikanan berupa ikan dan mutiara
 - Komoditas hasil industri berupa tekstil, kayu olahan, barang dari logam tidak mulia dan olahan ikan, meubel, alas kaki
3. Tiongkok :
 - Komoditas perikanan berupa kepiting, kerang dan ikan kerapu
 - Komoditas hasil industri berupa kayu olahan, meubel, barang dari logam dan industri lainnya

Grafik 1.19. Pertumbuhan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Utama



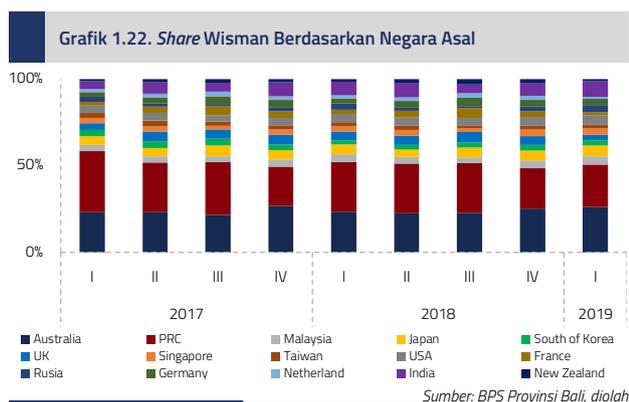
Sumber: Bea dan Cukai, diolah

Sejalan dengan kinerja ekspor barang, kinerja ekspor jasa Provinsi Bali pada triwulan I 2019 tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya seiring dengan jumlah kedatangan wisman yang melambat²⁶. Berdasarkan hasil liason, perlambatan kinerja ekspor jasa juga dipengaruhi oleh masuknya periode *low season* pariwisata di Provinsi Bali serta meningkatnya kompetisi berbagai destinasi wisata dunia. Selain itu, tingginya pertumbuhan ekspor jasa pada triwulan IV 2018 seiring dengan penyelenggaraan *IMF-World Bank Annual Meeting 2018*.

Melambatnya kinerja ekspor jasa Provinsi Bali terkonfirmasi dari melambatnya pertumbuhan kedatangan wisman dari negara-negara pasar utama yang terkonfirmasi dari melambatnya kedatangan penumpang di Bandara Ngurah Rai. Kedatangan wisman Tiongkok sebagai pasar utama

24. Pangsar pasar ekspor Provinsi Bali berdasarkan negara tujuan pada triwulan I-2019 yaitu AS (26,97%), Australia (9,46%), Tiongkok (6,17%), Jepang (5,35%), Singapura (7,26%).
 25. Ekspor barang Provinsi Bali ke AS, Jepang, Singapura, dan Tiongkok pada triwulan I 2019 masing-masing tercatat tumbuh 16,69% (yoy); -26,305% (yoy); 7,44% (yoy); -24,93% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh sebesar 24,21% (yoy); -8,56% (yoy); 17,56% (yoy); -24,93% (yoy)
 26. Ekspor jasa luar negeri Provinsi Bali pada triwulan I-2019 tumbuh 3,09% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan IV-2018 sebesar 24,69% (yoy)

(pangsa 18,8%) melambat pada triwulan laporan²⁷. Sementara itu, kedatangan wisman Australia tercatat kontraksi pada triwulan laporan²⁸. Kedatangan wisman dari negara pasar utama lainnya seperti India, Jepang, dan Inggris juga melambat di triwulan laporan. Kedatangan wisman yang menurun terkonfirmasi dari data kedatangan penumpang pada pintu kedatangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada triwulan I 2019²⁹.



Tracking Kinerja Triwulan II 2019

Kinerja ekspor luar negeri Provinsi Bali pada triwulan II 2019 diperkirakan akan mengalami akselerasi, didorong oleh peningkatan kinerja ekspor jasa dan barang. Meningkatnya kinerja ekspor jasa, didorong oleh membaiknya kinerja pariwisata seiring dengan mulai masuknya periode *high season* pariwisata. Peningkatan ekspor jasa pada triwulan II 2018 juga didorong oleh pembukaan rute penerbangan langsung baru ke Provinsi Bali dari beberapa negara³⁰ sehingga mendorong kedatangan wisman ke Bali. Sementara itu, perbaikan kinerja ekonomi negara mitra dagang utama Provinsi Bali diharapkan mampu mendorong ekspor barang Bali. Salah satu negara mitra dagang utama Provinsi Bali yang diproyeksi akan mengalami akselerasi pertumbuhan ekonomi adalah Jepang³¹. Jepang merupakan pasar ekspor beberapa komoditas utama Provinsi Bali antara lain komoditas perikanan, *travel goods*, serta produk olahan kayu.

1.3. SISI PENAWARAN

Dari sisi penawaran, perlambatan kinerja ekonomi Provinsi Bali pada triwulan I 2019 disebabkan oleh perlambatan kinerja beberapa lapangan usaha utama yaitu akmamin; pertanian; perdagangan besar & eceran; serta konstruksi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab perlambatan kinerja lapangan usaha utama di Provinsi Bali antara lain periode *low season* pariwisata, belum maksimalnya progres proyek konstruksi diawal tahun, belum masuknya masa panen komoditas tabama, serta minimnya HBKN pada triwulan laporan dibanding triwulan sebelumnya.

Perkembangan struktur ekonomi Provinsi Bali pada triwulan I-2018 masih didominasi 5 komponen lapangan usaha utama yaitu: (1) penyediaan akomodasi makan dan minum (pangsa 23%), (2) pertanian, kehutanan, dan perikanan (pangsa 13%), (3) konstruksi (pangsa

27. Kedatangan wisman Tiongkok pada triwulan laporan tumbuh 8,31% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 31,615 (yoy)

28. Kedatangan wisman Australia tercatat tumbuh -0,43% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 19,43% (yoy)

29. Jumlah kedatangan penumpang pada pintu kedatangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai tumbuh 2,86% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya (30,67%;yoy)

30. Pada bulan April 2019, Malindo Air membuka rute penerbangan langsung baru Denpasar – Adelaide dengan frekuensi penerbangan 4 kali per minggu.

31. Menurut proyeksi IMF bulan April 2019, Jepang diperkirakan tumbuh 1,0% (yoy) pada tahun 2019, lebih tinggi dibanding tahun 2018 yang tumbuh 0,8% (yoy)

Tabel 1.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Sisi Penawaran (% , yoy)

Lapangan Usaha	2017				2017	2018				2019
	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV	I
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,31	4,88	4,05	-1,37	2,88	4,71	2,95	3,72	6,92	1,68
Pertambangan dan Penggalian	2,54	0,39	1,91	-10,49	-1,44	-6,26	-3,12	-4,00	3,44	-4,10
Industri Pengolahan	3,58	-0,05	0,65	-0,66	0,86	1,32	5,66	6,72	9,16	9,74
Pengadaan Listrik, Gas	0,40	-0,16	8,40	13,50	5,48	4,90	6,52	0,50	-3,51	1,50
Pengadaan Air	1,82	4,86	3,05	1,16	2,72	-1,88	2,92	2,14	4,87	6,04
Konstruksi	6,41	7,29	8,02	8,94	7,69	9,04	9,48	11,77	9,40	8,97
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,38	8,12	9,64	5,28	7,84	5,20	6,52	7,82	12,34	7,56
Transportasi dan Pergudangan	5,24	6,10	6,00	2,65	4,99	6,72	6,10	2,96	8,79	6,40
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,47	9,73	11,18	6,65	9,25	6,64	6,41	4,41	8,26	4,99
Informasi dan Komunikasi	8,19	8,36	7,58	8,42	8,14	9,21	8,80	7,96	6,12	5,99
Jasa Keuangan	5,06	6,34	0,70	-2,01	2,43	1,06	-0,31	3,29	3,84	6,89
Real Estate	2,56	3,42	4,03	5,06	3,78	2,38	3,91	5,73	6,44	7,65
Jasa Perusahaan	8,56	7,66	5,90	5,65	6,91	6,94	8,40	9,00	6,83	4,10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,10	-5,06	-1,34	0,33	-1,59	0,95	6,33	8,52	3,23	9,74
Jasa Pendidikan	7,30	8,11	5,24	7,44	7,00	9,25	9,30	8,84	4,31	3,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,00	7,92	7,76	9,06	8,44	9,29	9,44	9,16	6,61	6,24
Jasa lainnya	9,57	8,26	7,52	6,68	7,98	7,53	9,29	9,59	8,97	7,07
PDRB	6,24	5,97	6,23	4,01	5,59	5,62	6,11	6,24	7,59	5,94

Sumber : BPS Provinsi Bali, diolah

10%), (4) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (pangsa 8%), (5) industri pengolahan (pangsa 6%). Kondisi ini cenderung tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan kondisi triwulan sebelumnya.

1.3.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan & Minum

Pada triwulan I 2019, lapangan usaha akmamin mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Lapangan usaha akmamin pada pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 4,99% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan IV 2018 yang tumbuh 8,26% (yoy). Penurunan ini disebabkan oleh periode *low season* pariwisata pada triwulan I 2019. Selain itu, kinerja wisatawan domestik tertahan akibat naiknya harga tiket pesawat.

Perlambatan kinerja lapangan usaha akmamin terkonfirmasi dari penurunan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Kunjungan wisatawan mancanegara pada triwulan I 2019 ke Provinsi Bali tumbuh lebih rendah dibanding triwulan IV 2018. Penurunan kinerja ini berasal dari beberapa negara pasar utama seperti Tiongkok, Australia, India, Jepang, dan Inggris. Kunjungan wisman Australia, India, Jepang dan Inggris tercatat kontraksi pada triwulan laporan sedangkan kunjungan wisman Tiongkok tumbuh melambat³².

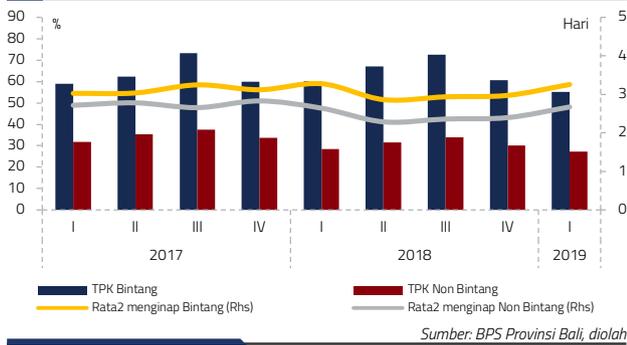
Kedatangan penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa dan Celukan Bawang juga menunjukkan adanya perlambatan. Jumlah kedatangan penumpang pada pintu kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai tumbuh melambat pada triwulan laporan. Sejalan dengan itu, kedatangan penumpang di Pelabuhan Benoa dan Celukan Bawang masih kontraksi pada triwulan laporan.

Penurunan tingkat penghunian kamar (TPK) pada hotel bintang dan non bintang juga mengkonfirmasi

32. Kunjungan wisman Australia, India, Jepang, dan UK pada triwulan I 2019 masing-masing tumbuh -0,43% (yoy); -0,35% (yoy); -3,44% (yoy); -0,88% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh 19,44% (yoy); 20,22% (yoy); 33,06% (yoy); 17,65% (yoy). Sementara itu, kunjungan wisman Tiongkok tumbuh 8,32% (yoy), melambat dibanding triwulan sebelumnya (31,61%;yoy)

perlambatan kinerja lapangan usaha akomodasi makan dan minum. TPK pada bintang dan non bintang menurun pada triwulan laporan³³. Namun demikian, rata-rata lama menginap masih menunjukkan peningkatan pada triwulan laporan.

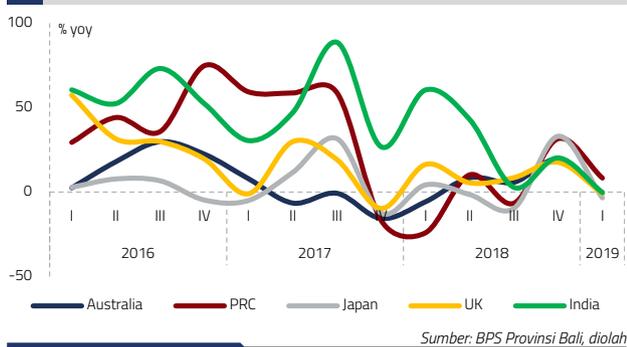
Grafik 1. 23. Rata-Rata Lama Menginap Hotel Bintang dan Non Bintang



Grafik 1. 24. Kunjungan Wisman ke Provinsi Bali Triwulanan



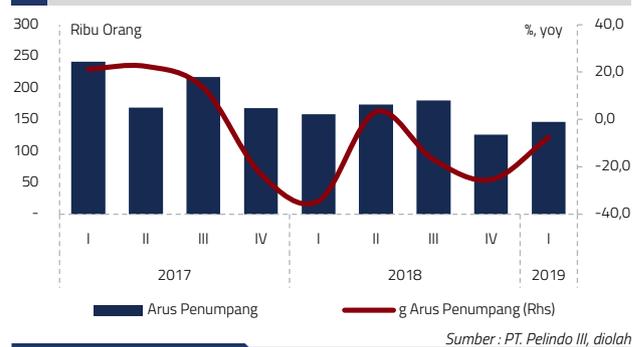
Grafik 1. 25. Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan Negara



Grafik 1. 26. Perkembangan Kedatangan Penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai



Grafik 1. 27. Perkembangan Arus Penumpang di Pelabuhan



Namun demikian, sejumlah upaya terus dilakukan oleh pemangku kepentingan (pemerintah dan pelaku usaha pariwisata) untuk terus mendorong kinerja pariwisata Provinsi Bali. Beberapa upaya yang dilakukan untuk kinerja lapangan usaha ini pada triwulan I 2019 berdasarkan hasil survei dan liaison meliputi:

- Pengembangan pasar alternatif, termasuk dengan menjalin kerja sama dengan *travel agent* lain dan pengembangan produk melalui program Provinsi Bali *and beyond*.
- Pengembangan produk dan strategi pemasaran serta upaya perbaikan pelayanan yang terus dilakukan;
- Upaya promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik konsumen domestik dan asing, selain itu upaya pelaku usaha untuk selalu mengikuti *event* promosi pariwisata di luar negeri

33. TPK hotel bintang dan non bintang pada triwulan I 2019 masing-masing sebesar 55,06% dan 27,06%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 60,53% dan 30,06%.

di antaranya melalui kegiatan *Travel Market* dan *Trade Fair* (London), *Internationale Tourismus Borse* (ITB) Berlin dan Asia Travel Fair di Singapura;

- Strategi untuk terus *maintain* kerja sama dengan *business partner* melalui program *membership*;
- Promosi dan mengundang *travel agent* luar negeri serta para Duta Besar Negara sahabat untuk berkunjung dan melihat kondisi Provinsi Bali terkini.

Tracking Kinerja Triwulan II 2019

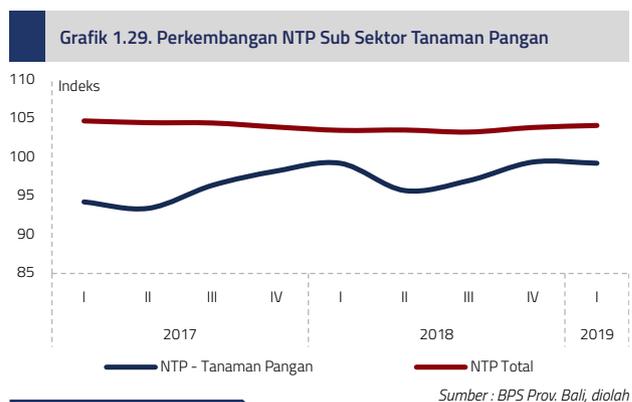
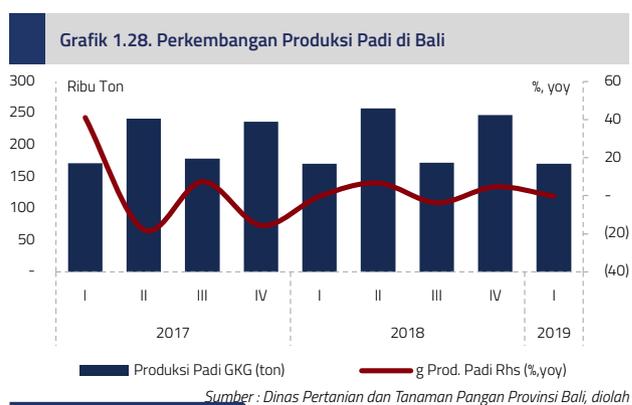
Temasuki periode triwulan II 2019, kinerja lapangan usaha penyediaan akmamin diperkirakan akan mengalami akselerasi. Kondisi ini didorong oleh masuknya periode pariwisata pada triwulan laporan, meningkatnya frekuensi penerbangan sejalan dengan adanya penambahan *direct flight* baru sepanjang triwulan II 2019³⁴, membaiknya kinerja ekonomi negara mitra dagang utama Provinsi Bali pada tahun 2018³⁵, masuknya periode *high season* pariwisata pada triwulan laporan menjadi faktor pendorong akselerasi akmamin. Sementara itu, jumlah wisatawan mancanegara juga diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan berbagai upaya inovasi dalam kegiatan promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata. Selain itu adanya penandatanganan kerja sama dalam bidang pariwisata dengan berbagai negara yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Bali, juga berpotensi mendorong akselerasi kinerja lapangan usaha ini.

1.3.2. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami perlambatan pada triwulan laporan. Lapangan usaha pertanian tercatat tumbuh sebesar 1,68% (yoy) pada triwulan I 2019, melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar

6,92% (yoy). Perlambatan kinerja lapangan usaha ini disebabkan oleh penurunan produksi komoditas tabama seiring dengan belum masuknya masa panen padi.

Perlambatan kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terkonfirmasi dari kinerja produksi padi dan Nilai Tukar Petani. Pada triwulan I 2019, produksi padi mengalami kontraksi seiring dengan belum masuknya periode panen pada triwulan laporan³⁶. Selain itu, perlambatan kinerja lapangan usaha pertanian juga terkonfirmasi dari penurunan NTP subsektor tanaman pangan pada triwulan laporan³⁷.



34. Malindo Air membuka rute penerbangan langsung baru Denpasar-Adelaide pada April 2019 dengan frekuensi 4 kali per minggu
 35. Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) IMF pada periode April 2019, kinerja ekonomi negara mitra dagang yang diperkirakan membaik adalah Jepang. Ekspor Provinsi Bali ke Jepang meliputi komoditas perikanan, *travel goods*, dan *wood manufacture*
 36. Produksi padi pada triwulan laporan tumbuh -0,20% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,69% (yoy)
 37. Indeks NTP sub sektor tanaman pangan pada triwulan laporan tercatat sebesar 99,25, turun dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 99,40

Meskipun demikian, Pemerintah Daerah terus mendorong kinerja sektor pertanian lewat berbagai program baik on farm maupun off farm ditengah berbagai tantangan. Sejumlah tantangan yang dihadapi sektor pertanian Provinsi Bali antara lain (i) tingginya alih fungsi lahan dan alih komoditas, (ii) skala usaha tani yang masih kecil dan sebagai usaha sampingan, (iii) ketersediaan air irigasi yang menyusut bersaing dengan air baku, dan (iv) ketidakpastian cuaca. Di tengah tantangan tersebut, pemerintah daerah Provinsi Bali melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali menjalankan sejumlah program *on farm* dan *off farm* untuk mendorong kinerja sektor pertanian antara lain pengembangan padi varietas khusus, pemberian insentif benih, pupuk & alat mesin pertanian, pendampingan lapangan, akses pasar, serta skema pembiayaan (PMUK)³⁸. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 99. Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Provinsi Bali yang mewajibkan pihak hotel, restoran, swalayan, dan *catering* untuk memanfaatkan produk lokal Bali.

Tracking Kinerja Triwulan II 2019

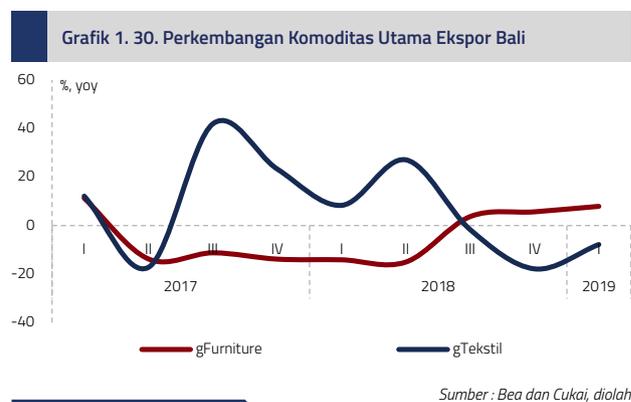
Kinerja lapangan usaha pertanian pada triwulan II 2019 diperkirakan meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja lapangan usaha ini, didorong oleh masuknya puncak panen untuk komoditas padi pada triwulan II 2019. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali memprakirakan produksi padi pada triwulan II mencapai 285.841 ton GKG atau meningkat sebesar 10,95% (yoy). Peingkatan ini juga didukung oleh faktor cuaca yang kondusif, berdasarkan informasi BMKG, kondisi hujan pada bulan April-Mei pada saat puncak panen padi masih normal dengan tingkat curah hujan 21-300 mm. Peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian pada triwulan II 2019 juga sejalan dengan upaya

peningkatan produksi ternak, termasuk berlanjutnya program sapi induk wajib bunting (Siwab) dan adanya perayaan hari keagamaan (Saraswati, Ramadhan, dan Idul Fitri), mendorong meningkatnya permintaan produk hasil peternakan, sehingga berpotensi mendorong meningkatnya suplai ternak. Sementara itu, kinerja lapangan usaha ini pada triwulan II 2019 berpotensi tertahan oleh kinerja sektor perikanan yang dipengaruhi oleh adanya gelombang tinggi dan angin kencang yang terjadi pada April dan Mei 2019.

1.3.3. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan laporan mengalami akselerasi dibanding triwulan sebelumnya. Industri pengolahan tercatat tumbuh sebesar 9,74% (yoy) pada triwulan I 2019, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,16% (yoy). Peningkatan kinerja lapangan usaha ini utamanya didorong oleh membaiknya kinerja ekonomi negara mitra dagang utama Provinsi Bali serta meningkatnya upaya promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha industri pengolahan yang berorientasi ekspor.

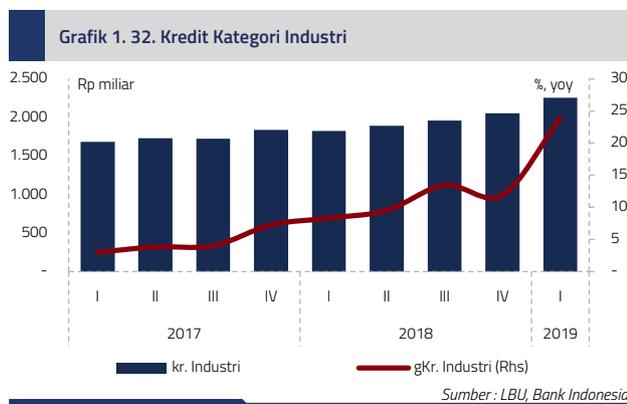
Peningkatan kinerja lapangan usaha industri pengolahan sejalan dengan membaiknya kinerja ekspor beberapa jenis barang. Sebagian besar produk ekspor barang luar negeri Provinsi Bali merupakan hasil produksi industri pengolahan. Membaiknya kinerja ekspor barang furnitur dan tekstil mengonfirmasi peningkatan kinerja lapangan usaha industri pengolahan³⁹.



38. Lewat Program Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), kelompok tani dapat mengakses dana pinjaman dengan bunga sangat murah. Dana tersebut berasal dari APBD Provinsi Bali.

39. Ekspor furniture dan tekstil masing-masing tumbuh 7,93% (yoy) dan -7,80% (yoy) pada triwulan I 2019, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh 5,67% (yoy) dan -17,85% (yoy)

Meningkatnya kinerja industri pengolahan pada triwulan laporan sejalan produksi Industri Manufaktur Besar Sedang (IBS) dan kredit industri. Pertumbuhan produksi IBS mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya⁴⁰. Disisi lain, pertumbuhan produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK) mengalami perlambatan pada triwulan I 2019. Peningkatan kinerja industri pengolahan yang lebih tinggi juga sejalan dengan akselerasi kredit industri pada triwulan laporan⁴¹.



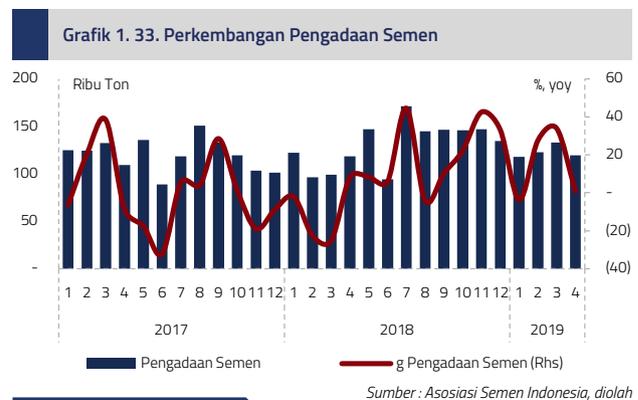
Tracking Kinerja Triwulan II-2019

Kinerja industri pengolahan pada triwulan II 2019 diperkirakan akan menunjukkan akselerasi dibanding triwulan sebelumnya. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menjadi

salah satu faktor pendorong permintaan terhadap produk industri pengolahan, khususnya pasar domestik, sehingga mendorong kinerja industri pengolahan. Selain itu, membaiknya kinerja ekspor barang luar negeri Provinsi Bali juga akan turut mendorong kinerja lapangan usaha industri pengolahan. Membaiknya kinerja ekspor barang luar negeri pada triwulan II 2019 sejalan meningkatnya proyeksi pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama Provinsi Bali seperti Jepang.

1.3.4. Lapangan Usaha Konstruksi

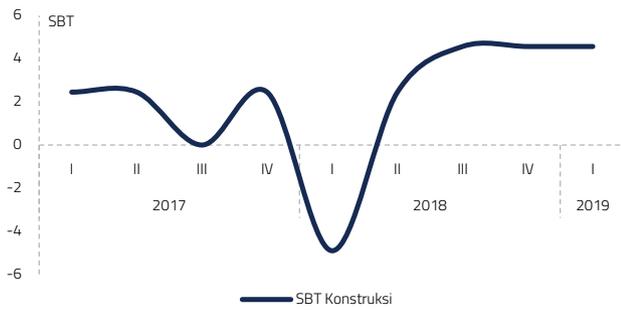
Kinerja lapangan usaha konstruksi pada triwulan laporan menunjukkan perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Lapangan usaha konstruksi pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 8,97% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,40% (yoy). Perlambatan kinerja lapangan usaha ini seiring dengan pengerjaan proyek konstruksi dan infrastruktur yang tidak semasih triwulan sebelumnya yang didorong oleh penyelenggaraan *IMF – World Bank Annual Meeting 2018*. Selain itu, melambatnya kinerja lapangan usaha konstruksi pada triwulan laporan juga disebabkan oleh pengerjaan beberapa proyek konstruksi (pemerintah) masih dalam tahap pengadaan.



40. Pertumbuhan produksi IBS pada triwulan I 2019 tercatat sebesar 24,12% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 9,86% (yoy).

41. Kredit industri tumbuh 23,90% (yoy) pada triwulan I 2019, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 11,92% (yoy)

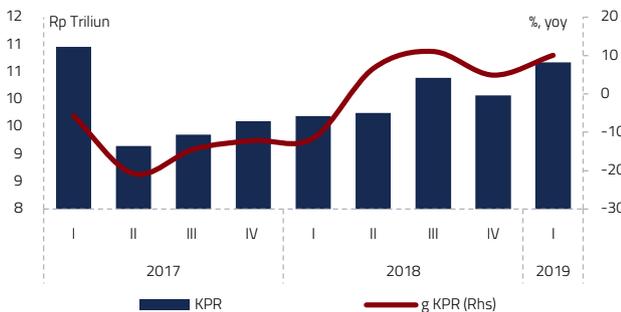
Grafik 1.34. Perkembangan SBT Konstruksi SKDU



Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia

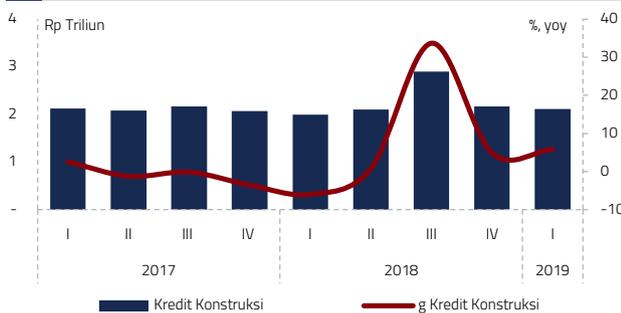
Kinerja lapangan usaha konstruksi yang melambat pada triwulan I 2019 terkonfirmasi oleh Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan sejalan dengan pengadaan semen. Nilai SBT konstruksi pada SKDU di triwulan I 2019 tidak meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Sementara itu, perlambatan kinerja lapangan usaha konstruksi juga sejalan dengan pengadaan semen di Provinsi Bali yang tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya.

Grafik 1.35. Perkembangan Kredit KPR



Sumber : LBU, Bank Indonesia

Grafik 1.36. Perkembangan Kredit Konstruksi



Sumber : LBU, Bank Indonesia

Meskipun demikian, ditengah perlambatan kinerja lapangan usaha konstruksi, kredit konstruksi dan KPR masih tumbuh kuat. Pada triwulan laporan, kredit konstruksi dan KPR tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya⁴². Peningkatan kinerja KPR ini seiring dengan relaksasi ketentuan LTV. Kondisi ini mendorong peningkatan pembangunan proyek untuk rumah tinggal.

Tracking Kinerja Triwulan II 2019

Kinerja lapangan usaha konstruksi pada triwulan II 2019 diperkirakan akan terus menunjukkan tendensi peningkatan. Hal ini didorong oleh berlanjutnya pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah antara lain pengembangan pelabuhan Benoa dan Celukan Bawang, *Shortcut* jalan Singaraja-Mengwitani, *Rapid Exit Taxiway* Bandara I Gusti Ngurah Rai, serta Bendungan Sidan. Selain itu, juga didorong oleh proyek konstruksi swasta antara lain pengembangan kawasan Nusa Dua berupa pembangunan beberapa hotel dan kawasan perkantoran.

Selain itu, peningkatan kinerja lapangan usaha konstruksi juga akan didorong oleh percepatan realisasi belanja modal dan juga peningkatan kapasitas bisnis pelaku usaha. Peningkatan belanja modal baik yang menggunakan APBN maupun APBD sejalan dengan upaya pemerintah yang terus melakukan optimalisasi realisasi anggaran antara lain dengan efisiensi proses pengadaan dan percepatan pengerjaan proyek-proyek infrastruktur. Peningkatan kinerja lapangan usaha konstruksi juga didorong oleh peningkatan kapasitas bisnis pelaku usaha seiring dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan optimisme pelaku usaha dengan melakukan deregulasi ijin usaha.

1.3.5. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tercatat tumbuh

42. Kredit konstruksi dan KPR pada triwulan I 2019 masing-masing tumbuh 5,83% (yoy) dan 10,08% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,87% (yoy) dan 4,91% (yoy)

lebih rendah pada triwulan laporan dibanding triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2019, lapangan usaha ini tumbuh 7,56% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,34% (yoy). Perlambatan ini disebabkan oleh periode *low season* pariwisata serta kinerja sektor pertanian yang masih tertahan.

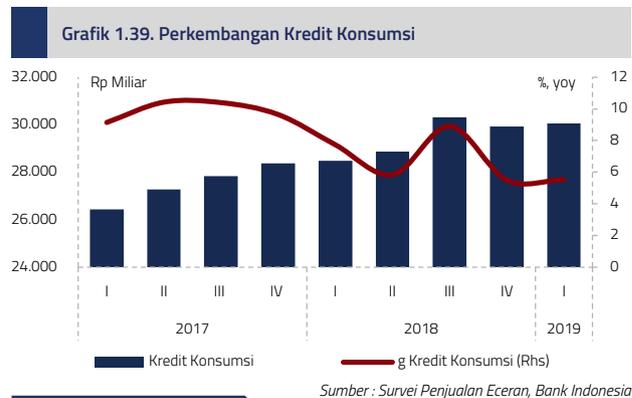
Perlambatan kinerja lapangan usaha ini terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) beberapa komoditas. Berdasarkan hasil SPE, pertumbuhan penjualan perlengkapan rumah tangga dan pakaian jadi & tekstil menunjukkan perlambatan pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya⁴³.



Meskipun kinerja lapangan usaha perdagangan melambat, konsumen masih optimis terhadap kondisi ekonomi. Hal ini tergambar dari hasil SK yang menunjukkan bahwa baik indeks keyakinan konsumen (IKK), indeks Kondisi Ekonomi (IKE), dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) meningkat dibanding triwulan sebelumnya⁴⁴. Optimisme ini menahan penurunan kinerja lapangan usaha perdagangan yang lebih dalam.



Selain itu, perlambatan kinerja lapangan usaha ini terjadi ditengah akselerasi pertumbuhan kredit konsumsi pada triwulan laporan. Kredit konsumsi pada triwulan laporan tumbuh lebih kuat dibanding triwulan sebelumnya⁴⁵. Kredit konsumsi yang tumbuh akselerasi pada triwulan laporan sejalan dengan penurunan tingkat suku bunga⁴⁶.



43. Penjualan perlengkapan rumah tang tercatat tumbuh 49,97% (yoy) pada triwulan I-2019, lebih rendah dibanding triwulan IV-201 yang sebesar 109,72% (yoy). Sementara itu, penjualan pakaian jadi dan tekstil masih kontraksi pada triwulan I 2019 sebagaimana triwulan sebelumnya sebesar -28% (yoy).
 44. IKK, IKE, dan IEK pada triwulan I 2019 masing-masing sebesar 125,21; 108,96; 141,46, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 112,0; 103,2; 120,8.
 45. Kredit konsumsi tumbuh sebesar 5,53% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,50% (yoy)
 46. Suku bunga kredit konsumsi tercatat sebesar 11,62 pada triwulan I-2019, sedikit lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang di level 11,69.

Tracking Kinerja Triwulan II 2019

Kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran pada triwulan II 2019 diperkirakan akan meningkat. Hal ini terutama didorong oleh peningkatan kinerja sektor pariwisata seiring dengan masuknya periode *high season* pariwisata. Selain itu, adanya pembukaan rute penerbangan langsung baru pada triwulan II 2019 akan meningkatkan kedatangan wisman dan berdampak pada peningkatan kinerja

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Adanya perayaan keagamaan yaitu Ramadhan dan Idul Fitri, Waisak, serta Saraswati juga berpotensi mendorong kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran pada triwulan II 2019. Pemberian insentif fiskal (Gaji ke 14 ASN) dan pembayaran THR juga akan mendorong kinerja lapangan usaha ini pada triwulan II 2019.

BOKS 1 TANTANGAN EKSPOR IKAN TUNA BALI

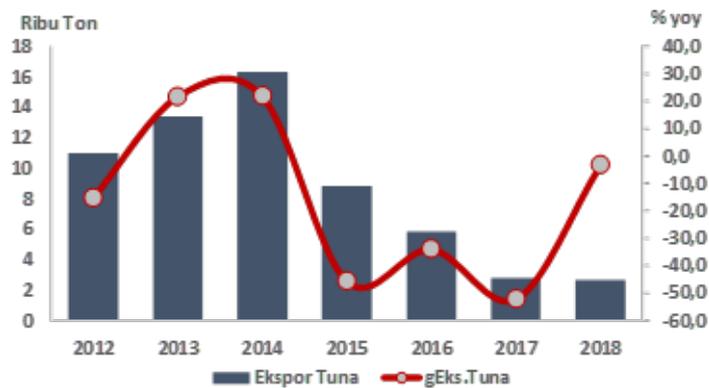
Ikan Tuna merupakan salah satu jenis ekspor unggulan Bali. Berdasarkan nilainya, ekspor tuna (tuna segar dan beku) memiliki pangsa 11% dari total ekspor perikanan Bali. Pada tahun 2018, Provinsi Bali mengekspor 2,6 ribu ton tuna. Berdasarkan negara tujuan, 65% ekspor ikan tuna Provinsi Bali ditujukan ke Jepang. Sementara itu, 27% ekspor tuna Provinsi Bali diekspor ke AS. Untuk pasar Jepang, sebagian ekspor tuna Provinsi Bali dalam bentuk tuna segar, sedangkan untuk pasar AS, sebagian besar ekspor tuna dalam bentuk beku.

Tantangan Ekspor Tuna Bali

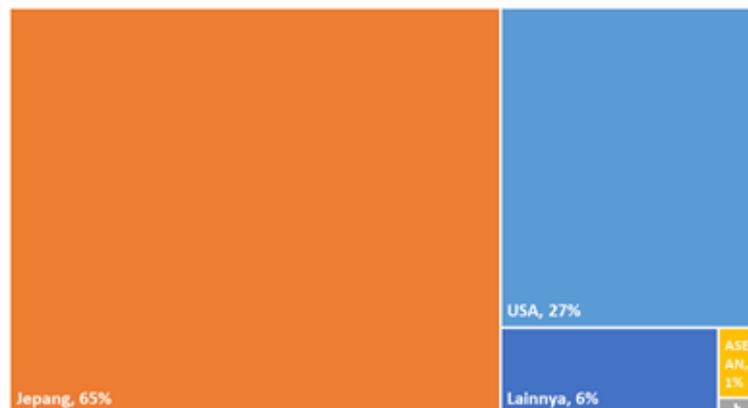
Ekspor tuna Provinsi Bali merosot tajam sejak tahun 2015. Pada tahun 2014, ekspor tuna dari Provinsi Bali mencapai 16,28 ribu ton. Pada tahun 2018, jumlah tersebut menurun signifikan menjadi 2,67 ribu ton. Sejumlah faktor menjadi penyebab menurunnya ekspor tuna Provinsi Bali : (i) Kapasitas Kapal; (ii) Hambatan tarif dan non tarif; (iii) Hambatan Perizinan Usaha.

Untuk penangkapan tuna, diperlukan kapal dengan ukuran besar dengan ukuran diatas 30 *GrossTone* (GT). Menurut data Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin), pada tahun 2017, hanya terdapat 946 unit kapal dengan

Grafik Perkembangan Ekspor Tuna Bali



Grafik Ekspor Tuna Provinsi Bali Berdasarkan Negara Tujuan



bobot diatas 30 GT. Selain itu, pada Tahun 2014, Menteri Kelautan dan Perikanan membuat kebijakan pengehentian sementara (moratorium) perizinan kapal ikan tangkap eks asing dengan ukuran di atas 30GT sebagaimana termuat dalam Permen KP No. 56/Permen-KP/2014 tentang Pengehentian Sementara Perizinan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI. Berdasarkan data dari Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) terdapat kapal eks-asing sebanyak 122 kapal dari 45 perusahaan di Benoa, Denpasar. Dengan adanya moratorium tersebut, kapal tersebut tidak lagi melaut. Dampak dari kebijakan ini terlihat dari volume ekspor tuna Provinsi Bali yang menurun signifikan sejak tahun 2015-2017.

Tantangan lain adalah adanya hambatan tarif dan non tarif. Untuk pasar AS, hambatan lebih terkait dengan non tarif. Pasar AS biasanya lebih menyukai ikan kaleng. Untuk ekspor ikan tuna kaleng, negara pengekspor harus memenuhi standar dari *Food and Drug Administration* (FDA). Hal ini berpotensi menjadi hambatan non tarif dengan ketatnya standar dalam penentuan produk makan yang diekspor ke AS. Untuk pasar Jepang, hambatan lebih ke tarif. Jepang mengenakan bea masuk 7% untuk ekspor tuna Indonesia. Sementara itu, Jepang mengenakan bea masuk 0% untuk tuna dari Vietnam dan Thailand. Terkait bea masuk tuna oleh Jepang, Menteri KKP

sudah beberapa kali meminta Pemerintah Jepang untuk menghapuskan tarif bea masuk untuk tuna dari Indonesia.

Selain itu, ada tantangan terkait perizinan usaha. Kapal dengan ukuran diatas 30 GT harus mendapatkan surat izin penangkapan ikan (SIPI) dari Kementerian KKP untuk bisa beroperasi. Pengusaha perikanan mengeluhkan sulitnya mendapat SIPI dari Kementerian KKP. Sementara itu, menurut Kementerian KKP, tidak keluarnya SIPI terkait dengan informasi laporan kegiatan usaha/laporan kegiatan penangkapan (LKU/LKP) yang tidak benar.

Ke depan, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah perlu terus mendorong penyelesaian berbagai tantangan ini. Pemerintah perlu mendorong dan memfasilitasi nelayan skala kecil (kapal ukuran di bawah 30 GT) agar bisa menjalankan praktek penangkapan ikan yang berkelanjutan sesuai persyaratan pasar internasional sehingga hasil tangkapannya bisa memasuki pasar ekspor. Selain itu, Pemerintah pusat juga perlu terus melakukan negosiasi dengan negara-negara tujuan ekspor untuk menghapus hambatan tarif maupun nontarif. Penguatan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha juga diperlukan agar tidak muncul permasalahan perijinan.

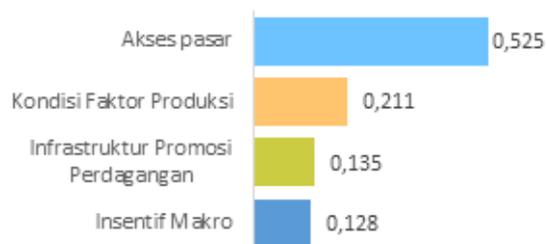
BOKS 2 HAMBATAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOMODITAS KAKAO DI BALI

Bali merupakan salah satu daerah penghasil kakao di Indonesia. Kakao Provinsi Bali memiliki karakter yang unik dan kualitas yang terbukti memenuhi standar internasional. Seperti halnya kopi, kakao juga memiliki citarasa yang berbeda-beda dipengaruhi oleh keadaan tanah serta tanaman yang ada di sekitarnya. Kakao yang dihasilkan wilayah utara Provinsi Bali (Kabupaten Jembrana dan Tabanan) memiliki citarasa buah-buahan (*fruity*) dengan rasa manis yang ringan sehingga banyak diolah menjadi *dessert* dan *chocolate bar*.

Kualitas kakao Provinsi Bali yang baik telah mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional dan dipilih menjadi bahan baku pembuatan cokelat premium Perancis Valrhona. Kakao Jembrana memiliki ciri khas profil aromatik dengan kandungan lemak yang baik. Pada bulan Agustus 2018, sebanyak 200 ton kakao telah di ekspor ke Jepang dan Verona, Italia. Sementara Amerika yang merupakan pasar utama kakao Provinsi Bali masih memiliki permintaan yang tinggi di tengah adanya perang dagang AS – China. Tidak hanya Amerika Serikat, kakao Provinsi Bali juga di ekspor ke negara Eropa seperti Belgia, Belanda dan Perancis dan negara di Asia seperti Jepang, Malaysia dan China.

Untuk mencapai peningkatan daya saing ekspor kakao Bali, diperlukan adanya perbaikan pada beberapa poin-poin kritical yang didapatkan dari hasil pengolahan kuesioner menggunakan metode *analytical hierarchy process* (AHP).

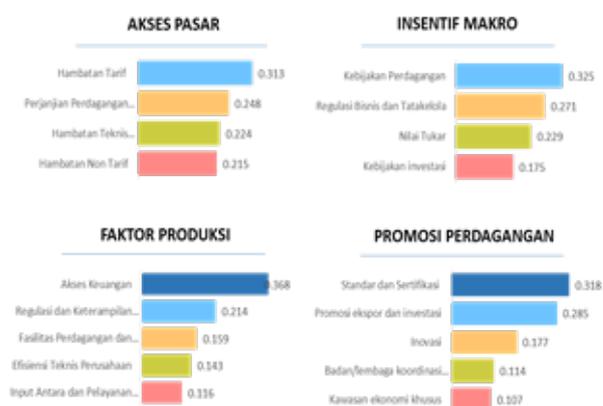
Grafik 1. Hasil AHP Faktor Daya Saing



Grafik 2. Hasil AHP Pada Level Sub-Kriteria



Grafik 3. Hasil AHP Sub-Level Pada Semua Faktor Daya Saing



1) *Market Access*

Akses pasar merupakan hal-hal yang menyebabkan kemampuan eksportir dalam mengakses pasar internasional. Hal-hal ini meliputi kebijakan perdagangan negara-negara importir yang memfasilitasi atau menghambat para eksportir untuk masuk atau melakukan penetrasi pasar dan mempertahankan daya saing mereka di pasar.

Hambatan tarif yang ditemui para pelaku usaha antara lain pengenaan PPN sebesar 10% untuk barang ekspor kakao olahan, sementara ekspor biji kakao dikenakan PPN 0%. Hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 tanggal 25 Februari 2014 dan SE Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2014 tanggal 25 Juli 2014 bahwa barang-barang hasil pertanian yang merupakan hasil perkebunan, tanaman hias dan obat, tanaman pangan, dan hasil hutan yang semula dibebaskan dari pengenaan PPN berubah menjadi dikenakan PPN. Dengan pengenaan tarif PPN sebesar 0% pada ekspor biji kakao, pelaku usaha cenderung untuk mengekspor bahan baku (biji kakao) dibanding olahan (kakao bubuk/pasta/cokelat) atau menjual biji kakao di dalam negeri. Selain itu, petani juga mengeluhkan adanya pengenaan PPN sebesar 10% ini karena membuat margin petani semakin menipis dan harga menjadi kurang kompetitif. Selain itu, masih terdapat kebijakan tarif bea keluar untuk mengekspor produk kakao terutama biji kakao. Seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No 13/PMK.010.2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan tarif Bea Keluar.

Terkait dengan perjanjian perdagangan, Provinsi Bali belum memiliki kerja sama bilateral untuk perdagangan kakao beserta turunannya. Hal ini menyebabkan eksportir kakao tidak dapat memiliki kepastian dalam stabilitas harga kakao. Belum adanya kerja sama tersebut berimplikasi terhadap rendahnya *bargaining*

power dalam penentuan harga yang sesuai dengan harga standar domestik yang berlaku. Selanjutnya pada aspek hambatan teknis dalam pemasaran kakao ke luar negeri, bentuk hambatan yang disampaikan oleh peserta FGD adalah lamanya proses karantina produk sebelum dikirim.

2) *Incentive Macro*

Insentif makro merupakan berbagai kebijakan di level makro yang dapat mendukung dan menciptakan serta mempengaruhi masuknya investasi dan partisipasi sektor swasta di dalam kegiatan ekspor-impor. Berdasarkan hasil FGD, kendala yang dihadapi pelaku eksportir kakao terkait regulasi perdagangan antara lain:

- Adanya beberapa dokumen persyaratan yang harus disertakan pada dalam dokumen ekspor, seperti sertifikasi organik, sertifikasi dari BPOM dan NSI serta sertifikasi lain yang diakui dunia internasional;
- Proses pemeriksaan pada badan karantina untuk komoditi hasil pertanian;
- *Import permit* dari negara pembeli.

3) *Factor Conditions*

Kondisi faktor produksi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap biaya dan kualitas produk dari suatu komoditas. Berdasarkan hasil FGD, sub kriteria faktor kondisi yang menjadi penghambat utama peningkatan daya ekspor kakao Provinsi Bali adalah pada akses keuangan. Akses keuangan ini mencakup akses terhadap permodalan baik modal produksi (*variable cost*) maupun modal investasi. Akses keuangan merupakan hal penting bagi produsen. Terlebih bagi mereka yang ingin menembus pasar internasional. Upaya yang dapat meningkatkan penetrasi produk finansial kepada para produsen akan turut mendorong ekspor produsen ke pasar internasional.

4) *Trade Promotion Infrastructure*

Infrastruktur promosi perdagangan adalah mencakup kebijakan intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi *market failure* dan *government failure* yang menghambat kinerja ekspor seperti tantangan koordinasi dan adanya informasi asimetris. Perkebunan kakao di Provinsi Bali sebagian besar adalah perkebunan rakyat. Petani kakao dan tenaga pengolah kakao belum memenuhi kualifikasi standar yang disyaratkan baik oleh pasar internasional. Kualifikasi yang dimaksud antara lain kelengkapan dokumen sertifikasi seperti sertifikasi organik, BPOM, serta beberapa sertifikasi internasional lainnya seperti *UTZ certified* dan *Rainforest Alliance*. Kemampuan dalam memenuhi ekspektasi pasar internasional akan komoditi kakao yang sudah difermentasi pun menjadi kendala sendiri pada pengembangan ekspor kakao Bali.

Produksi kakao fermentasi sesungguhnya akan jauh lebih menguntungkan baik bagi petani maupun

distributor biji kakao. Akan tetapi, panjangnya proses perijinan serta teknologi yang belum mumpuni untuk menghasilkan kakao terfermentasi, membuat para petani lebih memilih untuk menjual biji kakaonya secara langsung sebelum dilakukan proses fermentasi. Harapan untuk lebih cepat memperoleh penghasilan dari menjual biji kakao juga ditengarai menjadi penyebab masih banyaknya petani yang tidak melakukan proses fermentasi yang baik pada biji kakao yang diproduksinya.

5) *Roadmap* Pengembangan Komoditas Kakao

Setelah mengetahui poin-poin kritikal dan hambatan dari peningkatan daya saing ekspor komoditas kakao di Provinsi Bali, arah pengembangan atau langkah-langkah peningkatan daya saing ekspor kakao untuk periode 5 tahun mendatang (2019-2024) dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1. Roadmap Peningkatan Daya Saing Ekspor Kakao Bali

	2019	2020	2021	2022	2023
AKSES PASAR	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pengenaan pajak: tarif Bea Keluar Biji Kakao Flat 15% (Kemendag, Kementan) Meningkatkan kualitas & Kuantitas SDM laboratorium pengujian mutu produk. (Kementan, Kemenperin, Pemda) 	<ul style="list-style-type: none"> Diplomasi kerja sama perdagangan untuk meningkatkan penetrasi pasar existing dan membuka jalur perdagangan baru. (Kemenlu & Kemendag) Fasilitasi sertifikasi organik mulai dari proses produksi hingga panen untuk mendapatkan valuasi harga yang tinggi. (Kementan, Pemda) 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan negosiasi penetapan tarif 0% produk industri kakao Indonesia ke berbagai negara (Kemendag, Kementan) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan standar mutu kakao organik mulai dari proses produksi sesuai dengan sertifikasi. (Kementan) 	<ul style="list-style-type: none"> Inentif pajak bagi industri pengolahan cokelat untuk mendorong peningkatan produktivitas jangka panjang. (Kemendag, Kementan)
INFRASTRUKTUR PROMOSI	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan fiskal pada biaya sertifikasi produk. (Kementan dan Kemenkeu) Pendanaan RnD untuk riset dan meningkatkan teknologi (Kementan & Kemenperin) 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan informasi negara ekspor tujuan potensial bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar existing. (Kemendag) Fasilitasi keikutsertaan dalam pameran-pameran besar skala Internasional (Kementan, Pemda) 	<ul style="list-style-type: none"> Channeling hasil produksi lokal dengan industri cocoa powder dan cocoa butter & paste. (Kementan, Kemenperin) 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan pelabuhan internasional di wilayah Bali Utara (Pemda) 	<ul style="list-style-type: none"> Channeling industri keseluruhan dengan industri cocoa powder dan cocoa butter & paste (Kementan, Kemenperin)
INSENTIF MAKRO	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan insentif investasi industri berbasis kakao orientasi ekspor (Kementan, Kemenperin) Evaluasi pengenaan bea masuk (Kemenperin) 	<ul style="list-style-type: none"> Mempromosikan investasi industri cocoa powder dan cocoa butter & paste dengan jaminan ketersediaan bahan baku. (Kementan, Pemda) Kemudahan investasi industri berbasis kakao orientasi ekspor (Kementan, Kemenperin) 	<ul style="list-style-type: none"> Membuka peluang investasi untuk peningkatan kapasitas produksi (Kementan, Kemenperin) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengenaan tarif impor biji kakao (Kementan, Kemendag) 	<ul style="list-style-type: none"> Membuka peluang investasi untuk peningkatan kapasitas produksi (Kementan, Kemenperin)
FAKTOR PRODUKSI	<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan program revitalisasi Kakao sebagai salah satu program prioritas Kementan dengan target Revitalisasi Tanaman Kakao ~25% luas lahan kakao di Bali per tahun (Kementan, Pemda) Pemberian bantuan bibit kepada petani berorientasi ekspor (Kementan, Akademisi) Peningkatan utilisasi industri pengolahan cokelat existing (Pelaku Usaha, Asosiasi) Peningkatan produktivitas kakao melalui: (1) peningkatan kompetensi petani, (2) dukungan sarana prasarana, (3) efisiensi biaya transportasi dan logistik. (Kementan, Pemda, Kemenhub, Kemenkeu) Pemberian pinjaman bersubsidi bagi Petani Kakao. (Kementan, Perbankan) Dukungan Fiskal Pusat dan Daerah pada Pendampingan Petani (Kementan, Pemda) 	<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi lahan tanaman kakao 25% dari total lahan kakao di Bali yang sudah berusia diatas 20 tahun yang diperkuat dengan pendampingan petani. (Kementan, Pemda) Membentuk Corporate Farming yang memiliki modal bersumber dari dana desa/APBD sebagai pengganti peran tengkulak (Pemda, Pelaku Usaha) Inisiasi vocational training untuk meningkatkan keahlian pengelolaan kakao (Kementan, Pemda, Akademisi) Peningkatan produktivitas kakao khususnya melalui adopsi teknologi. (Kementan, Pemda) Implementasi zonasi kawasan industri kakao organik di Bali (Kementan, Pemda, Akademisi) Penerapan standarisasi produk hasil industri cokelat sesuai dengan SNI. (Kementan, Kemendag) Penyempurnaan informasi harga kepada petani melalui sistem informasi komoditi perkebunan pada website Kementan. (Kementan, Pemda) Penerapan regulasi terkait HPP rumput laut untuk menjaga harga jual. (Kemendag) 	<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi Tahap II – add on 25%. (Kementan, Pemda) Peningkatan luas lahan rumput laut. 10% dari existing melalui permodalan dana desa maupun APBD. (KKP, Pemda) Menstimulus diversifikasi produk olahan rumput laut pada industri existing melalui pemberian insentif fiskal a.l. Tax allowanc, bea masuk. 	<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi Tahap III – add on 25% (Kementan, Pemda) Penerapan institutional value chain berbasis kemitraan, dengan turut serta melibatkan kelompok tani masyarakat. (Kementan, Kemenperin, Pemda, Pelaku Usaha, Asosiasi) 	<ul style="list-style-type: none"> 100% Revitalisasi terlaksana (Kementan, Pemda) Eksansi Permodalan Corporate Farming (RIRU dan Dana Desa) (Pemda, Pelaku Usaha)



Pantai Kuta - Badung

BAB II

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH



Rp 5,23 Triliun
12,58%
terhadap Pagu
11,58% (yoy)
triwulan I
2019

Realisasi Belanja Pemerintah
(APBN & APBD)
Rp 4,67 Triliun
11,45% terhadap Pagu
35,50% (yoy)
triwulan I
2018

Rp 5,47 Triliun
19,49%
terhadap Pagu
8,34% (yoy)
triwulan I
2019

Realisasi Belanja Pemerintah
(APBN & APBD)
Rp 4,67 Triliun
11,45% terhadap Pagu
35,50% (yoy)
triwulan I
2018

Rp 462 Miliar
6,67%
terhadap Pagu
-38,81% (yoy)
triwulan I
2019

Realisasi Belanja Pemerintah
Provinsi
Rp 755 Miliar
11,45% terhadap Pagu
90,86% (yoy)
triwulan I
2018

Rp2,84 Triliun
12,27%
terhadap Pagu
25,64% (yoy)
triwulan I
2019

Realisasi Belanja Pemerintah
Gabungan 9 Kabupaten/Kota
Rp 2,26 Triliun
10,04% terhadap Pagu
25,32% (yoy)
triwulan I
2018

Rp1,92 Triliun
16,65%
terhadap Pagu
16,39% (yoy)
triwulan I
2019

Realisasi Belanja APBN
Rp1,65 Triliun
14,20% terhadap Pagu
32,66% (yoy)
triwulan I
2018

- Realisasi belanja pemerintah (APBN, APBD Provinsi dan APBD 9 Kabupaten/Kota) pada triwulan I 2019 tercatat sebesar Rp5,23 triliun atau tumbuh sebesar 11,95% (yoy), melambat dibanding realisasi belanja triwulan I 2018 sebesar 35,50% (yoy) atau tercatat Rp4,67 triliun. Persentase Realisasi belanja pemerintah pada TW I 2019 tercatat sebesar 12,58%, meningkat dibanding triwulan I 2018 yang sebesar 11,45%
- Realisasi pendapatan pemerintah (APBD Provinsi dan APBD 9 Kabupaten/Kota) pada triwulan I 2019 tercatat sebesar Rp5,47 triliun atau tumbuh sebesar 8,34% (yoy), mengalami akselerasi dibanding realisasi pendapatan triwulan I 2018 sebesar 4,06% (yoy) atau tercatat Rp5,05 triliun. Sejalan dengan itu, persentase realisasi pendapatan daerah di triwulan I 2019 tercatat sebesar 19,49%, meningkat dibanding triwulan I 2018 sebesar 18,71%

2.1. GAMBARAN UMUM

Total pagu anggaran belanja pemerintah (fiskal) di Provinsi Bali, baik yang menggunakan anggaran APBD (Provinsi dan kabupaten/kota) maupun APBN pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp41,56 triliun. Pagu anggaran tersebut meliputi belanja APBN Rp11,56 triliun (pangsa 27,80%), APBD Provinsi Bali sebesar Rp6,83 triliun (16,45%) dan APBD kabupaten/kota⁴⁷ Rp23,17 triliun (55,75%). Bila dibandingkan dengan tahun 2018 (anggaran perubahan), pagu anggaran belanja fiskal Provinsi Bali tersebut meningkat sebesar 1,93% (yoy), lebih rendah dibanding peningkatan pagu anggaran pada 2018 yang tercatat sebesar 8,03% (yoy). Rendahnya peningkatan tersebut, terutama disebabkan oleh penurunan pagu APBN dan rendahnya peningkatan pagu APBD 9 Kabupaten/kota di 2019. Rendahnya peningkatan pagu APBD kabupaten/kota terutama disebabkan realisasi pencapaian pendapatan daerah (khususnya pendapatan asli daerah) di tahun 2018 jauh di bawah target, sebagai akibat melambatnya pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada periode tersebut. Penurunan jumlah kunjungan wisman ke Provinsi Bali pada periode tersebut disebabkan terjadinya bencana

erupsi Gunung Agung. Penurunan penerimaan PAD pada akhirnya menyebabkan beberapa daerah (terutama yang pendapatannya didominasi pajak PHR), berupaya menyusun pagu anggaran belanja dengan peningkatan yang terbatas, mengakomodasi realisasi pencapaian pendapatan asli daerah yang rendah tersebut.

Realisasi belanja pemerintah (APBD & APBN) di Provinsi Bali sepanjang triwulan I 2019 tercatat sebesar Rp5,23 triliun atau meningkat 11,95% (yoy) dibanding realisasi triwulan I 2018 (Rp4,67 triliun). Peningkatan realisasi belanja pada triwulan I 2019 tersebut, masih lebih rendah (melambat) dibandingkan peningkatan realisasi belanja di triwulan I 2018 yang tercatat sebesar 35,50% (yoy). Melambatnya peningkatan realisasi belanja pemerintah pada triwulan I 2019, terutama disebabkan oleh lebih rendahnya peningkatan realisasi belanja untuk kategori APBN dan menurunnya realisasi belanja untuk kategori APBD Provinsi. Sementara itu, realisasi belanja untuk APBD kabupaten/kota tetap tumbuh lebih tinggi di triwulan I 2019 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sehingga dapat menahan perlambatan realisasi belanja pemerintah.

Tabel 2.1. Pagu Anggaran Belanja Pemerintah di Provinsi Bali (2018-2019)

KATEGORI	PAGU BELANJA (APBD-P & APBN-P) TAHUN 2018 (Rp Miliar)	GROWTH PAGU BELANJA 2018 (%yoy)	PAGU BELANJA (APBD-P & APBN-P) TAHUN 2019 (Rp Miliar)	GROWTH PAGU BELANJA 2019 (%yoy)
APBN	11.641	8,60	11.554	-0,74
APBD Provinsi	6.596	-2,29	6.834	3,62
APBD Kabupaten/Kota	22.533	11,17	23.168	2,82
TOTAL	40.770	8,03	41.557	1,93

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah Untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali, diolah

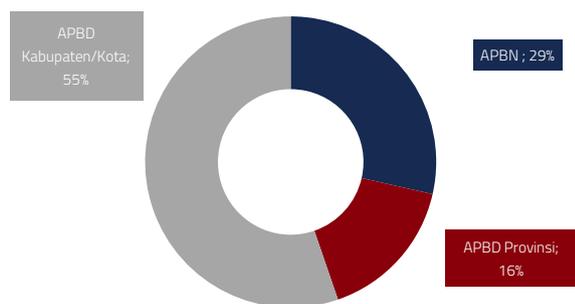
Tabel 2.2. Realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi Bali Triwulan I (2018 & 2019)

KATEGORI	REALISASI BELANJA (APBD & APBN) TW I 2018 (Rp Miliar)	GROWTH REALISASI BELANJA TW I 2018 (%yoy)	REALISASI BELANJA (APBD & APBN) TW I 2019 (Rp Miliar)	GROWTH REALISASI BELANJA TW I 2019 (%yoy)
APBN	1.653	32,66	1.924	16,39
APBD Provinsi	755	90,86	462	-38,81
APBD Kabupaten/Kota	2.262	25,32	2.842	25,64
TOTAL	4.670	35,50	5.228	11,95

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah Untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali, diolah

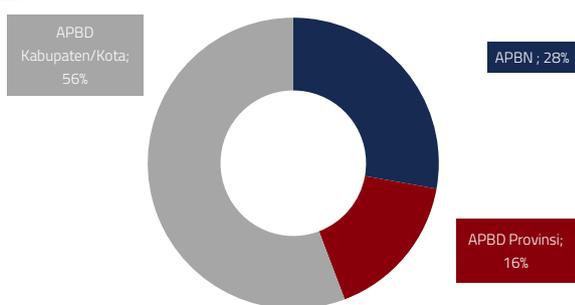
47. Data APBD kabupaten/kota mencakup 9 kabupaten/kota yang ada di Bali. Sumber data BPKAD Provinsi Bali dan BPKAD kabupaten/kota

Grafik 2.1. Struktur Pagu Anggaran Belanja Pemerintah di Provinsi Bali 2018



Sumber: BPKAD Provinsi-Kab/Kota & DJPBN Wilayah Bali, diolah

Grafik 2.2. Struktur Pagu Anggaran Belanja Pemerintah di Provinsi Bali 2019



Sumber: BPKAD Provinsi-Kab/Kota & DJPBN Wilayah Bali, diolah

Persentase realisasi belanja pemerintah (APBD & APBN) pada triwulan I 2019 meningkat dibandingkan triwulan I 2018. Kondisi ini terutama didorong oleh meningkatnya persentase realisasi belanja untuk kategori APBN dan APBD kabupaten/kota sebagai dua kategori dengan pangsa terbesar. Sementara persentase realisasi belanja untuk kategori APBD provinsi mengalami penurunan. Peningkatan persentase realisasi belanja pemerintah, terutama pada kategori APBN dan APBD kabupaten/kota didorong oleh upaya percepatan tahapan dan proses realisasi belanja pemerintah, khususnya untuk komponen belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sejalan dengan itu, pembayaran

kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2019 ikut mendorong peningkatan realisasi belanja pegawai.

Capaian persentase realisasi belanja pemerintah yang meningkat pada triwulan I 2019, menjadi faktor pendorong akselerasi pertumbuhan komponen konsumsi rumah pemerintah di Provinsi Bali pada triwulan I 2019. Komponen konsumsi rumah pemerintah pada triwulan I 2019 tercatat tumbuh sebesar 20,84% (yoy), lebih tinggi (terakselerasi) dibanding pertumbuhan komponen tersebut di triwulan I 2018 yang tercatat sebesar 14,23% (yoy), dan lebih tinggi dibanding pertumbuhan komponen tersebut pada IV 2018 yang terkontraksi sebesar 7,57% (yoy). Akselerasi pertumbuhan konsumsi pemerintah semakin kuat didorong oleh realisasi belanja kabupaten/kota (komponen dengan pangsa terbesar) yang tercatat lebih tinggi pada triwulan I 2019 (12,27%) dibandingkan triwulan I 2018 (10,04%). Perkembangan realisasi belanja pemerintah pada triwulan I 2019 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik pada tingkat APBN provinsi maupun kabupaten/kota, meliputi:

1. Kebijakan percepatan (akselerasi) tahapan dan proses pengadaan belanja barang dan jasa serta belanja modal, khususnya kategori APBD kabupaten/kota dan APBN. Kebijakan ini mendorong peningkatan persentase realisasi belanja komponen-komponen tersebut di kedua kategori tersebut.
2. Adanya pergantian kepemimpinan baru pada tingkat Provinsi Bali dan pergantian 13 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat Provinsi Bali, yang membutuhkan waktu dan

Tabel 2.3. Persentase Realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi Bali Triwulan I (2018-2019)

KATEGORI	PERSENTASE REALISASI BELANJA (APBD & APBN) TW I 2018 (%)	PERSENTASE REALISASI BELANJA (APBD & APBN) TW I 2019 (%)
APBN	14,20	16,65
APBD Provinsi	11,45	6,76
APBD Kabupaten/Kota	10,04	12,27
TOTAL	11,45	12,58

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah
Untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali, diolah

penyesuaian dalam proses dan tahapan realisasi belanja daerah, khususnya pada kategori APBD Provinsi.

3. Adanya realisasi pembayaran kenaikan gaji ASN sebesar 5% pada tahun 2019, yang mulai dibayar pada triwulan I 2019, mendorong peningkatan realisasi belanja pegawai.
4. Peningkatan capaian realisasi pendapatan daerah, khususnya untuk kategori APBD pada tingkat kabupaten/kota, sehingga mendorong peningkatan persentase realisasi belanja di kategori tersebut.
5. Adanya upaya pelaksanaan kegiatan *monitoring* realisasi belanja pada masing-masing OPD, khususnya pada tingkat kabupaten/kota, secara berkesinambungan yang dikaitkan dengan penilaian kinerja OPD dan pegawai, mendorong peningkatan persentase realisasi anggaran belanja untuk kategori APBD kabupaten/kota.

Pagu anggaran pendapatan pemerintah di Provinsi Bali untuk 2019 mencapai Rp28,06 triliun. Pagu tersebut meliputi anggaran pendapatan APBD Provinsi Bali sebesar Rp6,32 triliun (pangsa 22,54%) dan APBD kabupaten/kota⁴⁸ sebesar Rp21,73 triliun (pangsa 77,46%). Pagu anggaran pendapatan tersebut tumbuh 4% (yoy), melambat dibanding tahun 2018 yang tercatat tumbuh

sebesar 10,82% (yoy). Kondisi tersebut disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan pagu anggaran pendapatan untuk kategori APBD kabupaten/kota (yaitu dari 14,67% di 2018 menjadi 4,60% pada 2019). Perlambatan pagu anggaran pendapatan APBD kabupaten/kota 2019 tersebut terjadi di semua komponen, baik untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), komponen dana perimbangan maupun komponen lain-lain pendapatan yang sah. Perlambatan pagu anggaran tersebut, tidak terlepas oleh capaian PAD tahun 2018 yang rendah terutama disebabkan oleh perlambatan jumlah kunjungan wisman sebagai dampak bencana erupsi Gunung Agung dan adanya beberapa pelaku usaha yang belum memenuhi kewajibannya pajak hotel dan restoran. Kondisi tersebut menyebabkan, beberapa daerah dalam menetapkan pagu anggaran pendapatannya dalam peningkatan yang terbatas, mengakomodasi capaian realisasi 2018.

Pada periode triwulan I 2019, capaian realisasi pendapatan daerah di Provinsi Bali tercatat sebesar Rp5,47 triliun atau meningkat sebesar 8,34% (yoy), lebih tinggi dibanding peningkatan realisasi triwulan I 2018 yang sebesar 4,06% (yoy). Peningkatan realisasi pendapatan terjadi baik pada kategori APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Membaiknya realisasi pendapatan daerah, khususnya komponen PAD di Provinsi didorong oleh akselerasi

Tabel 2.4. Pagu Anggaran Pendapatan Pemerintah di Provinsi Bali Triwulan I (2018-2019)

KATEGORI	PAGU PENDAPATAN (APBD-P & APBN-P) TAHUN 2018 (Rp Miliar)	GROWTH PAGU PENDAPATAN 2018 (%yoy)	PAGU PENDAPATAN (APBD & APBN) TAHUN 2019 (Rp Miliar)	GROWTH PAGU PENDAPATAN 2019 (%yoy)
APBD Provinsi	6.200	-0,37	6.323	1,98
APBD Kabupaten/Kota	20.779	14,67	21.734	4,60
TOTAL	26.979	10,82	28.057	4,00

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah

Tabel 2.5. Realisasi Pendapatan Pemerintah di Provinsi Bali Triwulan I (2018-2019)

KATEGORI	REALISASI PENDAPATAN (APBD & APBN) TW I 2018 (Rp Miliar)	GROWTH REALISASI PENDAPATAN TW I 2018 (%yoy)	REALISASI PENDAPATAN (APBD & APBN) TW I 2019 (Rp Miliar)	GROWTH REALISASI PENDAPATAN TW I 2019 (%yoy)
APBD Provinsi	1.366	2,48	1.519	11,20
APBD Kabupaten/Kota	3.681	4,66	3.949	7,28
TOTAL	5.047	4,06	5.468	8,34

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah

48. Data APBD kabupaten/kota mencakup 9 kabupaten/kota yang ada di Bali. Sumber data BPKAD Provinsi Bali dan BPKAD kabupaten/kota

Tabel 2.6. Persentase Realisasi Pendapatan Pemerintah di Provinsi Bali Triwulan I (2018-2019)

KATEGORI	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN (APBD & APBN) TW I 2018 (%)	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN (APBD & APBN) TW I 2019 (%)
APBD Provinsi	22,03	24,02
APBD Kabupaten/Kota	17,72	18,17
TOTAL	18,71	19,49

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah

pertumbuhan penjualan kendaraan baru terutama mobil yang pada triwulan I 2019 tercatat tumbuh lebih tinggi dibanding periode triwulan I 2018⁴⁹. Sementara itu, meningkatnya realisasi pendapatan untuk kategori APBD kabupaten/kota di Provinsi Bali, didorong oleh peningkatan realisasi pendapatan untuk komponen dana perimbangan, baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Realisasi pendapatan daerah di Provinsi Bali pada triwulan I 2019 mencapai 19,49% (terhadap total pagu 2019), meningkat dibanding periode triwulan I 2018 sebesar 18,71%. Peningkatan persentase realisasi tersebut terjadi pada semua kategori, baik untuk APBD pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Capaian realisasi pendapatan tertinggi pada triwulan I 2019 ada di tingkat APBD Provinsi sebesar 24,02%, sementara untuk APBD kabupaten/kota persentase realisasi mencapai 18,17%. Peningkatan realisasi pendapatan di tingkat provinsi, didorong oleh meningkatnya realisasi komponen PAD sejalan dengan peningkatan penjualan kendaraan bermotor, khususnya mobil dan peningkatan realisasi pendapatan untuk komponen dana perimbangan, baik DAK maupun DAU. Sejalan dengan itu, meningkatnya realisasi pendapatan daerah untuk kategori APBD kabupaten/kota juga didukung oleh meningkatnya realisasi pendapatan daerah dari komponen dana perimbangan⁵⁰, baik untuk komponen DAU maupun DAK.

2.2. APBD PROVINSI BALI

Pagu anggaran Pemerintah Provinsi Bali pada 2019 kembali mengalami defisit, yakni sebesar Rp 511 miliar, meningkat dibanding

defisit pagu anggaran perubahan 2018 yang tercatat sebesar Rp396 miliar. Kebijakan defisit anggaran ini, mencerminkan strategi kebijakan fiskal pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan peran dan kontribusi fiskal dalam perekonomian di Provinsi Bali, termasuk dalam mendukung penciptaan investasi melalui peningkatan belanja modal. Target pendapatan maupun belanja pemerintah provinsi (pagu anggaran) 2019 masing-masing menunjukkan peningkatan.

2.2.1. Pagu Anggaran Pendapatan Provinsi Bali

Pagu anggaran pendapatan APBD Provinsi Bali di 2019 ditargetkan mencapai Rp6,32 triliun atau meningkat 1,99% (yoy) dibanding target anggaran perubahan 2018. Peningkatan target pagu pendapatan 2019 tersebut lebih tinggi dibanding pagu anggaran perubahan pendapatan 2018 yang tercatat menurun sebesar 0,37% (yoy). Meningkatnya pagu pendapatan daerah di 2019, terutama didorong oleh peningkatan seluruh komponen target pendapatan, baik untuk komponen PAD, dana perimbangan maupun komponen lain-lain pendapatan yang sah. Peningkatan pagu pendapatan terbesar terutama berasal dari komponen target lain-lain pendapatan yang sah yakni sebesar 59,03% (yoy). Peningkatan target seluruh komponen pendapatan daerah dalam pagu anggaran tahun 2019 tersebut menunjukkan optimisme pemerintah Provinsi Bali terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali ke depan yang lebih baik, yang selanjutnya dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah.

49. Penjualan mobil pada triwulan I 2019 tercatat 6.873 unit atau tumbuh sebesar 1,27% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan I 2018 sebesar 0,07% (yoy) atau tercatat 6.787 unit.

50. Komponen dana perimbangan pada triwulan I 2019 persentasenya tercatat sebesar 28,88%, meningkat dibanding triwulan I 2018 yang sebesar 26,47%.

Tabel 2.7. Pagu Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Bali (2018-2019)

KATEGORI	2018		2019	
	PAGU APBD-P (Rp Miliar)	GROWTH TAHUNAN PAGU (%;yoy)	PAGU APBD (Rp Miliar)	GROWTH TAHUNAN PAGU (%;yoy)
PENDAPATAN DAERAH	6.200	-0,37	6.323	1,99
PEND. ASLI DAERAH (PAD)	3.567	0,78	3.588	0,58
DANA PERIMBANGAN	2.586	-1,89	2.662	2,92
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	46,39	-1,66	73,77	59,03
BELANJA DAERAH DAN TRANSFER	6.596	-2,29	6.834	3,62
BELANJA DAERAH	4.689	-3,50	4.854	3,51
BELANJA OPERASI	4.125	0,38	4.057	-1,66
BELANJA MODAL	549	-26,33	785	43,02
BELANJA TAK TERDUGA	15	228,91	12	-17,47
BELANJA TRANSFER	1.907	0,83	1.981	3,87
SURPLUS (DEFISIT)	-396	-24,95	-511	29,01

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah

2.2.2. Realisasi Pendapatan Provinsi Bali Triwulan I 2019.

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Bali pada triwulan I 2019 tercatat mencapai Rp1,52 triliun, lebih tinggi dibanding capaian triwulan I 2018 yang tercatat sebesar Rp1,37 triliun. Sejalan dengan itu, dari sisi capaian realisasi terhadap pagu anggaran, realisasi pendapatan daerah di periode yang sama mencapai 24,08%, meningkat dibanding triwulan I 2018 yang tercatat sebesar 22,03%. Peningkatan realisasi ini, terutama didorong oleh peningkatan realisasi pada komponen PAD⁵¹ dan peningkatan realisasi pada komponen dana perimbangan⁵². Peningkatan realisasi komponen PAD sejalan dengan akselerasi kinerja ekonomi Provinsi Bali, dimana laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali di triwulan I 2019 tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan I 2018⁵³. Seiring dengan itu, peningkatan realisasi dana perimbangan sejalan dengan meningkatnya target (pagu) anggaran untuk komponen ini dan upaya untuk mempercepat pencairan anggaran komponen DAU dan DAK melalui pemenuhan seluruh kelengkapan administrasi yang diperlukan ikut mendorong peningkatan realisasi di komponen pendapatan daerah ini.

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Provinsi Bali pada triwulan I tahun 2019 menunjukkan kondisi yang tetap baik, meskipun sedikit menurun dibandingkan triwulan I 2018. Kondisi tersebut tercermin dari persentase komponen PAD terhadap total pendapatan daerah yang sedikit menurun. Pada triwulan I 2019, sebanyak 51,59% dari realisasi anggaran pendapatan daerah yang dihimpun bersumber dari komponen PAD. Capaian ini sedikit menurun dibanding triwulan I 2018 yang tercatat sebesar 53,71% dari total realisasi anggaran pendapatan yang dihimpun. Penurunan rasio DDF pada triwulan I 2019 tersebut disebabkan oleh peningkatan realisasi komponen PAD yang tidak setinggi dengan peningkatan realisasi komponen dana perimbangan. Meskipun demikian, penurunan rasio DDF untuk APBD Provinsi Bali dapat tertahan oleh perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali di triwulan I 2019 yang tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan I 2018, sehingga mampu mendorong peningkatan komponen PAD. Subkomponen pajak daerah masih menjadi subkomponen terbesar dalam pencapaian realisasi PAD, dengan pangsa mencapai 91,40% (triwulan I 2019), lebih tinggi dibandingkan pangsa periode yang sama tahun 2018 sebesar 89,85%.

51. Komponen PAD Provinsi Bali pada triwulan I 2019 persentase realisasinya sebesar 21,85%, meningkat dibanding triwulan I 2018 yang sebesar 20,57%

52. Komponen Dana Perimbangan Provinsi Bali pada triwulan I 2019 persentase realisasinya sebesar 26,34%, meningkat dibanding triwulan I 2018 yang sebesar 23,59%

53. Ekonomi Provinsi Bali pada triwulan I 2019 tercatat tumbuh sebesar 5,94% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan I 2018 yang sebesar 5,58% (yoy)

Tabel 2.8. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Triwulan I (2018-2019)

KATEGORI	2018				2019			
	PAGU APBD-P (Rp Miliar)	REALISASI APBD TW I (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI TW I (%)	GROWTH TAHUNAN REALISASI TW I (%,yoy)	PAGU APBD (Rp Miliar)	REALISASI APBD TW I (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI TW I (%)	GROWTH TAHUNAN REALISASI TW I (%,yoy)
PENDAPATAN DAERAH	6.200	1.366	22,03	2,47	6.323	1.519	24,03	11,24
PEND. ASLI DAERAH (PAD)	3.567	734	20,57	16,32	3.588	784	21,85	6,83
- Pendapatan Pajak Daerah	3.098	659	21,28	11,65	3.069	716	23,34	8,68
- Retribusi Daerah	48	9	18,72	1,38	50	8	15,32	-15,85
- Hsl Pengelolaan. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	171				171			
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yg Sah	249	65	26,25	113,48	298	60	20,07	-8,65
DANA PERIMBANGAN	2.586	610	23,59	-12,96	2.662	701	26,34	14,92
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	215	43	20,07	-29,02	186	37	20,08	-13,64
- Dana Alokasi Umum (DAU)	1.269	407	32,08	-1,09	1.326	442	33,33	8,59
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.102	160	14,50	-30,04	1.150	222	19,29	38,76
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	46,39	22,10	47,64	1.621,18	73,77	34,48	46,74	56,02
- Pendapatan Hibah	4,89	1	27,61	5,14	5,34	0,26	4,92	-80,53
- Dana Penyesuaian & otonomi khusus	41,50	21	50,00		68,43	34,22	50,00	64,90

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Provinsi Bali pada triwulan I 2019 tercatat mencapai Rp784 miliar atau sebesar 21,85% terhadap pagu anggaran. Capaian ini lebih tinggi dibanding realisasi triwulan I 2018 yang sebesar Rp734 miliar atau 20,57% dari target anggaran. Peningkatan realisasi PAD ini, terutama didorong oleh peningkatan realisasi sub komponen pajak daerah, dimana sub komponen lainnya mengalami penurunan. Berdasarkan pangasanya, komponen realisasi pajak daerah di Provinsi Bali tetap mendominasi realisasi komponen PAD di triwulan I 2019 (pangsa 91,40%). Lebih lanjut lagi, komponen realisasi pendapatan pajak daerah pada triwulan I 2019 masih didominasi oleh sub komponen Pajak Kendaraan Bermotor dan sub komponen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik Provinsi Bali sebagai daerah destinasi utama wisata Dunia, sehingga kebutuhan akan sarana transportasi (kendaraan bermotor) sangat tinggi.

Dari sisi pertumbuhan, realisasi PAD Provinsi Bali pada triwulan I 2019 tumbuh sebesar

6,83% (yoy), lebih rendah dibanding periode yang sama 2018 yang tumbuh sebesar 16,32% (yoy). Melambatnya realisasi PAD tersebut, terutama disebabkan oleh melambatnya sub komponen utama PAD, yaitu pendapatan pajak daerah⁵⁴. Sejalan dengan hal tersebut, penurunan realisasi sub komponen retribusi daerah dan sub komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah⁵⁵, juga menjadi faktor penyebab melambatnya realisasi komponen PAD pada triwulan I 2019. Melambatnya kinerja pendapatan pajak daerah tersebut disebabkan oleh melambatnya realisasi penerimaan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor. Kondisi ini terkonfirmasi oleh perlambatan pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor pada triwulan I 2019 dibanding triwulan I 2018⁵⁶ dan melambatnya penyaluran kredit perbankan untuk kendaraan bermotor (KKB) di Provinsi Bali pada triwulan I 2019 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya⁵⁷. Selain faktor tersebut, terdapat beberapa faktor lain yang juga menjadi faktor penyebab melambatnya pertumbuhan realisasi pendapatan pajak daerah, meliputi:

54. Realisasi Sub Komponen pendapatan pajak daerah di Provinsi Bali pada triwulan I 2019 tercatat tumbuh sebesar 8,68% (yoy), tumbuh melambat dibanding triwulan I 2018 yang tumbuh sebesar 11,65% (yoy)

55. Realisasi Sub Komponen retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah di Provinsi Bali pada triwulan I 2019 tercatat terkontraksi masing-masing sebesar 15,85% (yoy) dan 8,65% (yoy), menurun dibanding triwulan I 2018 yang tumbuh masing-masing sebesar 1,38% (yoy) dan 113,48% (yoy)

56. Penjualan kendaraan bermotor pada triwulan I 2019 tercatat sebesar 43.758 unit atau turun sebesar 1,80% (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan I 2018 yang sebesar 4,55% (yoy) atau mencapai 44.558 unit

57. Kredit kendaraan bermotor (KKB) pada triwulan I 2019 tercatat tumbuh sebesar 21,51% (yoy), melambat dibanding pertumbuhan triwulan I 2018 yang sebesar 45,07% (yoy)

- Telah berakhirnya kebijakan yang terkait pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor (Peraturan Gubernur Provinsi Bali no.55 tahun 2018) pada Desember 2018.
- Minimnya kegiatan MICE berskala *international* yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, menahan permintaan kendaraan baru. Pada tahun 2018, penyelenggaraan IMF-WB AM 2018 menjadi faktor pendorong peningkatan penjualan kendaraan baru.
- Berdasarkan hasil survei dan liaison, sikap *wait and see* para pelaku usaha transportasi menanti hasil pemilihan umum, menjadi faktor penahan permintaan kendaraan baru.

Meskipun demikian, berbagai upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong akselerasi penerimaan pajak daerah, telah berdampak terhadap tetap tumbuh positifnya capaian realisasi sub komponen ini pada TW I 2019. Adapun beberapa upaya dan strategi tersebut meliputi:

- Kebijakan mendorong kerjasama dalam penghimpunan pajak kendaraan dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam rangka meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.
- Pelaksanaan kegiatan samsat keliling secara rutin dan reguler
- Kebijakan peningkatan tarif untuk pajak air permukaan yang dipergunakan untuk kegiatan wisata.
- Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk terus mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas dan pencapaian target dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk komponen pendapatan daerah melalui penerapan elektronifikasi dalam

penerimaan pajak daerah dan jenis transaksi lainnya melalui kerjasama dengan pihak perbankan.

Komponen Dana Perimbangan

Pada periode triwulan I 2019, realisasi komponen dana perimbangan tercatat sebesar Rp701 miliar atau 26,34% terhadap pagu anggaran, meningkat dibanding realisasi triwulan I 2018 yang tercatat sebesar 23,59%. Peningkatan tersebut, terutama didukung oleh peningkatan realisasi 2 sub komponen utama, yaitu DAK dan DAU. Berdasarkan pangasanya, komponen DAU memberikan kontribusi terbesar terhadap realisasi penerimaan komponen dana transfer triwulan I 2019, yaitu mencapai 63,03% disusul oleh DAK (31,64%) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak (5,33%). Bila dibandingkan dengan triwulan I 2018, sub komponen yang mengalami peningkatan pangsa adalah DAK sejalan dengan tingginya capaian persentase realisasi, sementara 2 sub komponen lainnya mengalami penurunan pangsa.

Dari sisi pertumbuhan, realisasi komponen dana perimbangan di triwulan I 2019 tercatat tumbuh sebesar 14,92% (yoy), lebih tinggi (terakselerasi) dibanding realisasi triwulan I 2018 yang terkontraksi sebesar 12,96% (yoy). Capaian yang positif ini, terutama didukung oleh meningkatnya capaian realisasi dua sub komponen utama dana perimbangan, yaitu DAK dan DAU setelah pada periode yang sama tahun lalu mengalami penurunan capaian realisasi⁵⁸. Beberapa faktor pendorong peningkatan capaian realisasi untuk kedua sub komponen utama ini meliputi:

- Upaya percepatan realisasi pencairan DAU dan DAK melalui optimalisasi pemenuhan dokumen administrasi dan pendukung lainnya secara tepat waktu, khususnya terkait dengan dokumen perencanaan kegiatan untuk DAK fisik.
- Tidak adanya lagi dampak *base effect* pengalihan kewenangan pengelolaan gaji SMU/SMK/Sederajat yang dilaksanakan pada tahun 2017

58. Realisasi DAK dan DAU pada triwulan I 2019 tercatat meningkat masing-masing sebesar 8,59% (yoy) dan 38,76% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan I 2018 yang masing-masing terkontraksi sebesar 1,09% (yoy) dan 30,04% (yoy)

- Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengaturan program kerja serta kegiatan, khususnya yang terkait dengan investasi fisik yang dilakukan secara lebih baik dan terencana.

Anggaran DAU sangat penting bagi daerah, karena dana yang bersumber dari APBN ini merupakan bagian dari perwujudan desentralisasi daerah. Selain itu, DAU dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (horizontal) dalam rangka mendanai kebutuhan daerah. Pengalokasian DAU tersebut didasarkan atas *fiscal gap*⁵⁹ dan alokasi dasar⁶⁰. DAK ditujukan untuk mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik (DAK fisik) dan dalam mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik (DAK non fisik).

Komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada triwulan I 2019 tercatat sebesar Rp34,48 miliar atau 46,74% dari target anggaran, meskipun tercatat mengalami peningkatan namun pertumbuhan dan realisasinya lebih rendah dibanding realisasi triwulan I 2018⁶¹. Kondisi ini terutama disebabkan oleh realisasi sub komponen

dana hibah dan sub komponen dana penyesuaian dan otonomi khusus yang capaian peningkatannya tidak setinggi periode yang sama tahun sebelumnya.

2.2.3. Pagu Anggaran Belanja Provinsi Bali

Pagu anggaran belanja dan transfer Provinsi Bali di 2019 adalah sebesar Rp6,83 triliun atau meningkat 3,62% (yoy) dibanding pagu anggaran belanja dan transfer perubahan 2018. Secara spesifik, peningkatan pagu anggaran belanja dan transfer terbesar adalah pagu anggaran untuk komponen belanja modal yakni 43,02% (yoy), sementara komponen dengan pagu peningkatan terendah adalah komponen belanja tak terduga yang mengalami penurunan sebesar 17,47% (yoy). Sementara pagu komponen belanja operasi dan komponen belanja transfer tetap menunjukkan peningkatan namun lebih rendah dibanding tahun 2018.

2.2.4. Realisasi Belanja Provinsi Bali

Realisasi belanja dan transfer di Provinsi Bali pada triwulan I 2019 tercatat sebesar Rp462 miliar atau 6,76% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut lebih rendah dibanding triwulan I 2018 yang tercatat sebesar 11,45%. Adapun komponen belanja

Tabel 2.9. Pagu Anggaran Belanja Daerah Provinsi Bali (2018-2019)

KATEGORI	2018		2019	
	PAGU APBD-P (Rp Miliar)	GROWTH TAHUNAN PAGU (%:yoy)	PAGU APBD (Rp Miliar)	GROWTH TAHUNAN PAGU (%:yoy)
BELANJA DAERAH DAN TRANSFER	6.596	-2,29	6.834	3,62
BELANJA DAERAH	4.689	-3,50	4.854	3,51
BELANJA OPERASI	4.125	0,38	4.057	-1,66
- Belanja Pegawai	1.689	-0,53	1.752	3,76
- Belanja Barang dan Jasa	1.194	-1,83	1.328	11,19
- Belanja Hibah	1.219	3,97	962	-21,09
- Belanja Subsidi	10	0,00	10	0,00
- Belanja Bantuan Sosial	13	0,95	4	-66,93
BELANJA MODAL	549	-26,33	785	43,02
BELANJA TAK TERDUGA	15	228,91	12	-17,47
BELANJA TRANSFER	1.907	0,83	1.981	3,87
SURPLUS (DEFISIT)	-396	-24,95	-511	29,01

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah

59. Fiscal gap adalah kebutuhan fiskal, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, PDRB perkapita dan indeks pembangunan manusia dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah (PAD dan DBH)

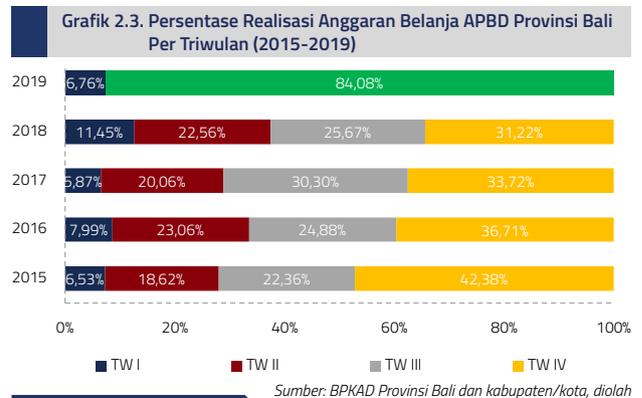
60. Alokasi dasar dihitung berdasarkan atas jumlah gaji pegawai negeri sipil

61. Peningkatan dan persentase realisasi Komponen pendapatan lain-lain yang sah di Provinsi Bali pada triwulan I 2019 tercatat masing-masing sebesar 56,02% (yoy) dan 46,74%, lebih rendah dibanding triwulan I 2018 yang masing-masing sebesar 1.621% (yoy) dan 47,64%

dan transfer dengan serapan realisasi tertinggi dicapai oleh komponen belanja operasi, yaitu sebesar 10,86% terhadap pagu anggaran, dimana realisasi tersebut menurun dibanding triwulan I 2018 (12,31%). Komponen belanja modal merupakan komponen dengan persentase realisasi tertinggi kedua, yakni 1,93% terhadap pagu anggaran. Realisasi komponen belanja modal tersebut meningkat dibandingkan pada triwulan I 2018 sebesar 0,08%, sejalan dengan percepatan proses dan tahapan pengadaan yang dilakukan serta perencanaan yang lebih baik pada tahun 2019 sehubungan dengan rencana pengembangan proyek belanja modal. Sementara itu, komponen belanja transfer justru mengalami penurunan persentase realisasi menjadi 0,30% (triwulan I 2019) dibanding triwulan I 2018 yang sebesar 12,93%.

Pola realisasi anggaran Pemerintah Provinsi masih memperlihatkan kecenderungan backloading (realisasi tidak proporsional setiap triwulan) dengan persentase realisasi anggaran yang relatif rendah di awal tahun, kemudian membesar pada triwulan akhir (persentase realisasi tertinggi selalu pada triwulan IV). Pola ini terus berulang setiap tahun, bahkan pada tahun triwulan I 2019 terlihat bahwa distribusi realisasi anggaran belanja tidak sebaik

triwulan I 2018, terlihat dari persentase realisasi pada triwulan 1 2019 yang lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (grafik 2.3).



Tabel 2.10. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali Triwulan I (2018-2019)

KATEGORI	2018				2019			
	PAGU APBD-P (Rp Miliar)	REALISASI APBD TW I (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI TW I (%)	GROWTH TAHUNAN REALISASI TW I (%:yoy)	PAGU APBD (Rp Miliar)	REALISASI APBD TW I (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI TW I (%)	GROWTH TAHUNAN REALISASI TW I (%:yoy)
BELANJA DAERAH DAN TRANSFER	6.596	755	11,45	90,86	6.834	462	6,76	-38,81
BELANJA DAERAH	4.689	508	10,84	28,51	4.854	456	9,39	-10,31
BELANJA OPERASI	4.125	508	12,31	28,46	4.057	441	10,86	-13,20
- Belanja Pegawai	1.689	247	14,65	8,99	1.752	234	13,34	-5,51
- Belanja Barang dan Jasa	1.194	89	7,45	41,05	1.328	100	7,55	12,72
- Belanja Hibah	1.219	171	14,05	63,14	962	107	11,07	-37,81
- Belanja Subsidi	10	0	0,00		10	0	0,00	
- Belanja Bantuan Sosial	13	0,12	0,94	-42,86	4	0,17	4,03	41,67
BELANJA MODAL	549	0,46	0,08	100	785	15	1,93	3.191
BELANJA TAK TERDUGA	15	0,08	0,53	300	12			-100
BELANJA TRANSFER	1.907	247	12,93		1.981	6	0,30	-97,56
SURPLUS (DEFISIT)	-396	611	-154,34	-34,82	-511	1.058	-207,06	73,08

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah

Pertumbuhan realisasi belanja dan transfer Provinsi Bali mengalami penurunan, sejalan dengan rendahnya realisasi serapan anggaran belanja pada triwulan I 2019. Realisasi belanja dan transfer pada triwulan I 2019 tercatat turun 10,31% (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan tahunan triwulan I 2018 yang tercatat sebesar 28,51% (grafik 2.4). Beberapa faktor yang berpengaruh pada capaian realisasi belanja pada triwulan I 2019 yang belum optimal yaitu penyesuaian implementasi program membutuhkan waktu untuk diselaraskan dengan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, penyesuaian program kerja terhadap visi dan misi pimpinan daerah yang baru terpilih, dan adanya 13 pimpinan OPD yang baru terpilih pada Februari 2019.

Berdasarkan komponennya, penurunan (kontraksi) terdalam terjadi pada komponen belanja transfer yakni sebesar 97,56% (yoy). Sementara itu, realisasi komponen belanja operasi (memiliki pangsa terbesar), mengalami penurunan realisasi pada triwulan I 2019 dibanding triwulan I 2018 yang tumbuh signifikan. Penurunan ini tidak terlepas dari penyesuaian terhadap implementasi program kerja dalam rangka penyelarasan agar sesuai dengan visi dan misi pemimpin daerah yang baru terpilih yang membutuhkan waktu dan penyesuaian dengan pimpinan baru pada sejumlah OPD. Sementara itu, serapan komponen belanja transfer juga menunjukkan penurunan yang semakin dalam dibandingkan periode triwulan I 2018.

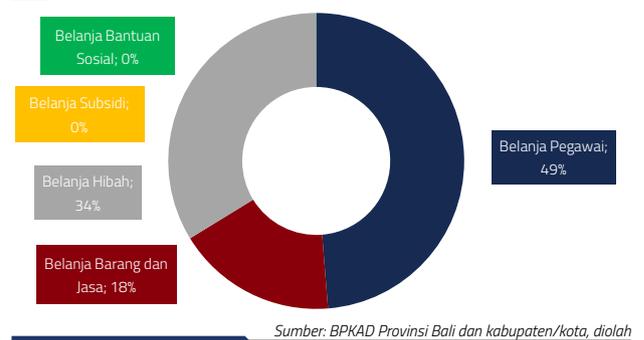
Belanja Operasi

Berdasarkan komponen pembentuknya, tertahannya realisasi belanja operasi pada triwulan I 2019 terutama disebabkan oleh penurunan realisasi subkomponen belanja pegawai (pangsa 53%) dan realisasi subkomponen belanja hibah (pangsa 24%). Sementara itu, realisasi komponen belanja barang dan jasa (pangsa 23%) yang juga tumbuh melambat, ikut menyebabkan tertahannya peningkatan realisasi belanja operasi. Sub komponen lainnya, yaitu belanja

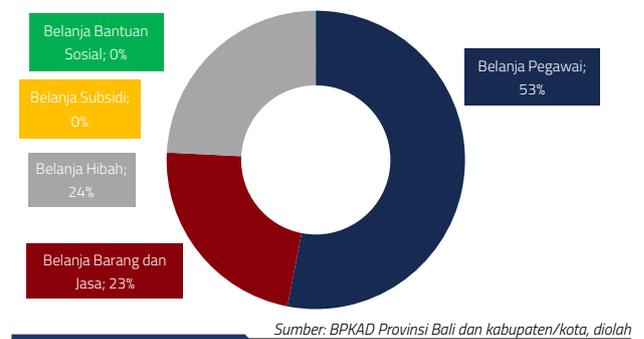
bantuan sosial dan belanja subsidi memiliki pangsa yang relatif kecil. Struktur komponen belanja operasi pada triwulan I 2019 relatif tidak jauh berbeda dibanding struktur triwulan I 2018 (grafik 2.5 dan 2.6).

Secara spesifik, pertumbuhan realisasi belanja operasi yang tumbuh melambat di triwulan I 2019, terutama disebabkan oleh penurunan realisasi serapan dua subkomponen utama, yaitu belanja pegawai dan belanja hibah. Sejalan dengan itu, melambatnya capaian realisasi subkomponen belanja barang dan jasa juga berkontribusi terhadap melambatnya realisasi belanja operasi. Melambatnya realisasi belanja operasi tidak terlepas dari dampak penyesuaian program kerja sejalan dengan kepemimpinan baru daerah dan adanya pergantian pimpinan pada 13 OPD. Kondisi ini menyebabkan realisasi belanja operasi pada triwulan I 2019 tidak dapat terserap secara optimal.

Grafik 2.5. Struktur Belanja Operasi APBD Provinsi Bali Triwulan I 2018



Grafik 2.6. Struktur Belanja Operasi APBD Provinsi Bali Triwulan I 2019



Belanja Modal

Realisasi belanja modal pada tingkat Provinsi Bali di triwulan I 2019 tercatat sebesar Rp15 miliar atau 1,93% dari target anggaran 2019, meningkat dibanding realisasi triwulan I 2018 yang tercatat sebesar Rp0,46 miliar atau sebesar 0,08% dari target anggaran 2018. Peningkatan persentase realisasi tersebut, sejalan dengan peningkatan pagu anggaran komponen belanja modal yang signifikan pada tahun 2019. Peningkatan realisasi belanja modal juga sejalan dengan tersedianya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur fisik yang bersumber dari DAK fisik yang realisasinya menunjukkan peningkatan sepanjang triwulan 1 2019. Persiapan dan perencanaan program yang dilakukan dengan lebih baik dan terencana juga menjadi faktor pendukung meningkatnya realisasi belanja pada triwulan I 2019. Beberapa proyek yang menggunakan anggaran DAK fisik dapat tereliasi secara optimal, sejalan dengan pemenuhan secara tepat waktu terkait dengan dokumen dan berkas administrasi proyek yang menjadi syarat dan pendukung pencairan anggaran.

2.3. APBD KABUPATEN/KOTA

2.3.1. Pagu Pendapatan APBD Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pendapatan gabungan untuk 9 kabupaten/kota pada 2019 tercatat sebesar Rp21,73 triliun atau meningkat sebesar 4,60% (yoy), lebih rendah dibanding peningkatan pagu pendapatan 2018 yang tercatat sebesar 14,66% (yoy). Melambatnya peningkatan pagu pendapatan daerah tersebut, terutama disebabkan

oleh capaian realisasi pendapatan daerah yang rendah, khususnya komponen pada tahun 2018 sebagai akibat melambatnya pertumbuhan jumlah kunjungan wisman⁶² pada periode tersebut. Kondisi tersebut telah mempengaruhi kebijakan penyusunan pagu anggaran tahun 2019 yang hanya meningkat terbatas, memperhatikan capaian realisasi pendapatan daerah 2018. Melambatnya pertumbuhan pagu anggaran 2019 tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan komponen pagu anggaran PAD dan komponen lain-lain pendapatan yang sah, sementara komponen dana perimbangan justru mengalami peningkatan. Secara spasial, peningkatan target pendapatan tertinggi tahun 2019 terjadi di Kabupaten Gianyar yang tumbuh 12,35% (yoy), didukung oleh peningkatan komponen PAD yang signifikan, sejalan dengan target jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat signifikan pada tahun 2019. Peningkatan target pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan, mendorong peningkatan pagu PHR (pangsa terbesar PAD). Bidang usaha pariwisata di Kabupaten Gianyar tengah berkembang, tercermin dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan serta diikuti pula oleh pertumbuhan dan berkembangnya pelaku usaha pariwisata termasuk hotel dan restoran (sumber PHR). Sejalan dengan itu, strategi dan upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru, termasuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha untuk membayar pajak juga menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan target pendapatan di tahun 2019. Sementara itu, peningkatan target pendapatan daerah terendah

Tabel 2.11. Pagu Anggaran Pendapatan Daerah 9 Kabupaten/Kota Tahun 2018-2019

Daerah Tingkat II	Pagu APBD P 2018 (Rp Miliar)				Growth 2018 (%yoy)				Pagu APBD 2019 (Rp Miliar)				Growth 2019 (%yoy)			
	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan
Kota Denpasar	855	909	304	2.068	-8,32	0,79	43,70	1,08	873	917	331	2.120	2,04	0,92	8,84	2,55
Kabupaten Tabanan	394	1.079	476	1.949	-0,27	-5,24	25,24	1,84	390	1.091	468	1.949	-0,89	1,11	-1,63	0,04
Kabupaten Klungkung	198	681	261	1.140	34,59	2,15	-13,82	2,10	180	702	288	1.169	-9,43	3,11	10,47	2,61
Kabupaten Karangasem	234	953	375	1.562	29,86	-2,10	-4,90	0,91	276	1.013	400	1.689	18,10	6,23	6,86	8,16
Kabupaten Gianyar	806	941	305	2.052	20,84	-0,19	53,04	13,43	989	966	350	2.305	22,74	2,67	16,73	12,35
Kabupaten Badung	6.687	573	310	7.570	57,04	-8,82	47,81	48,54	6.792	610	381	7.782	1,56	6,53	22,85	2,81
Kabupaten Buleleng	376	1.270	511	2.157	-20,26	-5,88	19,05	-4,14	440	1.333	598	2.371	16,93	4,94	17,12	9,91
Kabupaten Bangli	121	706	334	1.161	2,86	-10,77	44,39	1,83	139	737	322	1.198	15,16	4,31	-3,71	3,13
Kabupaten Jemberana	130	692	298	1.120	8,70	-7,21	-11,38	-6,79	132	727	290	1.149	1,10	5,16	-2,68	2,60
Total	9.801	7.803	3.174	20.779	34,46	-4,11	17,80	14,66	10.210	8.096	3.429	21.734	4,17	3,75	8,03	4,60

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah

62. Jumlah kunjungan wisman ke Provinsi Bali pada tahun 2018 tercatat sebesar 6,073 juta orang atau tumbuh sebesar 6,55% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 2017 yang sebesar 15,62% (yoy) atau sebesar 5,70 juta orang.

pada tahun 2019, dialami oleh Kabupaten Tabanan, yang hanya tumbuh sebesar 0,04% (yoy). Rendahnya peningkatan pagu anggaran tersebut, disebabkan oleh penurunan pagu anggaran untuk komponen PAD dan komponen lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini disebabkan oleh realisasi PAD yang rendah pada tahun 2018, berdampak target PAD yang disusun pada 2019 lebih rendah mengkomodasi capaian tahun 2018.

2.3.2. Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota

Realisasi gabungan pendapatan 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali pada triwulan I 2019 tercatat sebesar Rp3,95 triliun, atau meningkat 7,30% (yoy). Peningkatan realisasi pendapatan tersebut lebih tinggi (terakselerasi) dibandingkan triwulan I 2018 yang tumbuh sebesar 4,67% (yoy). Peningkatan realisasi pendapatan gabungan 9 kabupaten/kota tersebut, terutama didukung oleh meningkatnya realisasi dua komponen pendapatan, yaitu dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Meningkatnya realisasi dana perimbangan, sejalan dengan upaya kabupaten/kota untuk memenuhi semua kelengkapan dokumen dan administrasi, termasuk yang terkait dengan perencanaan proyek (DAK fisik) yang merupakan syarat pencairan. Sementara realisasi pendapatan komponen PAD di triwulan I 2019 mengalami penurunan dibanding triwulan I 2018⁶³, terutama disebabkan oleh melambatnya pendapatan pajak daerah, sejalan dengan perlambatan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali (terkonfirmasi kedatangan penumpang di Bandara)⁶⁴, yang disebabkan tingginya tarif pesawat udara.

Secara spesifik, daerah dengan pertumbuhan realisasi pendapatan tertinggi pada triwulan I 2019 adalah Kabupaten Bangli, yaitu sebesar 31,85% (yoy) dengan nilai nominal Rp205 miliar, terutama didukung oleh peningkatan realisasi pendapatan dari komponen dana perimbangan. Kondisi ini didukung oleh kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangli yang berupaya secara optimal mencapai target realisasi pencairan dana perimbangan melalui pemenuhan dokumen administrasi yang merupakan syarat pencairan anggaran khususnya terkait dengan DAK fisik. Sementara itu, daerah dengan peningkatan realisasi pendapatan terendah adalah Kabupaten Badung yang turun sebesar 0,03% (yoy). Kondisi ini terutama disebabkan menurunnya realisasi pendapatan dari komponen pajak daerah, sejalan jumlah kedatangan wisatawan yang melambat pada periode triwulan I 2019 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya⁶⁵.

Berdasarkan capaian realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan, realisasi pendapatan gabungan 9 kabupaten/kota pada triwulan I 2019 tercatat mencapai 18,17% dari target anggaran, meningkat dibanding triwulan I 2018 yang tercatat sebesar 17,71%. Peningkatan ini terutama didukung oleh meningkatnya capaian realisasi di 6 kabupaten/kota di Provinsi Bali (grafik 2.7), yang sejalan dengan peningkatan realisasi penerimaan komponen dana perimbangan. Secara spesifik, daerah dengan capaian persentase realisasi tertinggi pada triwulan I 2019 adalah Kabupaten Tabanan (24,89%), meningkat

Tabel 2.12. Realisasi Pendapatan Daerah 9 Kabupaten/Kota Triwulan 1 (2018-2019)

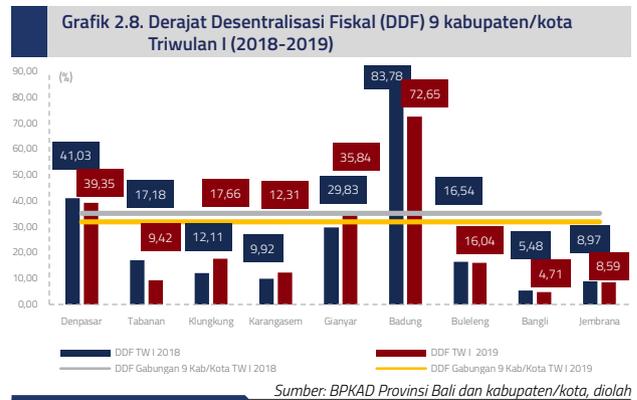
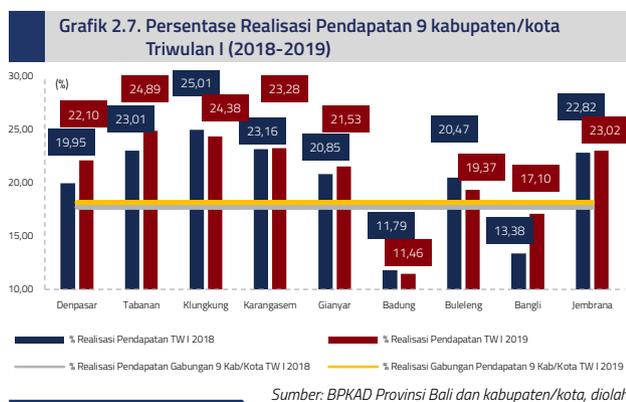
Daerah Tingkat II	Realisasi TW I 2018 (Rp Miliar)				Growth TW I 2018 (%yoy)				Realisasi TW I 2019 (Rp Miliar)				Growth TW I 2019 (%yoy)			
	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan
Kota Denpasar	169	238	5	413	-2,51	-12,88	-26,93	-9,14	184	268	16	469	8,95	12,65	199,09	13,61
Kabupaten Tabanan	77	285	87	448	44,50	18,62	1053,73	49,00	46	328	112	485	-40,64	15,05	29,07	8,19
Kabupaten Klungkung	35	207	43	285	25,58	1,34	68,84	10,65	50	211	24	285	45,87	1,94	-45,75	0,00
Kabupaten Karangasem	36	258	68	362	-5,33	-11,36	805,20	7,53	48	302	43	393	34,94	17,20	-37,35	8,72
Kabupaten Gianyar	128	269	31	428	14,44	-2,25	315,73	8,52	178	282	36	496	39,37	4,90	16,10	16,00
Kabupaten Badung	748	136	8	892	6,87	-23,30	12,80	0,86	648	196	48	892	-13,30	43,90	464,89	-0,03
Kabupaten Buleleng	73	330	39	442	12,52	-15,91	40,14	-8,90	74	339	47	459	0,86	2,75	20,60	4,00
Kabupaten Bangli	9	136	11	155	449,03	-4,07	#DIV/0!	8,18	10	195	0	205	13,28	43,24	-100,00	31,85
Kabupaten Jembrana	23	206	27	256	2,05	-2,94	5,83	-1,66	23	217	25	265	-0,87	5,01	-4,75	3,47
Total	1.297	2.066	319	3.681	8,73	-6,46	175,04	4,67	1.261	2.338	350	3.949	-2,73	13,20	9,85	7,30

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah

63. Realisasi PAD gabungan 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali pada triwulan I 2019 tercatat turun 2,73% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I 2018 yang tumbuh 8,73% (yoy)

64. Kedatangan penumpang di Bandara Ngurah Rai pada triwulan I 2019 tercatat tumbuh sebesar 2,86% (yoy), melambat dibanding triwulan I 2018 yang tumbuh sebesar 8,82% (yoy)

dibanding triwulan I 2018. Kondisi ini didorong oleh tumbuh dan berkembangnya beberapa destinasi wisata dan hotel serta restoran di wilayah Tabanan. Sejalan dengan itu, upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah melalui implementasi elektronikasi dan transaksi nontunai untuk beberapa sumber-sumber pendapatan daerah termasuk retribusi parkir, juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Tabanan pada triwulan I 2019. Sementara itu, kabupaten dengan capaian realisasi pendapatan daerah terendah pada triwulan I 2019 (grafik 2.7) adalah Kabupaten Badung (11,46%), dimana capaian realisasi tersebut jauh lebih rendah dibanding capaian triwulan I 2018 (11,79%). Kondisi ini disebabkan melambatnya jumlah kunjungan wisatawan dan penurunan lama tinggal wisatawan di hotel berbintang⁶⁵. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan khususnya domestik, sebagai akibat tingginya harga tiket pesawat udara. Penurunan realisasi pendapatan Kabupaten Badung juga disebabkan tingkat kepatuhan penyeteroran pajak daerah oleh wajib pajak yang relatif masih rendah.



Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) untuk 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali pada triwulan I 2019 mengalami penurunan (grafik 2.8), tercermin dari penurunan nilai DDF pada seluruh kabupaten/Kota. Hanya Kabupaten Badung yang memiliki nilai persentase DDF lebih dari 50%, yaitu 72,65%. Kabupaten lain dengan nilai DDF terbesar kedua pada triwulan I 2019 adalah Kota Denpasar (39,35%). Kondisi ini menunjukkan masih besarnya ketergantungan fiskal seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali terhadap sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, yaitu komponen dana perimbangan. Daerah dengan nilai DDF terendah adalah Kabupaten Bangli (4,71%), menurun dibanding triwulan I 2018 (5,48%). Secara umum terjadi penurunan nilai DDF pada triwulan I 2019 dibanding periode yang sama tahun 2018 untuk seluruh kabupaten/kota (grafik 2.8). Hal ini menunjukkan masih terbatas dan belum optimalnya kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam mendorong peningkatan sumber-sumber PAD untuk mencapai kemandirian fiskal daerah.

2.3.3. Pagu Belanja APBD Kabupaten/Kota

Pagu anggaran belanja gabungan 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp23,17 triliun atau tumbuh 2,81% (yoy), lebih rendah dibanding peningkatan

65. Kedatangan penumpang di Bandara Ngurah Rai pada triwulan I 2019 tercatat tumbuh sebesar 2,86% (yoy), melambat dibanding triwulan I 2018 yang tumbuh sebesar 8,82% (yoy)

66. - Kedatangan penumpang di Bandara Ngurah Rai pada triwulan I 2019 tercatat tumbuh sebesar 2,86% (yoy), melambat dibanding triwulan I 2018 yang tumbuh sebesar 8,82% (yoy)

- Rata-rata lama tinggal wisatawan pada hotel berbintang pada triwulan I 2019 tercatat sebesar 3,26 hari, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2018 yang sebesar 3,28 hari.

Tabel 2.13. Pagu Anggaran Belanja Daerah 9 Kabupaten/Kota (2018-2019)

Daerah Tingkat II	Pagu Belanja APBD P 2018 (Rp Miliar)				Growth Tahun 2018 (% yoy)				Pagu Belanja APBD 2019 (Rp Miliar)				Growth Tahun 2019 (% yoy)			
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja
Kota Denpasar	1.851	304	202	2.356	7,45	-6,14	-10,46	3,75	1.828	353	196	2.377	-1,75	16,26	-2,85	0,47
Kabupaten Tabanan	1.498	473	244	2.215	5,54	-9,62	0,84	1,39	1.466	483	273	2.222	-2,14	2,23	11,98	0,34
Kabupaten Klungkung	931	164	116	1.211	3,50	-22,32	1,64	-1,12	958	162	123	1.244	2,98	-0,95	6,04	2,74
Kabupaten Karangasem	1.221	187	191	1.598	3,75	-37,00	7,29	-3,18	1.344	204	213	1.761	10,09	9,27	11,72	10,19
Kabupaten Gianyar	1.578	322	261	2.161	16,18	-26,51	3,99	5,56	1.753	633	276	2.663	11,10	96,83	5,72	23,21
Kabupaten Badung	5.075	1.649	1.439	8.163	36,44	11,52	47,76	32,26	5.128	1.440	1.374	7.941	1,03	-12,70	-4,52	-2,72
Kabupaten Buleleng	1.749	238	239	2.225	5,80	-29,25	-14,45	-1,88	1.776	370	264	2.410	1,54	55,94	10,50	8,31
Kabupaten Bangli	770	221	273	1.264	5,25	-13,41	47,21	7,83	858	237	265	1.360	11,37	7,32	-2,92	7,57
Kabupaten Jemberana	803	393	135	1.330	1,10	12,16	7,62	4,79	839	213	138	1.189	4,52	-45,85	2,25	-10,58
Total	15.485	3.949	3.099	22.533	14,85	-6,23	20,40	11,17	15.950	4.096	3.122	23.168	3,00	3,72	0,74	2,81

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah

pagu anggaran gabungan tahun 2018 yang sebesar 11,17% (yoy). Melambatnya peningkatan pagu anggaran belanja tersebut, disebabkan oleh perlambatan peningkatan pagu komponen belanja operasional dan pagu komponen belanja transfer dan tak terduga. Sedangkan, pagu belanja modal dapat tumbuh positif dan meningkat lebih tinggi, sehingga menjadi faktor yang dapat menahan perlambatan pagu belanja daerah 2019.

Secara spesifik, daerah yang menunjukkan pertumbuhan pagu anggaran belanja tertinggi di 2019 adalah Kabupaten Gianyar (23,21%,yoy), sedangkan daerah dengan pertumbuhan pagu belanja terendah adalah Kabupaten Jemberana, yang turun sebesar 10,58% (yoy). Peningkatan pagu anggaran belanja Kabupaten Gianyar, sejalan dengan peningkatan pagu anggaran pendapatan daerah Gianyar 2019. Selain itu, peningkatan tersebut juga didukung oleh peningkatan yang signifikan terhadap komponen belanja modal dibanding tahun 2018. Kondisi ini sejalan dengan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Gianyar yang terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar destinasi wisata, dalam rangka mendorong

peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan kualitas pariwisata di wilayah tersebut. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan realisasi PAD, khususnya yang bersumber dari komponen pajak daerah. Sementara itu, penurunan pagu anggaran belanja Kabupaten Jemberana, disebabkan oleh rendahnya realisasi pendapatan daerah pada 2018, sehingga dalam penyusunan pagu anggaran tahun 2019 disusun dengan peningkatan yang terbatas, mempertimbangkan capaian yang diraih di 2018.

2.3.4. Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota

Realisasi belanja gabungan 9 kabupaten/kota pada triwulan I 2019 tercatat sebesar Rp2,84 triliun, atau tumbuh 25,65% (yoy), sedikit meningkat dibanding triwulan I 2018 yang sebesar Rp2,26 triliun. Peningkatan tersebut, terutama didukung oleh meningkatnya realisasi komponen belanja modal yang signifikan, sementara komponen lainnya mengalami peningkatan yang tidak signifikan. Peningkatan realisasi belanja gabungan 9 kabupaten/kota di triwulan I 2019 juga didukung oleh peningkatan realisasi pendapatan gabungan 9 kabupaten/kota di periode yang sama, sehingga mendorong akselerasi realisasi belanja.

Tabel 2.14. Realisasi Belanja Daerah 9 Kabupaten/Kota Triwulan I (2018-2019)

Daerah Tingkat II	Triwulan I 2018 (Rp Miliar)				Growth Tahunan TW1 2018 (%yoy)				Triwulan I 2019 (Rp Miliar)				Growth Tahunan TW1 2019 (%yoy)			
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja
Kota Denpasar	213	0,17	5	219	4,06	-50,00	0,00	6,64	270	0,23	23	293	26,70	35,29	312,77	33,87
Kabupaten Tabanan	255	1,97	53	310	33,57	48,12	78,47	39,67	203	3,40	104	311	-20,48	72,59	96,31	0,10
Kabupaten Klungkung	132	0,62	7	139	22,72	-66,12	21,52	21,24	130	0,15	3	133	-0,99	-75,81	-61,46	-4,24
Kabupaten Karangasem	168	1,14	11	180	14,34	-96,73	-15,27	-7,55	175	0,74	37	212	4,43	-35,09	227,80	18,03
Kabupaten Gianyar	223	18,34	39	281	23,20	597,34	277,18	44,62	201	0,81	42	244	-9,75	-95,58	6,23	-13,12
Kabupaten Badung	459	15,60	124	599	26,39	38.900	47,56	33,85	716	211	123	1.051	55,95	#####	-0,76	75,30
Kabupaten Buleleng	235	1,67	30	267	17,81	39,17	83,71	22,87	246	0,94	56	303	4,59	-43,71	86,05	13,41
Kabupaten Bangli	81	0,01	32	113	-8,82		3.672,62	25,71	113	0	21	134	39,39	-100,00	-33,73	18,80
Kabupaten Jemberana	116	10,80	27,8	154	14,49	610,53	62,62	28,97	127	0,32	35	162	9,83	-97,04	24,60	5,01
Total	1.882	50	330	2.262	18,83	15,04	85,79	25,32	2.182	217	443	2.842	15,95	332,08	34,27	25,65

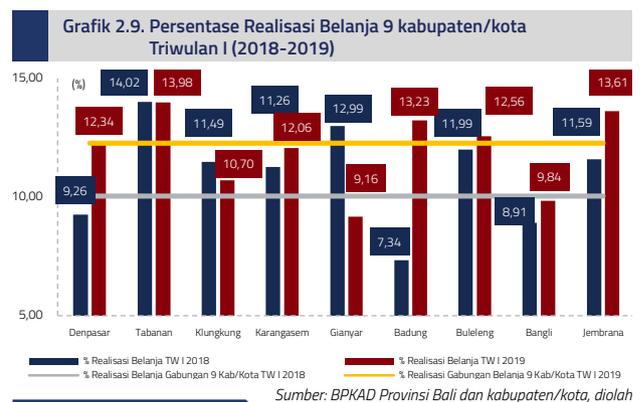
Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah

Kondisi tersebut mendorong percepatan realisasi dan pelaksanaan beberapa kegiatan dan program pada triwulan I 2019. Peningkatan realisasi belanja gabungan 9 kabupaten/kota yang signifikan tersebut, menjadi salah satu pendorong akselerasi kinerja konsumsi pemerintah (PDRB) Provinsi Bali pada triwulan I 2019, yang tumbuh signifikan sebesar 20,84% (yoy), terakselerasi dibanding triwulan I 2018 (14,23%,yoy) dan dibanding triwulan IV 2018 yang berkontraksi 7,57% (yoy).

Secara spesifik, daerah dengan peningkatan realisasi belanja tertinggi pada triwulan I 2019 adalah Kota Denpasar (33,87%, yoy), lebih tinggi dibanding periode yang sama 2018. Peningkatan yang tinggi tersebut terkait kebijakan Kota Denpasar yang terus berupaya mendorong percepatan realisasi belanja, antara lain melalui unit khusus yang menangani pengadaan barang dan jasa di bawah koordinasi Sekretaris Daerah, sehingga dapat mempercepat dan mempermudah proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, pelaksanaan evaluasi dan *monitoring* secara kontinu dan berkala terhadap realisasi belanja pemerintah pada semua OPD, juga menjadi faktor pendorong percepatan realisasi belanja. Sementara itu, daerah dengan realisasi belanja terendah pada triwulan I 2019 adalah Kabupaten Gianyar, yang mengalami kontraksi 13,12% (yoy), jauh lebih rendah dibanding triwulan I 2018 yang tumbuh 44,62% (yoy). Kondisi ini disebabkan kabupaten Gianyar baru memiliki pimpinan daerah yang baru, sehingga implementasi program kerja mengalami penyesuaian dan penyalarsan dengan visi dan misi pimpinan daerah terpilih, yang membutuhkan waktu. Sejalan dengan itu, adanya penggantian pimpinan beberapa OPD, juga berdampak pada implementasi program kerja dan realisasi belanja daerah yang tidak optimal pada triwulan I 2019.

Berdasarkan capaian realisasi belanja daerah, realisasi belanja gabungan 9 kabupaten/kota

pada triwulan I 2019 mencapai 12,27% terhadap target anggaran belanja, meningkat dibanding triwulan I 2018 yang sebesar 10,04%. Peningkatan ini terutama didorong oleh meningkatnya realisasi belanja pada 6 daerah, termasuk Badung dan Denpasar yang merupakan daerah dengan pagu anggaran terbesar. Meningkatnya realisasi belanja tersebut, juga sejalan dengan meningkatnya realisasi pendapatan daerah di periode yang sama. Peningkatan realisasi belanja gabungan kabupaten/kota pada triwulan I 2019 tersebut yang menjadi faktor pendorong akselerasi kinerja konsumsi pemerintah (PDRB) pada triwulan I 2019 yang terakselerasi dibanding triwulan I 2018 dan triwulan IV 2018⁶⁷.



Secara spesifik, kabupaten dengan realisasi belanja tertinggi pada triwulan I 2019 adalah Kabupaten Tabanan (13,98%), sementara yang terendah adalah Kabupaten Gianyar (9,16%). Peningkatan realisasi belanja kabupaten Tabanan tersebut didukung oleh upaya percepatan tahapan realisasi belanja yang dilakukan oleh beberapa OPD, sejalan upaya mendorong peningkatan peran sisi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sejalan dengan itu, kebijakan evaluasi dan *monitoring* yang dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan oleh pemerintah kabupaten Tabanan terhadap capaian realisasi anggaran, juga ikut mendorong tercapainya peningkatan realisasi belanja tersebut. Sementara itu, daerah dengan capaian realisasi belanja terendah

67. Komponen Konsumsi Pemerintah di Provinsi Bali pada triwulan I 2019 tercatat tumbuh sebesar 20,84% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan I 2018 yang sebesar 14,23% (yoy)

adalah Kabupaten Gianyar (9,16%). Rendahnya realisasi belanja tersebut, disebabkan oleh realisasi pendapatan daerah yang juga rendah sejalan dengan penurunan realisasi PAD akibat melambatnya jumlah kunjungan wisatawan dan penurunan lama tinggal di hotel berbintang akibat harga tiket yang tinggi. Kondisi ini juga terkonfirmasi oleh menurunnya lama tinggal di hotel berbintang pada periode TW I 2019 dibanding TW I 2018, sehingga berdampak pada penurunan penerimaan PHR.

Apabila dibandingkan dengan pagu anggaran belanjanya, maka daerah dengan persentase realisasi belanja tertinggi pada TW I 2019 diraih oleh Kabupaten Tabanan (24,89%). Capaian tersebut sejalan dengan upaya percepatan realisasi belanja yang dilakukan oleh Kabupaten Tabanan dalam mendorong peningkatan peran fiskal terhadap ekonomi daerah.

2.4. REALISASI APBN PROVINSI BALI

2.4.1. Pagu Belanja APBN Provinsi Bali

Dalam rangka pembiayaan belanja dan program di daerah, Pemerintah Pusat mengalokasikan sejumlah anggaran APBN untuk direalisasikan di Wilayah Bali. Belanja pemerintah pusat melalui APBN tersebut, antara lain digunakan untuk membiayai gaji pegawai Kementerian atau instansi vertikal yang bertugas di Bali. Selain itu, belanja APBN digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur strategis yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.

Pagu anggaran belanja APBN tahun 2019 tercatat sebesar Rp 11,55 triliun atau menurun 0,74%

(yoy), lebih rendah dibanding tahun 2018 yang meningkat 8,60% (yoy). Penurunan ini, terutama disebabkan oleh menurunnya pagu anggaran belanja pegawai dan belanja barang, masing-masing sebesar 5,87% (yoy) dan 9,99% (yoy). Sedangkan pagu belanja modal, belanja bantuan sosial dan bantuan transfer tetap tumbuh positif. Struktur pagu belanja APBN tahun 2019, masih didominasi oleh belanja pegawai (pangsa 34,11%) dan belanja barang (pangsa 34,26%). Sementara belanja modal menempati urutan ketiga dengan pangsa 20,16%. Struktur ini relatif tidak jauh berbeda dibandingkan dengan pagu anggaran APBN-P tahun 2018.

2.4.2. Realisasi Belanja APBN Provinsi Bali

Realisasi belanja APBN untuk Provinsi Bali pada triwulan I 2019 tercatat sebesar Rp1,92 triliun atau 16,65% dari target anggaran belanja. Capaian ini meningkat dibanding realisasi belanja APBN triwulan I 2018 yang tercatat sebesar Rp1,65 triliun atau 14,20% terhadap target anggaran. Peningkatan nominal dan persentase realisasi belanja APBN tersebut, terutama didorong oleh upaya pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga vertikal untuk mempercepat proses dan tahapan realisasi belanja dalam rangka mendorong peran fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan upaya pemerintah untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur. Percepatan ini khususnya terjadi pada kementerian dan lembaga yang terkait dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan yang dilakukan dengan memajukan

Tabel 2.15. Pagu Anggaran Belanja APBN di Provinsi Bali (2018-2019)

Jenis Komponen	Pagu APBN P 2018 (Rp Miliar)	Growth Pagu 2018 (%yoy)	Pagu APBN 2019 (Rp Miliar)	Growth Pagu 2019 (%yoy)
Pegawai	4.187	9,65	3.941	-5,87
Barang	4.397	22,80	3.958	-9,99
Modal	1.885	7,73	2.329	23,53
Bantuan Sosial	12	14,21	16	35,03
Bantuan Transfer	1.159	-25,66	1.310	13,00
Total	11.641	8,60	11.554	-0,74

Sumber: DJPBN Wilayah Bali, diolah

68. - Kedatangan penumpang di Bandara Ngurah Rai pada triwulan I 2019 tercatat tumbuh sebesar 2,86% (yoy), melambat dibanding triwulan I 2018 yang tumbuh sebesar 8,82% (yoy)
 - Rata-rata lama tinggal wisatawan pada hotel berbintang pada triwulan I 2019 tercatat sebesar 3,26 hari, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2018 yang sebesar 3,28 hari.

tahapan pengadaan menjadi di triwulan IV 2018. Kondisi ini tercermin oleh peningkatan yang signifikan pada realisasi belanja modal di triwulan I 2019 yang mencapai 14,06%, jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama 2018 yang hanya sebesar 4,49%. **Peningkatan realisasi ini, menjadi salah satu faktor yang mendorong akselerasi pertumbuhan kinerja komponen konsumsi pemerintah (PDRB), yang tumbuh signifikan pada triwulan I 2019 dibanding triwulan I 2018⁶⁹.** Monitoring dan evaluasi anggaran yang dilakukan secara berkala dan kontinu secara periodik, serta memasukkan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai salah satu komponen indikator kinerja pegawai, menjadikan semua lembaga pengguna anggaran APBN berupaya untuk mempercepat tahapan dan proses realisasi belanja. Faktor ini juga berkontribusi terhadap peningkatan capaian realisasi belanja di triwulan I 2019. Sementara itu, menurunnya realisasi penyerapan bantuan sosial dan bantuan transfer, disebabkan karena satuan kerja

teknis terkait terlambat menerima petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program yang terkait dengan penyerapan kedua komponen tersebut, sehingga menahan laju realisasinya.

Bila dianalisis lebih dalam, realisasi belanja APBN pada triwulan I 2019 mengalami peningkatan sebesar 16,43% (yoy), tumbuh melambat dibanding peningkatan realisasi belanja triwulan I 2018 yang tercatat sebesar 32,62% (yoy). Perlambatan tersebut, sejalan dengan menurunnya pertumbuhan pagu anggaran belanja 2019 di Wilayah Bali. Secara spesifik, komponen dengan peningkatan terendah adalah komponen bantuan sosial yang turun 45,08% (yoy) dan komponen bantuan transfer yang turun 29,64% (yoy). Sedangkan komponen belanja pegawai dan komponen belanja modal tetap mengalami akselerasi pertumbuhan secara tahunan, yaitu belanja modal (dari kontraksi 1,50% menjadi meningkat 286,31%) dan belanja pegawai (dari 2,92% menjadi 6,87%).

Tabel 2.16. Realisasi Belanja APBN di Provinsi Bali Triwulan I (2018-2019)

Jenis Belanja	Tahun 2018			Growth Realisasi (%yoy)	Tahun 2019			Growth Realisasi (%yoy)
	Pagu Anggaran Perubahan (Rp Miliar)	Realisasi Anggaran TW I (Rp Miliar)	Persentase Realisasi Terhadap Pagu (%)		Pagu Anggaran (Rp Miliar)	Realisasi Anggaran TW I (Rp Miliar)	Persentase Realisasi Terhadap Pagu (%)	
Pegawai	4.187	799	19,08	2,92	3.941	854	21,66	6,87
Barang	4.397	536	12,19	39,90	3.958	579	14,64	8,11
Modal	1.885	85	4,49	-1,50	2.329	327	14,06	286,31
Bantuan Sosial	12	1,65	13,96	57,21	16	0,90	5,68	-45,08
Bantuan Transfer	1.159	232	19,98		1.310	163	12,44	-29,64
Total	11.641	1.653	14,20	32,62	11.554	1.924	16,65	16,43

Sumber: DJPBN Wilayah Bali, diolah

69. Komponen Konsumsi Pemerintah di Provinsi Bali pada triwulan I 2019 tercatat tumbuh sebesar 20,84% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan I 2018 yang sebesar 14,23% (yoy)

halaman ini sengaja dikosongkan



Tari Kecak - Pura Luhur Uluwatu - Badung

BAB III

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH



1,85% (yoy)
triwulan I
2019

Inflasi Tahunan Bali
3,13% (yoy)
triwulan IV
2018

1,74% (yoy)
triwulan I
2019

Inflasi Tahunan Denpasar
3,40% (yoy)
triwulan IV
2018

0,57% (yoy)
triwulan I
2019

Inflasi Tahunan Singaraja
1,87% (yoy)
triwulan IV
2018

2,20%-2,60% (yoy)
triwulan II
2019

Inflasi Tahunan Bali
1,85% (yoy)
triwulan I
2019

- Realisasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan I 2019 tercatat sebesar 1,85% (yoy), melandai dibanding triwulan IV 2018 yang sebesar 3,13% (yoy).
- Inflasi Provinsi Bali pada triwulan II 2019 diprakirakan akan meningkat dibanding realisasi inflasi triwulan I 2019, yaitu dalam kisaran 2,20%-2,60% (yoy).

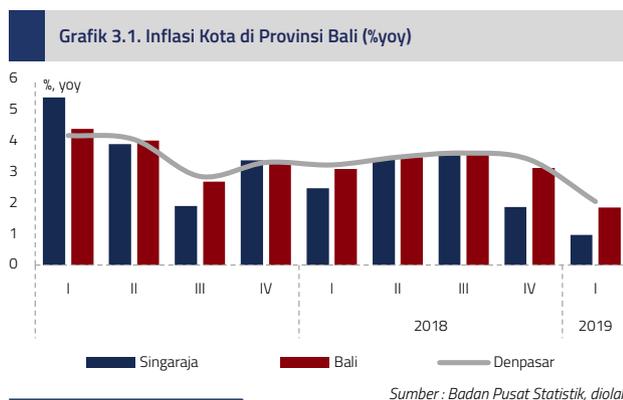
Inflasi Provinsi Bali pada triwulan I 2019 tercatat sebesar 1,85% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,13% (yoy) dan lebih rendah dibanding triwulan I 2018 (3,10%, yoy). Realisasi inflasi ini juga lebih rendah dibanding inflasi nasional triwulan I 2019 (2,48%, yoy). Dengan demikian inflasi IHK Provinsi Bali pada triwulan I 2018 masih berada dalam di bawah kisaran sasaran inflasi nasional.

Terjaganya inflasi di Provinsi Bali didukung oleh semakin solidnya upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Namun demikian, masih terdapat beberapa potensi risiko seperti kenaikan tarif angkutan udara seiring kebijakan beberapa maskapai penerbangan yang dapat menyebabkan tekanan inflasi kelompok *administered price* serta faktor cuaca dan ketergantungan pasokan bahan pangan pada daerah lain. Inflasi Provinsi Bali pada triwulan II 2019 diperkirakan lebih tinggi dibanding triwulan I 2019, yaitu pada kisaran 2,16% - 2,56% (yoy). Dengan demikian, inflasi Provinsi Bali tahun 2019 diperkirakan akan berada pada sasaran inflasi nasional sesuai PMK No.93/PMK.011/2014 sebesar 3,5%±1% (yoy).

3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI

Perkembangan Inflasi Triwulan I 2019

Inflasi Provinsi Bali pada triwulan I 2019 sebesar 1,85% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 3,13% (yoy) dan lebih rendah dibanding triwulan I 2018 (3,10%, yoy).



Realisasi inflasi ini juga lebih rendah dibanding inflasi nasional triwulan I 2019 (2,48%, yoy). Melandainya inflasi Provinsi Bali didorong oleh semua komponen disagregasi. Inflasi IHK Provinsi Bali pada triwulan I 2019 berada di bawah kisaran sasaran inflasi nasional yang sebesar 3,5%±1% (yoy).

Melandainya tekanan inflasi Provinsi Bali pada periode laporan terjadi pada semua kelompok pengeluaran, kecuali kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Sementara berdasarkan kota pembentuknya, penurunan tekanan inflasi di triwulan I 2019 terjadi pada kedua kota Denpasar dan Singaraja, masing-masing dari 3,40% (yoy) dan 1,88% (yoy) menjadi 2,05% (yoy) dan 0,97% (yoy). Secara bulanan, inflasi Provinsi Bali pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,26 (mtm), dengan rincian kota sampel Inflasi Denpasar sebesar 0,24% (mtm) dan Singaraja 0,35% (mtm).

Tracking Inflasi Triwulan II 2019

Pada April 2019, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,28% (mtm) atau 2,13% (yoy). Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi pada Januari 2019 antara bawang merah, angkutan udara dan bawang putih. Meskipun demikian, deflasi yang terjadi di beberapa komoditas pangan seperti beras, daging ayam ras dan ikan tongkol pindang menahan laju peningkatan inflasi Provinsi Bali yang lebih tinggi. Deflasi juga terjadi pada komoditas *administered price* yaitu tarif listrik dan bahan bakar rumah tangga. Secara bulanan dan

tahunan, inflasi Provinsi Bali pada April 2019 masih lebih rendah dibanding nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,44% (mtm) dan 2,83% (yoy).

Secara spasial, peningkatan tekanan inflasi terjadi di kedua kota sampel penghitungan inflasi di Bali. Kota Denpasar mencatat inflasi 0,26% (mtm) atau 2,24% (yoy), sementara kota Singaraja mencatat inflasi 0,39% (mtm) atau 1,63% (yoy). Dibanding kota sampel lainnya, pencapaian inflasi Kota Denpasar dan Singaraja berada pada level yang moderat. Komoditas penyumbang terjadinya inflasi di Denpasar adalah bawang merah (dengan andil sebesar 0,18), angkutan udara (0,11), bawang putih (0,05), bimbingan belajar (0,04), serta sepeda motor (0,04). Sementara, komoditas yang mengalami penurunan indeks harga antara lain daging ayam ras (andil sebesar -0,08), beras (-0,07), tongkol pindang (-0,05), minyak goreng (-0,02), dan semen (-0,02). Di sisi lain, komoditas yang menyumbang inflasi di Kota Singaraja pada April 2019 adalah bawang merah (andil sebesar 0,21), ayam goreng (0,10), tomat sayur (0,05), telur ayam ras (0,05), dan apel (0,04). Sementara, komoditas yang mengalami deflasi adalah beras (dengan andil sebesar -0,07), taug/kecambah (-0,05), daging ayam ras (-0,02), laying/benggol (-0,02) dan kentang (-0,02).

Inflasi Provinsi Bali pada triwulan II 2019 diperkirakan lebih tinggi dibanding triwulan I 2019, yaitu pada kisaran 2,20% - 2,60% (yoy). Terdapat beberapa tantangan tekanan inflasi pada triwulan II 2019 seiring adanya: (i) hari besar keagamaan nasional (HBKN), yaitu ramadhan pada bulan Mei 2019 dan Hari Raya Idul Fitri pada bulan Juni 2019 yang berpotensi mendorong permintaan, (ii) kebijakan maskapai dalam mempertahankan tarif angkutan udara pada level yang relatif tinggi, serta (iii) peningkatan pendapatan seiring dengan pencairan THR pada bulan Mei 2019 juga berpotensi meningkatkan konsumsi yang dapat berdampak pada peningkatan harga komoditas kelompok inti. Menyikapi adanya risiko dan

tantangan tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali akan terus berupaya melakukan pengendalian harga baik melalui forum koordinasi dan langkah tindak lanjut dengan OPD terkait. Program kerja TPID akan difokuskan pada pada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif untuk mengendalikan konsumsi dan ekspektasi berlebih. Upaya stabilisasi harga melalui pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar insidentil juga akan dilanjutkan sehingga diharapkan dapat menjadi jangkar dalam penetapan harga dan menahan laju inflasi yang dapat bersumber dari sisi permintaan, sisi penawaran, dan ekspektasi pelaku ekonomi.

3.2 ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI

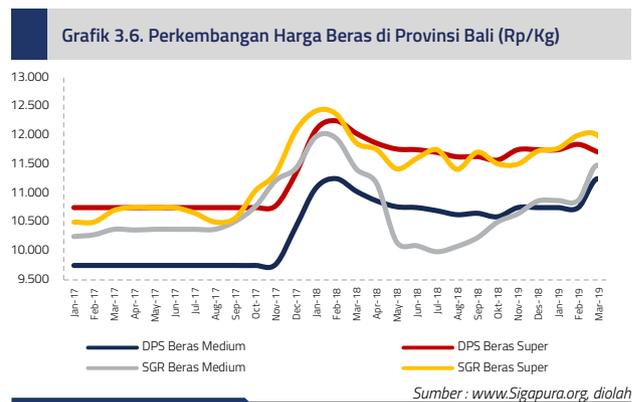
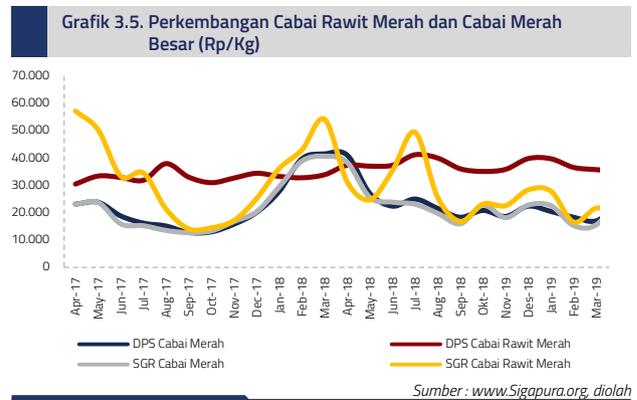
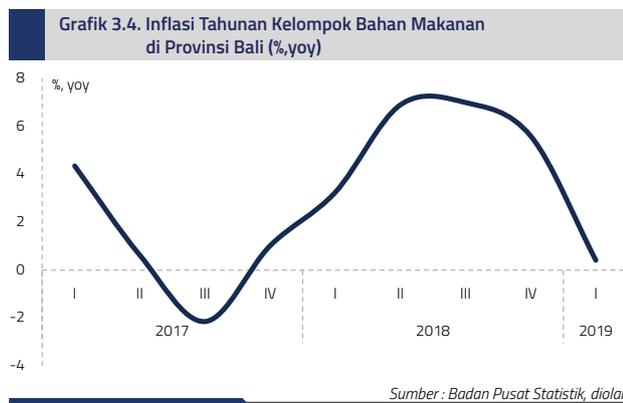
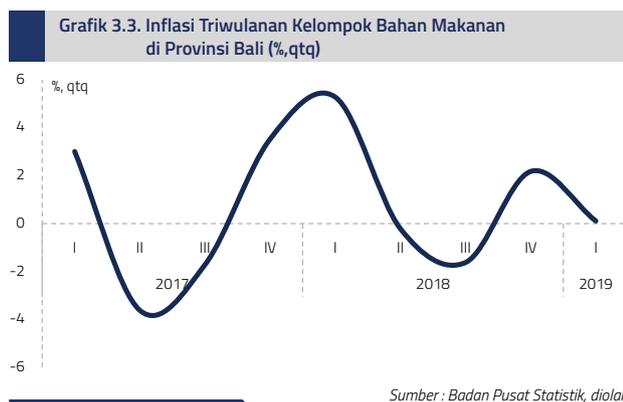
3.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

Melandainya tekanan inflasi Provinsi Bali pada triwulan I 2019 terjadi pada semua kelompok pengeluaran, kecuali kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

a) Kelompok Bahan Makanan

Secara tahunan, inflasi kelompok bahan makanan pada periode laporan tercatat sebesar 0,41% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,60% (yoy). Sementara secara triwulanan, kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 0,11% (qtq) pada triwulan I 2019, melandai dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 2,18% (qtq). Penurunan tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan terutama dipengaruhi oleh penurunan tekanan inflasi sub kelompok bumbu-bumbuan, sayur-sayuran dan padi-padian. Hal ini dipengaruhi oleh pasokan yang mencukupi seiring dengan masuknya periode panen tabama dan cukupnya pasokan komoditas hortikultura paska panen akhir tahun 2018. Penurunan inflasi kelompok bahan makanan yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan tekanan inflasi pada komoditas tomat sayur. Hal ini terbatasnya pasokan dari daerah sentra yang dipengaruhi oleh cuaca buruk sehingga produktifitas menurun.

Penurunan harga komoditas cabai merah besar di Provinsi Bali juga terkonfirmasi dari hasil pemantauan harga di SiGapura⁷⁰. Berdasarkan pemantauan di Denpasar, rata-rata harga cabai merah besar pada triwulan IV 2018 sebesar Rp20.680/kg, kemudian turun menjadi Rp18.664/kg di triwulan I 2019 (rata-rata). Tren penurunan harga cabai merah besar juga terjadi di kota Singaraja, yaitu dari harga rata-rata Rp21.322/kg pada triwulan IV 2018 menjadi Rp17.868/kg di triwulan I 2019 (rata-rata). Sementara itu, harga tomat sayur berdasarkan pemantauan di SiGapura secara rata-rata menunjukkan peningkatan dari Rp6.842/kg menjadi Rp10.554/kg di Denpasar, sedangkan di Singaraja dari Rp6.165/kg menjadi Rp9.283/kg.

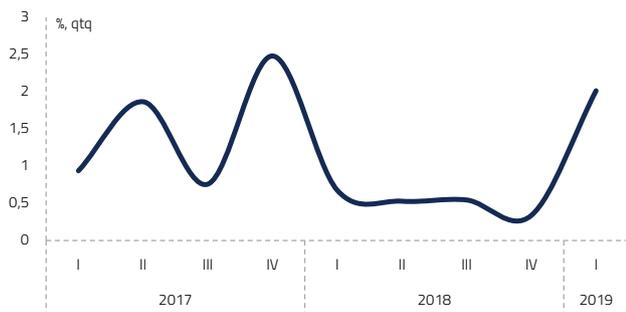


b) Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

Pada triwulan I 2019, inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau tercatat sebesar 3,46% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 2,11% (yoy). Sementara secara triwulanan inflasi kelompok ini juga mengalami peningkatan dari 0,34% (qdq) pada triwulan IV 2018 menjadi 2,01% (qdq) pada triwulan laporan. Peningkatan tekanan inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau terjadi di seluruh sub-kelompok, terutama disumbang oleh sub-kelompok makanan jadi yaitu air kemasan, rokok kretek filter dan ayam goreng.

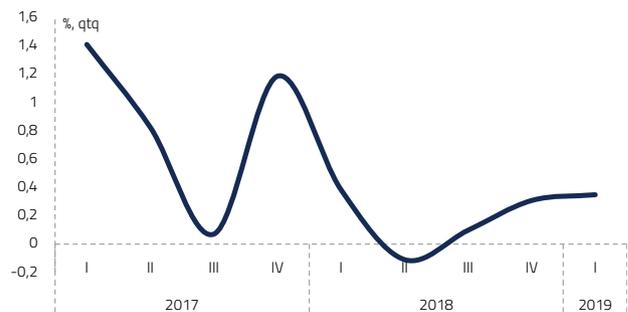
70. Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis. Dapat diakses melalui www.sigapura.org

Grafik 3.7. Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Provinsi Bali (% ,qtq)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.9. Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Provinsi Bali (% ,qtq)



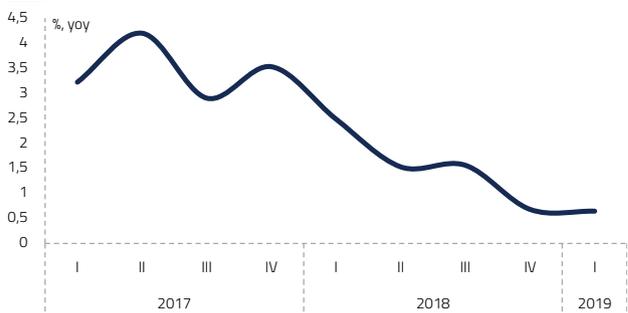
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.8. Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Provinsi Bali (% ,yoy)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.10. Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar di Provinsi Bali (% ,yoy)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

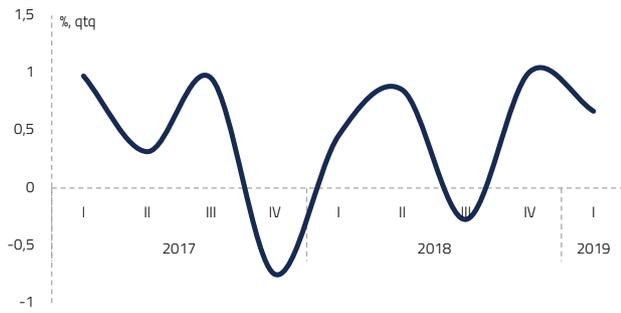
c) Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

Secara tahunan, inflasi kelompok perumahan, air, listrik, dan gas melandai dari 0,68% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 0,65% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara itu, secara triwulanan kelompok perumahan, air, listrik, dan gas pada triwulan I 2019 mengalami inflasi sebesar 0,35% (qtq), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang inflasi 0,31% (qtq). Melandainya inflasi kelompok ini secara tahunan didorong oleh menurunnya tekanan inflasi di sub-kelompok bahan bakar, penerangan dan air serta sub-kelompok perlengkapan rumah tangga.

d) Kelompok Sandang

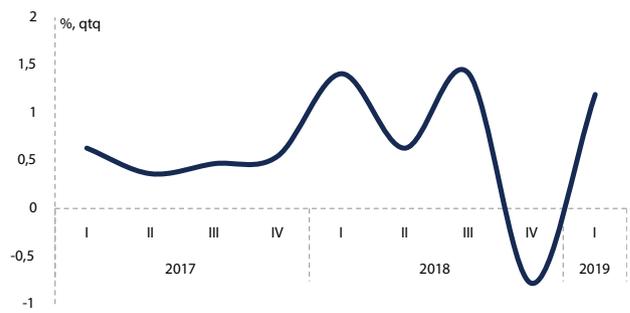
Pada triwulan laporan, secara tahunan inflasi kelompok sandang meningkat dari 2,06% (yoy) menjadi 2,28% (yoy). Sementara itu, secara triwulanan inflasi kelompok ini mengalami penurunan dari 1,01% (qtq) menjadi 0,67% (qtq) pada triwulan I 2019. Meningkatnya inflasi kelompok sandang secara tahunan disebabkan oleh peningkatan inflasi di semua sub-kelompok, kecuali kelompok sandang anak-anak.

Grafik 3.11. Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Provinsi Provinsi Bali (% ,qtq)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.13. Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Provinsi Provinsi Bali (% ,qtq)



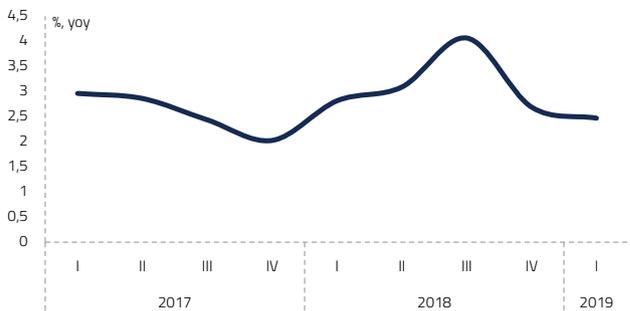
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.12. Inflasi Tahunan Kelompok Sandang di Provinsi Provinsi Bali (% ,yoy)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.14. Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Provinsi Provinsi Bali (% ,yoy)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

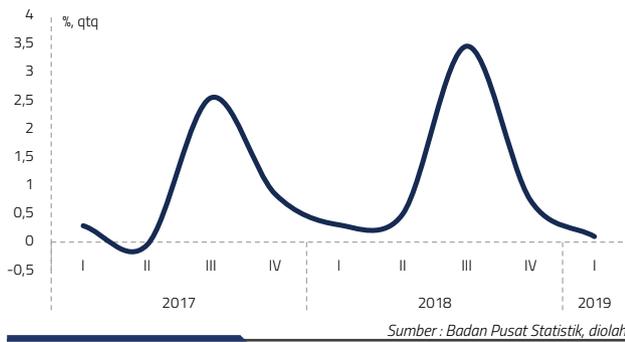
e) Kelompok Kesehatan

Pada triwulan I 2019, inflasi kelompok kesehatan tercatat sebesar 2,47% (yoy), melandai dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 2,69% (yoy). Penurunan ini didorong oleh turunnya tekanan inflasi sub-kelompok perawatan jasmani dan kosmetika dan jasa perawatan jasmani. Penurunan tekanan inflasi kelompok ini lebih dalam tertahan oleh peningkatan tekanan inflasi sub-kelompok jasa kesehatan dan obat-obatan. Sejalan dengan itu, inflasi kelompok kesehatan secara triwulanan tercatat sebesar 1,19% (qtq), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar -0,78% (qtq).

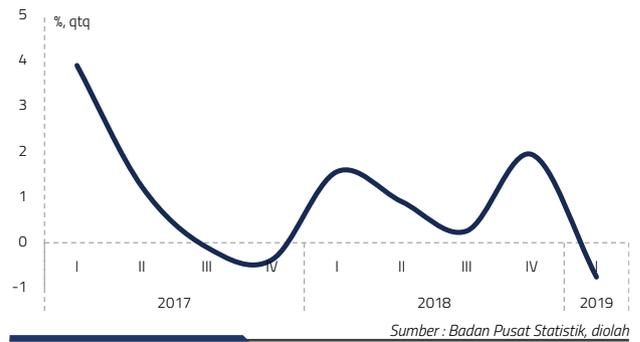
f) Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga

Secara tahunan, tekanan inflasi kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga pada triwulan I 2019 melandai menjadi 4,84% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,06% (yoy). Sejalan dengan tren tersebut, secara triwulanan tekanan inflasi kelompok ini juga mengalami penurunan dari 0,74% (qtq) pada triwulan IV 2018 menjadi 0,10% (qtq) pada triwulan I 2019. Penurunan tekanan inflasi ini didorong oleh penurunan tekanan inflasi pada sub-kelompok perlengkapan/peralatan pendidikan dan sub-kelompok rekreasi. Penurunan tekanan inflasi lebih dalam tertahan oleh peningkatan inflasi pada sub-kelompok kursus/pelatihan dan olahraga.

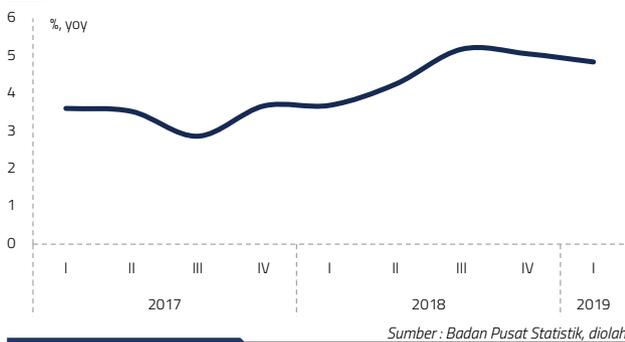
Grafik 3.15. Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga di Provinsi Bali (% ,qtq)



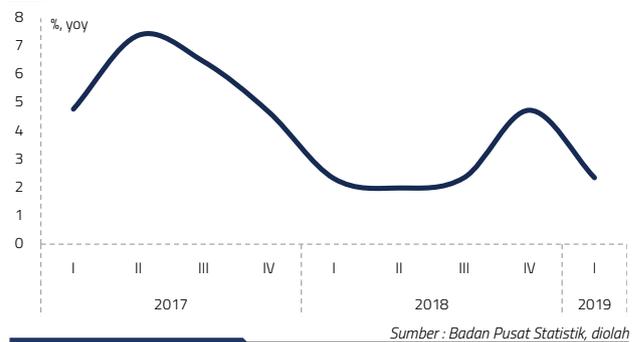
Grafik 3.17 Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (% ,qtq)



Grafik 3.16. Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga di Provinsi Bali (% ,yoy)



Grafik 3.18 Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (% ,yoy)

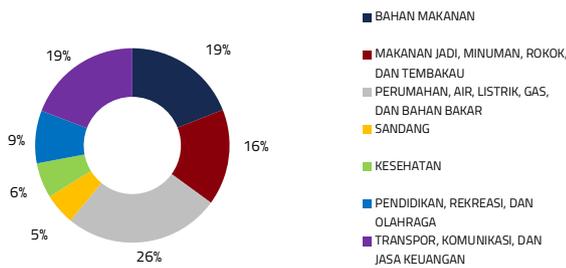


g) Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan
Inflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan secara tahunan melandai dari 4,74% (yoy) menjadi 2,35% (yoy) pada triwulan I 2019, didorong oleh penurunan tekanan inflasi di semua sub-kelompok, kecuali jasa keuangan. Hal ini dipengaruhi oleh masuknya periode *low season* pariwisata yang juga mempengaruhi penurunan permintaan. Sementara peningkatan inflasi sub-kelompok jasa keuangan dipengaruhi oleh peningkatan biaya administrasi asuransi. Secara triwulanan, inflasi kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan juga melandai dari 1,94% (qtq) pada triwulan IV 2018, menjadi -0,75% (qtq) di triwulan laporan.

3.2.2 INFLASI MENURUT KOTA

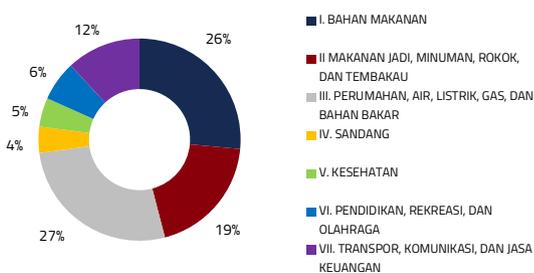
Sejak 1 Januari 2014 terdapat penambahan cakupan kota perhitungan inflasi di Provinsi Bali menjadi 2 (dua) kota sampel inflasi, yaitu Denpasar dan Singaraja. Berdasarkan SBH 2012, bobot Kota Denpasar terhadap inflasi nasional adalah 1,78%, sedangkan bobot Kota Singaraja adalah 0,58%. Karakteristik inflasi Kota Denpasar maupun Singaraja terutama dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran bahan makanan, makanan jadi dan perumahan sebagaimana tercermin pada dominannya bobot kelompok pengeluaran tersebut dalam keranjang IHK Kota Denpasar maupun Singaraja.

Grafik 3.19. Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.20. Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

a) Kota Denpasar

Berdasarkan tren perkembangan inflasi Kota Denpasar, pencapaian inflasi pada triwulan I 2019 melandai dari 3,40% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi 2,05% (yoy) pada triwulan I 2019.

Penurunan tekanan inflasi terjadi di semua kelompok kecuali kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta kelompok sandang. Melandainya inflasi kota Denpasar pada triwulan I 2019 seiring dengan normalnya kembali permintaan pasca perayaan Natal dan Tahun Baru pada triwulan IV 2019. Selain itu, pencapaian inflasi yang rendah juga didukung oleh ketersediaan pasokan yang cukup seiring dengan masuknya periode panen tabama. Sementara itu, peningkatan tekanan inflasi di kelompok sandang serta makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dipengaruhi oleh peningkatan UMP/UMK yang mendorong peningkatan konsumsi.

Beberapa komoditas VF yang menjadi penyumbang utama inflasi pada triwulan I 2019 antara lain daging ayam ras dan daging babi seiring peningkatan permintaan saat Hari Raya Kuningan pada Januari 2019. Sementara itu, komoditas yang menjadi penyumbang deflasi pada triwulan laporan antara lain cabai merah, cabai rawit, pepaya dan jeruk. Penurunan harga cabai merah dan cabai rawit didorong oleh tingginya pasokan, seiring dengan panen raya pada bulan Februari 2019 di tengah kondisi cuaca yang mendukung (curah hujan tidak terlalu tinggi) dan serangan organisasi pengganggu tanaman (OPT) yang dapat dikendalikan.

Tabel 3.1. Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran

No	Kelompok Barang	2018												2019		
		TW I			TW II			TW III			TW IV			TW I		
		mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy
1	Bahan Makanan	0,38	5,26	4,27	0,38	2,18	7,36	(2,70)	3,55	7,04	2,69	5,86	5,86	0,73	(0,05)	0,52
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	(0,12)	0,82	6,82	1,25	5,36	5,14	0,06	2,00	4,94	(0,01)	2,39	2,39	0,27	2,22	3,82
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	(0,03)	0,67	1,84	(0,06)	1,36	1,24	0,24	1,22	1,70	0,28	1,56	1,56	(0,09)	0,29	1,17
4	Sandang	0,67	0,22	(0,35)	0,24	0,70	0,79	(0,81)	0,62	(0,65)	(0,61)	1,47	1,47	(0,13)	0,57	1,83
5	Kesehatan	1,12	1,44	2,35	(0,21)	1,15	2,93	0,41	3,80	4,39	0,19	2,69	2,69	0,29	1,25	2,50
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	0,08	0,23	2,75	0	2,15	3,31	0,56	3,10	4,12	0,02	3,89	3,89	(0,08)	0,19	3,85
7	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	(0,05)	1,67	2,39	(0,07)	0,71	2,06	(0,40)	2,77	2,29	1,05	4,86	4,86	0,34	(0,73)	2,39
	UMUM	0,15	1,75	3,23	0,51	2,62	3,48	(0,52)	2,37	3,61	0,77	3,40	3,40	0,24	0,42	2,05

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 3. 2 Ranking Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/Deflasi (yoy) di Kota Denpasar Tw I 2019

No	Komoditas	No	Komoditas
Inflasi		Deflasi	
1	Angkutan Udara	1	Cabai Merah
2	Bensin	2	Cabai Rawit
3	Daging Ayam Ras	3	Pepaya
4	Daging Babi	4	Telepon Seluler
5	Upah Pembantu RT	5	Jeruk

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Pada kelompok *administered prices*, peningkatan tekanan inflasi terutama disumbang oleh tarif angkutan udara dan bensin. Peningkatan tarif angkutan udara didorong oleh kebijakan dari maskapai terutama maskapai *low cost carrier* (LCC) yang tidak lagi menjual tiket dengan tarif mendekati batas bawah sebagaimana sebelumnya serta kebijakan bagasi berbayar. Sementara itu, tekanan inflasi kelompok *administered price* yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga bahan bakar rumah tangga dan tarif listrik. Adanya kebijakan PLN yang menurunkan tarif listrik untuk pelanggan 900 VA (Rumah Tangga Mampu) per 1 Maret 2019 dari Rp1.352 per kWh menjadi Rp1.300 per kWh menjadi pendorong terjadinya deflasi tarif listrik.

Pada kelompok inti, tekanan inflasi Denpasar bersumber dari upah pembantu rumah tangga seiring dengan peningkatan permintaan di tengah minimnya pasokan di awal tahun 2019. Sementara itu, tekanan

inflasi inti yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi komoditas telepon seluler dan pasir.

b) Kota Singaraja

Sebagaimana tren inflasi di Denpasar, Inflasi di Singaraja juga melandai dari 1,88% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi 0,97% (yoy) pada triwulan I 2019, seiring menurunnya tekanan inflasi pada semua kelompok, kecuali kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar. Kelompok bahan makanan dan perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar mencatatkan deflasi pada triwulan I 2019 seiring dengan penurunan harga beras, cabai rawit dan cabai merah serta pasir dan batako.

Sama halnya dengan di Denpasar, komoditas daging ayam ras dan daging babi menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok *volatile food* di Singaraja seiring peningkatan permintaan saat Hari Raya Kuningan

Tabel 3. 3 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran

No	Kelompok Barang	2018												2019		
		TW I			TW II			TW III			TW IV			TW I		
		mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy
1	Bahan Makanan	2,00	5,39	(1,49)	0,16	1,05	4,65	(2,24)	2,37	6,79	2,97	4,33	4,33	1,06	0,90	(0,12)
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	(0,01)	0,01	1,79	0,34	3,55	1,66	0	0,67	1,34	(0,06)	0,77	0,77	0,46	1,04	1,80
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	(0,95)	(0,83)	5,38	0,15	0,51	2,86	(0,51)	(3,27)	0,93	(0,01)	(3,07)	(3,07)	(0,14)	0,62	(1,65)
4	Sandang	0,33	1,40	6,61	(0,11)	(1,55)	4,52	0,50	2,73	4,13	0,38	4,42	4,42	0,23	1,04	4,05
5	Kesehatan	0,45	1,26	5,40	0,21	1,95	3,95	0,08	1,92	2,35	0,23	2,67	2,67	0,11	0,92	2,32
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	0,24	0,66	8,31	0,18	1,52	8,87	0,03	9,87	10,09	0,23	10,51	10,51	(0,08)	(0,30)	9,45
7	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,41	1,05	1,97	0,12	1,22	1,68	0,14	2,62	2,68	0,08	4,16	4,16	(0,16)	(0,87)	2,19
	UMUM	0,38	1,50	2,48	0,33	1,78	3,43	(0,71)	0,97	3,54	0,84	1,88	1,88	0,35	0,59	0,97

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 3. 4 Ranking Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/Deflasi di Kota Singaraja Triwulan I 2019

No	Komoditas	No	Komoditas
Inflasi		Deflasi	
1	Daging Ayam Ras	1	Pasir
2	Sekolah Menengah Atas	2	Cabai Rawit
3	Sekolah Menengah Pertama	3	Beras
4	Daging Babi	4	Batako
5	Tukang Bukan Mandor	5	Cabai Merah

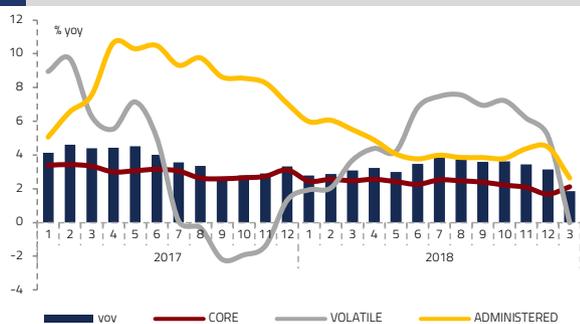
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

pada Januari 2019. Pada kelompok *administered price*, komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi pada triwulan I 2019 adalah bensin. Sementara itu, dari kelompok inflasi inti yang menjadi penyumbang utama inflasi di triwulan I 2019 adalah sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama dan tukang bukan mandor.

3.3. DISAGREGASI INFLASI

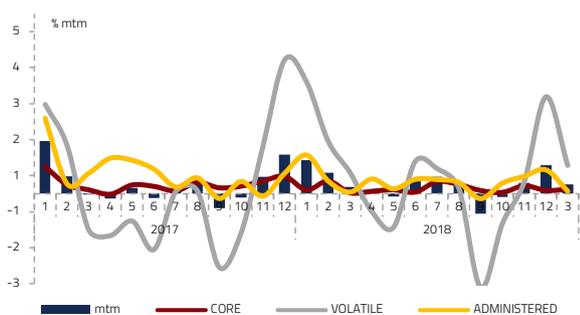
Berdasarkan disagregasi inflasi, melandainya tekanan inflasi tahunan pada triwulan I 2019 dikontribusikan dari komponen disagregasi *volatile food* dan *administered price*, namun tertahan oleh peningkatan tekanan inflasi dari komponen inti.

Grifik 3.21. Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% yoy)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grifik 3.22. Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% mtm)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

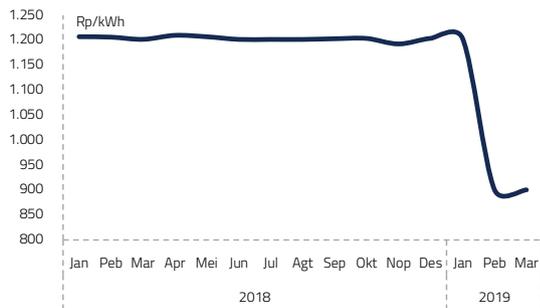
a) Volatile Food

Tekanan inflasi kelompok *volatile food* pada triwulan I 2019 melandai dari 5,12% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi -0,02% (yoy), terutama dipengaruhi oleh penurunan tekanan inflasi komoditas beras, cabai merah dan cabai rawit, didorong cukupnya pasokan seiring masuknya periode panen di Provinsi Bali pada triwulan I 2019. Namun penurunan tekanan inflasi *volatile food* lebih lanjut tertahan oleh komoditas daging ayam ras daging ayam babi yang mengalami peningkatan tekanan inflasi pada triwulan laporan dibanding triwulan sebelumnya, seiring peningkatan permintaan saat hari Raya Kuningan serta kondisi cuaca yang berdampak pada tertahannya kinerja produksi ayam pada bulan Januari 2019. Tekanan inflasi bawang merah yang menunjukkan peningkatan seiring terbatasnya pasokan dari daerah sentra turut menahan tekanan inflasi kelompok *volatile food*.

b) Administered Prices

Inflasi kelompok *administered price* (AP) pada triwulan I 2019 di Provinsi Bali tercatat sebesar 2,65% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 4,48% (yoy). Rendahnya inflasi AP ini didorong oleh penurunan tarif listrik seiring adanya kebijakan PLN yang menurunkan tarif listrik untuk pelanggan 900 VA (Rumah Tangga Mampu) per 1 Maret 2019 dari Rp1.352 per kWh menjadi Rp1.300 per kWh. Berdasarkan data dari PLN Distribusi Bali, penurunan harga jual listrik untuk pelanggan rumah tangga 900 VA terjadi sejak bulan Februari 2019 (Rp900/kWh), lebih rendah dibanding Januari 2019 (Rp1203/kWh).

Grafik 3.23. Perkembangan Harga Jual Listrik Untuk Rumah Tangga 900 VA Di Provinsi Bali



Sumber : PLN Distribusi Bali, diolah

Grafik 3.24. Interaksi Permintaan dan Penawaran



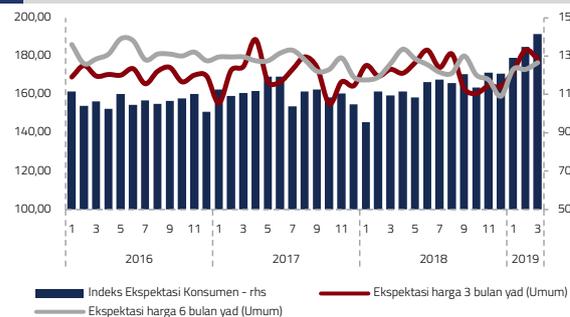
Sumber : Survei Penjualan Eceran, Bank Indonesia

Penurunan tekanan inflasi lebih lanjut pada kelompok *administered price* tertahan oleh kenaikan tekanan inflasi komoditas angkutan udara. Hal ini disebabkan oleh kebijakan dari maskapai terutama maskapai *low cost carrier* (LCC) yang tidak lagi menjual tiket dengan tarif mendekati batas bawah sebagaimana sebelumnya serta kebijakan bagasi berbayar.

c) Core Inflation

Melandainya inflasi *volatile food* dan *administered price* tertahan oleh meningkatnya inflasi kelompok inti pada triwulan laporan dibanding triwulan sebelumnya, yaitu dari 1,68% (yoy) menjadi 2,12% (yoy) yang dipengaruhi oleh peningkatan UMP/UMK yang memicu peningkatan konsumsi. Peningkatan tekanan inflasi inti dipicu oleh peningkatan upah pembantu rumah tangga seiring dengan peningkatan permintaan di awal tahun. Peningkatan inflasi inti ini tercermin pada hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia yang menunjukkan peningkatan indeks ekspektasi konsumen (IEK) dari 118,56 pada triwulan IV 2018 menjadi 135,10 pada triwulan I 2019.

Grafik 3.25. Ekspektasi Konsumen

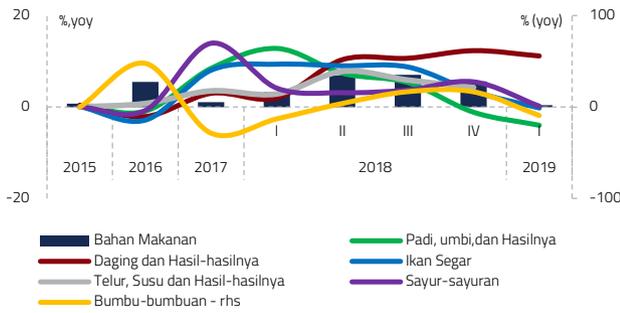


Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia

3.5. INFLASI PANGAN

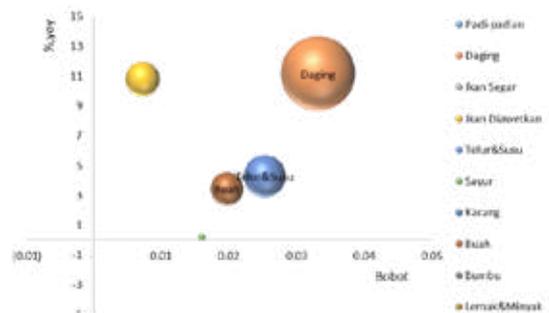
Inflasi pangan Provinsi Bali pada triwulan I 2019 sebesar 0,41% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,60% (yoy) dan triwulan I 2018 yang sebesar 3,25% (yoy). Dilihat dari sub kelompoknya, beberapa sub kelompok komoditas pangan yang mengalami deflasi pada triwulan I 2019 antara lain sub kelompok padi, umbi dan hasilnya; sub kelompok ikan segar; sub kelompok kacang-kacangan; sub kelompok bumbu-bumbuan; serta sub kelompok lemak dan minyak. Sementara beberapa sub kelompok yang mengalami inflasi antara lain sub kelompok daging dan hasil-hasilnya; sub kelompok ikan diawetkan; sub kelompok telur, susu dan hasil-hasilnya; sub kelompok sayur-sayuran; serta sub kelompok buah-buahan. Diantara semua sub-kelompok yang mengalami inflasi, hanya sub-kelompok telur, susu dan hasil-hasilnya yang tercatat mengalami peningkatan inflasi dari 4,27% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi 4,30% (yoy).

Grafik 3.26. Perkembangan Inflasi (yoy) Kelompok Pangan



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

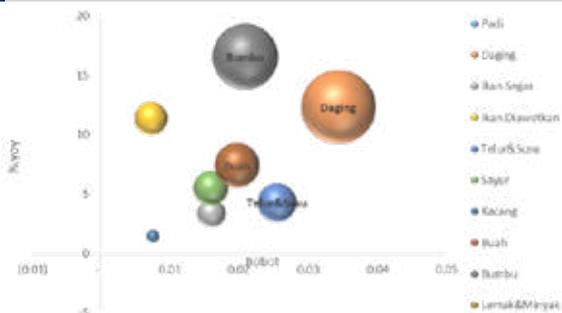
Grafik 3.28. Andil Inflasi (yoy) Kelompok Pangan Triwulan I 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Melandainya inflasi pangan pada triwulan I 2019 disumbang oleh sub-kelompok padi, umbi dan hasilnya (andil 0,22); sub kelompok ikan segar (andil 0,004); sub kelompok kacang-kacangan (andil 0,03); sub kelompok bumbu-bumbuan (andil 0,23); serta sub kelompok lemak dan minyak (andil 0,03). Sementara dilihat dari penurunan andil pada triwulan I 2019 dibanding triwulan sebelumnya, sub kelompok bumbu-bumbuan mengalami penurunan paling signifikan. Hal ini didorong oleh periode cukupnya pasokan cabai merah dan cabai rawit seiring masuknya periode panen di Bali.

Grafik 3.27. Andil Inflasi (yoy) Kelompok Pangan Triwulan IV 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

3.6 KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI

Dalam rangka pengendalian inflasi provinsi Bali, TPID Provinsi Bali dan TPID Kabupaten/Kota terus meningkatkan koordinasi secara intensif. TPID di Provinsi Bali baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota telah berkoordinasi untuk menyusun program pengendalian inflasi tahun 2019 dalam sebuah *Roadmap* Pengendalian Inflasi Tahun 2019. Program kerja TPID akan difokuskan pada seluruh aspek mencakup produksi, distribusi, serta menjaga ekspektasi masyarakat melalui sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat terkait upaya menjaga stabilitas harga. Upaya stabilisasi harga melalui pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar insidental juga akan dilanjutkan sehingga diharapkan dapat menjadi jangkar dalam penetapan harga dan menahan laju inflasi yang dapat bersumber dari sisi permintaan, sisi penawaran, dan ekspektasi pelaku ekonomi.

Selama triwulan I 2019 terdapat beberapa kegiatan untuk pemantauan harga, penguatan kerja sama dan koordinasi baik di TPID Provinsi maupun TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. Dalam rangka menjaga kestabilan harga pada periode hari besar keagamaan nasional (HBKN), TPID Provinsi Bali senantiasa berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya antisipasi. Menghadapi peningkatan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Nyepi, TPID Provinsi Bali menyelenggarakan

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada tanggal 27 Februari 2019 yang menghasilkan langkah-langkah pengendalian inflasi yang akan dilakukan oleh masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah) dan organisasi vertikal terkait (Dinas Peternakan, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan). TPID Provinsi Bali juga melakukan *Focus Group Discussion* membahas dan menggali informasi terkait tantangan dan risiko pengendalian inflasi Provinsi Bali, pengendalian inflasi *volatile food* (VF) serta *progress* tindak lanjut arahan Presiden dalam Rakornas TPID 2018 terkait pengendalian inflasi yang rendah dan stabil. Sebagai respon terhadap risiko dan tantangan pengendalian inflasi Provinsi Bali di 2018,

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali akan terus melanjutkan upaya pengendalian harga, baik melalui forum koordinasi dan tindak lanjut nyata dengan OPD terkait.

Mencermati perkembangan inflasi daging ayam ras di bulan Januari 2019 yang salah satunya disebabkan oleh terbatasnya pasokan, TPID Provinsi Bali berinisiatif mengembangkan klaster ayam pedaging sebagai bagian dari program pengendalian inflasi di Bali. Dalam FGD ini dipaparkan dan didiskusikan mengenai komitmen dari masing-masing instansi pendukung serta kendala dan rencana pengembangan klaster ayam pedaging di Kabupaten Badung sebagai salah satu program pengendalian inflasi untuk komoditas *volatile food*.

Tabel 3.5. Kegiatan TPID Triwulan I 2019

No	TPID/KEGIATAN	TANGGAL	AGENDA	KETERANGAN
Rapat Koordinasi				
1	TPID Kabupaten Badung	14 Januari 2019	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan TPID Kabupaten Badung Triwulan IV 2018	Pemerintah Kabupaten Badung
2	TPID Kabupaten Klungkung	17 Januari 2019	Rapat Finalisasi Penyusunan Roadmap TPID Kabupaten Klungkung	Bupati Klungkung dan OPD Strategis Kabupaten Klungkung
3	TPID Kabupaten Karangasem	21 Januari 2019	Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Karangasem	Bupati Karangasem dan OPD Strategis Kabupaten Karangasem
4	TPID Provinsi Bali	4 Februari 2019	Focus Group Discussion Pengumpulan Informasi Terkait Tantangan dan Risiko Pengendalian Inflasi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog Divre Bali-Nusra, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, serta Dinas PUPR Provinsi Bali
5	TPID Provinsi Bali	27 Februari 2019	Rapat TPID Provinsi Bali Dalam Rangka Menghadapi Nyepi	Dinas Peternakan, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Bank Indonesia
6	TPID Kabupaten Badung	27 Februari 2019	Focus Group Discussion Pengembangan Klaster Ayam Pedaging Program Pengendalian Inflasi	Bank Indonesia Provinsi Bali, Biro Perekonomian Kab. Badung, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung, DPRD Kab. Badung, Sekdes Taman, serta Bendesa Adat Taman
7	TPID se-Provinsi Bali	28 Maret 2019	Rapat Penyusunan One Page Summary Program Unggulan dan Self Assesment, Penyusunan Laporan TPID se-Provinsi Bali Triwulan I 2019, serta Capacity Building TPID se-Provinsi Bali	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, termasuk Bulog Divre Bali
Pasar Murah, Operasi Pasar, Pemantauan Harga dan Sosialisasi Pengendalian Inflasi				
1	Pasar Nyanggelan, Pasar Gunung Agung Utara, Pasar Kreneng, Pasar Badung	3 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
2	Pasar Pidada	4 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
3	Pasar Kreneng, Pasar Gunung Agung Utara, Pasar Nyanggelan, Pasar Badung	7-9 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali

Pasar Murah, Operasi Pasar, Pemantauan Harga dan Sosialisasi Pengendalian Inflasi				
1	Pasar Nyanggelan, Pasar Gunung Agung Utara, Pasar Kreneng, Pasar Badung	3 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
2	Pasar Pidada	4 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
3	Pasar Kreneng, Pasar Gunung Agung Utara, Pasar Nyanggelan, Pasar Badung	7-9 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
4	Pasar Kreneng, Pasar Gunung Agung Utara, Pasar Nyanggelan	10 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
5	Pasar Badung, Pasar Kreneng, Pasar Gunung Agung Utara	11-13 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
6	Pasar Nyanggelan, Pasar Gunung Agung Utara, Pasar Badung, Pasar Kreneng	14 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
7	Pasar Kreneng, Pasar Badung, Pasar Gunung Agung Utara	15 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
8	Pasar Nyanggelan, Pasar Gunung Agung Utara, Pasar Kreneng, Pasar Badung	16 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
9	Pasar Kreneng, Pasar Gunung Agung Utara, Pasar Badung	17 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
10	Pasar Nyanggelan, Pasar Kreneng, Pasar Gunung Agung Utara	18 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
11	Pasar Badung, Pasar Gunung Agung Utara	19 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
12	Pasar Gunung Agung Utara, Pasar Badung, Pasar Nyanggelan	21 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
13	Pasar Badung, Pasar Kreneng, Pasar Gunung Agung Utara	22 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
14	Pasar Badung, Pasar Gunung Agung Utara, Pasar Kreneng	23 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
15	Pasar Badung, Pasar Gunung Agung Utara, Pasar Kreneng, Pasar Nyanggelan	24 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
16	Pasar Badung, Pasar Gunung Agung Utara, Pasar Kreneng	25 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
17	Pasar Badung, Pasar Gunung Agung Utara, Pasar Kreneng	26 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
18	Pasar Badung, Pasar Gunung Agung Utara, Pasar Kreneng, Pasar Nyanggelan	28 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
19	Pasar Gunung Agung Utara, Pasar Kreneng	29 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
20	Pasar Badung, Pasar Gunung Agung Utara, Pasar Kreneng, Pasar Nyanggelan	30 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
21	Pasar Gunung Agung Utara, Pasar Kreneng	31 Januari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
22	Pasar Gunung Agung Utara, Pasar Nyanggelan, Pasar Badung, Pasar Kreneng, Pasar	1-18, 22 Februari 2019	Operasi Pasar	Bulog Divre Bali
23	Balai Banjar Sari, Jalan Angsoka, Kelurahan Ubung, Denpasar Utara; Banjar Tohpati, Desa Kesiman, Denpasar Timur; Kelurahan Dauh Puri, Komplek Pertokoan Kerta Wijaya	19,20,21 Februari 2019	Pasar Murah	Disperindag Kota Denpasar
24	Pasar Bondalem, Pasar Tamblang, Pasar Anyar, Pasar Banyuasri, Pasar Pancasari, Pasar Busungbiu	21,23,24,25,27 Februari 2019	Pasar Murah	TPID Kab. Buleleng
25	Desa Umadiwang, Desa Luwus	24 dan 28 Februari 2019	Pasar Murah	TPID Kab. Tabanan
26	Desa Umadiwang, Desa Luwus	24 dan 28 Februari 2019	Pasar Murah	TPID Kab. Tabanan
27	Pasar Mengwi	1 Maret 2019	Pasar Murah	TPID Kabupaten Badung
28	Desa Batu Kandik, Kecamatan Nusa Penida	1 Maret 2019	Pasar Murah	TPID Kabupaten Klungkung
29	Desa Batu Madeg, Kecamatan Nusa Penida	2 Maret 2019	Pasar Murah	TPID Kabupaten Klungkung
30	Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida	3 Maret 2019	Pasar Murah	TPID Kabupaten Klungkung
31	Kantor Bupati Buleleng	3 Maret 2019	Pasar Murah	TPID Kabupaten Buleleng
32	Lapangan Timur Bajra Sandi	3 Maret 2019	Pasar Murah	Dinas Ketahanan Provinsi Bali
33	Desa Delod Peken Tabanan	4 Maret 2019	Pasar Murah	Disperindag Provinsi Bali
Edukasi Masyarakat				
1	TPID Kota Denpasar dan TPID Provinsi Bali	12 Maret 2019	Sekolah Pasar Rakyat	Diikuti 40 pedagang dari perwakilan empat pasar tradisional yaitu Pasar Sindhu Sanur, Pasar Pedungan, Pasar Tegal Arum dan Pasar Windhu Boga

Roadmap pengendalian inflasi Provinsi Bali tahun 2019-2021 terbagi atas *key strategies* 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Dalam hal menjaga keterjangkauan harga, program yang dilakukan antara lain:

1. Stabilisasi harga yang dilakukan melalui optimalisasi peran pasar murah / operasi pasar, penertiban penerapan batas HET (harga eceran tertinggi), himbauan kepada *supermarket* dan distributor untuk menerapkan program diskon pada waktu tertentu serta *monitoring* harga melalui komunikasi dan koordinasi termasuk melalui pemanfaatan SiGapura
2. Mengelola permintaan yang dilakukan melalui program peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat, himbauan belanja bijak pada saat hari besar keagamaan, sosialisasi terkait komoditas pangan substitusi dari komoditas yang ada (seperti daging ayam beku sebagai pengganti daging ayam segar) serta sinergi dengan sektor pariwisata dalam rangka pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan peternakan lokal Bali

Upaya dalam menjaga ketersediaan pasokan dilakukan dengan program memperkuat produksi, cadangan pangan pemerintah, dan pengelolaan impor-ekspor pangan serta program kelembagaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi (melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal) dengan optimalisasi bantuan sarana produksi, pengembangan pertanian organik, pengembangan ternak unggulan lokal Bali, pengembangan Teknologi sistem SALIBU (Tanam Sekali Panen Berkali-kali), pengembangan SRI (*System Rice Intensification*) dan pengembangan Pertanian *Hidroponic* Perkotaan (*Urban Farming*)
2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

3. Penguatan cadangan pangan Pemerintah dengan menjaga level CBP dan mendukung penguatan mekanisme peningkatan CBP ke level 1-1,5 juta ton
4. Program kelembagaan melalui pengembangan agribisnis pertanian, perluasan implementasi Asuransi Usaha Pertanian (AUDP), pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan pengembangan kelembagaan Subak sebagai Koperasi Tani

Untuk menjaga kelancaran distribusi, akan dilakukan program kerjasama antar daerah dan peningkatan infrastruktur perdagangan. Dalam rangka mendorong kerja sama perdagangan antar daerah, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan model bisnis kerja sama perdagangan antar daerah dan fasilitasi kerja sama antar daerah, antara lain dengan mengoptimalkan peran swasta dan BUMD
2. Optimalisasi pemanfaatan pasar lelang *forward* untuk pemenuhan komoditas pangan strategis serta pemasaran produk unggulan daerah
3. Kerjasama antar Kabupaten/Kota yang mengalami surplus di Provinsi Bali untuk pemenuhan komoditas pangan strategis

Sementara untuk meningkatkan infrastruktur perdagangan, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pemanfaatan Sub Terminal Agribisnis (STA) sebagai salah satu upaya distribusi komoditas pangan
2. Pengembangan pasar lelang *online*
3. Pembangunan/revitalisasi pasar tradisional Kabupaten/Kota

Komunikasi efektif dibentuk melalui perbaikan kualitas data dan memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Perbaikan kualitas data dilakukan dengan penyusunan kebijakan satu peta lahan pertanian, penguatan data PIHPS yang terintegrasi dari konsumen, produsen dan pedagang besar, serta penggunaan kajian sebagai dasar pembuatan kebijakan. Sementara untuk memperkuat

koordinasi pusat dan daerah akan dilakukan *capacity building* anggota TPID (termasuk studi banding dan rapat koordinasi) serta penyusunan rekomendasi dalam hal pengaturan kebijakan harga *administered prices*

bersama dengan TPIP yang mendukung tercapainya sasaran inflasi IHK (antara lain menjaga tarif angkutan udara pada batas atas dan batas bawah).

halaman ini sengaja dikosongkan



Jalan Tol Bali Mandara - Badung

BAB IV

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM



5,44% (yoy)
triwulan I
2019

Pertumbuhan Kredit Bank
Umum
4,96% (yoy)
triwulan IV
2018

8,01% (yoy)
triwulan I
2019

Pertumbuhan DPK Bank
Umum
7,92% (yoy)
triwulan IV
2018

81,89%
triwulan I
2019

LDR Bank Umum
81,90%
triwulan IV
2018

3,03%
triwulan I
2019

NPL Bank Umum
2,56%
triwulan IV
2018

5,38% (yoy)
7,95%
triwulan I
2019

Pertumbuhan Kredit Korporasi
6,24% (yoy)
NPL Kredit Korporasi
7,11%
triwulan IV 2018

6,29% (yoy)
2,33%
triwulan I
2019

Pertumbuhan Kredit Rumah
Tangga
6,26% (yoy)
NPL Kredit Korporasi
2,23%
triwulan IV 2018

5,79% (yoy)
3,13%
triwulan I
2019

Pertumbuhan Kredit UMKM
6,81% (yoy)
NPL Kredit UMKM
3,28%
triwulan IV 2018

- Kredit kelompok rumah tangga (perseorangan) di periode triwulan I 2019 terakselerasi dengan tumbuh sebesar 6,29% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan IV 2018 sebesar 6,26% (yoy). Sementara itu kualitas kredit relatif terjaga
- Kredit korporasi pada triwulan I 2019 mengalami perlambatan dengan tumbuh sebesar 5,38% (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan IV 2018 yang sebesar 6,24% (yoy). Sejalan dengan kondisi tersebut, kualitas kredit mengalami penurunan
- Kredit UMKM pada triwulan I 2019 tumbuh sebesar 5,79% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan IV 2018 yang sebesar 6,81% (yoy). Meskipun demikian kualitas kredit mengalami peningkatan.

4.1. ASESMEN INTERMEDIASI PERBANKAN

4.1.1. Jaringan Kantor dan Kinerja Perbankan

Pada triwulan I 2019, jumlah bank umum dan BPR di Provinsi Bali tidak mengalami perubahan yaitu 55 bank umum dan 136 BPR dengan penambahan 1 kantor bank umum. Total aset perbankan (bank umum dan BPR) di Provinsi Bali pada triwulan I 2019 sebesar Rp125,06 triliun, lebih rendah dibanding triwulan IV (Rp127,98 triliun). Dilihat dari laju pertumbuhannya, aset perbankan melambat dari 8,85% (yoy) menjadi 4,50% (yoy) pada triwulan I 2019. Total kredit perbankan (bank umum dan BPR) terakselerasi dari triwulan sebelumnya yaitu dari hanya tumbuh 5,35% (yoy) dengan nominal Rp87,09 triliun menjadi 5,93% (yoy) pada triwulan I 2019 dengan nominal Rp87,93 triliun. Sejalan dengan kredit, pertumbuhan total DPK (bank umum dan BPR) juga terakselerasi dibandingkan triwulan lalu dari tumbuh 8,77% (yoy) atau sebesar Rp104,53 triliun menjadi tumbuh 8,84% (yoy) pada triwulan laporan (nominal Rp105,65 triliun). Dari sisi kualitas kredit, NPL perbankan (bank umum dan BPR) pada triwulan I 2019 tercatat sama dengan triwulan IV 2018 yaitu sebesar 3,73%.

4.1.2. Kinerja Bank Umum

Secara umum, perkembangan kinerja bank umum di Provinsi Bali pada triwulan I 2019 menunjukkan kinerja yang membaik. Pertumbuhan aset bank umum di Provinsi Bali pada triwulan I 2019 melambat menjadi 3,77% (yoy) dengan nominal Rp109,29 triliun, dari

sebelumnya 8,61% (yoy) dengan nominal Rp112,41 triliun pada triwulan IV 2018. Pertumbuhan DPK bank umum terakselerasi dibanding triwulan lalu. Sejalan dengan penghimpunan dana, penyaluran kredit bank umum juga mengalami akselerasi sementara kualitas kredit sedikit menurun.

4.1.2.1 Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank umum pada triwulan I 2019 mengalami akselerasi dibanding periode sebelumnya, yaitu dari 7,92% (yoy) di triwulan IV 2018 menjadi 8,01% (yoy) di triwulan I 2019 dengan nominal sebesar Rp94,32 triliun. Akselerasi kinerja tersebut didorong oleh akselerasi pertumbuhan deposito dan giro. Akselerasi kinerja DPK pada triwulan I 2019 tertahan oleh kinerja tabungan yang melambat dibanding triwulan sebelumnya.

Pada periode laporan, simpanan dalam bentuk deposito terakselerasi menjadi 5,88% (yoy) dibanding triwulan lalu yang sebesar 4,52% (yoy) didorong oleh peningkatan suku bunga deposito dari 6,15% per tahun (rata-rata triwulan IV 2018) menjadi 6,31% per tahun (rata-rata triwulan I 2019). Sejalan dengan deposito, giro juga mengalami akselerasi dari sebelumnya tumbuh 3,13% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi tumbuh sebesar 4,56% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan tabungan pada triwulan I 2019 melambat menjadi 10,77% (yoy) dibanding triwulan lalu yang tumbuh 11,99% (yoy).

Tabel 4.1. Perkembangan Jumlah Bank dan Jaringan Kantor Bank di Bali

KATEGORI	2017	2018				2019
		I	II	III	IV	I
Bank Umum	55	55	55	55	55	55
Jumlah Kantor	702	701	700	697	656	657
BPR	136	136	136	136	136	136
Jumlah Kantor	323	324	324	325	329	329
Total Bank Umum & BPR	191	191	191	191	191	191
Total Jumlah Kantor	1.025	1.025	1.024	1.022	985	986

Sumber: LBU dan LBBR Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.2. Perkembangan Indikator Bank Umum di Bali

Indikator Bank Umum	2017	2018				2019
		I	II	III	IV	
Aset (Rp milyar)	103.502	105.319	106.450	109.992	112.409	109.293
g Asset (% , yoy)	3,37	9,80	8,55	6,34	8,61	3,77
Kredit Umum (Rp milyar)	73.041	73.253	73.932	75.499	76.667	77.238
Modal Kerja (Rp milyar)	28.069	28.235	28.386	28.715	29.894	29.046
Investasi (Rp milyar)	16.599	16.547	16.668	17.342	16.841	18.146
Konsumsi (Rp milyar)	28.372	28.471	28.878	29.441	29.933	30.046
g Kredit Umum (% , yoy)	5,98	5,25	3,74	5,03	4,96	5,44
g Modal Kerja (% , yoy)	4,50	5,16	2,35	4,33	6,50	2,88
g Investasi (% , yoy)	2,59	1,39	2,59	4,95	1,45	9,66
g Konsumsi (% , yoy)	9,64	7,73	5,84	5,78	5,50	5,53
Jumlah Rekening Kredit Umum	571.127	581.473	592.693	605.631	608.900	614.402
Modal Kerja	238.870	247.181	249.001	256.255	316.917	260.862
Investasi	103.685	105.495	108.413	111.972	55.852	117.950
Konsumsi	228.572	228.797	235.279	237.403	236.130	235.589
NPL Kredit (%)	2,98	3,40	3,08	2,98	2,56	3,03
NPL Modal Kerja%	3,47	4,04	4,15	4,05	3,44	4,23
NPL Investasi (%)	5,00	5,76	3,88	3,46	3,02	2,70
NPL Konsumsi (%)	1,30	1,41	1,57	1,64	1,43	2,06
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	86.735	87.322	89.689	94.762	93.605	94.316
Deposito (Rp milyar)	30.843	31.203	30.679	31.753	32.236	33.038
Giro (Rp milyar)	13.803	14.275	15.124	16.532	14.234	14.926
Tabungan (Rp milyar)	42.089	41.844	43.887	46.476	47.135	46.352
g DPK (% , yoy)	9,06	7,05	7,79	8,17	7,92	8,01
g Deposito (% , yoy)	9,87	2,88	2,53	3,59	4,52	5,88
g Giro% , yoy)	4,86	-0,91	-0,36	0,95	3,13	4,56
g Tabungan% , yoy)	9,91	13,61	15,16	14,54	11,99	10,77
Jumlah Rekening DPK (rekening)	4.512.531	4.622.404	4.737.575	4.887.943	5.058.352	5.177.676
Deposito	73.471	74.473	75.333	76.447	76.793	77.978
Giro	4.328.016	4.433.906	4.546.892	4.692.361	4.860.203	4.975.386
Tabungan	111.044	114.025	115.350	119.135	121.356	124.312
NPL (%)	2,98	3,40	3,08	2,98	2,56	3,03
LDR	84,21	83,89	82,43	79,67	81,90	81,89

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

4.1.2.2 Penyaluran Kredit

Sejalan dengan kinerja penghimpunan dana, fungsi penyaluran kredit perbankan oleh bank umum juga mengalami akselerasi dibanding triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2019, kredit bank umum tumbuh 5,44% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan lalu (4,96%, yoy). Secara nominal, kredit perbankan yang disalurkan sampai dengan triwulan I 2019 mencapai Rp77,24 triliun. Akselerasi penyaluran kredit tersebut

terjadi pada kredit investasi dan konsumsi, dari masing-masing tumbuh 1,45% (yoy) dan 5,50% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi 9,66% (yoy) dan 5,53% (yoy), seiring dengan pengerjaan proyek infrastruktur Pemerintah⁷¹. Di sisi lain kinerja kredit modal kerja melambat dari 6,50% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi 2,88% (yoy).

71. Proyek infrastruktur tersebut yaitu pengembangan pelabuhan Benoa dan Celukan Bawang, proyek shortcut jalan Singaraja-Mengwitana, pembangunan Rapid Exit Taxiway Bandara I Gusti Ngurah Rai, serta pembangunan bendungan Sidan

4.1.2.3 LDR dan NPL

Kinerja intermediasi perbankan yang diindikasikan oleh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan kondisi yang stabil dibanding periode sebelumnya. Pada triwulan I 2019 LDR bank umum di Provinsi Bali mencapai 81,89%, cenderung stabil dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 81,90%. Sementara itu, kualitas kredit perbankan menunjukkan penurunan yang tercermin dari indikator *Non Performing Loans* (NPLs) *Gross* yang meningkat dari 2,56% pada triwulan IV 2018 menjadi 3,03% pada triwulan I 2019.

4.1.3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kinerja BPR pada triwulan I 2019 masih mencatatkan akselerasi. Pada triwulan I 2019, penyaluran kredit BPR tumbuh 9,65% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan IV 2018 yang tumbuh 8,29% (yoy). Sementara dari sisi kualitas kredit mengalami penurunan yang

tercermin oleh peningkatan NPL dari 8,11% pada triwulan lalu menjadi 8,82%. Demikian halnya aset BPR yang melambat menjadi hanya tumbuh 9,85% (yoy) dengan nominal Rp15,76 triliun, lebih rendah dibanding periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,61% (yoy). Pertumbuhan DPK yang dihimpun BPR juga melambat dari 16,58% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi 16,32% (yoy) pada triwulan I 2019.

4.1.4. Kinerja Bank Syariah

Kinerja Bank Syariah di Provinsi Bali pada triwulan I 2019 dari sisi penyaluran pembiayaan mengalami perbaikan, namun penghimpunan dana dan kualitas kredit menunjukkan penurunan. Aset bank syariah pada triwulan laporan membaik dari -2,70% (yoy) pada triwulan lalu menjadi tumbuh 5,16% (yoy). Penghimpunan dana Bank Syariah pada triwulan laporan melambat dari 23,47% (yoy) pada triwulan

Tabel 4.3. Perkembangan Indikator BPR di Bali

Indikator BPR	2017	2018				2019
		I	II	III	IV	
Aset (Rp milyar)	14.078	14.350	14.511	14.993	15.571	15.763
g Aset (% ,yoy)	7,67	10,83	9,75	8,30	10,61	9,85
Kredit Umum (Rp milyar)	9.633	9.749	9.985	10.118	10.431	10.690
Modal Kerja (Rp milyar)	4.700	4.773	4.908	4.929	5.051	5.110
Investasi (Rp milyar)	1.402	1.405	1.443	1.478	1.490	1.576
Konsumsi (Rp milyar)	3.532	3.571	3.634	3.711	3.890	4.003
g Kredit Umum (% ,yoy)	6,66	5,86	6,14	6,67	8,29	9,65
g Modal Kerja (% ,yoy)	4,70	4,81	6,53	6,75	7,48	7,08
g Investasi (% ,yoy)	18,53	8,95	7,88	6,65	6,28	12,15
g Konsumsi (% ,yoy)	5,11	6,09	4,95	6,57	10,15	12,09
Jumlah Rekening Kredit	80.822	80.168	79.847	79.456	79.834	79.670
Modal Kerja	21.956	21.591	21.356	20.967	20.733	20.183
Investasi	6.021	5.954	5.905	5.784	5.763	5.665
Konsumsi	52.845	52.623	52.586	52.705	53.338	53.822
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	9.368	9.746	10.935	10.435	10.921	11.336
Deposito (Rp milyar)	6.925	7.209	8.303	7.634	8.149	8.471
Tabungan (Rp milyar)	2.443	2.536	2.632	2.800	2.772	2.864
g DPK (% ,yoy)	12,13	15,13	25,33	13,04	16,58	16,32
g Deposito (% ,yoy)	11,82	13,88	27,46	12,61	17,69	17,51
g Tabungan(% ,yoy)	13,02	18,82	19,07	14,25	13,45	12,94
Jumlah Rekening DPK	721.183	724.437	724.706	738.481	734.907	730.784
Deposito	663.134	664.468	664.622	676.594	672.132	666.626
Tabungan	58.049	59.969	60.084	61.887	62.775	64.158
NPL (%)	6,77	7,81	8,57	9,23	8,11	8,82
LDR	71,40	71,47	72,41	71,49	69,49	71,69

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.4. Perkembangan Indikator Bank Syariah di Bali

Indikator Bank Syariah	2017	2018				2019
		I	II	III	IV	I
Aset (Rp milyar)	2.010	1.991	2.066	2.080	2.040	2.093
g Aset (% ,yoy)	6,23	-2,19	-1,09	0,57	-2,70	5,16
Pembiayaan (Rp milyar)	1.656	1.623	1.617	1.675	1.721	1.727
g Pembiayaan (% ,yoy)	-3,04	-12,84	-14,03	-9,83	-6,32	6,41
Modal Kerja (Rp milyar)	383	348	328	326	353	345
g Modal Kerja (% ,yoy)	-33,95	-41,97	-45,81	-43,34	-35,13	-0,76
Investasi (Rp milyar)	273	282	291	285	268	250
g Investasi (% ,yoy)	28,42	7,97	4,96	2,09	-4,26	-11,26
Konsumsi (Rp milyar)	1.000	993	999	1.063	1.099	1.132
g Konsumsi (% ,yoy)	9,20	-0,83	-0,04	6,10	8,61	13,94
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	1.094	1.142	1.184	1.219	1.258	1.283
g DPK (% ,yoy)	29,31	22,49	26,70	26,18	23,47	12,35
Giro (Rp milyar)	94	92	97	112	126	113
g Giro (% ,yoy)	27,48	2,02	10,50	28,81	53,03	22,42
Tabungan (Rp milyar)	483	506	511	555	602	604
g Tabungan (% ,yoy)	27,72	16,52	18,85	29,61	35,80	19,28
Deposito (Rp milyar)	517	544	577	525	568	567
g Deposito (% ,yoy)	31,17	33,39	38,18	16,53	15,00	4,18
NPF (%)	3,87	5,62	7,96	8,05	5,85	7,13

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

lalu menjadi hanya 12,35% (yoy). Perlambatan DPK Bank Syariah ini disebabkan oleh perlambatan penghimpunan dana pada semua jenis penggunaan.

Sementara itu, penyaluran pembiayaan mengalami perbaikan dari -6,32% pada triwulan IV 2018 menjadi 6,41% (yoy), terutama didorong oleh akselerasi pembiayaan konsumsi dan modal kerja di tengah perlambatan pembiayaan investasi. Dari sisi risiko, terjadi penurunan kualitas pembiayaan yang tercermin pada peningkatan NPF dari 5,85% pada triwulan IV 2018 menjadi 7,13%. Peningkatan NPF kredit Bank Syariah di Provinsi Bali ini perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat telah melebihi *threshold* 5% sejak triwulan I 2018.

4.2. ASESMEN SEKTOR KORPORASI

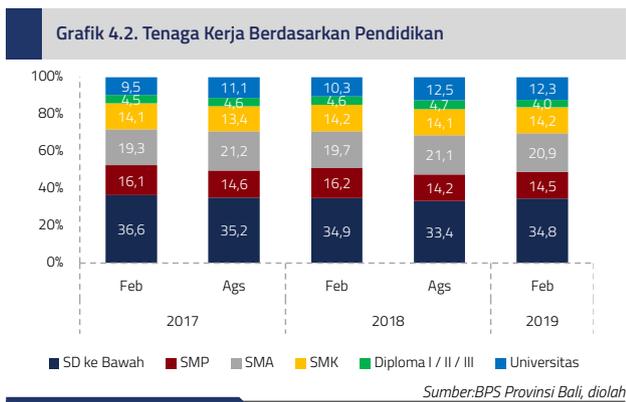
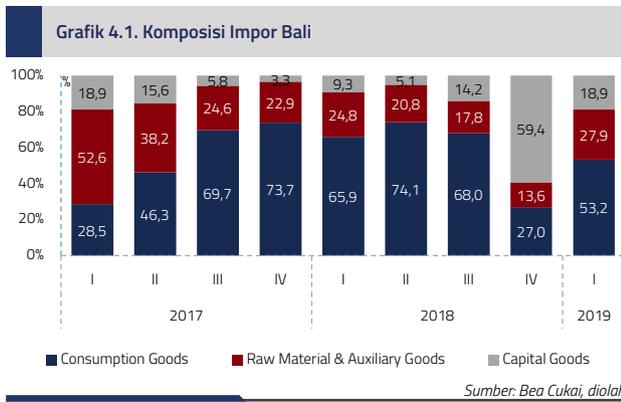
4.2.1. Sumber Kerentanan Sektor Korporasi

Sumber kerentanan sektor korporasi berasal dari faktor eksternal maupun domestik. Beberapa kondisi yang diindikasikan menjadi sumber kerentanan korporasi di Provinsi Bali antara lain:

1. Ketergantungan Industri Terhadap Bahan Baku Impor

Ketergantungan industri di Provinsi Bali terhadap bahan baku impor tergambar pada struktur impor di Bali. Pada triwulan I 2019, impor bahan baku Provinsi Bali mencapai 27,9% dari total impor. Tingginya komponen impor dalam produksi korporasi akan menguntungkan apabila barang yang dihasilkan dapat di ekspor ke negara lain. Sebaliknya, hal ini dapat menjadi sumber kerentanan industri apabila produk yang bahan bakunya berasal dari impor tersebut justru dijual di pasar domestik.

Pergerakan harga bahan baku yang disebabkan baik oleh kenaikan harga internasional maupun fluktuasi nilai tukar Rupiah tidak akan serta merta dapat ditransmisikan ke harga jual apabila barang dipasarkan di pasar domestik. Lebih lanjut, ketergantungan terhadap bahan baku impor juga dapat mengganggu kinerja industri apabila terjadi depresiasi nilai tukar yang cukup dalam, kenaikan harga komoditas internasional, serta penurunan permintaan negara mitra dagang.



2. Struktur Biaya Korporasi

Berdasarkan hasil liaison ke beberapa korporasi di Bali, struktur biaya terbesar industri masih didominasi oleh biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Penggunaan mesin dan teknologi secara masif belum menjadi pilihan utama karena tingginya ketersediaan tenaga kerja serta karakteristik beberapa industri yang masih bersifat padat karya. Kondisi ini dapat menjadi sumber kerentanan industri apabila tenaga kerja yang diperoleh tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan sehingga produktivitas menjadi rendah. Hal ini diperkuat pula dengan struktur tenaga kerja Provinsi Bali yang mayoritas SD ke bawah (lulusan SD atau lebih rendah). Produktivitas yang rendah dapat memengaruhi profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan.

4.2.2. Kinerja Korporasi

Korporasi pada triwulan I 2019 masih mencatatkan kinerja yang baik, walaupun tidak setinggi triwulan

sebelumnya. Hal ini tercermin pada hasil liaison Bank Indonesia Provinsi Bali yang menunjukkan peningkatan skala likert penjualan domestik dan ekspor dibandingkan periode yang sama tahun lalu, namun tidak setinggi skala likert triwulan IV 2018. Pada triwulan I 2019, skala likert penjualan domestik tercatat sebesar 1,14 poin, lebih tinggi dibanding triwulan I 2018 (-0,18 poin), namun lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2018 (1,71 poin). Demikian halnya dengan skala likert penjualan ekspor yang pada triwulan I 2019 tercatat sebesar 0,18 poin, lebih tinggi dibanding triwulan I 2018 (-0,64 poin), namun lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2018 (1,89 poin). Penurunan skala likert penjualan ekspor dibanding triwulan lalu sejalan dengan kinerja ekspor luar negeri pada PDRB triwulan I 2019 yang hanya tumbuh 2,19% (yoy), melambat dibanding triwulan lalu yang mencapai 15,15% (yoy). Penurunan penjualan ekspor juga terkonfirmasi oleh melambatnya pertumbuhan nilai ekspor barang Provinsi Bali ke luar negeri yang pada triwulan laporan tercatat tumbuh 4,62% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan lalu (22,16%, yoy). Sementara itu, penurunan penjualan domestik terkonfirmasi oleh penurunan jumlah kedatangan penumpang domestik periode triwulan I 2019 yang berkontraksi 10,28% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 21,59%, yoy.



Grafik 4.4. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara



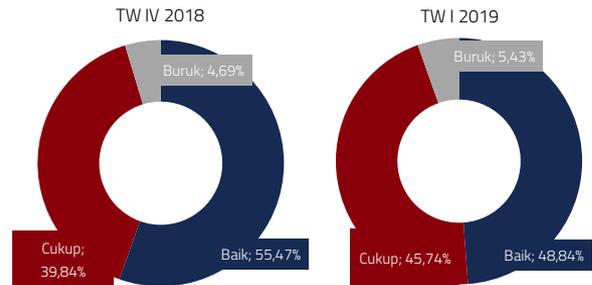
Sumber: Bea Cukai, diolah

Berdasarkan hasil liaison, peningkatan kinerja penjualan domestik pada triwulan I 2019 didorong oleh beberapa faktor yang meliputi: 1) membaiknya daya beli masyarakat (konsumen) di tahun berjalan dibandingkan tahun lalu; 2) faktor *seasonal* berupa Imlek, Kuningan, Galungan dan Nyepi; 3) meningkatnya perekonomian Provinsi Bali pada triwulan I 2019 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mendorong peningkatan permintaan masyarakat; 4) jumlah kunjungan wisatawan domestik yang masih tinggi baik individual maupun grup; 5) pengembangan produk melalui inovasi baru dan penerapan strategi dalam penetrasi segmen pasar domestik; serta 6) meningkatnya optimisme pelaku usaha dan investor terhadap perkembangan ekonomi ke depan paska erupsi Gunung Agung dan penyelenggaraan *Annual Meeting IMF-WB*.

Sementara faktor-faktor yang mendorong peningkatan penjualan ekspor khususnya pada lapangan usaha akmamin antara lain: 1) strategi perusahaan untuk menjangkau pasar-pasar potensial melalui kontrak kerjasama dengan rekan *travel agent* eksisting dan menjalin kerjasama dengan *travel agent* yang baru untuk meningkatkan penjualan, 2) melakukan berbagai program promosi seperti pemberian diskon untuk tamu yang menginap dalam waktu yang lama, dan program benefit untuk meningkatkan penjualan MICE, 3) melakukan kegiatan *sales call* secara rutin, 4) melakukan *travel fair* secara rutin serta *tradeshaw* dan *tabletop* ke luar negeri, 5) memaksimalkan *advertising*

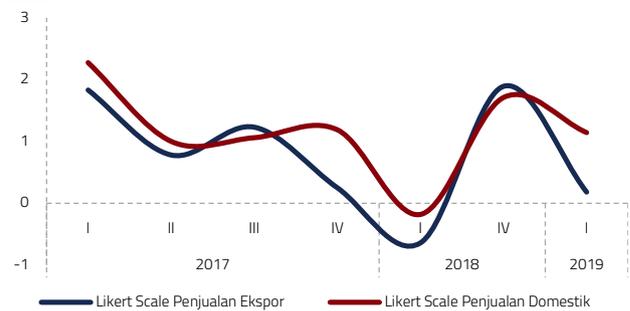
secara *online* serta memaksimalkan *online booking* untuk para *customers*, 6) upaya *joint promotion*.

Grafik 4.5. Perkembangan Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi di Bali



Sumber: SKDU KPw BI Prov. Bali, diolah

Grafik 4.6. Perkembangan Likert Scale

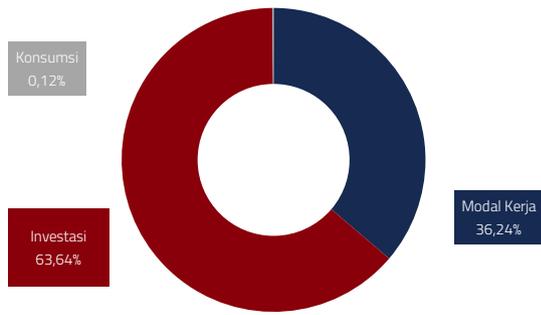


Sumber: Liaison KPw BI Prov. Bali, diolah

Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi

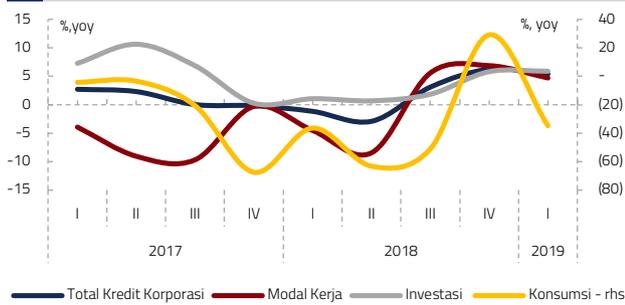
Secara umum, dari hasil SKDU kondisi keuangan korporasi dari sisi likuiditas menunjukkan penurunan dibanding triwulan lalu. Pada triwulan I 2019, pangsa korporasi yang memiliki kondisi likuiditas baik tercatat sebesar 48,84%, menurun dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 55,47% dari total responden korporasi di Bali. Di sisi lain, pangsa korporasi dengan kondisi likuiditas yang buruk mengalami peningkatan dari 4,69% menjadi 5,43%.

Grafik 4.7. Komposisi Penggunaan Kredit Korporasi



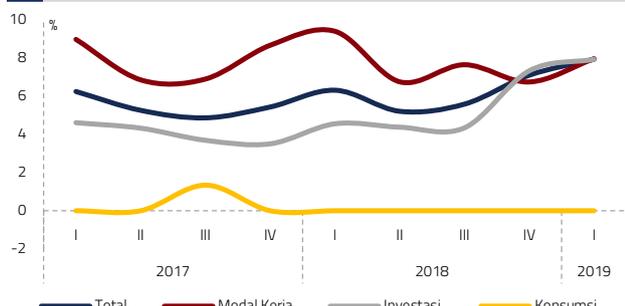
Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.8. Pertumbuhan Kredit Korporasi



Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.9. NPL Kredit Korporasi



Sumber: LBU, diolah

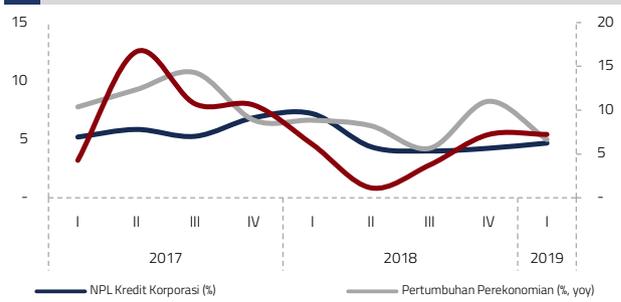
4.2.3. Eksposur Perbankan Pada Korporasi

Meskipun eksposur kredit perbankan pada korporasi hanya sebesar 30,25% dari total kredit di Bali, kerentanan yang terjadi pada sektor korporasi tetap perlu diwaspadai. Kewaspadaan tersebut mempertimbangkan kondisi keuangan sektor rumah tangga yang menjadi eksposur dominan kredit perbankan di Provinsi Bali juga dipengaruhi oleh kinerja sektor korporasi, terutama dari sisi penghasilan dan penyerapan tenaga kerja.

Kredit perbankan pada sektor korporasi di Provinsi Bali pada triwulan I 2019 mencapai Rp29,38 triliun atau tumbuh 5,38% (yoy), melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,24% (yoy). Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh melambatnya kredit modal kerja dan menurunnya kredit konsumsi. Pada triwulan laporan, kredit modal kerja hanya tumbuh 4,71% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,88% (yoy). Kredit konsumsi pada triwulan laporan mengalami penurunan yaitu terkontraksi 34,77% (yoy) dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 29,13% (yoy). Namun demikian, kredit investasi korporasi mengalami akselerasi dari tumbuh 5,82% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi 5,89% pada triwulan I 2019.

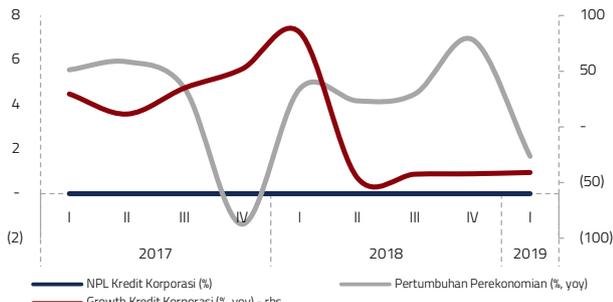
Perlambatan kinerja kredit korporasi diiringi oleh penurunan kualitas kredit yang tercermin dari peningkatan NPL dari 7,11% pada triwulan IV 2018 menjadi 7,95% pada triwulan I 2019. Peningkatan NPL terjadi pada semua jenis penggunaan. NPL kredit investasi korporasi meningkat dari 7,34% pada triwulan lalu menjadi 7,95%. Sedangkan NPL kredit modal kerja korporasi meningkat dari 6,76% pada triwulan lalu menjadi 7,98%. Peningkatan NPL kredit korporasi perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat telah melebihi nilai *threshold* NPL sebesar 5%.

Grafik 4.10. Kredit Korporasi Lapangan Usaha Akmamin



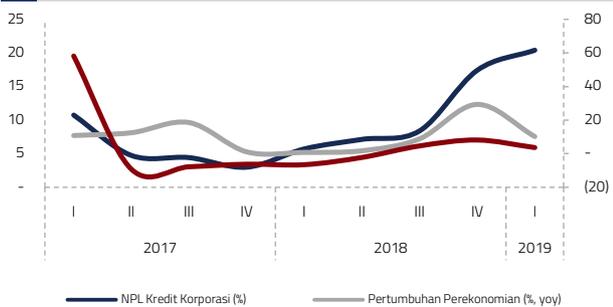
Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.11. Kredit Korporasi Lapangan Usaha Pertanian



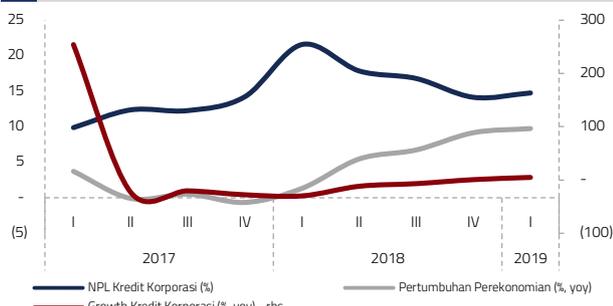
Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.12. Kredit Korporasi Lapangan Usaha Perdagangan



Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.13. Kredit Korporasi Lapangan Usaha Industri Pengolahan



Sumber: LBU, diolah

Dilihat dari sisi sektoral, seiring kinerja lapangan usaha akmamin pada PDRB yang mengalami perlambatan, kualitas kreditnya juga menurun walaupun penyaluran kredit sektor sedikit meningkat. Kredit korporasi pada lapangan usaha akmamin tumbuh 7,23% (yoy) pada triwulan I 2019, sedikit lebih tinggi dibanding triwulan lalu (7,21%, yoy). Namun demikian, kualitas kredit korporasi pada akmamin menurun yang tercermin dari peningkatan NPL dari 4,24% pada triwulan sebelumnya menjadi 4,68% di triwulan laporan. Lapangan usaha

akmamin memiliki pangsa terbesar dalam PDRB Bali, yaitu sebesar 23,28% pada triwulan I 2019.

Lapangan usaha pertanian (pangsa terbesar kedua dalam PDRB Provinsi Bali yaitu sebesar 13,35% pada triwulan laporan) mengalami perbaikan pertumbuhan penyaluran kredit dari -42,13% (yoy) pada triwulan IV 2019 menjadi -40,97% (yoy). Penyaluran kredit pertanian yang membaik ini diiringi kualitas kredit korporasi yang masih terjaga pada level 0% di tengah kinerja lapangan usaha pertanian pada PDRB Provinsi Bali yang menunjukkan perlambatan.

Sementara itu, sejalan dengan perlambatan kinerja lapangan usaha perdagangan pada PDRB, penyaluran kredit korporasi lapangan usaha ini turut menunjukkan perlambatan dari 8,17% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 3,67% (yoy). Perlambatan penyaluran kredit tersebut diiringi dengan penurunan kualitas kredit yang tercermin pada peningkatan NPL pada triwulan laporan sebesar 20,41% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan lalu (17,41%).

Di sisi lain, lapangan usaha industri pengolahan menunjukkan peningkatan penyaluran kredit korporasi sejalan dengan akselerasi kinerjanya dalam PDRB triwulan berjalan. Penyaluran kredit korporasi lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan I 2019 tumbuh sebesar 4,90% (yoy), terakselerasi dibanding triwulan lalu (0,72% yoy). Namun demikian, kualitas kredit lapangan usaha ini menurun yang tercermin pada peningkatan NPL dari 14,15% pada triwulan IV 2018 menjadi 14,76% pada triwulan I 2019.

4.3. ASESMEN SEKTOR RUMAH TANGGA

4.3.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

Beberapa faktor yang dapat memberikan tekanan pada kinerja sektor rumah tangga di Provinsi Bali antara lain:

1. Tingkat Pendapatan dan Kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT) Provinsi Bali
 Pada triwulan I 2019, kinerja konsumsi rumah tangga di Provinsi Bali tumbuh 6,26% (yoy),

melambat dibanding triwulan IV 2018 (6,90%, yoy). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Bali pada tahun 2019 yang lebih rendah dibanding tahun 2018 serta penurunan harga gabah⁷² yang menekan pendapatan petani.

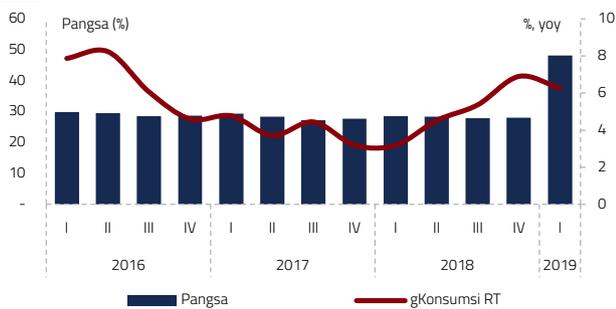
Meskipun melambat, konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2019 masih tumbuh tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan selama 3 tahun terakhir yang hanya 5,24% (yoy). Tendensi optimisme rumah tangga ini tercermin pada hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia. Rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) triwulan I 2019 yang berada di atas nilai 100 (optimis), yaitu masing-masing sebesar 120,39; 105,68 dan 135,11. Nilai IEK pada triwulan I 2019 lebih tinggi dibanding triwulan lalu yang sebesar 118,53. Hal ini didorong oleh

optimisme kondisi penghasilan saat ini dengan nilai indeks sebesar 105,12, lebih tinggi dibanding triwulan lalu yang sebesar 102,33.

2. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi dapat mendorong atau menahan laju konsumsi masyarakat. Inflasi Provinsi Bali pada triwulan I 2019 sebesar 1,85% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya (3,13%, yoy). Melandainya tekanan inflasi tahunan pada triwulan I 2019 dikontribusikan oleh komponen disagregasi *volatile food*⁷³. Kelompok ini merupakan jenis konsumsi primer masyarakat, sehingga walaupun terdapat kenaikan harga, sektor RT akan tetap mengalokasikan pendapatan untuk membelinya. Akibatnya, apabila terjadi kenaikan harga, akan terdapat perubahan alokasi pengeluaran sektor RT untuk komponen lainnya yaitu tabungan dan pembayaran angsuran kredit, sehingga dapat mengganggu stabilitas dan ketahanan sektor RT.

Grafik 4.14. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Bali



Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik 4.15. Persepsi Rumah Tangga Provinsi Bali Terhadap Ekonomi Saat Ini



Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

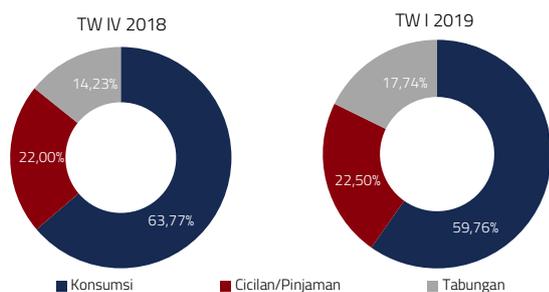
4.3.2. Kinerja Keuangan Rumah Tangga

Keuangan rumah tangga pada triwulan I 2019 menunjukkan kinerja yang tidak setinggi triwulan lalu. Seperti periode sebelumnya, penggunaan keuangan rumah tangga pada triwulan I 2019 masih didominasi oleh konsumsi dengan pangsa 59,76%, lebih rendah dibanding triwulan lalu (63,77%). Sementara itu, proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk tabungan mengalami peningkatan dari 14,23% pada triwulan IV 2018 menjadi 17,74% dari total pengeluaran. Kondisi ini terjadi seiring dengan berakhirnya perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan masa libur akhir tahun yang memicu peningkatan konsumsi. Dengan demikian, pada triwulan I 2019 rumah tangga cenderung untuk menahan konsumsi dan menambah proporsi tabungannya.

72. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani pada triwulan I 2019 (rata-rata) turun menjadi Rp4.662,11 dari triwulan sebelumnya sebesar Rp4.697,57. Demikian harga GKP di tingkat penggilingan turun menjadi Rp4.668,46 dari triwulan sebelumnya sebesar Rp4.784,36.

73. Tekanan inflasi kelompok *volatile food* pada triwulan I 2019 sebesar -0,02% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,12% (yoy)

Grafik 4.16. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Bali



Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Proporsi pendapatan RT untuk pembayaran cicilan hutang meningkat dari 22,00% pada triwulan IV 2018 menjadi 22,50%. Peningkatan preferensi rumah tangga

dalam menggunakan penghasilannya untuk cicilan/pinjaman diiringi dengan peningkatan risiko kredit RT, terutama tercermin pada peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki *debt service ratio* lebih dari 30% (DSR>30%). Pada triwulan I 2019, jumlah rumah tangga dengan DSR>30% sebesar 23,8% atau naik 0,5% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya (23,3%). Peningkatan risiko rumah tangga dengan DSR>30% terutama terjadi pada kelompok pengeluaran Rp1–2 juta. Institusi keuangan menilai bahwa rumah tangga dengan DSR>30% memiliki risiko yang tinggi dan dapat menjadi penyebab naik *non performing* loan.

Tabel 4.5. Dana Rumah Tangga Untuk Membayar Cicilan dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan

Pengeluaran/ bln	Triwulan I 2019			
	Debt Service Ratio (DSR)			
	0%-10%	10%-20%	20%-30%	>30%
Rp1 - 2 jt	8,2%	2,0%	3,7%	4,8%
Rp2,1 - 3 jt	13,0%	4,7%	8,3%	6,5%
Rp3,1 - 4 jt	8,5%	3,8%	4,5%	6,2%
Rp4,1 - 5 jt	2,3%	2,8%	1,0%	2,3%
>Rp5 jt	8,5%	1,8%	3,0%	4,0%
Total	40,5%	15,2%	20,5%	23,8%

Tabel 4.6. Dana Rumah Tangga Untuk Menabung dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan

Pengeluaran/ bln	Triwulan I 2019					
	Total	Tabungan				
		0%-10%	10%-20%	20%-30%	>30%	TMB
Rp1 - 2 jt	18,7%	9,7%	3,5%	3,3%	2,2%	0,0%
Rp2,1 - 3 jt	32,5%	15,8%	9,5%	3,7%	3,5%	0,0%
Rp3,1 - 4 jt	23,0%	12,2%	3,5%	5,0%	2,3%	0,0%
Rp4,1 - 5 jt	8,5%	4,0%	2,3%	1,3%	0,8%	0,0%
>Rp5 jt	17,3%	7,8%	4,2%	3,0%	2,3%	0,0%
Total	100,0%	49,5%	23,0%	16,3%	11,2%	0,0%

Pengeluaran/ bln	Perubahan Debt Service Ratio (DSR)*			
	0%-10%	10%-20%	20%-30%	>30%
Rp1 - 2 jt	5,2%	1,7%	3,0%	4,2%
Rp2,1 - 3 jt	2,7%	1,3%	5,0%	2,2%
Rp3,1 - 4 jt	-3,2%	-3,7%	-1,2%	0,3%
Rp4,1 - 5 jt	-4,5%	-2,3%	-2,2%	-3,0%
>Rp5 jt	0,8%	-2,0%	-1,2%	-3,2%
Total	1,0%	-5,0%	3,5%	0,5%

*Perubahan triwulan I 2019 dibandingkan triwulan IV 2018
Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Pengeluaran/ bln	Perubahan Tabungan*					
	Total	0%-10%	10%-20%	20%-30%	>30%	TMB
Rp1 - 2 jt	14,0%	8,0%	1,7%	2,8%	1,5%	0,0%
Rp2,1 - 3 jt	11,2%	4,3%	5,7%	0,7%	0,5%	0,0%
Rp3,1 - 4 jt	-7,7%	-5,3%	-3,7%	0,7%	0,7%	0,0%
Rp4,1 - 5 jt	-12,0%	-8,8%	-2,0%	0,0%	-1,2%	0,0%
>Rp5 jt	-5,5%	-6,7%	-0,2%	0,7%	0,7%	0,0%
Total	0,0%	-8,5%	1,5%	4,8%	2,2%	0,0%

*Perubahan triwulan I 2019 dibandingkan triwulan IV 2018
Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Tabel 4.7. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Berdasarkan Kategori Pengeluarannya Per Bulan

Triwulan IV 2018									
Penggunaan	Pengeluaran per Bulan								
	Rp1 - 2 jt	Rp2,1 - 3 jt	Rp3,1 - 4 jt	Rp4,1 - 5 jt	Rp5,1 - 6 jt	Rp6,1 - 7 jt	Rp7,1 - 8 jt	>Rp8 jt	Rata-rata
Konsumsi	67,46	66,95	67,95	64,17	65,70	62,94	58,35	56,65	63,77
Cicilan/Pinjaman	13,21	17,49	18,86	22,07	20,55	25,18	28,98	29,65	22,00
Tabungan	19,32	15,55	13,20	13,76	13,75	11,88	12,67	13,70	14,23
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

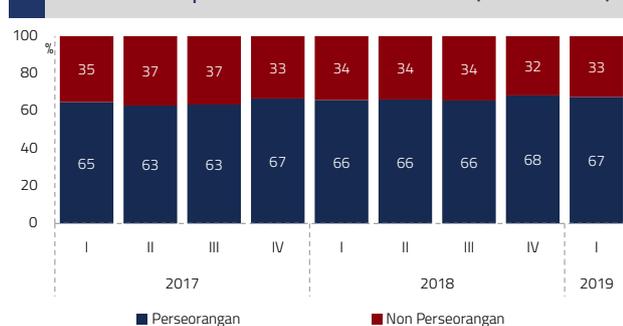
Triwulan I 2019									
Penggunaan	Pengeluaran per Bulan								
	Rp1 - 2 jt	Rp2,1 - 3 jt	Rp3,1 - 4 jt	Rp4,1 - 5 jt	Rp5,1 - 6 jt	Rp6,1 - 7 jt	Rp7,1 - 8 jt	>Rp8 jt	Rata-rata
Konsumsi	62,23	62,96	60,07	58,82	63,26	59,69	55,83	55,22	59,76
Cicilan/Pinjaman	21,25	20,89	23,51	23,92	18,43	23,44	25,42	23,13	22,50
Tabungan	16,52	16,14	16,41	17,25	18,30	16,88	18,75	21,65	17,74
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

4.3.3. Dana Pihak Ketiga Perseorangan (Di Perbankan)

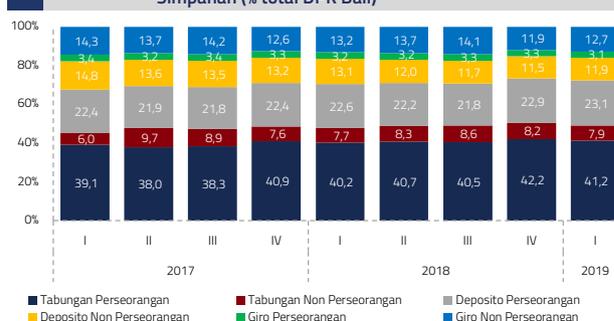
Peningkatan proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk tabungan pada triwulan laporan tidak mampu mendorong peningkatan proporsi dana pihak ketiga (DPK) perseorangan di perbankan. Pada triwulan I 2019, proporsi DPK sektor RT tercatat sebesar 67%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 68%. Penurunan proporsi DPK perseorangan terutama disebabkan oleh penurunan simpanan perseorangan dalam bentuk tabungan dan giro (masing-masing turun dari 42,2% dan 3,3% pada triwulan sebelumnya menjadi 41,2% dan 3,1%). Sementara proporsi simpanan RT dalam bentuk deposito mengalami peningkatan dari 22,9% menjadi 23,1%.

Grafik 4.17. Komposisi DPK Perbankan Provinsi Bali (% total DPK Bali)



Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi KC/KCP), diolah

Grafik 4.18. Komposisi Perbankan DPK Provinsi Bali berdasarkan Jenis Simpanan (% total DPK Bali)



Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi KC/KCP), diolah

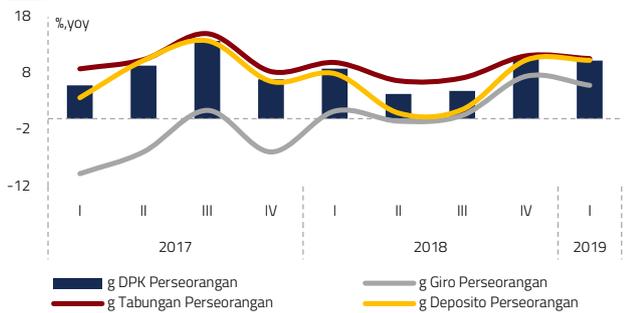
Seiring penurunan proporsi, pertumbuhan DPK perseorangan pada triwulan laporan juga melambat dari 10,69% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi 10,30% (yoy). Dilihat dari jenis simpanannya, perlambatan DPK perseorangan disebabkan oleh perlambatan pada semua jenis simpanan. Tabungan perseorangan hanya tumbuh 10,64% (yoy) pada triwulan I 2019, melambat dibanding triwulan sebelumnya (11,12% yoy). Deposito perseorangan pada triwulan I 2019 tumbuh 10,34% (yoy), sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya (10,37%, yoy). Demikian juga giro perseorangan yang melambat menjadi 5,90% (yoy) pada triwulan I 2019, dibanding triwulan lalu yang tumbuh 7,50% (yoy).

Grafik 4.19. Pertumbuhan DPK Perbankan Provinsi Bali (%)



Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi KC/KCP), diolah

Grafik 4.20. Pertumbuhan DPK Perseorangan (%)



Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi KC/KCP), diolah

Dilihat dari jumlah rekening DPK perseorangan, pada triwulan I 2019 terdapat penambahan jumlah rekening sebesar 4,18% dibanding triwulan sebelumnya, didorong oleh peningkatan jumlah rekening pada semua kategori nilai simpanan. Secara spasial, seluruh daerah mengalami pertumbuhan jumlah rekening simpanan. Persentase penambahan jumlah rekening terbanyak terjadi di Kabupaten Tabanan.

4.3.4. Kredit Perbankan Pada Sektor Rumah Tangga

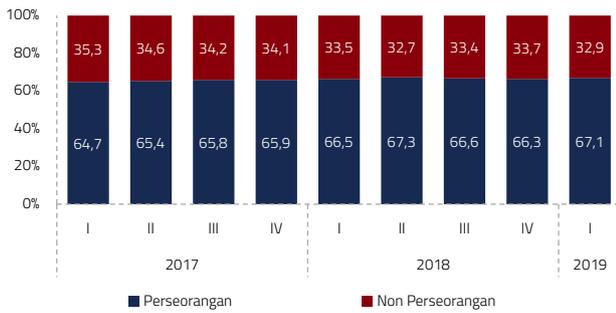
Dari sisi penyaluran kredit perbankan, proporsi kredit rumah tangga di Provinsi Bali masih mendominasi. Pada triwulan I 2019, pangsa kredit untuk perseorangan mencapai 67,1% dibanding keseluruhan kredit. Sebagian besar kredit perseorangan digunakan untuk konsumsi, yaitu 52,0%, sedangkan sisanya digunakan untuk kegiatan produktif yaitu modal kerja dan investasi masing-masing sebesar 32,1% dan 15,9%.

Tabel 4.8. Komposisi Jumlah Rekening Perseorangan Per Nilai Penempatan di Bali

DAERAH	Jumlah	<10 JT	>10 JT - 100 JT	>100JT - 500JT	>500JT - 1 M	>1 M - 2 M	>2 M - 5M	>5M - 10M	>10M - 15M	>15M - 20M	>20M	
Kab. Buleleng	Rek	542.488	492.427	43.005	6.249	417	200	137	8	2	1	10
	Δ%	3,53	5,61	-3,85	2,75	37,17	55,04	73,42	100,00	100,00		900,00
Kab. Jembrana	Rek	245.264	220.812	21.136	2.980	178	78	63	14			3
	Δ%	4,32	5,54	-2,01	8,44	39,06	8,33	133,33	366,67			
Kab. Tabanan	Rek	343.593	296.719	39.508	6.442	510	195	199	8	9	1	2
	Δ%	6,86	8,73	0,89	12,23	65,05	21,12	172,60	-20,00	125,00		
Kab. Badung	Rek	809.129	670.781	106.068	26.497	2.986	1.400	1.088	230	61	2	16
	Δ%	6,61	6,72	10,11	21,51	61,23	41,70	154,21	350,98	258,82		220,00
Kab. Gianyar	Rek	377.207	316.979	48.439	10.003	901	419	430	21	1	6	8
	Δ%	6,50	7,70	1,81	12,38	59,19	25,07	181,05	320,00	-66,67	100,00	700,00
Kab. Klungkung	Rek	155.201	134.656	17.072	3.073	213	112	68	3	2		2
	Δ%	6,27	7,90	-2,87	7,41	47,92	31,76	119,35				
Kab. Bangli	Rek	133.084	118.324	12.547	1.968	152	54	35		1	1	2
	Δ%	6,52	8,45	-5,86	3,63	162,07	31,71	483,33				
Kab.Karangasem	Rek	273.076	243.903	24.747	4.027	193	106	94	3			3
	Δ%	3,53	4,84	-1,79	6,51	85,58	103,85	91,84	200,00			
Kota Denpasar	Rek	2.194.465	1.850.726	266.137	64.700	6.615	3.041	2.529	406	108	24	117
	Δ%	2,48	3,62	5,17	12,80	28,80	50,99	59,96	174,32	107,69	300,00	680,00
Provinsi Bali	Rek	5.073.507	4.345.327	578.659	125.939	12.165	5.605	4.643	693	184	35	163
	Δ%	4,18	5,37	3,60	13,28	41,44	44,57	91,31	212,16	138,96	288,89	640,91

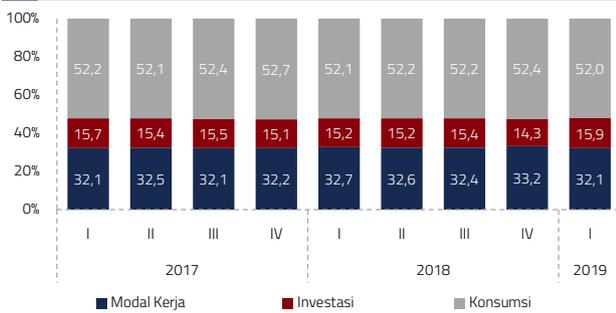
Rek = Jumlah rekening; % = Perubahan jumlah rekening pada triwulan I 2019 dibandingkan dengan triwulan IV 2018
 Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi KC/KCP), diolah

Grafik 4.21. Komposisi Penyaluran Kredit Perbankan



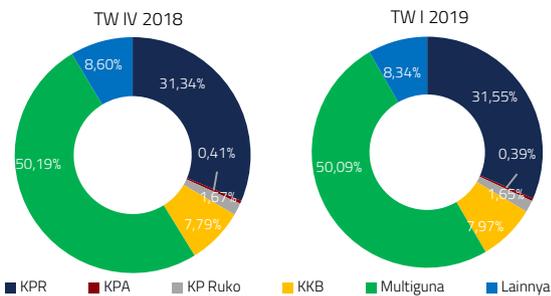
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.22. Komposisi Kredit Perseorangan



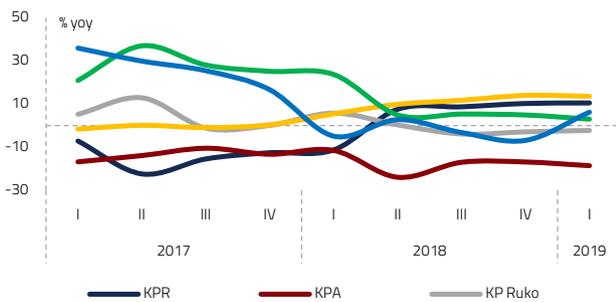
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.23. Komposisi Kredit Konsumsi Perseorangan



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

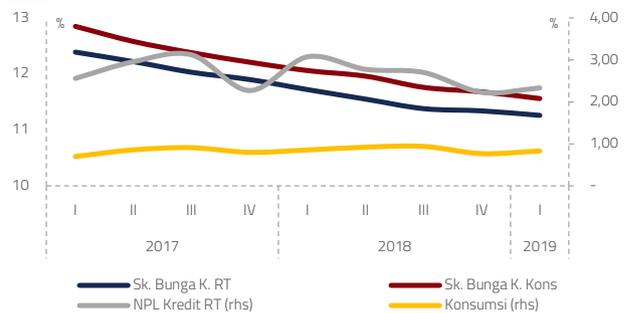
Grafik 4.24. Pertumbuhan Kredit Konsumsi Perseorangan



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

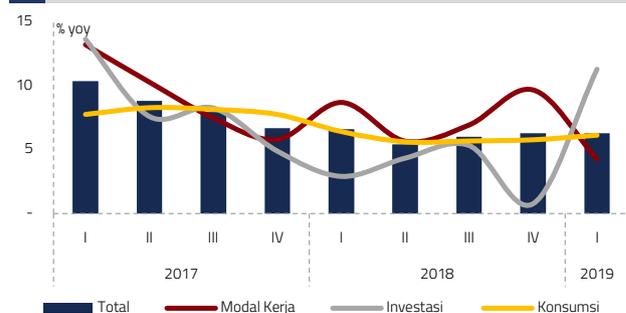
Dari sisi pertumbuhan, kredit perseorangan tumbuh 6,29% (yoy) pada triwulan I 2019, terakselerasi dibanding triwulan IV 2018 (6,26%, yoy). Akselerasi pertumbuhan kredit perseorangan terutama didorong oleh peningkatan kredit investasi dan konsumsi. Pertumbuhan kredit investasi meningkat dari 0,77% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi 11,26% (yoy) pada triwulan laporan. Kredit konsumsi meningkat dari 5,76% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi 6,12% (yoy). Di sisi lain kredit modal kerja turun dari 9,56% (yoy) menjadi 4,26% (yoy).

Grafik 4.25. NPL dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga & Kredit Konsumsi di Bali



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.26. Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga (%)



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Hampir di setiap periode, kredit perseorangan didominasi oleh kredit konsumsi yang digunakan untuk membeli berbagai keperluan seperti rumah, apartemen, kendaraan dan konsumsi lainnya. Berdasarkan proporsinya, kredit konsumsi paling besar adalah kredit multiguna dengan pangsa 50,09% (turun dari 50,19% pada triwulan IV 2018). Sementara proporsi kredit kepemilikan rumah (KPR) sebesar

31,55% (naik dari 31,34% pada triwulan IV 2018) dan kredit kepemilikan kendaraan bermotor (KKB) sebesar 7,97% (naik dari 7,79% pada triwulan IV 2018).

Dilihat dari sisi suku bunga, suku bunga kredit perseorangan cenderung semakin rendah. Pada triwulan I 2019, suku bunga tertimbang kredit perseorangan di Provinsi Bali kembali menunjukkan penurunan menjadi 11,26% per tahun, dari triwulan sebelumnya yang sebesar 11,34% per tahun. Dari sisi risiko, risiko kredit rumah tangga di triwulan I 2019 kembali mengalami penurunan, tercermin dari NPL kredit perseorangan sebesar 2,33%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 2,23%. Peningkatan NPL kredit perseorangan disebabkan oleh peningkatan NPL pada kredit konsumsi dan modal kerja. NPL kredit konsumsi naik dari 0,77% menjadi 0,83% pada triwulan I 2019. NPL kredit modal kerja naik dari 1,11% pada triwulan IV 2018 menjadi 1,17%. Sementara itu, NPL kredit investasi mengalami penurunan dari 0,35% pada triwulan IV 2018 menjadi 0,33%.

Secara spasial, kredit perseorangan masih terkonsentrasi di daerah Provinsi Bali Selatan, yaitu Kota Denpasar, dengan pangsa sebesar 37%, diikuti oleh Kabupaten Badung dengan pangsa sebesar 16%. Sejalan dengan konsentrasi jumlah kredit, jumlah rekening di dua daerah tersebut juga cukup besar dibanding daerah lainnya.

4.3.4.1 Kredit Kepemilikan Rumah dan Apartemen

Kinerja perkembangan kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kepemilikan ruko di triwulan laporan mengalami perbaikan. Dari jenis kreditnya, akselerasi pertumbuhan KPR pada triwulan I 2019 didorong oleh KPR tipe sedang (s.d. 70) dari 15,66% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 18,58% (yoy). Akselerasi pertumbuhan KPR sejalan dengan meningkatnya penjualan bahan konstruksi dari hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) KPwBI Provinsi Bali. Berdasarkan hasil SPE, pertumbuhan penjualan bahan konstruksi pada triwulan I 2019 terakselerasi menjadi 3,32% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan lalu (-20,30%, yoy).

Tabel 4.9. Penyaluran Kredit Perseorangan Secara Spasial Posisi Triwulan I 2019

Daerah	Kredit (Rp Miliar)	Pangsa %	Jumlah Akun (Rekening)					
			KPR	KPA	Ruko	KKB	Multiguna	Lainnya
Kab. Buleleng	7.470	11	7.003	29	15	4.444	20.800	4.513
Kab. Jembrana	3.112	5	1.473	5	3	1.530	10.361	1.069
Kab. Tabanan	6.361	10	4.920	8	44	3.441	18.014	3.584
Kab. Badung	10.564	16	5.003	136	79	7.397	23.182	22.231
Kab. Gianyar	5.870	9	1.425	7	6	4.255	13.036	5.081
Kab. Klungkung	2.266	3	307	3	5	811	6.795	535
Kab. Bangli	2.231	3	858	7	3	748	5.797	314
Kab. Karangasem	3.291	5	1.544	3	3	1.476	10.488	701
Kota Denpasar	23.996	37	12.634	117	316	27.993	50.077	63.187
PROVINSI BALI	65.160	100	35.167	315	474	52.095	158.550	101.215

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.10. Pertumbuhan dan NPL KPR di Bali

Jenis KPR, KPA, Ruko	Pangsa %	Growth (%yoy)			NPL (%)		
		TW I-18	TW IV-18	TW I-19	TW I-18	TW IV-18	TW I-19
KPR	31,55	-11,26	10,23	10,48	2,43	2,58	2,89
RT. KPR sd 21	2,04	-68,52	6,49	-2,89	1,11	0,57	0,80
RT. KPR sd 70	15,48	11,02	15,66	18,58	2,03	1,69	1,90
RT. KPR 70+	14,04	-2,61	5,51	4,69	3,03	3,82	4,28
KPA	0,39	-11,50	-16,86	-18,57	29,75	19,84	18,89
RT. KPA sd 21	0,06	-11,03	-38,98	-37,14	37,46	25,85	33,04
RT. KPA sd 70	0,22	-11,93	-18,16	-20,02	33,35	24,99	23,29
RT. KPA 70+	0,11	-10,81	7,61	1,86	13,51	6,33	2,08
RUKO	1,65	0,10	-2,90	-2,25	1,00	2,20	2,37

*Lokasi Proyek

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.11. Pertumbuhan dan NPL KKB dan Multiguna di Bali

Jenis KKB	Pangsa %	Growth (%yoy)			NPL (%)		
		TW I-18	TW IV-18	TW I-19	TW I-18	TW IV-18	TW I-19
KKB	7,97	5,42	13,97	13,56	0,60	0,51	0,54
Mobil	7,17	5,53	10,90	9,88	0,53	0,43	0,48
Sepeda Motor	0,62	15,54	47,15	57,17	1,82	1,16	0,66
Truk	0,03	-35,18	-56,10	-35,56	0,25	0,57	1,84
Lainnya	0,15	-16,30	327,33	163,16	0,28	1,85	2,42
RT. Multiguna	50,09	25,14	4,91	3,00	0,84	0,71	0,77

*Lokasi Proyek

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Sejalan dengan KPR, pertumbuhan kredit kepemilikan ruko pada triwulan I 2019 mengalami perbaikan, yaitu dari -2,90% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi -2,25% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan KPA berkontraksi semakin dalam yang disebabkan oleh tipe sedang (s.d. 70) dan tipe besar (> 70). KPA tipe sedang berkontraksi 20,02% (yoy), lebih dalam dibanding triwulan lalu (-18,16%, yoy). Sedangkan KPA tipe besar melambat dari 7,61% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi 1,86% (yoy). Sementara itu, KPA tipe kecil (s.d 21) membaik walaupun masih berkontraksi, yaitu dari -38,98% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi -37,14% (yoy).

Dari sisi risiko kredit KPR, perilaku rumah tangga dalam melakukan pembayaran cicilan rumah mengalami penurunan kualitas. Pada triwulan I 2019, NPL gross KPR sebesar 2,89%, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 2,58%. Peningkatan risiko ini juga terjadi pada kredit kepemilikan ruko. NPL kredit kepemilikan ruko di triwulan I 2019 sebesar 2,37%, lebih tinggi dibanding triwulan lalu yang sebesar 2,20%.

Sementara KPA mengalami peningkatan kualitas kredit yang tercermin pada penurunan NPL dari 19,84% di triwulan lalu menjadi 18,89%. Meskipun menurun, NPL pada KPA memerlukan perhatian khusus karena masih di atas 5%. Namun demikian, pangsa KPA masih sangat kecil yaitu 0,41%.

4.3.4.2 Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Pertumbuhan kredit kendaraan bermotor (KKB) di Provinsi Bali pada triwulan I 2019 melambat menjadi 13,56% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,97% (yoy). Melambatnya pertumbuhan kredit KKB disebabkan oleh pertumbuhan kredit mobil yang hanya tumbuh 9,88% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,90% (yoy). Namun demikian, perlambatan lebih dalam tertahan oleh akselerasi kredit kendaraan roda dua (sepeda motor) dan perbaikan kredit kendaraan jenis truk yang masing-masing tumbuh dari 47,15% (yoy) dan -56,10% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 57,17% (yoy) dan -35,56% (yoy).

Tabel 4.12. Komposisi Kredit Multiguna Posisi Triwulan I 2019

Besarnya Pinjaman	Berdasarkan Nominal (% pangsa)						Berdasarkan Jumlah Rekening (% pangsa)					
	Jangka Waktu						Jangka Waktu					
	<1 tahun	1-3 tahun	>3-4 tahun	>4-5 tahun	>5 tahun	Jumlah	<1 tahun	1-3 tahun	>3-4 tahun	>4-5 tahun	>5 tahun	Jumlah
<10 JT	12,69	4,86	1,49	0,64	0,19	0,47	57,42	27,44	9,60	7,09	2,39	8,27
>10 JT - 50 JT	40,13	38,04	32,91	19,57	2,05	6,51	34,85	56,19	58,93	51,57	11,36	30,66
>50 JT - 100 JT	19,49	21,87	34,51	23,58	11,26	13,20	5,47	11,79	21,45	27,40	23,87	20,99
>100JT - 500JT	18,23	15,75	29,07	23,70	72,10	63,92	2,11	4,22	9,88	12,72	60,63	38,81
>500JT - 1 M	4,65	4,89	1,14	4,97	4,84	4,73	0,10	0,21	0,11	0,53	1,15	0,79
>1 M	4,82	14,60	0,88	27,54	9,55	11,16	0,04	0,15	0,03	0,70	0,61	0,48
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.13. NPL Kredit Multiguna

Besarnya Pinjaman	Berdasarkan NPL (%)					
	Jangka Waktu					
	<1 tahun	1-3 tahun	>3-4 tahun	>4-5 tahun	>5 tahun	Jumlah
<10 JT	0,33	7,95	14,76	17,93	16,32	11,13
>10 JT - 50 JT	0,20	0,69	0,75	0,39	0,31	0,48
>50 JT - 100 JT	0,00	1,13	0,23	0,40	0,17	0,25
>100JT - 500JT	0,14	1,52	0,52	0,50	0,40	0,41
>500JT - 1 M	0,00	3,12	0,00	0,74	3,66	3,30
>1 M	0,00	1,55	0,00	2,05	2,14	2,09
Jumlah	0,15	1,51	0,70	1,01	0,73	0,77

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Dilihat dari sisi risiko kredit, perlambatan KKB pada triwulan I 2019 diiringi dengan penurunan kualitas kredit seiring naiknya NPL pada jenis kendaraan roda empat (mobil) dan truk. NPL kredit kendaraan roda empat (mobil) dan truk masing-masing sebesar 0,48% dan 1,84% pada triwulan berjalan, lebih tinggi dibanding triwulan lalu (0,43% dan 0,57%). Di sisi lain, kualitas kredit kendaraan roda dua (sepeda motor) mengalami perbaikan dari 1,16% pada triwulan lalu menjadi 0,66%. Hal ini didorong oleh berkembangnya jasa transportasi *online* di Provinsi Bali.

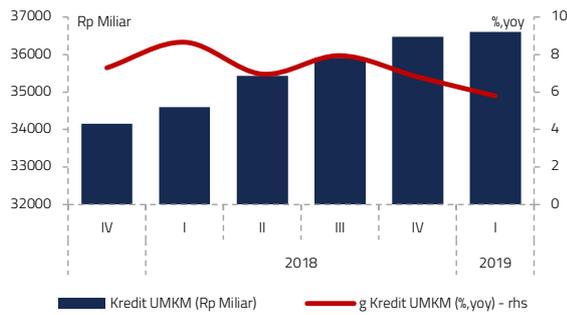
4.3.4.3 Kredit Multiguna

Pangsa kredit konsumsi perseorangan secara multiguna masih mendominasi, yaitu sebesar 50,09%. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan rumah tangga masih cukup besar, di luar kebutuhan untuk memiliki rumah dan kendaraan bermotor maupun peralatan rumah tangga. Hal ini didorong oleh pengajuan kredit multiguna yang relatif mudah. Selain

itu, dana yang diterima dapat secara leluasa digunakan untuk melakukan aktivitas konsumsi seperti renovasi rumah, biaya pernikahan, biaya pendidikan, biaya pengobatan, maupun pembelian barang berharga/elektronik, dan bahkan dapat digunakan untuk modal usaha.

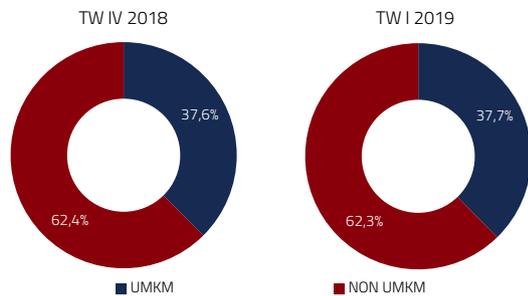
Pada triwulan I 2019, kredit multiguna tumbuh 3,00% (yoy), melambat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 4,91% (yoy). Dilihat dari pangsa berdasarkan kelompok besar pinjaman dan jangka waktu kreditnya, kredit multiguna masih didominasi oleh kelompok pinjaman >Rp100 juta s.d. Rp500 juta dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun yang mencapai 72,10% dari keseluruhan kredit multiguna jangka waktu >5 tahun. Demikian halnya berdasarkan jumlah rekening, pangsa terbesar berada pada kelompok pinjaman >Rp100 juta s.d. Rp500 juta dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun yaitu 60,63%.

Grafik 4.27. Pertumbuhan Kredit UMKM



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.28. Pangsa Kredit UMKM terhadap Total Kredit



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Dari sisi risiko kredit, kredit rumah tangga untuk fasilitas multiguna mengalami penurunan kualitas walaupun memiliki risiko yang relatif minimal. Pada triwulan I 2019, NPL kredit multiguna sebesar 0,77%, sedikit meningkat dibanding triwulan sebelumnya (0,73%). Kredit multiguna dengan risiko kredit terbesar berada pada pembiayaan dengan nominal di bawah Rp10 juta dan jangka waktu >4-5tahun dengan NPL sebesar 17,93%. Meskipun demikian, karena dari sisi nominal pangsanya hanya sebesar 0,06% dari total keseluruhan kredit multiguna, risiko kredit dari kelompok ini masih berdampak minor terhadap institusi keuangan maupun pada sistem keuangan di Bali.

4.4. AKSES KEUANGAN DAN UMKM

4.4.1. Akses Keuangan Kepada UMKM

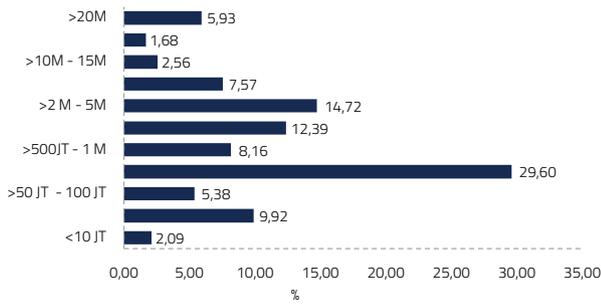
Pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan I 2019 mengalami perlambatan, dari tumbuh 6,81% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi 5,79% (yoy). Penurunan

penyaluran kredit UMKM terjadi di sektor utama yaitu perdagangan, hotel dan restoran (PHR) dan jasa-jasa. Sektor PHR yang merupakan sektor dengan pangsa kredit UMKM terbesar (69,44%) mengalami perlambatan penyaluran kredit UMKM dari 6,78% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi 5,98% (yoy). Sektor jasa-jasa dengan pangsa kredit UMKM terbesar kedua (8,74%) menunjukkan penurunan dari 6,69% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi -0,03% (yoy). Sektor konstruksi juga menunjukkan perlambatan pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan laporan, yaitu menjadi 1,25% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 8,56% (yoy).

Namun demikian, perlambatan kredit UMKM tertahan oleh akselerasi kredit pada sektor pertanian, pertambangan, industri serta pengangkutan dan komunikasi. Kredit UMKM pada sektor pertanian terakselerasi dari 10,17% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi 11,62% (yoy) pada triwulan I 2019. Kredit pertambangan membaik dari -0,65% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi 0,62% (yoy). Sementara kredit UMKM pada sektor industri serta pengangkutan dan komunikasi masing-masing tercatat meningkat dari 15,63% (yoy) dan 27,78% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 28,36% (yoy) dan 30,71% (yoy) pada triwulan laporan. Pertumbuhan kredit UMKM yang melambat pada periode laporan diiringi dengan penurunan NPL menjadi 3,13% dari sebelumnya 3,28% di triwulan IV 2018.

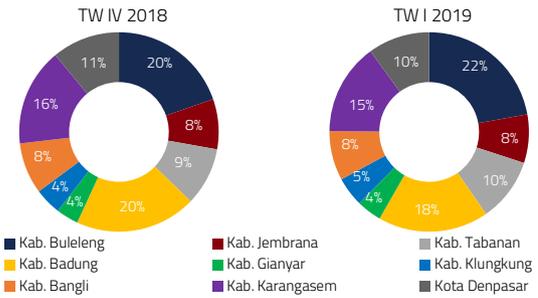
Berdasarkan data, pangsa kredit UMKM terhadap total kredit pada periode laporan mengalami sedikit peningkatan dari 37,6% pada triwulan sebelumnya menjadi 37,7%. Rasio penyaluran kredit UMKM di Provinsi Bali tersebut telah melebihi kewajiban pemberian kredit/pembiayaan UMKM minimal 20% seperti yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.17/12/PBI/2015.

Grafik 4.29. Pangsa Nominal Kredit UMKM



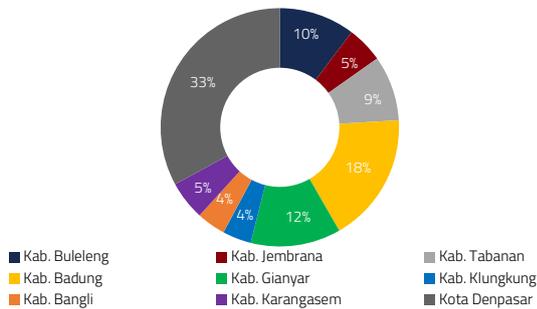
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.31. NPL Kredit UMKM Berdasar Kab/Kota



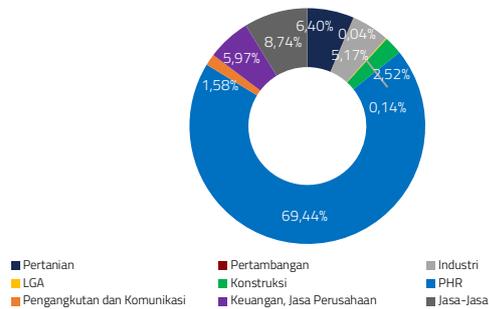
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.30. Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Kabupaten/Kota



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.32. Realisasi Kredit UMKM Berdasar Sektor Ekonomi



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Sementara berdasarkan nominal kreditnya, realisasi kredit UMKM terbesar masih berada pada rentang nominal >Rp100 juta s.d. Rp500 juta, dengan pangsa sebesar 29,60% dari total kredit UMKM yang ada di Bali. Berdasarkan sebaran wilayahnya, konsentrasi realisasi kredit UMKM terbesar masih berada di Kota Denpasar dengan pangsa 33%, diikuti Kabupaten Badung (18%) dan Kabupaten Gianyar (12%). Dari sisi kualitas kredit, NPL tertinggi dicatat oleh Kabupaten Buleleng yaitu sebesar 5,87%, lebih tinggi dibanding triwulan lalu (5,30%). Sementara NPL kredit UMKM terendah dicatat oleh Kabupaten Gianyar yaitu sebesar 1,07%, lebih tinggi dibanding triwulan lalu (0,97%).

Berdasarkan sektor ekonominya, realisasi kredit UMKM masih terkonsentrasi di sektor PHR dengan pangsa sebesar 69,44%, diikuti sektor jasa-jasa, pertanian, keuangan dan industri dengan pangsa masing-masing sebesar 8,74%; 6,40%; 5,97% dan 5,17%. Sementara itu, sektor ekonomi lainnya memiliki pangsa relatif rendah (dibawah 3%). Sedangkan tingkat NPL UMKM yang menurun di periode laporan, secara sektoral dipengaruhi oleh penurunan NPL kredit UMKM pada sektor pertanian, industri, konstruksi, PHR dan jasa-jasa. Sektor pengangkutan dan komunikasi masih mencatat NPL paling tinggi yaitu 8,45%, meningkat dibanding triwulan lalu (8,32%). Namun demikian, pangsa sektor pengangkutan dan komunikasi hanya sebesar 1,58%, sehingga memberikan pengaruh yang relatif kecil terhadap kinerja kredit UMKM.

Tabel 4.14. NPL Kredit UMKM berdasarkan Sektor Ekonomi

NPL UMKM Sektoral (%)	2017	2018				2019
		I	II	III	IV	
Pertanian	3,03	3,78	4,18	4,73	3,89	3,79
Pertambangan	6,74	4,57	1,02	0,51	1,63	1,65
Industri	3,51	4,25	4,45	3,44	3,35	2,46
LGA	2,42	2,34	1,13	0,01	0,00	0,39
Konstruksi	6,54	9,28	5,12	5,96	6,65	4,55
PHR	3,05	3,79	3,92	3,97	3,24	3,18
Pengangkutan & Komunikasi	1,23	3,56	1,00	9,05	8,32	8,45
Keuangan, Jasa Perush.	0,83	1,32	1,79	3,93	3,60	3,84
Jasa-Jasa	1,30	1,49	1,34	1,47	0,98	0,82
TOTAL	2,82	3,56	3,56	3,89	3,28	3,13

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

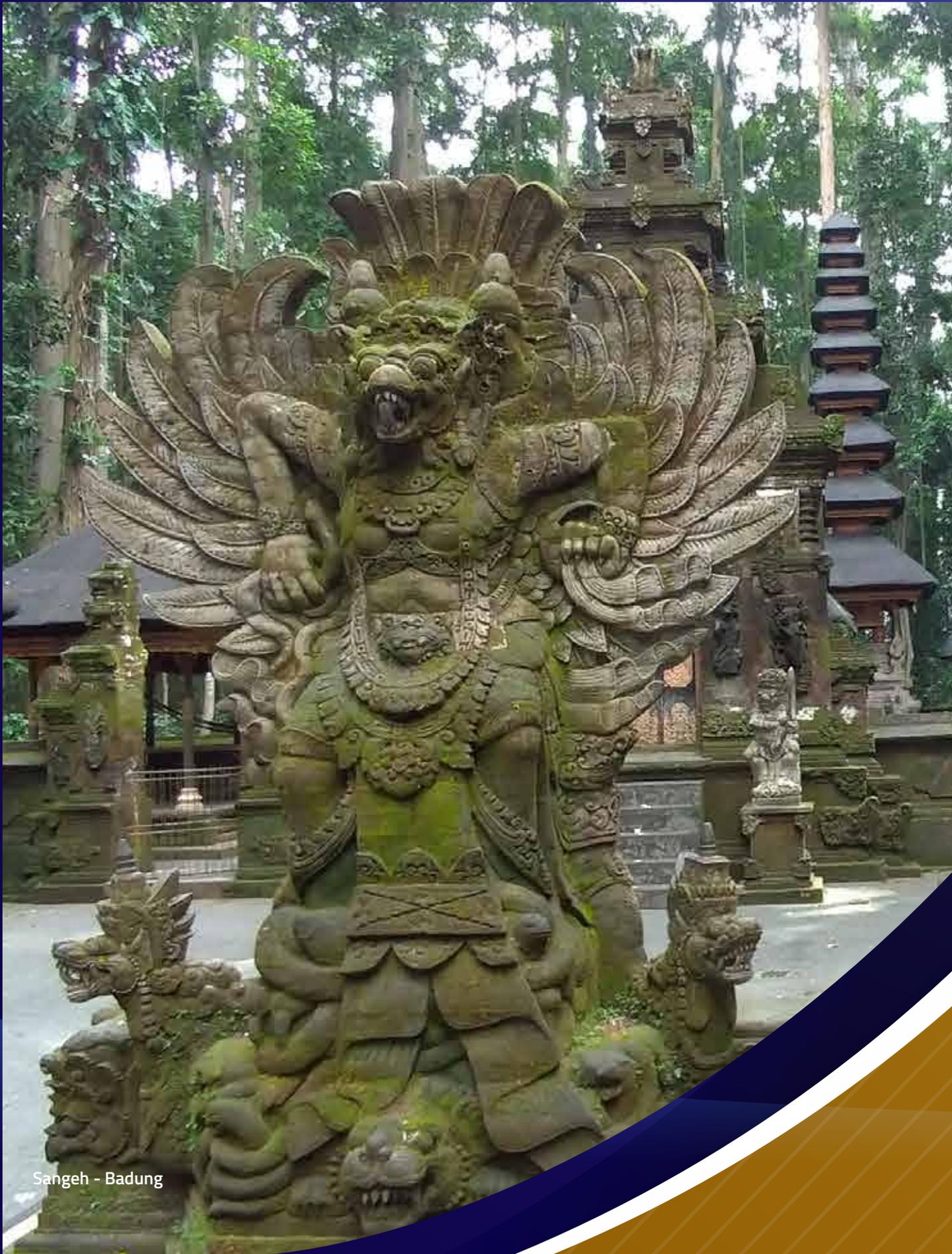
4.4.2. Akses Keuangan Kepada Penduduk

Rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk angkatan kerja di Provinsi Bali menunjukkan tren peningkatan. Pada bulan Februari 2019, rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk angkatan kerja di Provinsi Bali tercatat sebesar 201,15%, lebih tinggi dibanding bulan Februari 2018 (176,58%) dan bulan Agustus 2018 (191,01%). Rasio yang lebih besar dari 100% menunjukkan bahwa terdapat penduduk angkatan kerja di Provinsi Bali yang memiliki rekening simpanan lebih dari satu. Selain itu rasio lebih dari 100% juga mengindikasikan adanya penduduk bukan angkatan kerja yang juga memiliki rekening seperti pelajar dan mahasiswa.

Selaras dengan rasio DPK, rasio jumlah rekening kredit terhadap penduduk angkatan kerja di Provinsi Bali juga menunjukkan peningkatan menjadi 29,53% di bulan Februari 2019, lebih tinggi dibanding Februari 2018 (27,56%), namun lebih rendah dibandingkan bulan Agustus 2018 (29,66%). Masih rendahnya rasio rekening kredit menunjukkan terbatasnya penggunaan fasilitas pembiayaan oleh masyarakat Provinsi Bali dan masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyaluran kredit di masa yang akan datang.



halaman ini sengaja dikosongkan



Sangeh - Badung

BAB V

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH



**Posisi Net Inflow
Rp 3,25 Triliun
triwulan I
2019**

Posisi Net Outflow
Rp 1,54 Triliun
triwulan IV
2018

**-7,60% (yoy)
triwulan I
2019**

Pertumbuhan Nominal
Transaksi Kliring
-3,20% (yoy)
triwulan IV
2018

**-2,38% (yoy)
triwulan I
2019**

Pertumbuhan Nominal
Transaksi RTGS
36,43% (yoy)
triwulan IV
2018

**-37,20% (yoy)
triwulan I
2019**

Pertumbuhan Nominal
Transaksi KUPVA BB
0,16% (yoy)
triwulan IV
2018

- Kinerja transaksi tunai pada triwulan I 2019 di Provinsi Bali menunjukkan terjadinya net *inflow* (uang yang masuk ke Bank Indonesia melalui perbankan lebih besar dibanding uang yang keluar) sebesar Rp3,25 triliun.
- Pada triwulan I 2019, volume transaksi melalui SKNBI tercatat sebanyak 437 ribu lembar atau terkontraksi 18,80% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan IV 2018 yang terkontraksi 10,30% (yoy). Sementara itu, nominal transaksi melalui SKNBI tercatat sebesar Rp12,60 triliun atau turun sebesar 7,60% (yoy) pada triwulan I 2019, lebih rendah dibanding triwulan IV 2018 yang menurun sebesar 3,20% (yoy).
- Transaksi penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali di triwulan I 2019 menunjukkan penurunan sebesar 37,20% (yoy) atau dengan nilai nominal sebesar Rp6,01 triliun (beli Rp2,98 triliun, jual Rp3,02 triliun), lebih rendah dibanding triwulan IV 2018 yang meningkat sebesar 0,16% (yoy).

5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI BALI

Sistem pembayaran di Indonesia terdiri dari sistem pembayaran tunai dan nontunai. Pelaksanaan kegiatan sistem pembayaran tunai dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan uang Rupiah kepada masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan dalam kondisi yang layak edar serta tepat waktu. Sementara itu, sistem pembayaran nontunai ditujukan untuk menyediakan sistem dan infrastruktur yang handal dan aman dalam rangka mendukung aktivitas perekonomian.

5.1.1. Transaksi Sistem Pembayaran Tunai

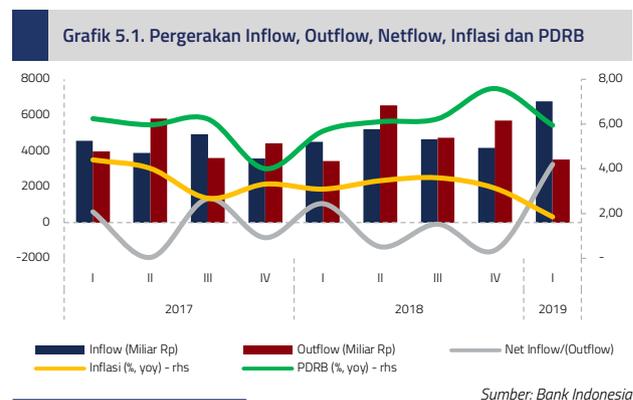
Transaksi pembayaran tunai di Bank Indonesia dapat diketahui melalui beberapa indikator, yaitu jumlah aliran uang keluar dari Bank Indonesia ke perbankan (*outflow*), jumlah aliran uang masuk dari perbankan ke Bank Indonesia (*inflow*), serta kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dan uang yang tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang Rupiah.

5.1.1.1. Aliran Uang Masuk/Keluar (Inflow/Outflow)

Sesuai dengan pola historisnya, perkembangan kinerja transaksi tunai pada triwulan I 2019 di Provinsi Bali menunjukkan terjadinya *net inflow* (aliran uang yang masuk ke Bank Indonesia melalui perbankan lebih besar dibanding uang yang keluar) sebesar Rp3,25 triliun setelah berakhirnya perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan masa libur akhir tahun.

Secara triwulanan, nominal *inflow* pada triwulan I 2019 mencapai Rp6,76 triliun atau tumbuh 50,18% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan IV 2018 (16,14%, yoy). Sedangkan nominal *outflow* pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp3,51 triliun atau hanya tumbuh 1,84 (yoy), melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 28,89% (yoy). Akselerasi *inflow* pada triwulan berjalan merupakan cerminan dari arus balik dana perbankan dan masyarakat pasca tingginya kebutuhan uang pada Hari Natal, libur akhir tahun dan penyelenggaraan *IMF-World Bank Annual Meeting* pada triwulan IV 2018.

Melambatnya arus uang tunai keluar dari Bank Indonesia ke masyarakat melalui perbankan di triwulan I 2019, sejalan dengan melambatnya komponen konsumsi rumah tangga PDRB Provinsi Bali di triwulan laporan⁷⁴. Kondisi ini juga didukung oleh melandainya inflasi Provinsi Bali pada triwulan laporan yang juga berpengaruh pada penurunan kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai.



Tabel 5.1. Perkembangan Inflow – Outflow Provinsi Bali

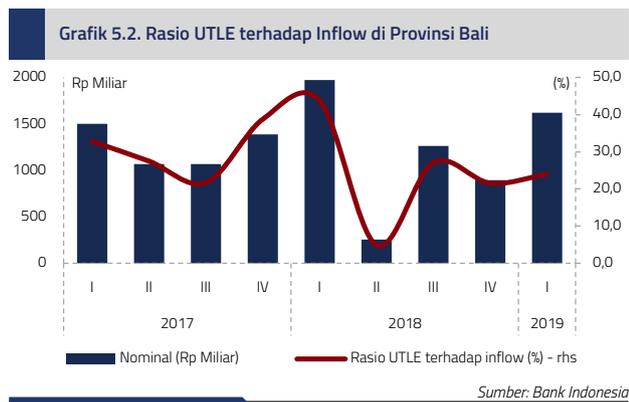
Indikator	2016				2017				2018				2019
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Inflow (Rp Miliar)	5.076	3.395	5.287	4.157	4.575	3.876	4.929	3.582	4.502	5.207	4.654	4.160	6.762
Outflow (Rp Miliar)	2.937	5.107	5.127	4.969	3.974	5.822	3.601	4.425	3.448	6.558	4.745	5.703	3.512
Net Inflow/(Outflow) - Rp Miliar	2.138	(1.712)	160	(812)	601	(1.946)	1.328	(843)	1.054	(1.352)	(91)	(1.543)	3.250
Penukaran (Rp Miliar)	21	21	19	30	20	18	15	18	22	22	31	26	30,22
Temuan Uang Palsu (Lembar)	1.934	1.409	1.029	1.222	1.055	1.509	1.406	759	1.241	656	775	910	1.007
Frekuensi Kas Keliling (Kali)	18	26	22	34	24	21	15	34	17	14	24	25	14
Nominal Kas keliling (Juta Rp)	10.393	16.663	7.234	11.943	13.261	30.684	2.944	6.135	4.641	17.842	5.262	8.213	5.992

Sumber: Bank Indonesia

74. Komponen konsumsi rumah tangga tumbuh 6,26% (yoy) pada triwulan I 2019, melambat dibanding triwulan sebelumnya (6,90%, yoy)

5.1.1.2. Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

Selain pengelolaan aliran uang kartal yang masuk dan keluar (*inflow* dan *outflow*), Bank Indonesia juga memiliki tugas memelihara kualitas uang kartal yang diedarkan kepada masyarakat atau dikenal dengan *Clean Money Policy*, diantaranya melalui pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE). UTLE yang dimusnahkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali pada triwulan I 2019 tercatat 42,33 juta lembar dengan nominal mencapai Rp1,62 triliun. Rasio jumlah UTLE terhadap *inflow* pada triwulan I 2019 mencapai 24%, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang hanya 21,5%. Hal ini mencerminkan tingginya standar kelusuhan uang (*soil level*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mempertahankan kualitas uang rupiah yang beredar di masyarakat.



5.1.2. Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai

5.1.2.1. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

SKNBI merupakan salah satu sarana transfer dana nontunai secara ritel selain RTGS, dengan mekanisme pertukaran warkat debit antar bank yang diselenggarakan melalui kliring. Di Provinsi Bali, koordinator penukaran warkat debit kliring dilaksanakan di KPw BI Provinsi Bali untuk Kota Denpasar dan di Bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dalam hal ini Bank Mandiri untuk wilayah Kabupaten Singaraja.

Transaksi nontunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) menunjukkan penurunan. Pada triwulan I 2019, volume transaksi melalui SKNBI tercatat sebanyak 437.479 lembar atau terkontraksi 18,8% (yoy), lebih dalam dibanding triwulan lalu yang terkontraksi 10,3% (yoy). Sementara itu, nominal transaksi melalui SKNBI tercatat sebesar Rp12,60 triliun atau terkontraksi 7,6% (yoy), lebih dalam dibanding triwulan lalu (-3,2%, yoy). Aktivitas sistem pembayaran nontunai di Provinsi Bali yang melambat sejalan dengan masih rendahnya realisasi belanja pemerintah daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat di awal tahun.

Tabel 5.2. Perkembangan Indikator SKNBI di Bali

Indikator	2017				2018				2019
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
PERPUTARAN KLIRING									
Lembar (ribu)	622,00	540,00	608,54	568,65	538,49	533,72	582,38	510,11	437,48
- Rata-rata lembar per hari (ribu)	10,20	10,19	9,82	9,32	8,83	9,88	9,39	8,36	7,41
Nominal Kliring (Rp Miliar)	16,270,00	13,370,00	15,804,40	15,077,89	13,635,43	13,842,34	15,845,75	14,602,60	12,603,80
- Rata-rata nominal per hari (Rp Miliar)	266,72	252,26	254,91	247,18	223,53	256,34	255,58	239,39	213,62
TOLAKAN CEK/BG									
Lembar (ribu)	7,91	7,45	6,06	5,63	5,91	5,35	4,72	4,62	4,141
- Rata-rata lembar per hari (ribu)	0,13	0,14	0,10	0,09	0,10	0,10	0,08	0,23	0,21
Nominal Cek/BG (Rp Miliar)	423,00	202,00	186,95	196,68	168,87	174,93	162,94	167,45	146,04
- Rata-rata nominal per hari (Rp Miliar)	6,93	3,81	3,02	3,22	2,77	3,24	2,63	8,35	7,42
PERTUMBUHAN PERPUTARAN KLIRING									
- Lembar (yoy, %)	(1,74)	(20,35)	(4,47)	(15,25)	(13,43)	(1,16)	(4,30)	(10,29)	(18,76)
- Nominal Kliring (yoy, %)	(18,10)	(37,61)	(12,22)	(17,26)	(16,19)	3,53	0,26	(3,15)	(7,57)
PERTUMBUHAN PERPUTARAN CEK/BG									
- Lembar (yoy, %)	(4,15)	(5,22)	(17,28)	(24,27)	(25,28)	(28,17)	(21,98)	(17,87)	(29,92)
- Nominal Kliring (yoy, %)	(1,63)	(52,13)	(30,24)	(26,88)	(16,40)	(6,43)	(17,15)	(14,86)	(13,52)

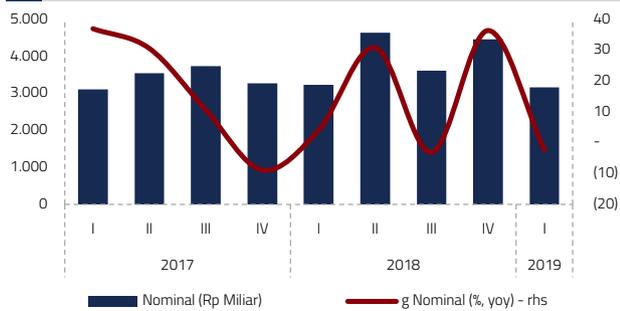
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.3. Perkembangan Nominal dan Volume Kliring di Bali



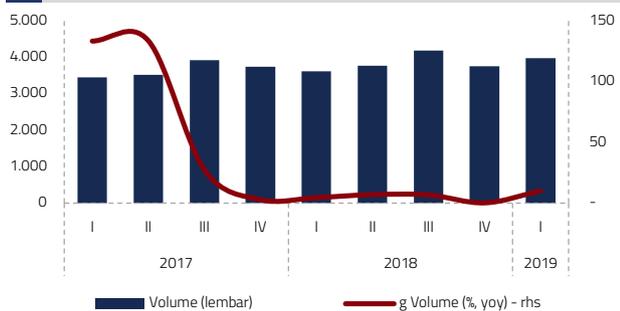
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.4. Perkembangan Nominal RTGS



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.5. Perkembangan Volume RTGS



Sumber: Bank Indonesia

Sejalan dengan SKNBI, transaksi Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) pada triwulan laporan juga mengalami penurunan dari sisi nominal, meskipun mengalami peningkatan dari sisi volume transaksi. Pada triwulan I 2019, nominal RTGS tercatat sebesar Rp3,16 triliun atau terkontraksi 2,38% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya (36,43%, yoy). Penurunan nominal transaksi RTGS seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan laporan. Sementara itu, volume RTGS tumbuh 10,06% (yoy) dengan jumlah sebanyak 3.971 transaksi, terakselerasi dibanding triwulan

lalu (0,22%, yoy). Peningkatan volume transaksi RTGS di tengah penurunan transaksi kliring mencerminkan preferensi masyarakat untuk menggunakan fasilitas RTGS untuk transaksi yang bernilai besar.

5.1.2.2. Perkembangan Tolakan Transaksi Cek/BG

Perkembangan nominal tolakan cek/bilyet giro pada triwulan laporan juga mengalami penurunan baik dari sisi volume maupun nominal. Pada triwulan I 2018, volume tolakan cek/bilyet giro terkontraksi 29,9% (yoy) dengan jumlah 4.141 lembar, lebih rendah dibanding triwulan IV 2018 yang terkontraksi 17,9% (yoy). Dilihat dari nominalnya, tolakan cek/bilyet giro pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp146,04 miliar, masih terkontraksi 13,5% (yoy), membaik dibanding triwulan lalu yang terkontraksi 14,9% (yoy). Masih terkontraksinya pertumbuhan nominal dan volume cek/BG sejak tahun 2017 terjadi seiring diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia No.18/41/PBI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Bilyet Giro, menunjukkan upaya perbankan dalam mematuhi peraturan dimaksud dan menunjukkan peran perbankan dalam mensosialisasikan penggunaan bilyet giro kepada masyarakat telah berjalan dengan baik.

Grafik 5.6. Perkembangan Cek dan Bilyet Giro di Bali



Sumber: Bank Indonesia

5.2. UPAYA MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

5.2.1. Penyediaan Uang Layak Edar dan Penanganan Uang Tidak Asli

Bank Indonesia selalu berupaya meningkatkan kualitas uang Rupiah (*soil level*) di masyarakat. Secara umum,

terdapat dua jenis layanan kas yang dilakukan Bank Indonesia untuk implementasi *Clean Money Policy*, yaitu melalui layanan kas di dalam kantor dan layanan kas di luar kantor. Kedua layanan kas ini dilakukan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia dan 45 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Layanan kas di dalam kantor Bank Indonesia dilakukan kepada bank umum (penyetoran dan pembayaran), maupun penukaran uang langsung kepada masyarakat dengan jadwal tertentu. Selain menukarkan uang langsung ke KPw BI Provinsi Bali di kota Denpasar, masyarakat juga dapat menukar di bank umum. Layanan kas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan dalam kondisi yang layak edar serta tepat waktu. Sepanjang bank memiliki persediaan uang Rupiah yang layak edar yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka bank tidak boleh menolak permintaan penukaran dari masyarakat. Kondisi geografis Provinsi Bali menjadi tantangan agar masyarakat di daerah terpencil tetap dapat memperoleh uang dalam kualitas baik dan pecahan yang sesuai. Berkaitan dengan itu, Bank Indonesia membuka layanan kas di luar kantor, yang terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kas Titipan

Kas Titipan adalah salah satu bentuk layanan Bank Indonesia dalam penyediaan Uang Layak Edar (ULE) kepada masyarakat yang berlokasi jauh dari Kantor Bank Indonesia melalui kerjasama dengan Bank Umum sebagai Bank Pengelola. Bank dapat melakukan penarikan/penyetoran tunai ke Bank Indonesia melalui Kas Titipan tanpa harus mendatangi Kantor Bank Indonesia. Selain itu, Kas Titipan dimaksud untuk memenuhi kebutuhan bank akan uang kartal kepada masyarakat termasuk melalui mekanisme penukaran. Salah satu tujuan dari Kas Titipan ini adalah percepatan penarikan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dari

masyarakat. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2016 di wilayah Kabupaten Singaraja, guna meningkatkan kualitas uang layak edar, dan pelaksanaan kas titipan diikuti oleh 8 anggota bank peserta dan 1 bank pengelola yang juga merangkap anggota di wilayah Kabupaten Singaraja.

2. Kas Keliling

Layanan kas ini dilaksanakan Bank Indonesia melalui mekanisme penukaran langsung di beberapa tempat yang menjadi pusat keramaian masyarakat (seperti pasar dan pusat perbelanjaan) baik dalam kota maupun luar kota. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat dilayani kebutuhan akan Uang Layak Edar termasuk di wilayah yang sulit dijangkau (*remote area*). KPw BI Provinsi Bali juga melayani kas keliling ke daerah terpencil, yaitu di Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Frekuensi pelaksanaan kegiatan kas keliling pada triwulan I 2019 di Provinsi Bali tercatat sebanyak 14 kali, menurun dibanding triwulan sebelumnya (25 kali). Sementara itu, dari sisi nominal, pelaksanaan kas keliling mengalami perlambatan dari 33,89% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi 29,10% (yoy) pada triwulan laporan. Selain sebagai sarana penukaran uang, kas keliling juga dimanfaatkan untuk melakukan edukasi dan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah.



Selain layanan kas, KPw BI Provinsi Bali juga berupaya mempermudah operasional antar bank untuk mendapatkan akses Uang Layak Edar (ULE), yang dilakukan melalui program Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB) khususnya di wilayah Denpasar. Sejak tahun 2012, perbankan yang membutuhkan uang layak edar tidak harus mengambil ULE ke Bank Indonesia karena telah difasilitasi melalui sistem TUKAB. Melalui sistem ini, bank dapat bertransaksi dengan bank lain yang memiliki ketersediaan ULE yang cukup. Dalam upaya untuk menjamin pengedaran uang Rupiah yang berkualitas, Bank Indonesia juga mengoptimalkan peran perbankan dalam menjaga kualitas pengelolaan uang Rupiah termasuk memastikan uang yang diberikan kepada nasabah dalam kondisi layak edar. Berkaitan dengan upaya tersebut, telah dilakukan pelatihan standar tata cara sortasi uang kertas kepada teller perbankan dan koordinasi serta evaluasi layanan kas perbankan secara berkesinambungan.

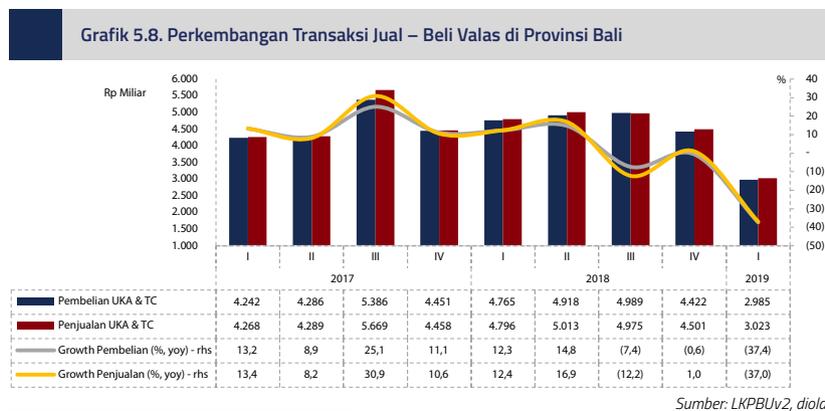
5.2.2. Perkembangan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di Provinsi Bali

Nominal transaksi penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali pada triwulan I 2019 mengalami penurunan yaitu berkontraksi 37,2% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,16% (yoy). Nominal transaksi jual-beli valas pada triwulan laporan mencapai Rp6,01 triliun, terdiri dari transaksi pembelian sebesar Rp2,98 triliun dan transaksi penjualan sebesar Rp3,02 triliun.

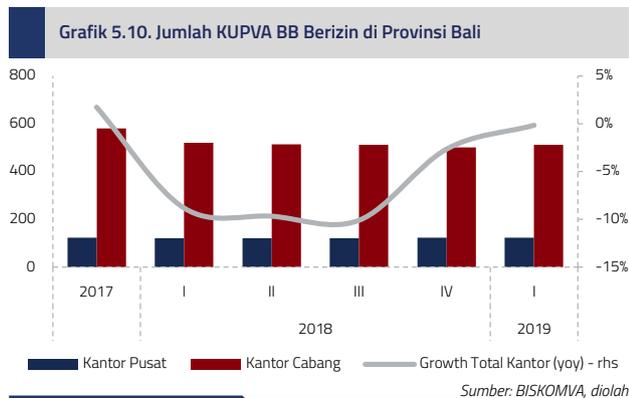
Penurunan transaksi KUPVA pada triwulan I 2019 sejalan dengan melambatnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali. Pada triwulan I 2019, jumlah wisman yang berkunjung ke Provinsi Bali hanya tumbuh 3,09% (yoy) atau sebanyak 1,34 juta orang, lebih rendah dibanding triwulan lalu yang tumbuh 24,69% (yoy). Perlambatan jumlah kunjungan wisman ini sesuai dengan siklus pariwisata Provinsi Bali dimana periode awal tahun (triwulan I) merupakan periode *low season* pariwisata.



Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah jaringan kantor KUPVA BB Berizin pada triwulan I 2019 sebanyak 634 kantor, terdiri dari 123 Kantor Pusat (KP) dan 511 Kantor Cabang (KC). Secara tahunan, jumlah tersebut berkontraksi 0,2% (yoy), membaik dibanding triwulan IV 2018 (-2,7%, yoy). Membaiknya jumlah jaringan kantor KUPVA BB Berizin pada triwulan laporan didorong oleh pembukaan 10 kantor cabang baru. Dalam rangka membangun industri KUPVA BB



yang sehat dan efisien, Bank Indonesia melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan untuk mencegah pemanfaatan KUPVA BB dalam pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya.



5.2.3. Perkembangan Inklusi Keuangan Provinsi Bali

Keuangan inklusif merupakan salah satu upaya Bank Indonesia dalam rangka mendukung efektivitas fungsi dan tugas Bank Indonesia baik dari sisi moneter, sistem pembayaran maupun makroprudensial. Dari sisi stabilitas sistem keuangan, keuangan inklusif dapat membantu menurunkan tekanan dari sisi likuiditas (*liquidity risk*) dan risiko kredit (*credit risk*) di sektor perbankan. Dari sisi likuiditas, perbankan berupaya meningkatkan porsi penghimpunan dananya dari segmen ritel karena segmen ini relatif lebih stabil meskipun dalam kondisi *shock*. Sementara itu pada sisi kredit, terbukanya segmen ritel baru yaitu kredit mikro dan kecil menjadi salah satu strategi diversifikasi portofolio dan diversifikasi risiko kredit. Guna mendukung keuangan inklusif, BI juga melaksanakan berbagai program pengembangan keuangan inklusif berupa edukasi keuangan dan perlindungan konsumen untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat yang diharapkan dapat menumbuhkan *responsible finance* bagi masyarakat.

Dari sisi kebijakan moneter, program pengembangan keuangan inklusif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas transmisi *policy rate*, mengingat transmisi *policy rate* dilakukan melalui perbankan. Berkembangnya keuangan inklusif di masyarakat akan membantu efektivitas kebijakan moneter dan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang terkena *second round effect*⁷⁵ dari kebijakan tersebut.

Sementara itu dari sisi sistem pembayaran, pengembangan keuangan inklusif akan mendukung semakin luas dan lancarnya jangkauan sistem pembayaran ke seluruh pelosok daerah sehingga dapat digunakan oleh seluruh penduduk di manapun berada. Di samping itu, program keuangan inklusif juga membantu terwujudnya program *less cash society* sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian.

Bank Indonesia memiliki parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat inklusifitas keuangan pada suatu daerah atau wilayah, yaitu Indeks Keuangan Inklusif (IKI)⁷⁶. Pengukuran IKI dilakukan Bank Indonesia untuk mengkombinasikan berbagai indikator yang tersedia di sektor perbankan. IKI menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem keuangan inklusif meliputi: akses (*access*), penggunaan (*usage*) dan kualitas (*quality*) dari layanan perbankan.

Dimensi Akses⁷⁷

Beberapa indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi akses untuk IKI meliputi:

1. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa⁷⁸
2. Jumlah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) per 100.000 penduduk dewasa

75. *Second round effect* adalah dampak lanjutan dari kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia

76. IKI adalah salah satu alternatif cara dalam pengukuran keuangan inklusif yang menggunakan indeks multi-dimensional berdasarkan data makroekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan

77. Dimensi Akses adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan jasa keuangan (kantor bank, ATM, dan lain-lain)

78. Penduduk dewasa adalah semua penduduk di suatu negara atau provinsi atau kabupaten/kota yang berusia di atas 15 tahun

3. Jumlah kantor bank⁷⁹ per 1.000 km²
4. Jumlah ATM per 1.000 km²

Pada triwulan I 2019, rasio jumlah kantor layanan bank per 100.000 penduduk di Provinsi Bali mencapai 33, masih sama dengan rasio pada triwulan IV 2018. Demikian halnya rasio jumlah ATM per 100.000 penduduk di Provinsi Bali pada triwulan I 2019 masih sama dengan triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 102⁸⁰. Bila dianalisis lebih lanjut secara spasial, Kabupaten Bangli masih menjadi daerah dengan rasio jumlah kantor layanan dan ATM terendah dengan pangsa jumlah penduduk dewasa sebesar 10%. Di sisi lain, Kabupaten Gianyar dengan jumlah penduduk terendah (pangsa 4%) memiliki rasio jumlah kantor layanan tertinggi. Hal ini mengingat walaupun luas wilayah Kabupaten Gianyar relatif kecil, tetapi menjadi pusat daerah pariwisata Provinsi Bali selain Kabupaten Badung. Sementara itu rasio jumlah ATM tertinggi dicatat oleh Kabupaten Badung. Pada triwulan berjalan, terdapat penambahan 1 kantor layanan bank di wilayah Denpasar dan 2 kantor layanan bank di wilayah Denpasar. Namun demikian, di wilayah Gianyar dan Tabanan masing-masing berkurang 1 kantor layanan bank.

Ditinjau dari cakupan luas wilayahnya, rasio jumlah ATM dan jumlah kantor layanan bank di Provinsi Bali sama dengan triwulan sebelumnya. Secara spasial, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung mengalami kenaikan rasio jumlah kantor layanan, yaitu masing-masing dari 2.301 dan 595 pada triwulan IV 2018 menjadi 2.309 dan 600 pada triwulan I 2019. Sementara itu, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan mengalami penurunan rasio jumlah kantor layanan, yaitu masing-masing dari 329 dan 120 pada triwulan lalu menjadi 326 dan 119 pada triwulan I 2019. Kabupaten Jembrana dan Bangli masih tercatat sebagai wilayah dengan rasio jumlah kantor layanan per 1000 km² terendah dan Kabupaten Bangli juga tercatat sebagai wilayah dengan rasio jumlah ATM per 1000 km² terendah pada triwulan laporan. Sementara itu, Kota Denpasar tercatat memiliki rasio jumlah kantor layanan dan ATM per 1000 km² tertinggi seiring dengan luas wilayah yang paling kecil (pangsa 2%) namun menjadi pusat pemerintahan dan pusat operasional perbankan di Bali.

Tabel 5.3. Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 100.000 Penduduk

	Jumlah Layanan Bank	Jumlah ATM	Rasio Jumlah Kantor Layanan	Rasio Jumlah ATM
Provinsi Bali	986	3.012	33	102
Kota Denpasar	295	1.215	46	190
Kab. Badung	251	995	72	285
Kab. Bangli	25	31	9	11
Kab. Buleleng	80	139	42	73
Kab. Gianyar	120	294	98	240
Kab. Jembrana	40	69	13	23
Kab. Karangasem	45	77	10	17
Kab. Klungkung	30	49	19	32
Kab. Tabanan	100	143	22	32

Sumber: Bank Indonesia

79. Kantor Bank adalah sebagai seluruh jaringan/unit kantor bank umum dan BPR yang tercatat dapat memberikan layanan keuangan kepada nasabah secara fisik dengan kantor utamanya, antara lain meliputi: Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas, Unit Usaha Syariah, Kas Mobil, *Payment Point, Agency*, dan *Deposit Taking Company* (DTC).

80. Berarti terdapat 33 kantor layanan bank dan 102 jaringan ATM yang siap untuk melayani 100.000 penduduk dewasa di Bali.

Tabel 5.4. Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 1000 km²

	Jumlah Layanan Bank	Jumlah ATM	Rasio Jumlah Kantor Layanan	Rasio Jumlah ATM
Prov. Bali	986	3.012	175	534
Kota Denpasar	295	1.215	2.309	9.509
Kab. Badung	251	995	600	2.377
Kab. Bangli	25	31	48	60
Kab. Buleleng	80	139	59	102
Kab. Gianyar	120	294	326	799
Kab. Jembrana	40	69	48	82
Kab. Karangasem	45	77	54	92
Kab. Klungkung	30	49	95	156
Kab. Tabanan	100	143	119	170

Sumber: Bank Indonesia

Dimensi Penggunaan⁸¹

Beberapa indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi penggunaan meliputi:

1. Jumlah rekening dana pihak ketiga (deposito, giro, tabungan) per 1.000 penduduk dewasa
2. Jumlah rekening kredit per 1.000 penduduk dewasa

Berdasarkan data yang dihimpun pada triwulan I 2019, rasio jumlah rekening simpanan (giro, tabungan dan deposito) per 1.000 penduduk dewasa di Provinsi Bali sebesar 1.720, meningkat dibanding triwulan IV 2018 (1.680). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan jumlah rekening simpanan yang dimiliki penduduk dewasa di bank sepanjang triwulan I 2019. Nilai rasio lebih dari 1.000 menandakan keberadaan penduduk dewasa yang memiliki lebih dari satu rekening simpanan⁸². Secara spasial, seluruh

kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan rasio jumlah rekening simpanan dengan peningkatan rasio terbesar terjadi di Kabupaten Buleleng, yaitu dari 2.758 pada triwulan IV 2018 menjadi 2.854 pada triwulan I 2019.

Sejalan dengan simpanan, rasio jumlah rekening kredit pada triwulan I 2019 turut mengalami peningkatan, dari 206 pada triwulan IV 2018 menjadi 208. Secara spasial, seluruh wilayah di Provinsi Bali mengalami peningkatan rasio jumlah rekening kredit. Peningkatan jumlah rekening kredit terbesar terjadi di Kabupaten Buleleng dari 335 pada triwulan IV 2018 menjadi 343 pada triwulan I 2019. **Peningkatan rasio jumlah rekening kredit dan simpanan terjadi seiring dengan akselerasi kinerja perekonomian Provinsi Bali pada triwulan laporan.**

Tabel 5.5. Indikator Banking Penetration

	Rasio Jumlah Rekening Kredit		Rasio Jumlah Rekening Simpanan	
	Tw IV 2018	Tw I 2019	Tw IV 2018	Tw I 2019
Provinsi Bali	206	208	1.680	1.720
Kab. Buleleng	335	343	2.758	2.854
Kab. Jembrana	136	138	791	805
Kab. Tabanan	120	121	745	761
Kab. Badung	150	151	2.236	2.318
Kab. Gianyar	378	383	3.000	3.079
Kab. Klungkung	161	162	978	999
Kab. Bangli	83	85	459	467
Kab. Karangasem	98	98	595	605

Sumber: Bank Indonesia

81. Dimensi penggunaan adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, antara lain terkait keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan

82. Contohnya Provinsi Bali memiliki penduduk dewasa berjumlah 3,25 juta dengan jumlah rekening simpanan sebanyak 4,5 juta. Rasio jumlah simpanan=4,5juta / 3,25juta x 1000=1383

5.2.4. Pengembangan Layanan Keuangan Nontunai dan Elektronifikasi

Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan elektronifikasi transaksi pembayaran dan peningkatan infrastruktur sistem pembayaran di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan elektronifikasi jalan tol 100% pada bulan Oktober 2017. Upaya ini sesuai amanat Presiden RI yang dituangkan dalam regulasi Peraturan Menteri PUPR No.16/PRT/M/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol.

Sejak tanggal 1 Oktober 2017, pembayaran di Tol Provinsi Bali Mandara sudah sepenuhnya menerapkan nontunai (100% nontunai). Jalan Tol Provinsi Bali Mandara memiliki 3 (tiga) pintu gerbang, yakni Gerbang Tol Benoa, Gerbang Tol Nusa Dua dan Gerbang Tol Ngurah Rai. Jumlah Gardu Tol yang beroperasi di Jalan Tol Provinsi Bali Mandara sebanyak 20 (dua puluh) unit Gardu Tol. Selain itu, pada bulan Maret 2018 telah dioperasikan layanan *drive thru* penjualan dan isi ulang uang elektronik di pintu Tol Benoa untuk mengurangi kemacetan yang seringkali terjadi di pintu tol. Dengan adanya *drive thru* tersebut, pengguna tol dapat melakukan *top up* saldo uang elektronik ataupun membeli uang elektronik. Layanan *drive thru* penjualan dan isi ulang uang elektronik di Jalan Tol Provinsi Bali Mandara ini adalah yang pertama di Indonesia.

Pada triwulan I 2019, jumlah uang elektronik di Provinsi Bali tercatat sebesar 215.307 pcs atau tumbuh 455,75% (yoy), terakselerasi dibanding triwulan

sebelumnya (tumbuh 378,52%, yoy). Pertumbuhan jumlah uang elektronik di triwulan laporan tergolong tumbuh sangat tinggi dibandingkan rata-rata 2 tahun terakhir sejak elektronifikasi mulai efektif digunakan secara massal di Provinsi Bali pada tahun 2017. Hal ini didorong oleh masifnya perluasan program elektronifikasi di Provinsi Bali.

Berdasarkan jenis penggunaannya, transaksi pembayaran masih mendominasi pada triwulan I 2019 dengan pangsa 48%, lebih rendah dibanding triwulan lalu (84%). Dilihat dari nominalnya, transaksi pembayaran tercatat sebesar Rp33,14 miliar atau tumbuh 810% (yoy), melambat dibanding triwulan IV 2018 yang tumbuh 44.649% (yoy) dengan nilai Rp8,95 miliar. Di sisi lain pertumbuhan penggunaan uang elektronik untuk transaksi isi ulang (*top up*) mengalami akselerasi dari 2.499% (yoy) menjadi 9.862% (yoy) pada triwulan laporan. Pangsa transaksi isi ulang pada triwulan laporan sebesar 38% (nominal Rp25,76 miliar), meningkat dibanding triwulan sebelumnya 11% (Rp1,1 miliar).

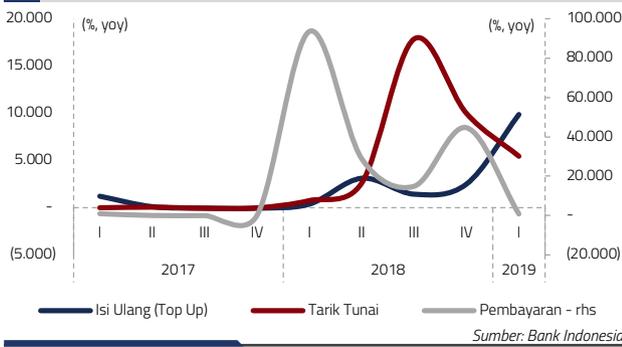


Tabel 5.6. Jumlah Gardu Tol Provinsi Bali Mandara

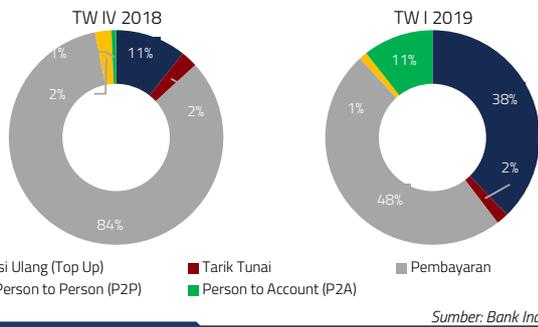
No	Nama Gerbang Tol	Jumlah Gardu Tol		
		Mobil	Sepeda Motor	Total
1	Gerbang Tol Benoa	4	3	7
2	Gerbang Tol Nusa Dua	4	4	8
3	Gerbang Tol Ngurah Rai	4	3	7
TOTAL		12	8	22

Sumber: PT. Jasa Marga Provinsi Bali Tol, Tbk

Grafik 5.12. Perkembangan Jenis Transaksi Uang Elektronik



Grafik 5.13. Pangsa Jenis Transaksi Uang Elektronik



Selain penerapan 100% nontunai di jalan tol, upaya mendorong perluasan elektronifikasi juga dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa *stakeholder* dalam menjajaki beberapa program elektronifikasi. KPw BI Provinsi Bali bekerjasama memfasilitasi dan mendukung implementasi elektronifikasi parkir (*e-parking*) kendaraan bermotor, obyek wisata, retribusi daerah, SPBU dan parkir bandara. Kerjasama dengan PT Angkasa Pura dilakukan untuk mewujudkan program elektronikasi pada pembayaran parkir kendaraan bermotor di Bandara I Gusti Ngurah Rai yang dikemas dalam "Bali Card". Selain itu, program elektronifikasi juga telah dilakukan pada pembayaran tiket penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Benoa (*e-Port Card*), khususnya di Pelabuhan Gilimanuk dilakukan uji coba sejak tanggal 15 Agustus 2018, untuk loket masuk penumpang dan loket masuk sepeda motor yang telah implementasi nontunai 100%, sedangkan untuk loket masuk kendaraan roda empat masih di

implementasikan sistem *Hybrid* (tunai dan nontunai). Dalam bidang transportasi, program elektronifikasi dilakukan dengan menyasar salah satu penyedia jasa transportasi, yaitu Blue Bird Group Bali. KPw BI Provinsi Bali juga mendorong elektronifikasi pembayaran tiket masuk obyek wisata khususnya di Kabupaten Tabanan dan kawasan wisata Pantai Pandawa serta pembayaran parkir kendaraan di pusat perbelanjaan.

Selain kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*, implementasi pembayaran nontunai di pemerintahan daerah Provinsi Bali juga terus dikembangkan, baik untuk penerimaan maupun pengeluaran. Dari sisi penerimaan daerah, penerapan nontunai telah dilaksanakan pada pajak daerah, khususnya Pajak/Retribusi Daerah, PBB, BPHTB, dan industri perhotelan, hiburan dan restoran (PHR). Sementara pengeluaran daerah Provinsi Bali juga telah menerapkan elektronifikasi, yaitu menggunakan transfer atau pemindahbukuan pada rekening bank untuk pembayaran dan transaksi daerah. Pemprov Provinsi Bali juga telah menerapkan komputerisasi yang tersambung secara *online* untuk pengelolaan APBD, sehingga pembuatan laporan keuangan seperti neraca dapat dilakukan seketika.

Sesuai dengan arahan Presiden RI mengenai transformasi penyaluran bansos secara nontunai, Bank Indonesia juga telah menerjemahkan hal tersebut ke dalam suatu model bisnis, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kebijakan penyaluran bansos nontunai baik dalam bentuk program keluarga harapan (PKH), program Indonesia pintar (PIP), bantuan pangan, pupuk dan dana desa, dinilai lebih efisien dibanding bansos tunai. Bansos nontunai khususnya PKH (Program Keluarga Harapan) telah disalurkan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penyaluran dilakukan oleh HIMBARA (himpunan Bank-Bank Negara) dengan pembagian wilayah penyaluran yang telah ditentukan. Sementara itu, penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) murni atau non-irisan baru mulai disalurkan pada tahun 2019.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, penyaluran bantuan sosial dalam bentuk nontunai/elektronik dapat dilakukan melalui mekanisme LKD, agen bank, atau e-warung. LKD merupakan pembayaran dan jasa keuangan yang bekerja sama dengan pihak ketiga (agen) dan menggunakan teknologi *mobile* dan berbasis daring (dalam jaringan *online*). Layanan ini mendukung perkembangan keuangan inklusif dan distribusi yang efektif dari dana bantuan pemerintah ke masyarakat (G2P). Mulai pertengahan 2016, atau tepatnya pada penyaluran PKH tahap III, LKD digunakan sebagai salah satu sistem distribusi bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) kepada KPM. Hal ini juga ditujukan sebagai bagian dari usaha untuk mendukung program Gerakan Nasional Nontunai (GNNT), mendorong efisiensi distribusi bantuan dan meminimalisir kebocoran atau kecurangan. Elektronik warung gotong royong (*e-warung*) adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan berperan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur. Ke depan, Bank Indonesia akan terus berkoordinasi dengan Himpunan Bank Negara sebagai penyalur BPNT untuk menambah jumlah *E-Warung* yang melayani penerimaan KPM BPNT.

Menindaklanjuti hal tersebut dan sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan layanan keuangan nontunai dan elektronifikasi di Provinsi Bali, pada tahun

2018 telah dilakukan sosialisasi dan edukasi penyaluran bantuan sosial nontunai, *training of trainers* (ToT) penyaluran program bantuan sosial secara nontunai di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Negara, terutama kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pejabat Dinas Sosial. Selain itu, kegiatan edukasi penyaluran bantuan sosial nontunai diikuti oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan agen bank.

Berdasarkan data yang dihimpun Bank Indonesia, pada triwulan I 2019 jumlah agen LKD di Provinsi Bali sebanyak 20.744 agen atau tumbuh 127,06% (yoy), terakselerasi dibanding triwulan IV 2018 (22,18%, yoy). Akselerasi jumlah agen LKD ini sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan elektronifikasi di Provinsi Bali.



halaman ini sengaja dikosongkan

BOKS 3

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI PEMERINTAH DAERAH BALI

Dasar Hukum Implementasi Transaksi Nontunai Pemerintah Daerah

Implementasi transaksi nontunai di pemerintah daerah diatur dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia telah diminta untuk mengimplementasikan transaksi nontunai sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ, tentang Implementasi Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi. Dalam surat edaran tersebut, Pemerintah Daerah diminta untuk melaksanakan transaksi nontunai paling lambat tanggal 1 Januari 2018.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Pemda di Provinsi Bali juga sudah menerbitkan aturan untuk penerapan transaksi nontunai pemerintah daerah. Gubernur Provinsi Bali sudah menerbitkan

Instruksi Gubernur Provinsi Bali Nomor 6352 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Nontunai di Provinsi Bali. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali juga sudah menerbitkan peraturan baik dalam bentuk instruksi Bupati/Walikota maupun instruksi Sekretaris Daerah.

Cakupan Implementasi Transaksi Nontunai Pemerintah Daerah

Implementasi transaksi nontunai pada Pemerintah Daerah (Pemda) mencakup transaksi nontunai pada sistem keuangan daerah, transaksi nontunai pada sisi penerimaan, serta transaksi nontunai pada sisi belanja. Implementasi transaksi nontunai dalam transaksi Pemda dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok: (i) transaksi nontunai dalam sistem keuangan daerah; (ii) transaksi nontunai dalam transaksi penerimaan daerah; dan (iii) transaksi nontunai dalam transaksi belanja daerah.

Penerapan transaksi nontunai dalam sistem keuangan daerah mencakup aplikasi sistem keuangan daerah, penggunaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) *Online*, serta penggunaan *payroll* nontunai. Dalam

Tabel Peraturan Daerah Pemda Provinsi Bali tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah

No	Pemerintah Daerah	Peraturan Pemerintah Daerah
1	Provinsi Bali	Instruksi Gubernur No.5961 tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
2	Kota Denpasar	Instruksi Walikota No.1 Tahun 2017 Tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Walikota Denpasar
3	Kabupaten Badung	Instruksi Sekda Pemerintah Kabupaten Badung No.903/71/BPKAD/Sekret/2018 Tanggal 4 Januari 2018 tentang Surat Edaran Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
4	Kabupaten Bangli	Instruksi Bupati Bangli No.910/100 Tahun 2017 Tanggal 22 Januari 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli
5	Kabupaten Buleleng	Instruksi Bupati Buleleng No.900/229.13/Bid.I/BKD/2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
6	Kabupaten Gianyar	Instruksi Bupati Gianyar No.6313.1 Tahun 2017 Tanggal 28 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
7	Kabupaten Jembrana	Instruksi Bupati Jembrana No.1 Tahun 2017 Tanggal 3 November 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
8	Kabupaten Karangasem	Instruksi Bupati Karangasem No.1 Tahun 2017 Tanggal 4 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
9	Kabupaten Klungkung	Instruksi Bupati Klungkung No.3 Tahun 2017 Tanggal 13 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
10	Kabupaten Tabanan	Instruksi Bupati Tabanan No.1 Tahun 2017 Tanggal Desember 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

sistem keuangan daerah, terdapat beberapa sistem aplikasi yang dapat digunakan daerah untuk melakukan perencanaan hingga monitoring keuangan daerah. Beberapa sistem yang tersedia yaitu (i) Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikembangkan oleh BPK; (ii) Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) yang dikembangkan oleh BPPT; dan (iii) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Untuk transaksi nontunai pada sisi penerimaan, implementasi transaksi nontunai mencakup transaksi nontunai untuk penerimaan pajak dan penerimaan retribusi. Beberapa jenis transaksi pajak untuk implementasi transaksi nontunai, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame. Sementara itu, sejumlah retribusi yang dapat di nontunai yaitu retribusi pasar, retribusi parkir, retribusi, terminal, retribusi rekreasi, Izin Mendirikan Bangunan, serta Izin Gangguan.

Dari sisi belanja, implementasi nontunai mencakup untuk transaksi belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Jenis belanja langsung tersebut meliputi belanja modal, belanja barang & jasa, serta belanja pegawai. Sementara itu, jenis belanja tidak langsung meliputi belanja subsidi, belanja pegawai, belanja bantuan sosial, serta belanja bantuan keuangan.

Progres Implementasi Transaksi Nontunai Pemerintah Daerah Bali

Sebagian besar (60%) Pemda (Provinsi dan Kab/Kota) di Provinsi Bali menggunakan aplikasi SIMDA dan seluruh (100%) Pemda di Provinsi Bali sudah menerapkan SP2D *online* dan menjalankan *payroll* nontunai. Sementara itu, sebagian lainnya (40%) Pemda menggunakan aplikasi SIPKD. Untuk *payroll*, seluruh Pemda di Provinsi Bali sudah menggunakan *Cash Management System* (CMS) yang dikembangkan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Grafik Progres Implementasi Transaksi Nontunai Di Pemerintah Daerah Bali



Dari sisi penerimaan, tingkat penerapan transaksi nontunai Pemda Provinsi Bali pada 12 jenis penerimaan mencapai 71%, dimana paling banyak implementasi nontunai pada jenis pajak. Untuk 6 jenis pajak, Pemda di Provinsi Bali sudah seluruhnya menerapkan nontunai, sedangkan untuk 6 jenis retribusi, belum semua Pemda di Provinsi Bali yang menggunakan nontunai. Untuk retribusi parkir, baru 5 Pemda di Provinsi Bali yang mulai menerapkan nontunai. Sementara itu, untuk retribusi pasar, retribusi terminal, retribusi tempat rekreasi, izin mendirikan bangunan, dan izin gangguan, baru 4 Pemda yang mulai menerapkan nontunai. Sementara itu, jenis kanal yang digunakan untuk transaksi nontunai sisi penerimaan, yaitu Teller, ATM, *Internet Banking*, serta *Mobile Banking*.

Dari sisi belanja, tingkat penerapan transaksi nontunai Pemda Provinsi Bali pada 6 jenis belanja sudah mencapai 100%. Sudah seluruh Pemda di Provinsi Bali menjalankan transaksi nontunai pada 6 jenis belanja antara lain menggunakan kanal pembayaran teller, ATM, *internet banking* maupun CMS. Untuk penggunaan CMS, seluruh Pemda di Provinsi Bali sudah menggunakan CMS baik untuk belanja modal, belanja barang & jasa, belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan.

Perluasan Implementasi Transaksi Nontunai Pemerintah Daerah Bali

Di tahun 2019, perluasan transaksi nontunai Pemda di Provinsi Bali mencakup transaksi e-retribusi pasar, e-parkir, serta e-tiket obyek wisata. Berdasarkan hasil FGD dengan BPD Bali, perluasan transaksi nontunai e-retribusi pasar akan dilakukan di berbagai pasar di Kota Denpasar (a.l. pasar Kreneng, pasar, Sanglah), Kabupaten Badung (a.l. Pasar Umum Beringkit, Pasar Umum Kuta 2), Kabupaten Tabanan (Pasar Kediri), Kabupaten Gianyar (Pasar Goa Gajah, Pasar Seni Sukawati), serta Kabupaten Bangli (Pasar Lokasrana). Sementara itu, untuk perluasan penerapan *e-parking*, tahun 2019 akan dilakukan implementasi *e-parking* di Rumah Sakit Sanglah dan Rumah Sakit Mangusada. Selain itu, untuk perluasan e-tiket obyek wisata, di tahun 2019 akan dimulai penggunaan e-tiket di beberapa obyek wisata di Kabupaten Klungkung (DTW Kerta Gosa, DTW Goa Lawah) dan di Kabupaten Gianyar (Pura Tirta Empul, DTW Goa Gajah)

halaman ini sengaja dikosongkan



Bandara I Gusti Ngurah Rai - Badung

BAB VI

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN



2,54 Juta Orang
Februari
2019

Jumlah Angkatan Kerja
2,61 Juta Orang
Februari
2018

76,68%
Februari 2019

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
79,83%
Februari 2018

1,19%
Februari
2019

Tingkat Pengangguran Terbuka
0,86%
Februari
2018

3,91%
September 2018

Tingkat Kemiskinan
4,14%
September
2017

103,28
triwulan III
2018

Nilai Tukar Petani
104,18
triwulan III
2017

0,364
September
2018

Gini Ratio
0,379
September
2017

74,77
2018

Indeks Pembangunan Manusia
74,30
2017

- Jumlah angkatan kerja di Provinsi Bali pada Februari 2019 mengalami penurunan menjadi 2,54 juta orang atau menurun 2,60% (yoy) dibanding Februari 2018 (5,60%,yoy).
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2019 mencapai 1,19%, mengalami peningkatan dibanding periode Februari 2018 yang sebesar 0,86%.
- Tingkat kemiskinan Provinsi Bali pada September 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 3,91%, lebih rendah dibanding September 2017 yang sebesar 4,14%.

6.1. KETENAGAKERJAAN

6.1.1. Kondisi Ketenagakerjaan Di Bali

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bali pada Februari 2019 mengalami penurunan pada jumlah penduduk yang bekerja dan peningkatan tingkat pengangguran dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan jumlah penduduk yang bekerja disebabkan terjadinya penurunan pasokan tenaga kerja di Provinsi Bali yang diiringi pula dengan penurunan jumlah angkatan kerja. Penduduk usia kerja di Provinsi Bali tercatat sebanyak 3,31 juta orang pada Februari 2019 atau meningkat sebesar 1,41% (yoy). Peningkatan tersebut lebih rendah dibanding peningkatan penduduk usia kerja pada Februari 2018 yang tercatat sebesar 1,68% (yoy). Sementara itu, jumlah angkatan kerja di Provinsi Bali pada Februari 2019 tercatat sebesar 2,54 juta orang, turun 2,60% (yoy), lebih rendah dibanding Februari 2018 yang tercatat mengalami peningkatan sebesar 5,60% (yoy).

Penurunan kondisi ketenagakerjaan di periode Februari 2019 juga tercermin oleh menurunnya

jumlah angkatan kerja yang bekerja, dan meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Jumlah angkatan kerja yang bekerja pada Februari 2019 tercatat sebesar 2,51 juta orang, atau menurun 2,93% (yoy), lebih rendah dibanding Februari 2018 yang meningkat 6,50% (yoy). Sejalan dengan kondisi tersebut, TPT Provinsi Bali pada Februari 2019 tercatat sebesar 1,19%, lebih tinggi dibanding pada periode yang sama di 2018 sebesar 0,86%. Angka TPT Provinsi Bali pada Februari 2019 mengindikasikan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, sekitar 1 orang di antaranya tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan ataupun sedang mempersiapkan usaha.

Berdasarkan jenjang pendidikannya, penduduk yang paling banyak menganggur adalah lulusan setingkat diploma, tercatat sebesar 2,86%. Kemudian disusul oleh penduduk dengan lulusan pendidikan setingkat SMK sebesar 2,01% dan penduduk dengan lulusan level pendidikan universitas sebesar 1,58%. Sementara TPT terendah terjadi pada penduduk yang berpendidikan SMP ke bawah (0,56%). Gambaran kondisi TPT ini menunjukkan penduduk yang memiliki

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama

KEGIATAN UTAMA	2017		2018		2019
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb
Penduduk Usia 15+ (Ribuan Orang)	3.212	3.236	3.266	3.289	3.312
Angkatan Kerja (Ribuan Orang)	2.469	2.434	2.607	2.525	2.540
Bekerja (Ribuan Orang)	2.437	2.398	2.585	2.491	2.509
Pengangguran (Ribuan Orang)	31,61	36,14	22,35	34,49	30,26
Bukan Angkatan Kerja (Ribuan Orang)	743	801	659	764	772
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	76,87	75,24	79,83	76,78	76,68
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,28	1,48	0,86	1,37	1,19
Pekerja Tidak Penuh (Ribuan Orang)	635	551	607	584	588

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Tabel 6.2. TPT menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Utama

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2017		2018		2019
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
SMP ke bawah (%)	1,06	0,77	0,37	0,52	0,56
SMA (%)	1,28	1,78	1,66	1,41	1,55
SMK (%)	1,06	2,69	1,19	3,14	2,01
Diploma I / II / III (%)	1,34	1,76	0,90	2,58	2,86
Universitas (%)	2,78	2,51	1,25	1,67	1,58
TOTAL	1,28	1,48	0,86	1,37	1,19

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

level pendidikan tinggi, sulit memperoleh memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi mereka. Kondisi ini juga menunjukkan keterkaitan (*linkage*) dunia pendidikan dengan dunia usaha, sebagai salah satu pihak yang akan menyerap lulusan perguruan tinggi tersebut belum sepenuhnya sinergi dan sejalan. Kondisi ini menyebabkan lulusan pendidikan tinggi tidak sepenuhnya terserap dengan dunia usaha. Berdasarkan pola historisnya, TPT pada periode Februari relatif lebih rendah dibandingkan dengan periode Agustus setiap tahunnya. Kondisi tersebut terjadi karena periode Agustus terdapat periode kelulusan, sehingga banyak penduduk dengan jenjang pendidikan menengah dan tinggi yang baru lulus dan mencari pekerjaan di periode tersebut.



Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Provinsi Bali pada Februari 2019 menunjukkan penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dapat dilihat pada Februari 2018 tercatat sebesar 79,83% mengalami penurunan menjadi 76,68% pada Februari 2019. TPAK merupakan indikator

yang menggambarkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Secara umum sesuai dengan pola historisnya, mayoritas penduduk usia kerja yang bekerja di Provinsi Bali pada Februari 2019 merupakan pekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah (pangsa 34,8%), menurun dibanding Februari 2018 yang sebesar 34,9%. Seiring dengan itu, pangsa pekerja dengan jenjang pendidikan lulusan SMA dan Universitas juga meningkat di Februari 2019 dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Pekerja lulusan SMA pada Februari 2018 tercatat sebesar 19,7%, meningkat menjadi 20,9% di Februari 2019. Lulusan Universitas juga meningkat, yaitu dari 10,3% menjadi 12,3% pada Februari 2019.

Apabila dianalisis lebih lanjut khususnya bila ditinjau dari sisi pertumbuhannya, semua jenjang lulusan mengalami penurunan/perlambatan pertumbuhan. Peningkatan tertinggi terjadi pada lulusan universitas, yaitu menjadi 14,75% (yoy) di Februari 2019 dari 14,90% (yoy) pada Februari 2018. Sementara itu, penurunan terendah terjadi pada jenjang tamatan Diploma yaitu turun sebesar 16,88% (yoy) dari sebelumnya di Februari 2018 tercatat tumbuh sebesar 9,93% (yoy). Mengacu pada kondisi tersebut, diperlukan adanya sinergi dan koordinasi yang erat antara Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha untuk membangun sinergi dan kerjasama yang kuat dan intensif dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja khususnya lulusan Diploma, SMA, SMK dan Universitas dalam dunia kerja. Kegiatan ini antara lain dilakukan melalui keterlibatan pelaku usaha dalam

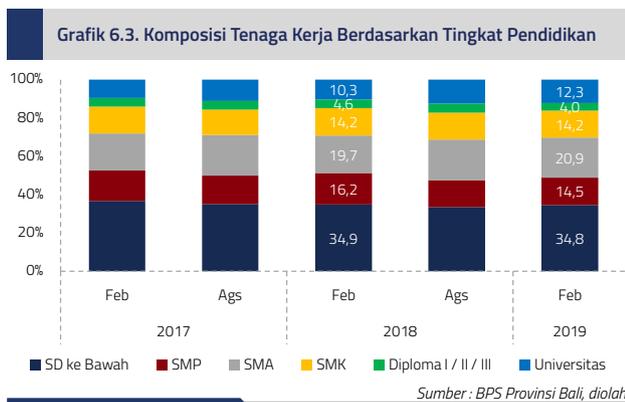
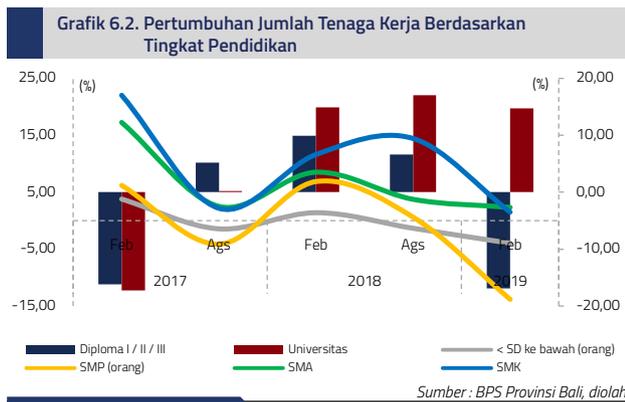
Tabel 6.3. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2016		2017		2018		2019
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb
< SD ke bawah (orang)	858.390	856.765	890.927	844.455	903.376	833.132	867.499
SMP (orang)	369.220	365.427	392.097	350.330	419.033	352.504	361.098
SMA (orang)	400.619	494.948	469.762	507.370	509.748	526.395	521.608
SMK (orang)	294.369	329.935	344.514	320.617	367.301	350.877	354.471
Diploma I / II / III (orang)	129.394	104.804	108.491	110.239	119.259	117.516	99.133
Universitas (orang)	280.072	264.676	231.703	265.296	266.226	310.446	305.507
TOTAL	2.332.064	2.416.555	2.437.494	2.398.307	2.584.943	2.490.870	2.509.316

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

penyusunan materi pendidikan dan juga menjadi salah satu pengajar tamu serta meninjau kembali materi pengajaran saat ini agar dapat disesuaikan dengan perkembangan yang sedang pesat saat ini dan juga disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha.

Berdasarkan jumlah jam kerja per minggu, jumlah pekerja penuh waktu (35 jam atau lebih per minggu) di Provinsi Bali pada Februari 2019 tercatat sebanyak 1,92 juta orang, menurun sebesar 2,85% (yoy), lebih rendah dibanding periode yang sama 2018



yang tumbuh sebesar 9,76% (yoy). Dari keseluruhan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, tercatat sebesar 76,58% merupakan pekerja penuh waktu, sementara sisanya sebesar 23,42% merupakan pekerja tidak penuh (antara 1-34 jam per minggu).

Struktur lapangan kerja secara umum tidak mengalami perubahan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) yang terkait secara langsung dengan industri pariwisata, masih menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Pada Februari 2019, lapangan usaha tersebut menyerap tenaga kerja terbanyak, yaitu tercatat sebesar 781 ribu orang, atau sebesar 31,1% dari total penduduk yang bekerja, mengalami penurunan dari periode Februari 2018 yang tercatat sebesar 853 ribu orang atau sebesar 33,2% dari jumlah penduduk yang bekerja. Lapangan usaha pertanian, menempati posisi kedua, yang menyerap tenaga kerja sebesar 543 ribu orang atau 21,6% dari total penduduk yang bekerja, meningkat dibanding periode sebelumnya yang tercatat sebesar 470 ribu orang atau dengan pangsa 18,3%. Sementara itu lapangan usaha industri menempati posisi ketiga, dengan menyerap 400 ribu orang atau dengan pangsa 15,9%, mengalami penurunan dibanding Februari 2018 yang tercatat sebesar 440 ribu orang atau dengan pangsa 17,1%.

Struktur distribusi angkatan kerja secara sektoral sejalan dengan distribusi PDRB Provinsi Bali dari sisi lapangan usaha. Berdasarkan PDRB triwulan I 2019,

Tabel 6.4. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja

PENDUDUK YANG BEKERJA	2016		2017		2018		2019
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI
Pekerja Tidak Penuh							
Jumlah (orang)	970.346	512.816	635.294	550.541	606.812	583.676	587.624
%	41,61	21,22	26,06	22,96	23,47	23,43	23,42
Pekerja Penuh							
Jumlah (orang)	1.361.718	1.903.739	1.802.200	1.847.766	1.978.131	1.907.194	1.921.692
%	58,39	78,78	73,94	77,04	76,53	76,57	76,58
TOTAL	2.332.064	2.416.555	2.437.494	2.398.307	2.584.943	2.490.870	2.509.316

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

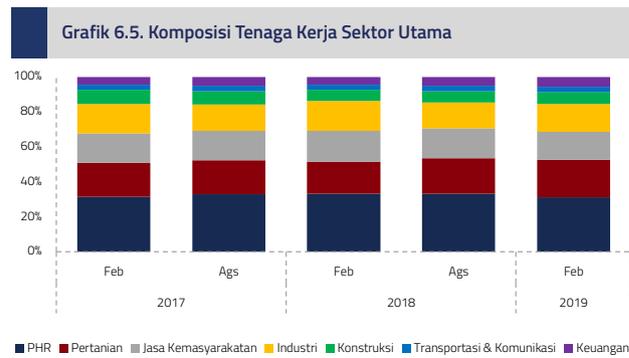
Tabel 6.5. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (Ribu Orang)

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	2016		2017		2018		2019
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb
Pertanian	512	506	468	466	470	501	543
Industri	329	371	413	362	440	365	400
Konstruksi	169	171	195	179	165	158	172
PHR	708	729	766	781	853	821	781
Transkom	90	91	72	77	73	80	79
Keuangan	97	110	106	118	114	122	139
Jasa - Jasa	426	439	410	398	456	426	394
TOTAL	2.332	2.417	2.428	2.381	2.572	2.473	2.509

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

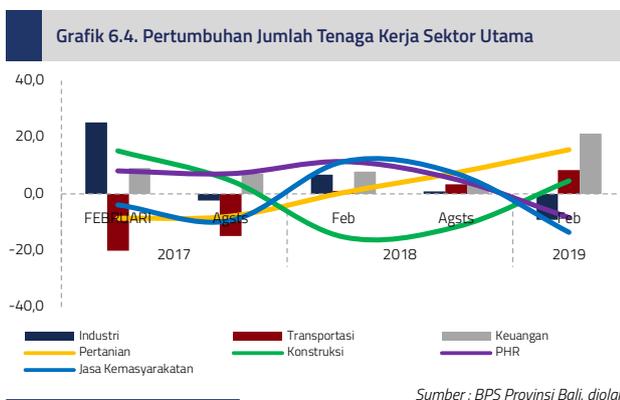
lapangan usaha akmamin dan perdagangan besar dan eceran masih menjadi lapangan usaha utama dalam struktur perekonomian di Bali. Apabila dianalisis lebih lanjut, sejumlah 31,1% angkatan kerja di Provinsi Bali yang bekerja di lapangan usaha akmamin. Sementara itu, lapangan usaha dengan pangsa terbesar kedua di PDRB Provinsi Bali pada triwulan I 2019, yaitu lapangan usaha pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 21,6% dari total penduduk bekerja. Sedangkan lapangan usaha industri pengolahan dapat menyerap tenaga kerja sebesar 15,9%.

Melambatnya kinerja lapangan usaha akmamin serta perdagangan besar dan eceran di TW I 2019, berdampak pada pertumbuhan penyerapan tenaga kerja kedua lapangan usaha tersebut. Pada Februari 2019, penyerapan tenaga kerja pada sektor PHR tercatat berkontraksi sebesar 8,39% (yoy), sementara dibanding penyerapan tenaga kerja pada Februari 2018 yang tercatat tumbuh sebesar 11,41% (yoy). Seiring dengan pertumbuhan lapangan usaha pertanian yang



Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

tetap positif, penyerapan tenaga kerja di lapangan usaha ini juga menunjukkan perbaikan dari periode sebelumnya. Tercatat penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian sebesar 0,43% (yoy) pada Februari 2018 meningkat secara signifikan menjadi sebesar 15,62% (yoy) pada Februari 2019. Selain itu, jumlah pekerja di lapangan usaha konstruksi juga menunjukkan perubahan, yaitu dari sebelumnya kontraksi -15,23% (yoy) pada Februari 2018 meningkat menjadi 4,60% (yoy) pada Februari 2019, sejalan dengan kinerja lapangan usaha konstruksi yang tumbuh kuat pada triwulan I 2019. Di lain sisi, terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha jasa kemasyarakatan, yaitu dari tumbuh 11,39% pada Februari 2018 menjadi turun sebesar -13,61% (yoy) pada Februari 2019. Kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran tenaga kerja dari lapangan usaha jasa kemasyarakatan beralih ke lapangan usaha lainnya.



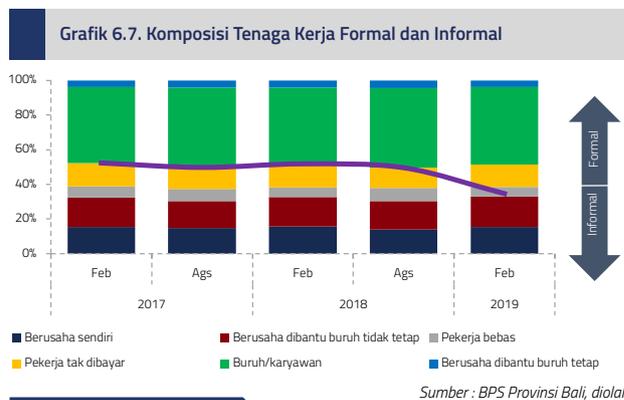
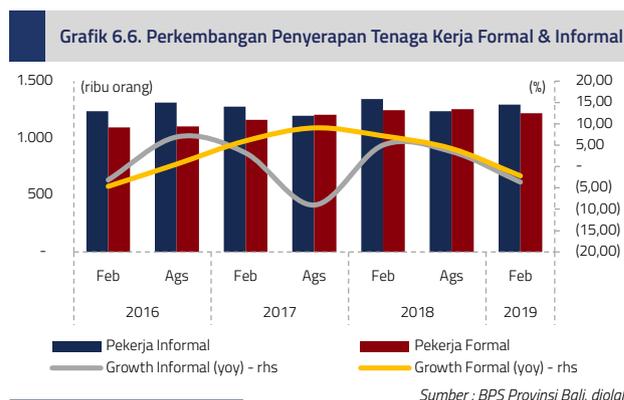
Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Tabel 6.6. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (Orang)

STATUS PEKERJAAN UTAMA	2016		2017		2018		2019
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI
Berusaha Sendiri	325.000	382.946	379.281	353.830	404.270	349.431	385.089
Berusaha Dibantu Buruh	452.674	435.670	408.027	371.848	439.548	406.506	443.255
Pekerja Bebas	154.760	196.060	158.761	167.900	147.238	186.976	135.603
Pekerja Tak Dibayar	305.130	298.025	330.970	300.863	350.081	293.380	328.426
Pekerja Informal	1.237.564	1.312.701	1.277.039	1.194.441	1.341.137	1.236.293	1.292.373
Berusaha Dibantu Buruh	84.896	88.872	93.007	100.341	103.381	109.851	91.514
Buruh/karyawan	1.009.604	1.014.982	1.067.448	1.103.525	1.140.488	1.144.726	1.125.429
Pekerja Formal	1.094.500	1.103.854	1.160.455	1.203.866	1.243.869	1.254.577	1.216.943
TOTAL	2.332.064	2.416.555	2.437.494	2.398.307	2.585.006	2.490.870	3.726.259

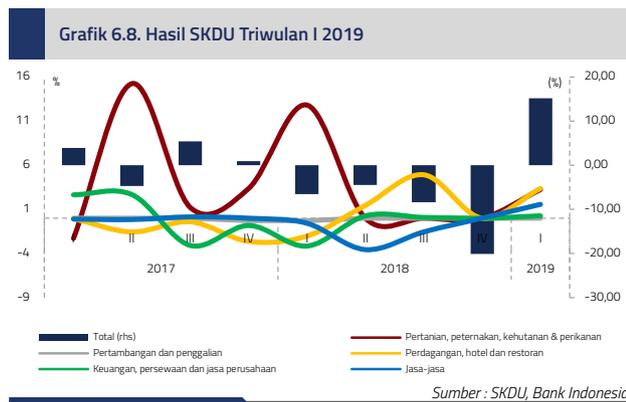
Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Jenis pekerjaan yang dominan pada Februari 2019 adalah kelompok orang yang bekerja pada kegiatan informal. Kondisi ini tidak jauh berbeda dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,29 juta jiwa atau 34,7% dari total penduduk yang bekerja. Jumlah tersebut turun -3,64% (yoy) dibanding Februari 2018 yang tercatat sebanyak 1,34 juta orang. Sedangkan orang yang bekerja pada lapangan kerja formal tercatat sebanyak 1,21 juta jiwa atau 32,7% dari total penduduk yang bekerja, mengalami penurunan sebesar -2,16% (yoy) dibanding Februari 2018 yang tercatat sebesar 1,24 juta orang. Tingginya kelompok orang yang bekerja pada kegiatan informal di Februari 2019 mengindikasikan bahwa sektor informal lebih memudahkan tenaga kerja di Provinsi Bali dalam mencari pekerjaan, karena sektor informal pada umumnya tidak mensyaratkan secara ketat terkait dengan latar belakang pendidikan dan jenis keterampilan tertentu.



Sejalan dengan kinerja perekonomian Provinsi Bali di triwulan I 2019 yang tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan I 2018, perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Bali juga menunjukkan perbaikan. Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) di triwulan I 2019, penggunaan tenaga kerja oleh pelaku usaha di Provinsi Bali secara umum menunjukkan perbaikan dibanding triwulan I 2018. Kondisi ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penggunaan tenaga

kerja pada triwulan I 2019 yang tercatat 15,17%, lebih tinggi dibanding triwulan I 2018 yang sebesar 3,55%. Peningkatan penggunaan tenaga kerja terjadi pada seluruh sektor usaha, kecuali industri listrik gas dan air bersih serta industri pengangkutan dan komunikasi. Membaiknya penggunaan tenaga kerja tersebut, terutama didorong oleh meningkatnya nilai SBT penggunaan tenaga kerja untuk sektor bangunan, yaitu dari 0,00% pada triwulan I 2018 menjadi 4,44% di TW I 2019.



6.1.2. Prospek Ketenagakerjaan Triwulan II 2019 dan Triwulan III 2019

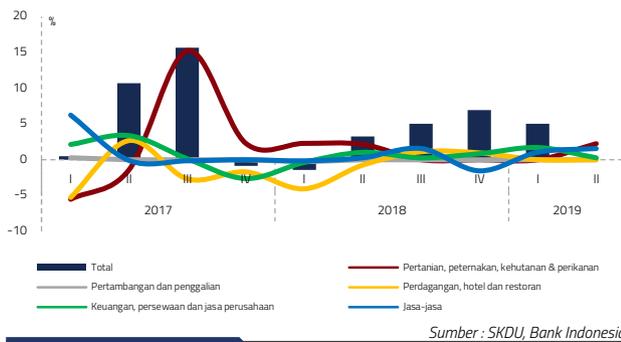
Perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Bali pada triwulan II 2019 diperkirakan akan mengalami peningkatan kinerja dibanding triwulan I 2018, sejalan dengan prakiraan meningkatnya kinerja ekonomi Provinsi Bali di triwulan II 2019. Prakiraan meningkatnya kondisi ketenagakerjaan tersebut juga terkonfirmasi dari hasil Survei Konsumen (SK) di Bali. Berdasarkan hasil SK, indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja pada triwulan II (April & Mei) 2019 mengalami peningkatan yaitu menjadi 139,30 dibanding triwulan II 2018 (109,17). Sejalan dengan itu, indeks ekspektasi penghasilan juga mengalami peningkatan di periode yang sama, yaitu menjadi 130,35 (triwulan II 2019) dibanding triwulan II 2018 (113,67). Demikian halnya dengan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) triwulan II (April & Mei) 2019 yang tercatat sebesar 134,25 lebih tinggi dibanding triwulan II 2018 (112,06). Prakiraan meningkatnya kinerja ketenagakerjaan

juga terkonfirmasi oleh peningkatan prospek penggunaan tenaga kerja (SKDU) di triwulan II 2019, dengan nilai SBT prakiraan yang tercatat sebesar 4,54, meningkat dibanding realisasi triwulan II 2018 yaitu -1,19. Dilihat dari sektoralnya, yang mengalami peningkatan signifikan adalah sektor pengangkutan dan komunikasi, yaitu dari -1,56 (triwulan II 2018) menjadi 0,91 (triwulan II 2019). Beberapa faktor pendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut, meliputi: (i) masuknya periode season pariwisata di Bali; (ii) periode puncak panen komoditas tabama; (iii) periode panen komoditas perkebunan; (iv) dimulainya pengerjaan beberapa proyek konstruksi dan infrastruktur, (v) peningkatan realisasi persentase fisik beberapa proyek konstruksi (multiyears) yang berdampak pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

Perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Bali pada triwulan III 2019 diperkirakan akan melanjutkan perbaikan seperti di triwulan II 2019. Membaiknya kondisi ketenagakerjaan di triwulan III 2019 juga didorong oleh prakiraan akselerasi kinerja ekonomi Provinsi Bali sejalan dengan masuknya periode *peak season* pariwisata dan prakiraan meningkat signifikannya jumlah kunjungan wisatawan. Kondisi ini diharapkan akan mendorong peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap oleh bidang usaha pariwisata, sehingga berpotensi menurunkan tingkat pengangguran.



Grafik 6.10. Indikator Ekspektasi SKDU



Sumber : SKDU, Bank Indonesia

6.2. KESEJAHTERAAN

6.2.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Bali

Tingkat kemiskinan Provinsi Bali di September 2018 tercatat sebesar 3,91%, atau sejumlah 168,34 ribu orang yang masuk dalam kategori penduduk miskin. Persentase ini menurun dibanding periode Maret 2018 dan September 2017 yang masing-masing sebesar 4,01% (171,76 ribu penduduk miskin) dan 4,14% (176,48 ribu penduduk miskin). Pada September 2018, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan tercatat sebesar 94 ribu orang (3,36%), sementara di wilayah pedesaan sebesar 77,73 ribu orang (5,38%). Jumlah ini menurun dibanding September 2017 yang masing-masing sebesar 96,07 ribu orang (3,46%) dan 80,40 ribu orang (5,42%).

Penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali tersebut, didukung oleh terjadinya peningkatan tingkat kesejahteraan petani, terkonfirmasi oleh peningkatan nilai tukar petani (NTP). Pada triwulan III 2018, NTP Provinsi Bali tercatat sebesar 103,41 atau turun 0,74% (yoy), membaik dibanding periode triwulan III 2017 yang turun 2,57% (yoy). Sementara itu, trend penurunan inflasi tertahan oleh meningkatnya tekanan inflasi pada triwulan III 2018 memberikan pengaruh pada tingkat kemiskinan. Inflasi pada triwulan III 2018 tercatat sebesar 3,60% (yoy), meningkat dibanding triwulan III 2017 yang sebesar 2,69% (yoy), menahan laju penurunan kemiskinan kemiskinan. Di sisi lain, dukungan akselerasi kinerja ekonomi Provinsi Bali pada 2018 yang tumbuh sebesar 6,35% (yoy), jauh

lebih tinggi dibanding tahun 2017 (5,57%,yoy), memberikan kontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan tersebut. Seiring dengan itu, pelaksanaan program bantuan sosial nontunai, berupa Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), juga memberikan kontribusi pada capaian penurunan tingkat kemiskinan di tahun 2018.

6.2.2. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Untuk mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan suatu wilayah, maka diperlukan indikator lain (selain jumlah dan persentase penduduk miskin). Terdapat dua indeks untuk mendukung analisis kemiskinan, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan kemiskinan (P2). Indeks P1 mengukur kesenjangan kemiskinan, yaitu sejauh mana individu berada di bawah garis kemiskinan pada suatu daerah/wilayah (dihitung dari jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan). Berdasarkan data pada periode September 2018, indeks P1 Provinsi Bali tercatat sebesar 0,52, lebih rendah dibanding September 2017 yang sebesar 0,55. Nilai P1 mengindikasikan bahwa rata-rata total pengeluaran penduduk di Provinsi Bali (miskin dan non-miskin) masih berada 0,52% di bawah garis kemiskinan (Rp382.598 per kapita per bulan) pada September 2018. Penurunan ini sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan dan yang juga didukung oleh peningkatan pendapatan masyarakat.

Namun P1 tidak dapat menggambarkan kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin, sehingga diperlukan indikator lain, yaitu Indeks Keparahan kemiskinan (P2). Indikator ini merupakan P1, namun perhitungan indeksnya memberikan bobot berbeda pada setiap penduduk miskin, tergantung dari jarak pengeluaran masing-masing terhadap garis kemiskinan. Makin jauh pengeluaran seorang penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, maka bobotnya dalam indeks P2 akan semakin besar, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, indeks P2 dapat menggambarkan kesenjangan pengeluaran

Tabel 6.7. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin

Keterangan	2015		2016		2017		2018	
	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	196,71	218,79	178,18	174,94	180,13	176,48	171,76	168,34
Persentase Penduduk Miskin (%)	4,74	5,25	4,25	4,15	4,25	4,14	4,01	3,91
- Kota	4,31	4,52	3,68	3,53	3,58	3,46	3,32	3,36
- Desa	5,44	6,42	5,23	5,21	5,45	5,42	5,38	5,08
Garis Kemiskinan (Rp)	321.834	331.028	338.967	346.398	361.387	364.064	382.598	388.451
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,66	1,13	0,51	0,53	0,68	0,55	0,69	0,52
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,14	0,35	0,09	0,11	0,16	1,12	1,18	0,12

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

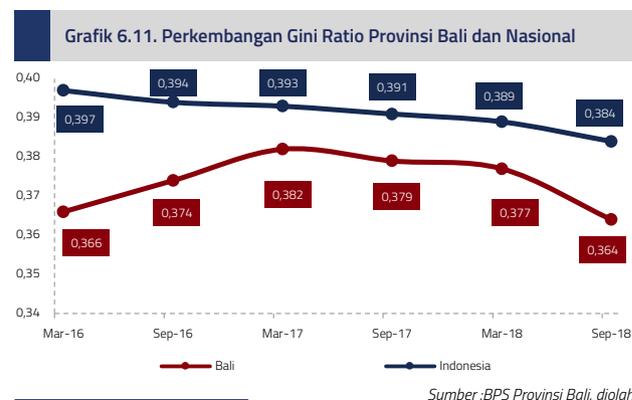
diantara penduduk miskin satu dengan lainnya. Berdasarkan data yang ada, terjadi penurunan P2 dari 1,12 di September 2017, menjadi 0,12 pada September 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Provinsi Bali semakin menurun. Nilai P2 sebesar 0,12 menunjukkan besarnya deviasi total pengeluaran diantara penduduk miskin di Bali. Kondisi ini memberikan konfirmasi bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, selain telah memberikan kontribusi yang nyata dalam penurunan tingkat kemiskinan, juga telah memberikan dampak pada penurunan tingkat kesenjangan, khususnya dari sisi pengeluaran diantara penduduk miskin.

6.2.3. Ketimpangan Pengeluaran Penduduk

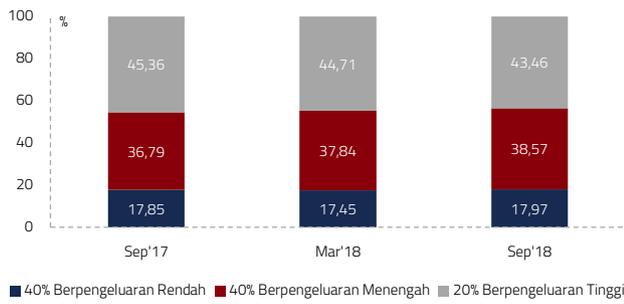
Salah satu indikator yang menggambarkan/ menunjukkan tingkat ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk suatu daerah atau wilayah, tercermin oleh indikator rasio gini. Sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan di Bali, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan melandainya tingkat inflasi, tingkat ketimpangan di Provinsi Bali Pada September 2018 juga menunjukkan penurunan. Tingkat rasio gini Provinsi Bali tercatat sebesar 0,364, menurun dibanding periode September 2017 yang tercatat 0,379. Angka ini juga lebih rendah dibanding rasio gini Nasional di September 2018 yang sebesar 0,384. Kondisi ini menunjukkan menurunnya ketimpangan/ kesenjangan ekonomi antar penduduk di Provinsi Bali, sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan melandainya

tingkat inflasi. Sejalan dengan itu, berbagai upaya pemerintah yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, termasuk diantaranya melalui pelaksanaan program bantuan sosial nontunai, peningkatan realisasi dana desa serta pengembangan infrastruktur serta terus mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi beberapa faktor yang ikut mengurangi tingkat ketimpangan tersebut. Penurunan Rasio Gini Provinsi Bali juga sejalan dengan penurunan Rasio Gini Nasional di periode yang sama.

Penurunan Rasio Gini Provinsi Bali pada September 2018 disebabkan oleh peningkatan pengeluaran kelompok 40% berpengeluaran rendah yang lebih tinggi, dibanding pengeluaran kelompok 20% berpengeluaran tinggi yang mengalami penurunan pada September 2018 dibanding periode yang sama 2017. Selain itu, pengeluaran kelompok 40% berpengeluaran menengah juga mengalami peningkatan, sehingga mendukung penurunan rasio gini Provinsi Bali.



Grafik 6.12. Distribusi Pendapatan Perkapita Penduduk



Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

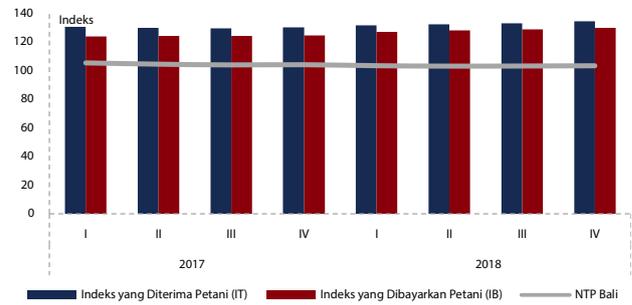
6.2.4. Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan

Tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan, dapat terkonfirmasi oleh perkembangan indikator Nilai Tukar Petani (NTP). NTP Provinsi Bali pada triwulan III 2018 tercatat sebesar 103,41, sedikit lebih tinggi dibanding triwulan II 2018 yang sebesar 103,32, namun lebih rendah dibanding triwulan III 2017 yang sebesar 104,18. Peningkatan NTP pada triwulan III 2018 disebabkan oleh peningkatan Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) lebih besar dari pada peningkatan Indeks yang Dibayarkan Petani (IB). Pada triwulan III 2018, IT sebesar 133,25, lebih tinggi dibanding triwulan II-2018 (132,62) atau meningkat 0,39% (qtq). Sementara itu, IB mengalami peningkatan sebesar 0,09% (qtq), dari 128,36 menjadi 128,86 pada 2018.

Bila dianalisis lebih lanjut dari sisi subsektornya, pada triwulan III 2018 NTP sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan yang mengalami peningkatan nilai NTP dibanding triwulan lalu. Sementara itu, NTP subsektor tanaman pangan, perkebunan rakyat dan hortikultura mengalami penurunan NTP dibanding triwulan sebelumnya. Peningkatan NTP terbesar pada triwulan III 2018 terjadi pada subsektor peternakan yang tumbuh 1,73% (qtq), dari 115,28 pada triwulan II 2018 menjadi 117,28 (triwulan III 2018). Peningkatan NTP pada subsektor ini disebabkan oleh peningkatan IT yang mencerminkan peningkatan harga jual komoditas peternakan. Kenaikan IT pada sub sektor peternakan didorong oleh kenaikan rata-rata indeks baik pada

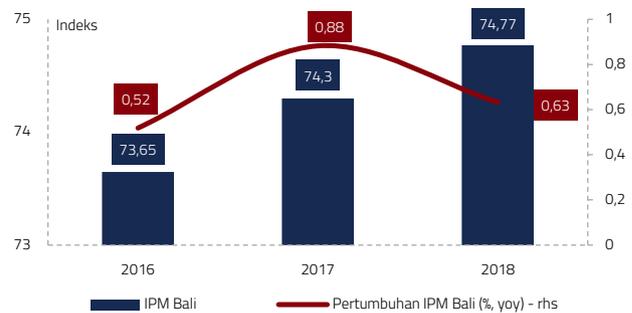
ternak kecil, besar maupun unggas. Di sisi lain, penurunan NTP terbesar pada triwulan III 2018 dicatat oleh subsektor perkebunan rakyat yang disebabkan oleh penurunan IT sebesar -1,71% (qtq). Penurunan IT subsektor perkebunan rakyat terutama disebabkan oleh penurunan rata-rata harga kakao dan cengkeh.

Grafik 6.13. NTP Bali, Indeks yang Diterima (IT), dan Indeks yang Dibayar (IB)



Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik 6.14. Perbandingan NTP Provinsi Bali dan Nasional



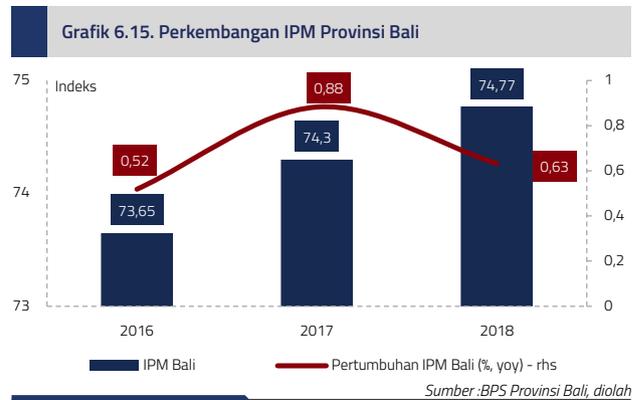
Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

6.3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Perkembangan indikator pembangunan manusia di Provinsi Bali semakin membaik, tercermin oleh nilai IPM yang tinggi dan berada di atas IPM nasional dengan tren yang meningkat. IPM Provinsi Bali pada 2018 tercatat sebesar 74,77, mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 yang tercatat sebesar 74,3, dan lebih tinggi dibanding IPM Nasional tahun 2018 yang sebesar 71,39. IPM Provinsi Bali tersebut masih menempati urutan ke-5 di antara 34 Provinsi di Indonesia.

Meningkatnya IPM Provinsi Bali pada 2018, dipengaruhi oleh peningkatan komponen pembentuk IPM yaitu

Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Per Kapita. Pada tahun 2018, UHH Provinsi Bali mencapai 71,68 tahun, artinya bayi yang lahir pada tahun 2018 memiliki peluang untuk hidup hingga 71,68 tahun. Nilai ini meningkat 0,22 tahun dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 71,46 tahun. Sementara itu, dimensi pengetahuan HLS dan RLS pada tahun 2018 mencapai 13,23 tahun dan 8,65 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa anak-anak yang pada tahun 2018 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,23 tahun (Diploma I), lebih lama 0,02 tahun dibanding tahun 2017. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,65 tahun (kelas IX), lebih lama 0,10 tahun dibanding tahun sebelumnya. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2018, Harapan Lama Sekolah di Indonesia meningkat sebesar 1,52 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah bertambah 0,91 tahun. Komponen pembentuk IPM lain yang mengalami peningkatan adalah Pengeluaran Per Kapita yang menggambarkan kelayakan standar hidup. Pada 2018, pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Bali mencapai Rp13,88 juta per tahun atau meningkat Rp313 ribu dibanding tahun 2017.





Pantai Segara - Badung

BAB VII

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH



**5,90%-6,30% (yoy)
2019**

**Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Bali
6,35% (yoy)
2018**

**2,70%-3,10% (yoy)
2019**

**Inflasi Bali
3,13% (yoy)
2018**

- Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2019 diperkirakan akan tumbuh melambat dan berada dalam kisaran 5,90%-6,30% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan tahun 2018 yang sebesar 6,35% (yoy)
- Inflasi Provinsi Bali untuk tahun 2019 diperkirakan akan melandai dalam kisaran 2,70%-3,10% (yoy), lebih rendah dibanding inflasi Provinsi Bali 2018 yang sebesar 3,13% (yoy).

7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI BALI

Dengan mencermati perkembangan ekonomi, *prompt* indikator, hasil survei dan liaison terakhir, diperkirakan perekonomian Provinsi Bali pada tahun 2019 akan tetap tumbuh stabil dengan kecenderungan yang melambat. Ekonomi Provinsi Bali diperkirakan akan tumbuh dalam kisaran 5,90%-6,30% (yoy), lebih rendah dibanding *range* proyeksi di periode sebelumnya⁸³. Komponen yang menjadi motor penggerak ekonomi Provinsi Bali adalah konsumsi di tengah laju investasi yang melambat. Sementara itu dari sisi lapangan usaha, ekonomi Provinsi Bali masih sangat bergantung pada lapangan usaha pariwisata, meskipun dengan kecenderungan yang melambat. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019, juga memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kinerja industri pengolahan, sehingga dapat menahan perlambatan lebih lanjut ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2019. Melambatnya kinerja ekonomi Bali, dari sisi permintaan terutama disebabkan oleh perlambatan kinerja komponen ekspor luar negeri dan investasi. Sementara dari sisi penawaran, melambatnya kinerja ekonomi Provinsi Bali disebabkan oleh melambatnya 5 lapangan usaha utama ekonomi Bali, yaitu lapangan usaha akomodasi makan minum, pertanian, perdagangan, konstruksi dan transportasi.

Melambatnya ekonomi Provinsi Bali pada 2019, baik dari sisi permintaan maupun penawaran disebabkan oleh beberapa faktor, yang meliputi:

- Tingginya harga tiket pesawat dan pengenaan bagasi berbayar kepada penumpang oleh beberapa maskapai, menahan laju kunjungan wisatawan,

khususnya wisatawan domestik, sehingga akan berdampak pada tertahannya laju kinerja sektor pariwisata Provinsi Bali.

- Resiko potensi terjadinya gangguan cuaca ekstrem (El Nino) pada tahun 2019, berpotensi menekan laju produksi sektor pertanian. Kondisi ini semakin berat dengan terjadinya alih fungsi lahan pertanian, yang berdampak pada pengurangan luas areal tanam lahan pertanian, sehingga dapat menyebabkan terjadinya penurunan produksi pertanian.
- Pengerjaan infrastruktur dan proyek konstruksi pada tahun 2019 yang tidak semasif seperti pada 2018.
- Peningkatan Upah Minimum Provinsi Bali pada 2019 yang sebesar 8,03% (yoy), lebih rendah dibandingkan peningkatan tahun 2018 yang sebesar 8,71% (yoy)
- Sikap *Wait and See* para pelaku usaha menanti kebijakan presiden terpilih, berisiko menjadi faktor penahan kinerja investasi
- Berdasarkan hasil survei dan liaison, melambatnya kinerja ekspor luar negeri juga disebabkan oleh semakin meningkatnya persaingan untuk produk-produk ekspor barang sejenis yang dihasilkan Bali, antara lain *handicraft*, olahan kayu, pakaian jadi dan tekstil, serta perhiasan dengan kualitas dan harga yang kompetitif.
- Berdasarkan hasil survei dan liaison, terus berkembangnya dan meningkatnya kualitas berbagai destinasi wisata dunia, termasuk di wilayah Asia Tenggara dengan biaya yang juga bersaing, berisiko menahan laju kunjungan wisman ke Provinsi Bali.

Tabel 7.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali 2019

Keterangan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019 ^a
Pertumbuhan Ekonomi Bali (%yoy)	6,33	5,57	6,35	5,90-6,30

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah Untuk Proyeksi 2019: Bank Indonesia

83. Range proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali 2019 pada buku KEKR Periode Februari 2019 adalah 6,00%-6,40% (yoy)

Tabel 7.2. Outlook Ekonomi Dunia dan Negara Mitra Dagang Utama Provinsi Bali 2019-2024

Negara	Pangsa Nilai Ekspor Barang Luar Negeri Bali TW I 2019 (%)	Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)							
		2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**	2023**	2024**
Amerika Serikat	29,67	2,22	2,86	2,33	1,87	1,77	1,64	1,62	1,57
Australia	9,46	2,38	2,81	2,07	2,76	2,76	2,64	2,65	2,64
Singapura	7,26	3,93	3,23	2,31	2,36	2,50	2,64	2,58	2,57
Jepang	5,35	1,93	0,81	0,98	0,45	0,54	0,51	0,53	0,52
Hongkong	4,65	3,84	3,02	2,73	3,00	3,02	3,02	2,96	2,99
Tiongkok	6,17	6,76	6,57	6,27	6,12	6,00	5,75	5,60	5,50
World Output		3,79	3,60	3,33	3,61	3,63	3,61	3,64	3,65

Sumber : World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF)
Keterangan : **) angka proyeksi IMF update April 2019

- Prakiraan melambatnya kinerja ekonomi beberapa negara mitra dagang utama Bali, yaitu AS, Australia, Singapura dan Tiongkok⁸⁴ pada 2019 dibandingkan 2018.

Pertumbuhan kinerja investasi pada tahun 2019 diperkirakan akan tumbuh melambat dibanding tahun 2018. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya investasi bangunan, sejalan dengan proyek konstruksi dan infrastruktur yang tidak semasif pada tahun 2018 (IMF-WB AM 2018). Sementara beberapa proyek pembangunan infrastruktur, yang diinisiasi oleh pemerintah daerah, seperti bendungan dan jalan *shortcut* Mengwitani-Singaraja, realisasi anggarannya baru akan signifikan pada tahun 2020. Sejalan dengan itu, sikap *wait and see* pelaku usaha menanti kebijakan presiden terpilih, diperkirakan akan menjadi salah satu faktor penyebab melambatnya ekonomi Bali. Kebijakan presiden terpilih baru akan terkonfirmasi pada periode triwulan IV 2019, sehingga respon dan konfirmasi pelaku usaha melalui kebijakan ekspansi investasinya baru akan dilakukan pada tahun 2020. Sehubungan dengan itu, dampak beberapa kebijakan investasi tersebut terhadap perekonomian Provinsi Bali diperkirakan baru akan mengalami akselerasi pada tahun 2020.

Kinerja ekspor luar negeri Provinsi Bali yang didominasi oleh kinerja ekspor jasa, diperkirakan

akan tumbuh melambat di 2019 dibanding tahun sebelumnya. Dominasi wisatawan mancanegara (wisman) asal Tiongkok, masih tetap terjadi di tahun 2019, meskipun diperkirakan akan mengalami penurunan sejalan dengan karakter wisman Tiongkok yang bukan merupakan *repeater tourists* (berbeda dengan wisman Australia dan Eropa). Penurunan wisman Tiongkok tersebut telah terlihat pada triwulan I 2019 yang berkontraksi cukup dalam sebesar 21,35% (yoy), menurun secara signifikan dibanding periode historisnya yang selalu tumbuh positif pada triwulan I (kecuali pada 2018 akibat dampak erupsi Gunung Agung). Berdasarkan hasil survei dan liaison, melambatnya kunjungan wisman tersebut juga disebabkan oleh terus berkembang dan meningkatnya kualitas destinasi wisata lain di dunia, khususnya di Wilayah Asia, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Thailand dengan biaya yang bersaing dan tidak adanya pelaksanaan kegiatan MICE internasional yang berskala besar seperti pada tahun 2018, yaitu pelaksanaan IMF-WB AM 2018. Tertahannya peningkatan kunjungan wisman, juga disebabkan oleh kapasitas bandara Ngurah Rai yang telah mendekati kapasitas optimum, sehingga penambahan *direct flight* baru untuk memenuhi permintaan dari beberapa maskapai negara asal wisman sangat terbatas untuk dapat dilakukan. Oleh karena itu, pengembangan Bandara Ngurah Rai dan membangun konektivitas dari beberapa bandara

84. Berdasarkan World Economic Outlook (WEO) IMF pada periode April 2019 pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 diperkirakan tumbuh 3,33% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 3,60% (yoy), update proyeksi ekonomi dunia tersebut lebih rendah dibanding periode Januari 2019 yang sebesar 3,50% (yoy). Ekonomi AS, Australia, Singapura dan Tiongkok pada tahun 2019 diperkirakan tumbuh melambat, masing-masing sebesar 2,33% (yoy); 2,07% (yoy); 2,31% (yoy) dan 6,27% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi 2018 yang masing-masing sebesar 2,86% (yoy); 2,81% (yoy); 3,23% (yoy) dan 6,57% (yoy).

di wilayah lain di luar Bali, merupakan beberapa solusi jangka pendek untuk mengatasi kondisi ini. Sementara dalam jangka panjang, pengembangan bandara Provinsi Bali Utara merupakan salah satu solusinya. Sejalan dengan prakiraan ekspor jasa yang melambat tersebut, kinerja ekspor barang luar negeri diperkirakan tumbuh dengan kecenderungan yang melambat, sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra dagang utama Provinsi Bali pada tahun 2019, terutama Amerika Serikat, Australia, Singapura dan Tiongkok⁸⁵ sebagai negara mitra dagang utama bagi ekspor barang Provinsi Bali. Perkembangan ekspor yang tertahan akan berdampak pada melambatnya kinerja impor pada tahun 2019.

Kinerja sektor konsumsi (rumah tangga dan LNPRT) diperkirakan akan mengalami akselerasi pada tahun 2019 dibanding tahun 2018. Meningkatnya kinerja konsumsi rumah tangga, sejalan dengan perluasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk pelaksanaan kegiatan bantuan sosial nontunai (Program Keluarga Harapan/PKH dan Bantuan Pangan Nontunai/BPNT) dengan nilai nominal yang juga meningkat. Peningkatan gaji ASN pada 2019 sebesar 5% (yoy) dan peningkatan nilai gaji ke 14 dan 13 ASN memberikan kontribusi terhadap menguatnya kinerja konsumsi rumah tangga. Peningkatan kinerja konsumsi RT dan terjaganya daya beli masyarakat, juga didorong oleh prakiraan terjaganya pertumbuhan ekspor dan investasi serta melandainya inflasi tahun 2019. Prakiraan meningkatnya konsumsi RT juga terkonfirmasi oleh hasil Survei Konsumen (SK) yang menunjukkan peningkatan nilai indeks, pada komponen pembentuk Indeks Ekspektasi Konsumen, yaitu indeks ekspektasi penghasilan maupun indeks ketersediaan lapangan kerja (grafik 7.1). Kondisi ini menunjukkan masyarakat masih memiliki keyakinan yang baik terhadap prospek ekonomi ke depan. Sejalan dengan kondisi tersebut, pelaksanaan kegiatan pemilihan umum, baik untuk

presiden/wakil presiden maupun legislatif yang diikuti oleh peningkatan aktivitas partai politik mendorong peningkatan konsumsi LNPRT.



Pertumbuhan konsumsi pemerintah pada tahun 2019 diperkirakan akan mengalami akselerasi. Peningkatan ini terutama didorong oleh percepatan tahapan realisasi belanja, khususnya pada anggaran belanja yang menggunakan APBN maupun APBD kabupaten/kota. Kegiatan perencanaan yang semakin baik pada tahun 2019 khususnya untuk proyek yang terkait dengan belanja modal, berkontribusi terhadap percepatan proses pengadaan yang telah mulai dilakukan sebelum tahun 2019 (APBN). Capaian percepatan realisasi belanja tersebut terkonfirmasi oleh meningkatnya persentase realisasi belanja pada triwulan I 2019, dibanding periode yang sama di triwulan I 2018⁸⁶. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2019. Sejalan dengan itu, prakiraan meningkatnya pendapatan daerah juga memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kinerja konsumsi pemerintah. Upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pencairan dana perimbangan (DAK dan DAU) melalui pemenuhan dokumen dan administrasi yang dipersyaratkan, juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Sejalan dengan itu, upaya pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota

85. Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) IMF pada periode April 2019 pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 diperkirakan tumbuh 3,33% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 3,60% (yoy), update proyeksi ekonomi dunia tersebut lebih rendah dibanding periode Januari 2019 yang sebesar 3,50% (yoy). Ekonomi AS, Australia, Singapura dan Tiongkok pada tahun 2019 diperkirakan tumbuh melambat, masing-masing sebesar 2,33% (yoy); 2,07% (yoy); 2,31% (yoy) dan 6,27% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi 2018 yang masing-masing sebesar 2,86% (yoy); 2,81% (yoy); 3,23% (yoy) dan 6,57% (yoy).

86. Realisasi belanja pemerintah (APBN dan APBD) pada triwulan I 2019 tercatat sebesar 12,58%, meningkat dibanding triwulan I 2018 yang sebesar 11,45%.

untuk mendorong optimalisasi penerimaan, khususnya terkait dengan penerimaan pajak daerah, juga menjadi faktor yang mendorong peningkatan pendapatan daerah. Kondisi terkonfirmasi oleh persentase realisasi pendapatan daerah yang meningkat pada triwulan I 2019 dibanding periode yang sama tahun 2018⁸⁷, yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2019.

Darisisi Lapangan Usaha (LU), melambatnya kinerja ekspor luar negeri dan investasi berdampak pada melambatnya kinerja lapangan usaha akmamin, transportasi, perdagangan dan konstruksi. Sementara itu, kinerja lapangan usaha pertanian juga tertahan oleh resiko terjadinya kondisi cuaca ekstrem El Nino dan berlanjutnya alih fungsi lahan pertanian. Sementara itu, kinerja LU industri pengolahan akan tetap tumbuh kuat dan menunjukkan kecenderungan akselerasi, sejalan dengan pelaksanaan kegiatan pemilihan umum

Kinerja LU akmamin dan transportasi pada tahun 2019 diperkirakan akan menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang melambat dibandingkan 2018. Melambatnya kinerja lapangan usaha ini, disebabkan oleh tingginya harga tiket pesawat udara dan pengenaan tarif bagasi berbayar, sehingga berdampak pada tertahannya jumlah kedatangan wisatawan domestik. Sejalan dengan itu, prakiraan melambatnya kinerja ekspor jasa di tahun 2019, juga menjadi faktor penyebab melambatnya kinerja kedua lapangan usaha tersebut. Kondisi ini juga memberikan dampak pada perlambatan kinerja LU perdagangan.

Kinerja sektor konstruksi di tahun 2019 diperkirakan akan tumbuh melambat, sejalan dengan prakiraan melambatnya kinerja investasi di periode yang sama. Konstruksi yang melambat disebabkan oleh pengerjaan proyek konstruksi pada tahun 2019, tidak semasif proyek konstruksi

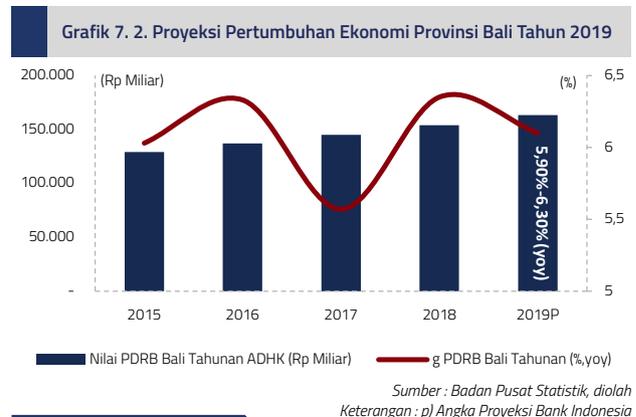
pada tahun 2018 yang terkait dengan IMF-WB AM. Sementara itu, pengerjaan beberapa proyek konstruksi yang dimulai pada tahun 2019, baru akan secara signifikan direalisasi fisik dan keuangannya pada tahun 2020, seperti bendungan dan *shortcut* jalan. Sikap pelaku usaha yang *wait and see* menanti kebijakan presiden terpilih, diperkirakan juga baru akan direspon oleh pelaku usaha di tahun 2020. Kondisi ini menjadi faktor penyebab melambatnya pertumbuhan LU konstruksi.

Meskipun diperkirakan tumbuh melambat, namun masih terdapat beberapa faktor yang berpotensi mendorong kinerja ekonomi Provinsi Bali di tahun 2019, yang meliputi:

- Dimulainya beberapa pengerjaan penyelesaian beberapa proyek infrastruktur dan konstruksi, meliputi pembangunan jalan *shortcut* Mengwitani-Singaraja titik 3-4 dan berlanjutnya pengerjaan titik 5-6; pengembangan dermaga pelabuhan Celukan Bawang dan berlanjutnya pengerjaan pelabuhan Benoa; pembangunan bendungan Tamblang dan bendungan Sidane; serta berlanjutnya pengerjaan pengembangan dan penataan kawasan Nusa Dua serta Bandara Ngurah Rai, diperkirakan berpotensi mendorong laju kinerja investasi dan kinerja lapangan usaha konstruksi.
- Dampak lanjutan pelaksanaan kegiatan IMF-WB AM 2018 membuat Provinsi Bali semakin dikenal sebagai pelaksana kegiatan MICE dengan skala *international* dan salah satu destinasi wisata dunia oleh peserta dari 189 negara, yang berpotensi mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan MICE di Bali.
- Pelaksanaan kegiatan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden pada 2019, berpotensi mendorong akselerasi kinerja konsumsi pemerintah dan LNPRT dari sisi permintaan; sementara dari sisi penawaran akan meningkatkan kinerja industri pengolahan.

87. Realisasi pendapatan pemerintah (APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota) pada triwulan I 2019 tercatat sebesar 19,49%, meningkat dibanding triwulan I 2018 yang sebesar 18,71%

- Potensi terus meningkatnya kunjungan wisman, sejalan dengan peningkatan upaya promosi, pengembangan produk dan destinasi wisata termasuk Provinsi Bali *and Beyond*, dan pengembangan pasar alternatif wisman (India dan Timur Tengah), yang diikuti dengan peningkatan pelayanan dan pengembangan Provinsi Bali *and Beyond* serta produk dan destinasi wisata, berpotensi mendorong pertumbuhan sektor akomodasi makan dan minum; transportasi dan pergudangan serta perdagangan besar dan eceran.
- Upaya peningkatan produksi pertanian melalui intensifikasi pertanian, khususnya untuk komoditas tanaman bahan makanan, melalui Gerakan Pengelolaan Pertanian Tanaman Terpadu (GPPTT) berupa penyediaan benih bersertifikasi, bantuan pupuk dan sarana produksi serta pendampingan dan bantuan teknis yang diikuti oleh perbaikan jaringan irigasi (primer, sekunder dan tersier), berpotensi mendorong kinerja pertanian pada tahun 2019. Peningkatan LU pertanian juga diperkirakan akan semakin signifikan, sejalan dengan mulai beroperasinya Waduk Titab sejak awal 2019 yang mengairi lahan pertanian seluas 1.795 hektar dan mendorong peningkatan indeks penanaman padi menjadi 275% dari sebelumnya 169% untuk luasan lahan tersebut. Akselerasi kinerja pertanian juga didorong dengan upaya perbaikan saluran irigasi (primer, sekunder maupun tersier) yang telah dilakukan maupun akan dilakukan pada 2019, diperkirakan mendorong akselerasi kinerja pertanian, khususnya untuk komoditas pangan.
- Realisasi dan rencana penambahan rute penerbangan sepanjang tahun 2019 dari dan ke Bali, baik untuk rute domestik maupun rute *international*, berpotensi mendorong kinerja LU transportasi dan pergudangan, LU akmamin serta komponen ekspor luar negeri, khususnya jasa.



7.2. PROSPEK INFLASI PROVINSI BALI

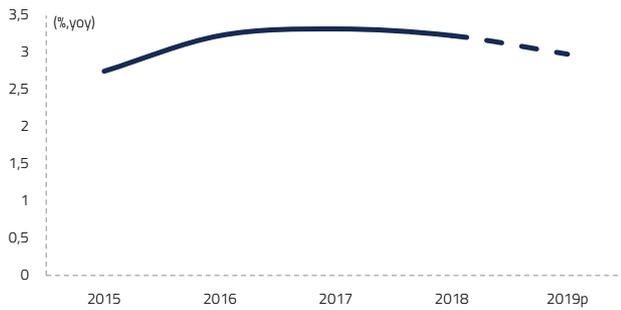
Secara keseluruhan, inflasi Provinsi Bali tahun 2019 diperkirakan akan melandai dan berada dalam kisaran 2,70%-3,10% (yoy), lebih rendah dibanding realisasi inflasi tahun 2018 yang tercatat sebesar 3,13% (yoy) dan proyeksi pada periode sebelumnya⁸⁸. Prakiraan inflasi tersebut juga berada dalam rentang sasaran inflasi Nasional sebesar 3,5%±1% (yoy), sebagaimana tercantum dalam PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi.

Berdasarkan disagregasinya, melandainya tekanan inflasi pada tahun 2019 terutama bersumber dari hampir semua kelompok pengeluaran, terutama kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Tendensi penurunan tekanan inflasi kelompok bahan makanan, didorong oleh:

- Kecukupan pasokan beras, seiring peningkatan produksi pangan dan ketersediaan stok beras BULOG dalam jumlah yang cukup dan memadai.
- Mulai beroperasinya waduk Titab sejak awal tahun 2019, berpotensi mendorong peningkatan indeks penanaman menjadi 275% dari 169% untuk luasan lahan sebesar 1.795 Ha
- Upaya rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier, mendukung peningkatan produksi pangan.

⁸⁸. Range proyeksi inflasi Provinsi Bali di 2019 pada buku KEKR Periode Februari 2019 adalah 3,40%-3,80% (yoy)

Grafik 7.3. Proyeksi Inflasi Provinsi Bali 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah
Keterangan : p) Angka Proyeksi Bank Indonesia

Sementara itu dari kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, melandainya tekanan inflasi pada kelompok ini sejalan dengan telah dilakukannya penurunan tarif batas atas angkutan udara sebesar 15% yang berlaku sejak Mei 2019. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa potensi resiko yang dapat mendorong peningkata inflasi di Provinsi Bali, meliputi:

- Potensi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan
Potensi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (termasuk wisatawan mancanegara), sejalan dengan bertambahnya jumlah *direct flight* dari dan ke Provinsi Bali (mendorong peningkatan wisman), sehingga berpotensi mendorong peningkatan permintaan khususnya untuk beberapa komoditas strategis, yang sebagian besar didatangkan dari luar Provinsi Bali (Jawa Timur), akan berpotensi mendorong peningkatan harga beberapa komoditas bahan pokok.
- Peningkatan biaya-biaya usaha tani sesuai dengan pola historisnya (biaya sarana dan prasarana produksi termasuk biaya buruh tani), berpotensi mendorong peningkatan harga jual gabah, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan harga jual beras.
- Resiko terjadinya cuaca ekstrem (El Nino), beresiko akan menahan produksi tabama.
- Potensi berlanjutnya peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Agung, berisiko menurunkan tingkat produksi pertanian, khususnya didaerah sekitar wilayah Gunung Agung (tabama dan hortikultura).

Dalam rangka mengantisipasi resiko tersebut Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali, telah melakukan beberapa kegiatan dan program sebagaimana tertuang dalam *roadmap* pengendalian inflasi, serta didukung oleh komitmen dan koordinasi TPID dalam menjaga ketersediaan pangan, meliputi: 1) potensi peningkatan produksi tabama dengan upaya intensifikasi produk pangan dan program GPPTT serta Siwab, 2) upaya TPID dalam menjaga ketersediaan komoditi pangan di seluruh Provinsi Bali, melalui operasi pasar (beras) dan pasar murah, dan 3) penyediaan data harga di tingkat produsen sebagai *early warning system*. Diharapkan melalui kegiatan dan progam tersebut, volatilitas harga kelompok bahan makanan dapat ditahan. Selain upaya tersebut, dalam menghadapi peningkatan permintaan termasuk menjelang perayaan HBKN 2019, TPID Provinsi Bali juga melakukan beberapa upaya strategis meliputi:

- Rapat koordinasi kesiapan sarana, prasarana dan operator angkutan
- Memprioritaskan penyeberangan angkutan komoditas strategis
- Berkomunikasi dg supermarket / distributor / retail untuk memberikan program diskon
- Melaksanakan sidak pasar, gudang distributor, pelabuhan
- Mengirimkan surat kepada maskapai untuk meninjau kebijakan tarif angkutan udara
- Pembentukan posko terpadu pada terminal, pelabuhan, serta bandara (kantor dishub provinsi sbg posko induk).
- Pelaksanaan kegiatan talkshow di televisi dan radio berkenaan kesiapan TPID
- Kegiatan ceramah keagamaan belanja bijak dan tidak berlebihan oleh MUI/PHDI

Selain itu, himbauan TPID terhadap ritel modern untuk tetap menjaga pasokan barang dan tingkat harga yang wajar, termasuk saat menjelang HBKN diharapkan dapat menjadi salah satu strategi yang tepat dan efektif dalam mengendalikan laju inflasi Bali. Sementara itu, penanganan tekanan inflasi dari

kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan dilakukan melalui pemberian himbauan secara resmi oleh TPID Provinsi Bali kepada maskapai penerbangan agar menetapkan tarif penerbangan secara wajar, khususnya saat pelaksanaan HBKN dan periode *peak season* pariwisata. Di sisi lain, tekanan inflasi inti tetap terkendali didukung oleh terjaganya ekspektasi masyarakat dan masih kuatnya sisi penawaran dalam merespon permintaan.

halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISTILAH

<i>Administered Price (AP)</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
<i>Cash Inflows</i>	Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.
<i>Cash Outflows</i>	Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.
Ekspor	Keseluruhan barang dan atau jasa yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.
Faktor Fundamental	Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-penawaran atau <i>output gap</i> , eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat.
Faktor Non Fundamental	Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (<i>volatile foods</i>), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (<i>administered price</i>).
<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank konvensional.
Impor	Seluruh barang dan atau jasa yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Imported inflation

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh perkembangan harga di luar negeri (eksternal).

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Indeks Kondisi Ekonomi (IKE)

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.

Indeks Pembangunan Manusia

Ukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.

Inflasi

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (*persistent*).

Inflasi IHK

Kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Inflasi inti

Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental (merupakan Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen *administered prices* dan *volatile food*).

Investasi

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.

Kliring

Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Kualitas kredit

Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur, dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Liaison

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Ratio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ke tiga yang dihimpun pada suatu waktu tertentu.

mtm (<i>month to month</i>)	Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
Net Cashflows	Selisih bersih antara jumlah <i>cash inflows</i> dan <i>cash outflows</i> pada periode yang sama yang terdiri dari: <i>net cash outflows</i> bila <i>cash outflows</i> lebih tinggi dibandingkan dengan <i>cash inflows</i> , dan <i>net inflows</i> bila terjadi sebaliknya.
Non-Performing Loan (NPL)	Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu. <ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB atas dasar harga berlaku Penjumlahan nilai tambah bruto yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian 2. PDRB atas dasar harga konstan Perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perusahaan	Suatu unit usaha yang diselenggarakan/dikelola secara komersil yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada suatu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja, dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi.
qtq (<i>quarter to quarter</i>)	Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Saldo Bersih	Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “meningkat” dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “menurun” dan mengabaikan jawaban “sama”.
Saldo Bersih Tertimbang (SBT)	Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian saldo bersih sektor/subsektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/subsektor yang bersangkutan sebagai penimbangannya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Sistem Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (BI RTGS)	Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (<i>real time</i>) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerima pembayaran.

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)	Survei triwulanan yang bertujuan untuk mendapatkan indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran secara triwulanan.
Survei Konsumen (SK)	Survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada 6 bulan mendatang.
<i>Volatile food</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
<i>yoy (year on year)</i>	Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.
<i>Derajat Desentralisasi Fiskal</i>	Kemampuan daerah untuk memenuhi pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kontraksi	Pertumbuhan yang negatif.
Akselerasi	Pertumbuhan yang lebih tinggi pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
Melambat	Pertumbuhan yang lebih rendah pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
Kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Causa Iman Karana

Koordinator Penyusun

Sapto Widyatmiko

Editor

Leo Ediwijaya

Tim Penulis

Umran Usman

Wilda Tri Farizqi

Riyan Hidayat

Kontributor

Grup *Advisory* dan Pengembangan Ekonomi

Kelompok Koordinator Asesmen Ekonomi Keuangan Regional dan *Advisory* Daerah

Produksi dan Distribusi

Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Grup *Advisory* dan Pengembangan Ekonomi

Jl. Letda Tantular No. 4

Denpasar – Bali, 80234

Tel. (0361) 248982

Fax. (0361) 222988



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Jl. Letda Tantular No. 4, Denpasar - 80235

Telp : 62-361-248982, Fax : 62-361-248993 - 222988

Website : <http://www.bi.go.id>